



Pemerintah Kota Depok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROFIL PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA DEPOK

2022



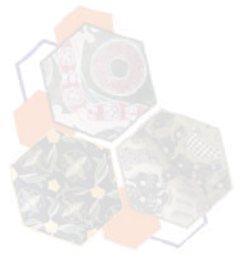
[disdukcapildepok](#)



0811 - 90 - 3276



disdukcapil.depok.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2022. Begitu pula ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan pihak lainnya yang terlibat secara baik dalam membantu memberikan data dan informasi untuk pengayaan profil perkembangan kependudukan tahun 2022 ini. Semoga buku ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi kependudukan serta mendayagunakan hasilnya untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan kementerian dalam negeri yang sumbernya dari data kependudukan kabupaten / kota se-Indonesia adalah satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan Dana Alokasi Umum), pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Untuk memudahkan pemanfaatan data tersebut diamanatkan pula setiap tahun menyusun profil perkembangan kependudukan yang menggambarkan kondisi kuantitas dan kualitas kependudukan Daerah.



Data yang digunakan dalam penulisan profil kependudukan ini bersumber dari data registrasi dari olahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) konsolidasi nasional semester II Tahun 2022 dan data lintas sektoral (dinas-dinas) terkait lainnya. Tentu saja pembenahan system pendataan kependudukan kedepan menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kota Depok dalam rangka menjadikan data tersebut valid dan mutakhir dan menjadi sumber penting dalam kerangka pembangunan berbasis kependudukan. Selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penduduk dalam hal pelaporan dari setiap peristiwa penting kependudukan.

Kami menyadari, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, semangat perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan, oleh karena itu dengan rendah hati kami mengharapkan sumbang saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan penyusunan profil untuk tahun-tahun selanjutnya.

Depok, Desember 2023

WALIKOTA DEPOK

KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	8
1.3.1. Maksud Kegiatan.....	8
1.3.2. Tujuan Kegiatan.....	8
1.3.3. Sasaran Kegiatan.....	8
1.4. Ruang Lingkup	10
1.5. Pengertian Umum dan Istilah	12
BAB 2 Gambaran Umum Kota Depok	
2.1. Profil Umum	20
2.1.1. Sejarah Kota Depok.....	21
2.1.2. Terbentuknya Kota Depok.....	24
2.2. Letak Geografis	27
2.2.1. Topografi.....	28
2.2.2. Hidrologi.....	30
2.2.2.1. Daerah Aliran Sungai.....	30
2.2.2.2. Sebaran Sumber Air.....	31
2.2.3. Curah Hujan.....	32
2.3. Kondisi Demografi	33
2.4. Perekonomian	38
2.5. Potensi Wilayah	50
2.5.1. Potensi Geografis.....	49
2.5.2. Potensi Penduduk.....	50
2.5.3. Potensi Wisata Budaya dan Religius.....	51
2.5.3.1. Masjid Kubah Emas.....	51
2.5.3.2. Makam Keramat Beji.....	51
2.5.3.3. Godong Ijo.....	52
2.5.3.4. Kawasan Bangunan Kolonial.....	53
2.5.4. Potensi Industri Kreatif.....	54
2.5.4.1. Kerajinan Genta.....	54
2.5.4.2. Kerajinan Gentong.....	54



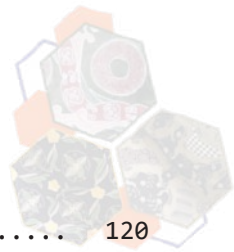
2.5.4.3. Makanan Olahan Belimbing	55
2.5.4.4. Handycraft Batik	55
2.5.4.5. Sulam Perca	55
2.5.4.6. Potensi Usaha Ikan Hias	56
2.5.5. Potensi Ekonomi	57

BAB 3 SUMBER DATA

3.1. Registrasi	60
3.2. Non Registrasi	61
3.3. Data Lintas Sektor	62

BAB 4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1. Kuantitas Penduduk	64
4.1.1. Komposisi dan Persebaran Penduduk	65
4.1.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk 2018-2022	65
4.1.1.2. Kepadatan Penduduk	67
4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk	69
4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	71
4.1.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	71
4.1.2.1.1. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Wilayah Kecamatan	74
4.1.2.1.2. Umur Median (<i>Median Age</i>)	97
4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	97
4.1.2.1.4. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	101
4.1.2.2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut status kawin	103
4.1.2.2.1. Penduduk menurut status kawin	104
4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Kasar	107
4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Umum	107
4.1.2.2.4. Rata-rata Kawin Umur Pertama	108
4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar	108
4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum	109
4.1.2.3. Keluarga	111
4.1.2.3.1. Jumlah dan Sebaran Keluarga	112
4.1.2.3.2. Jumlah anggota keluarga	113
4.1.2.3.3. Hubungan penduduk dengan kepala keluarga	115
4.1.2.4. Penduduk menurut karakteristik sosial	116
4.1.2.4.1. Penduduk menurut pendidikan	116
4.1.2.4.2. Penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan	117
4.1.2.4.3. Penduduk menurut agama	119



4.1.2.4.4.	Penduduk menurut disabilitas.....	120
4.1.2.5.	Kelahiran.....	122
4.1.2.5.1.	Jumlah kelahiran hidup.....	122
4.1.2.5.2.	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>).....	123
4.1.2.6.	Kematian.....	124
4.1.2.6.1.	Jumlah Kematian.....	124
4.1.2.6.2.	Angka kematian kasar (<i>Crude Death Rate</i>).....	124
4.2.	Kualitas Penduduk	125
4.2.1.	Kesehatan.....	131
4.2.1.1.	Kelahiran.....	131
4.2.1.2.	Kematian.....	132
4.2.2.	Pendidikan.....	141
4.2.2.1.	Angka Melek Huruf.....	141
4.2.2.2.	Angka Partisipasi Kasar	142
4.2.2.3.	Angka Partisipasi Murni	144
4.2.3.	Ekonomi.....	147
4.2.3.1.	Proporsi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja.....	147
4.2.3.2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	148
4.2.4.	Sosial.....	151
4.2.4.1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	152
4.2.4.2.	Jumlah Penduduk Miskin.....	153
4.3.	Mobilitas Penduduk	155
4.3.1.	Mobilitas Permanen (Migrasi).....	156
4.3.1.1.	Migrasi Masuk	156
4.3.1.2.	Migrasi Keluar	157
4.3.1.3.	Migrasi Netto	158

BAB 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

5.1.	Kepemilikan Kartu Keluarga	160
5.1.1.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Pancoran Mas ..	165
5.1.2.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cimanggis	166
5.1.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Sawangan	167
5.1.4.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Limo	168
5.1.5.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Sukmajaya	170
5.1.6.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Beji	171
5.1.7.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cipayung	172
5.1.8.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cilodong	173
5.1.9.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cinere	175
5.1.10.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Tapos	176
5.1.11.	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Bojongsari	177



5.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	178
5.3.	Kepemilikan Akta	187
5.3.1.	Akta Kelahiran.....	187
5.4.	Kartu Identitas Anak	196

BAB 6 PENUTUP

6.1.	Kesimpulan	206
6.2.	Rekomendasi	207





DAFTAR TABEL

Tabel Bab 2	Halaman
2.1. Jumlah Kelurahan, RW, RT dan Luas Wilayah, Kota Depok, Tahun 2022	33
2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	34
2.3. Tren Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan, Tahun 2018-2022	36
2.4. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022	36
2.5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok 2018-2022 (miliar rupiah)	38
2.6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok 2018-2022 (miliar rupiah)	39
2.7. Distribusi PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022	41
2.8. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 - 2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	42
2.9. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Depok 2015-2022	49

Tabel Bab 4	Halaman
4.1. Jumlah, Luas, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	67
4.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok 2018-2022	71
4.3. Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2022	72
4.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan, Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	98
4.5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan, Kota Depok, Tahun 2022 ...	99
4.6. Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022 ...	102
4.7. Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur, Kota Depok, Tahun 2022	103
4.8. Distribusi Penduduk Menurut Status Perkawinan, Kota Depok Tahun 2022	104
4.9. Jumlah Perkawinan Kota Depok Tahun 2022	106
4.10. Angka Perceraian Kasar Kota Depok Tahun 2022	109
4.11. Angka Perceraian Umum Kota Depok Tahun 2022	110
4.12. Data Perkara Perceraian Tahun 2022 Berdasarkan Kecamatan	110
4.13. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Hubungan Dengan Kepala Keluarga, Kota Depok 2022	115



4.14.	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Depok 2022	118
4.15.	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin, Kota Depok 2022	120
4.16.	Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2022 Menurut Kecacatan	121
4.17.	Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok 2022	122
4.18.	Rasio Anak Perempuan, Kota Depok, Tahun 2022	132
4.19.	Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022	135
4.20.	Angka Kematian Anak, Kota Depok 2022	136
4.21.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Depok, 2022	141
4.22.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Menurut Kecamatan Kota Depok, Tahun 2022	144
4.23.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Menurut Kecamatan Kota Depok, Tahun 2022	145
4.24.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin 2018-2022	148
4.25.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin 2018-2022	149
4.26.	Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2015-2022, Kota Depok	151
4.27.	jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Jenisnya Tahun 2022	152
4.28.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2022	153
4.29.	Angka Migrasi Masuk Kota Depok Tahun 2022	157
4.30.	Angka Migrasi Keluar Kota Depok Tahun 2022	158
4.31.	Angka Migrasi Neto (nett-migration) Kota Depok Tahun 2022	159

Tabel Bab 5

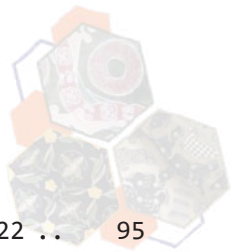
Halaman

5.1.	Daftar Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Depok, 2022	161
5.2.	Jumlah Perekaman Wajib KTP Menurut Kelurahan Tahun 2022	180
5.3.	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2022 berdasarkan Kelurahan	189
5.4.	Jumlah Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun 2022 berdasarkan Kelurahan	197



DAFTAR GAMBAR

Gambar Bab 2	Halaman
2.1. Peta Depok 1851-1852 Diterbitkan 1854	22
2.2. Pembagian Administrasi Kota Depok	28
2.3. Jumlah Penduduk (Dalam Persen) Kota Depok, Tahun 2022	34
2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	35
2.5. Grafik Batang Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022	37
2.6. Perbandingan Inflasi 7 Kota di Jawa Barat, Tahun 2022	45
2.7. Pergerakan Inflasi Bulanan Kota Depok, Tahun 2020-2022	45
2.8. Inflasi per Bulan Kota Depok 2022	47
2.9. Masjid Kubah Emas, Cinere, Kota Depok	51
2.10. Makam Keramat Beji	52
2.11. Tempat Wisata Godong Ijo	53
2.12. Jembatan Panus yang melintas diatas sungai Ciliwung	54
2.13. Contoh Hasil Kerajinan Sulam Perca	56
Gambar Bab 4	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2022	65
4.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Depok, Tahun 2018-2022	66
4.3. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022 ...	66
4.4. Persentase Luas Kota Depok Menurut Kecamatan, Tahun 2022	68
4.5. Ranking Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	69
4.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2022	70
4.7. Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Umur Tahun 2022	73
4.8. Piramida Penduduk Kota Depok, Tahun 2022	74
4.9. Piramida Penduduk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Tahun 2022	75
4.10. Piramida Penduduk Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Tahun 2022 ...	77
4.11. Piramida Penduduk Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Tahun 2022	79
4.12. Piramida Penduduk Kecamatan Limo, Kota Depok, Tahun 2022	80
4.13. Piramida Penduduk Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Tahun 2022 ...	82
4.14. Piramida Penduduk Kecamatan Beji, Kota Depok, Tahun 2022	85
4.15. Piramida Penduduk Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2022	87
4.16. Piramida Penduduk Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Tahun 2022	89
4.17. Piramida Penduduk Kecamatan Cinere, Kota Depok, Tahun 2022	91
4.18. Piramida Penduduk Kecamatan Tapos, Kota Depok, Tahun 2022	93



4.19.	Piramida Penduduk Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Tahun 2022 ..	95
4.20.	Penduduk Menurut Status Kawin, Kota Depok Tahun 2022	106
4.21.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Depok Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	113
4.22.	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin, Kota Depok 2022	113
4.23.	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022	114
4.24.	Persentase Penduduk Menurut Hubungan Dengan Kepala Keluarga, Kota Depok 2022	115
4.25.	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan, Kota Depok Tahun 2022	117
4.26.	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan jenis Kelamin, Kota Depok 2022	118
4.27.	Persentase Penduduk menurut Agama, Kota Depok, Tahun 2022	119
4.28.	Persentase Penduduk Menurut Kecacatan Kota Depok Tahun 2022	121
4.29.	Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kota Depok Tahun 2022	123
4.30.	Tren IPM 2015-2022, KOTA DEPOK 2022	127
4.31.	Tren Angka Harapan Hidup 2015-2022	128
4.32.	Tren Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah, Kota Depok, Tahun 2015-2022	129
4.33.	Tren Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, Kota Depok, Tahun 2015-2022	130
4.34.	Angka kematian Bayi Menurut Kecamatan, Depok 2022	133
4.35.	Angka Kematian Balita (AKABA) Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022	137
4.36.	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022	139
4.37.	Kematian Ibu Berdasarkan Penyebabnya Kota Depok Tahun 2022	140
4.38.	Persentase Angka Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Kota Depok, 2022	142
4.39.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Depok menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Depok, Tahun 2022	143
4.40.	Grafik Perbandingan APM SD dan APM SMP Kota Depok	145
4.41.	Grafik Perbandingan APM SD dan APK SMP Kota Depok	146
4.42.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok Tahun 2018-2022	149
4.43.	TPT Kota Depok Tahun 2018-2022	150
4.44.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2022	154

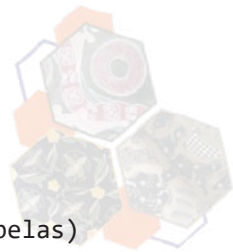
Gambar Bab 5

Halaman

5.1.	Jumlah Kartu Keluarga Menurut Pemutakhiran/Pencetakan, Kota Depok 2022	164
5.2.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022	165



5.3.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas, Tahun 2022	165
5.4.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas, Tahun 2022	166
5.5.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Tahun 2022	166
5.6.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Tahun 2022	167
5.7.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sawangan, Tahun 2022	168
5.8.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sawangan, Tahun 2022	168
5.9.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Limo, Tahun 2022	169
5.10.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Limo, Tahun 2022	169
5.11.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, Tahun 2022	170
5.12.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, Tahun 2022	171
5.13.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Beji, Tahun 2022	171
5.14.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Beji, Tahun 2022	172
5.15.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cipayung, Tahun 2022	173
5.16.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cipayung, Tahun 2022	173
5.17.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cilodong, Tahun 2022	174
5.18.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cilodong, Tahun 2022	174
5.19.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cinere, Tahun 2022	175
5.20.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cinere, Tahun 2022	176
5.21.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022	176
5.22.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022	177
5.23.	Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022	177
5.24.	Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Bojongsari, Tahun 2022	178
5.25.	Distribusi Penduduk menurut Status KTP Tahun 2022	179
5.26.	Distribusi Penduduk menurut Status KTP Menurut Kecamatan Tahun 2022	179

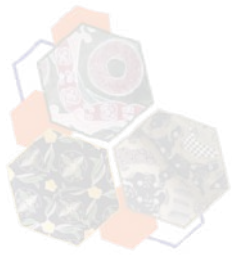


5.27. Distribusi Perekaman e-KTP Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022	186
5.28. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2022	189
5.29. Sebaran Akta Kelahiran Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022	196
5.30. Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2022	197
5.31. Sebaran KIA Usia 0-17 Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022	203





DISDUKCAPIL
Kota Depok



BAB 1

PENDAHULUAN





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Depok merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jakarta, Kota Depok memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan demografi di daerah tersebut. Dalam rangka mengelola dan mengambil kebijakan yang tepat, penyusunan profil perkembangan kependudukan di Kota Depok menjadi sangat penting

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tinggi di Kota Depok telah menyebabkan sejumlah tantangan dan peluang. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, perubahan demografi juga mempengaruhi struktur sosial, pola migrasi, dan kebutuhan masyarakat.

Data dan informasi kependudukan merupakan keharusan untuk dimiliki setiap daerah dalam setiap perencanaan pembangunan. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terutama Bab 8 tentang Data dan Informasi Kependudukan. Pada Pasal 49 dan 50 tersebut menerangkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal data dan informasi kependudukan. Semua Kabupaten/Kota termasuk Kota Depok wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan yang akurat, mutakhir dan berkesinambungan.

Dengan memiliki profil perkembangan kependudukan yang komprehensif, pemerintah Kota Depok dapat merencanakan kebijakan yang



tepat dalam bidang pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial lainnya. Profil ini juga dapat menjadi acuan bagi investor, peneliti, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami karakteristik dan dinamika populasi di Kota Depok.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, potensi sumberdaya daerah, maupun informasi terkait kewilayahan lainnya. Namun dalam implementasinya, ketersediaan data masih mengalami banyak kendala. Padahal ketersediaan data kependudukan merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah juga telah menyusun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Pada Tahun 2013, Undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa penyajian data berskala Kabupaten/Kota berasal dari Dinas Kependudukan yang telah dikonsolidasikan, dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Sementara pada Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan huruf f mewajibkan instansi pelaksana menjamin kerahasiaan, dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, serta melakukan verifikasi dan validasi data, dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan, akan melibatkan berbagai sumber data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga lain yang terkait. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber tersebut, diharapkan dapat terbentuk gambaran yang akurat mengenai perkembangan kependudukan di Kota Depok.

Dasar pemikiran yang menjadi landasan Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 sebagai mana yang diuraikan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Profil perkembangan kependudukan di Kota Depok diperlukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Data tentang jumlah penduduk, pola migrasi, dan komposisi demografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan transportasi, jaringan jalan, sarana air bersih, dan penyediaan energi yang memadai. Profil ini membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan infrastruktur yang memadai bagi penduduk Kota Depok.

2) Penyusunan Kebijakan Sosial

Profil perkembangan kependudukan juga penting dalam menyusun kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data mengenai komposisi demografi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan penduduk dapat digunakan untuk merencanakan program kesejahteraan sosial, perumahan terjangkau, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Profil ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial di Kota Depok.

3) Pengembangan Sektor Pendidikan

Profil perkembangan kependudukan memberikan wawasan tentang kebutuhan pendidikan di Kota Depok. Data tentang jumlah penduduk usia sekolah, tingkat partisipasi pendidikan, dan tingkat pendidikan penduduk dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan fasilitas pendidikan, program beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidikan. Profil ini membantu pemerintah



dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kota Depok.

4) Peningkatan Akses Kesehatan

Profil perkembangan kependudukan juga penting dalam menyusun kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data mengenai komposisi demografi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan penduduk dapat digunakan untuk merencanakan program kesejahteraan sosial, perumahan terjangkau, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Profil ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial di Kota Depok.

5) Pengembangan Potensi Ekonomi

Profil perkembangan kependudukan dapat memberikan informasi tentang potensi ekonomi di Kota Depok. Data mengenai tingkat partisipasi tenaga kerja, kualifikasi pendidikan, dan pola migrasi dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan sektor ekonomi yang sesuai dengan profil penduduk. Profil ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi sektor unggulan, peluang investasi, dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok.

6) Pengambilan Keputusan Investasi dan Pengembangan Perumahan

Profil perkembangan kependudukan juga penting bagi investor dan pengembang perumahan. Data tentang pertumbuhan penduduk, pola migrasi, dan kebutuhan perumahan dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi pasar, menentukan lokasi investasi, dan merencanakan pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Profil ini memberikan informasi penting bagi sektor swasta untuk mengambil keputusan investasi yang tepat di Kota Depok.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 dapat melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin muncul dalam proses tersebut:



- 1) Keterbatasan data yang akurat: Salah satu masalah yang sering terjadi dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah keterbatasan data yang akurat dan terkini. Data kependudukan yang diperlukan untuk membuat profil tersebut mungkin tidak lengkap, tidak tersedia, atau tidak terkini. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menggambarkan secara akurat situasi kependudukan di Kota Depok.
- 2) Tidak adanya koordinasi antarinstansi: Proses penyusunan profil perkembangan kependudukan membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, dan instansi lain yang terkait dengan data kependudukan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara instansi-instansi tersebut, dapat terjadi kesulitan dalam mengumpulkan data dan menyusun profil yang lengkap.
- 3) Kesulitan dalam memperoleh data kualitatif: Selain data kuantitatif, data kualitatif juga penting dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Data kualitatif dapat memberikan informasi tentang karakteristik penduduk, perilaku, dan kebutuhan mereka. Namun, memperoleh data kualitatif dapat menjadi tantangan karena melibatkan wawancara atau observasi langsung, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup.
- 4) Perubahan kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi terkait kependudukan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi data kependudukan yang tersedia dan metode yang digunakan dalam penyusunan profil. Jika tidak ada pembaruan yang tepat dalam mengikuti perubahan tersebut, profil kependudukan Kota Depok mungkin tidak mencerminkan situasi terkini.
- 5) Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pengguna: Penting untuk memahami kebutuhan pengguna profil perkembangan kependudukan Kota Depok. Jika kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik, maka profil yang disusun mungkin tidak relevan atau tidak memberikan informasi yang diharapkan oleh pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, interaksi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk memahami kebutuhan mereka.



- 6) Tantangan dalam menganalisis data yang kompleks: Data kependudukan sering kali kompleks dan memerlukan analisis yang cermat untuk menggali informasi yang bermanfaat. Tantangan dalam menganalisis data yang kompleks, terutama jika tidak ada keahlian yang memadai dalam analisis data, dapat menghambat penyusunan profil perkembangan kependudukan yang efektif.
- 7) Kendala sumber daya: Penyusunan profil perkembangan kependudukan memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai. Jika terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya tersebut, maka penyusunan profil dapat terhambat atau tidak dilakukan secara menyeluruh.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, memperbaiki pengumpulan data, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan secara berkala agar profil kependudukan Kota Depok tetap relevan dan akurat seiring dengan perubahan yang terjadi.

Sedangkan rumusan masalah kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keterbatasan data yang akurat memengaruhi penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?
- 2) Bagaimana kurangnya koordinasi antar instansi berdampak pada penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?
- 3) Bagaimana kesulitan dalam memperoleh data kualitatif mempengaruhi kesempurnaan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?
- 4) Bagaimana perubahan kebijakan dan regulasi kependudukan mempengaruhi penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?
- 5) Bagaimana kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pengguna memengaruhi relevansi dan kemanfaatan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?
- 6) Bagaimana tantangan dalam menganalisis data kependudukan yang kompleks memengaruhi penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?



- 7) Bagaimana kendala sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran mempengaruhi kelengkapan dan efektivitas penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok?

Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, dapat dilakukan analisis lebih mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1.3.1. Maksud Kegiatan

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 adalah suatu dokumen yang disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan dan karakteristik populasi atau penduduk di Kota Depok. Buku tersebut mengumpulkan dan menganalisis berbagai data dan informasi terkait populasi kota tersebut selama periode waktu tertentu.

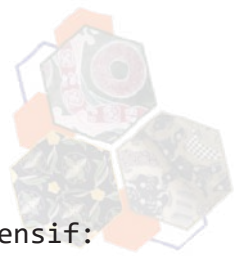
1.3.2. Tujuan Kegiatan

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek demografi, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat migrasi. Profil ini juga mencakup analisis dan interpretasi data untuk memahami tren demografi yang sedang berlangsung, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

1.3.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data kependudukan yang lengkap: Sasaran ini mencakup pengumpulan data kependudukan yang lengkap, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Data yang diperlukan meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi usia, tingkat fertilitas, tingkat migrasi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya.



- 2) Menganalisis dan menginterpretasikan data secara komprehensif: Sasaran ini melibatkan analisis dan interpretasi data kependudukan yang telah terkumpul. Analisis yang komprehensif mencakup pemahaman mendalam tentang tren perkembangan kependudukan, pola migrasi, perubahan struktur usia, dan karakteristik demografis lainnya. Interpretasi data ini penting untuk memahami implikasi kependudukan dalam konteks perencanaan pembangunan Kota Depok.
- 3) Menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami: Sasaran ini melibatkan penyajian informasi kependudukan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Profil perkembangan kependudukan harus disusun dalam format yang user-friendly, menggunakan grafik, tabel, dan narasi yang jelas untuk mengkomunikasikan temuan utama dengan efektif.
- 4) Mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti: Sasaran ini bertujuan agar profil perkembangan kependudukan Kota Depok dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Informasi yang disajikan dalam profil harus relevan, akurat, dan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kependudukan Kota Depok.
- 5) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan dinamika kependudukan: Sasaran ini mencakup memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan dinamika kependudukan Kota Depok. Profil perkembangan kependudukan harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang struktur usia penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kependudukan.
- 6) Mendorong keberlanjutan dan pembaruan profil kependudukan: Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan pembaruan profil perkembangan kependudukan. Profil tersebut harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kependudukan yang terjadi. Keberlanjutan dan pembaruan profil merupakan langkah penting dalam



memastikan informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat seiring waktu.

Dengan mencapai sasaran-sasaran tersebut, penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Depok akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika populasi, memberikan dasar pengetahuan yang kuat bagi pengambilan keputusan, dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan profil ini mencakup kondisi perkembangan kependudukan Kota Depok dari berbagai aspek terkait. Gambaran kependudukan disajikan sesuai dengan ketersediaan data, baik menurut pembagian kecamatan maupun ketersediaan tahun data. Data yang diutamakan adalah data tahun 2022.

Penyajian profil disesuaikan dengan ketersediaan data dari berbagai SKPD, BPS, dan Kementrian/lembaga terkait. Isi Profil Perkembangan Kependudukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 2010, dengan memuat sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat: Latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.

Bab II. Gambaran Umum Kota Depok

Memberikan gambaran mengenai Kota Depok dilihat dari segi letak geografis, kondisi demografis, ekonomi, dan potensi daerah.

Bab III. Sumber Data

Menyajikan tiga sumber data utama yaitu registrasi, non registrasi, dan data dari lintas sektor.

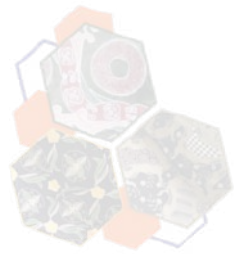
Bab IV. Perkembangan Kependudukan

Penduduk dilihat dari segi kuantitas, dan kualitas. Dari segi kuantitas, penyajian data penduduk mencakup: 1) jumlah dan persebaran penduduk (jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/ kecamatan/ kelurahan; kepadatan penduduk; dan laju pertumbuhan penduduk); 2) penduduk menurut karakteristik



demografi (jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yang terdiri dari rasio jenis kelamin, piramida penduduk, dan rasio ketergantungan); jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin (angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perkawinan menurut kelompok umur, rata-rata umur kawin pertama, angka perceraian kasar, dan angka perceraian umum); 3) Keluarga (jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan); 4) Penduduk menurut karakteristik sosial (Jumlah penduduk menurut pendidikan, jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk menurut agama, dan jumlah penduduk menurut kecacatan); 5) Kelahiran (jumlah kelahiran, dan angka kelahiran kasar); 6) Kematian (Jumlah kematian, dan jumlah kematian kasar).

Kualitas Penduduk mencakup 1) Kesehatan terdiri dari a) Kelahiran (Angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, dan rasio anak perempuan); b) Kematian (angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu). 2) Pendidikan (angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka putus sekolah); 3) Ekonomi (Proporsi dan Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, yang terdiri dari jumlah dan proporsi tenaga kerja, dan jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan; 4) Sosial (Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, dan proporsi penduduk miskin penerima BPJS); 5) Mobilitas Penduduk, terdiri dari, mobilitas permanen (migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi netto).



Bab V. Kepemilikan Dokumen kependudukan

Bab ini menyajikan mengenai 1) Kepemilikan Kartu Keluarga; 2) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Kepemilikan akta (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak);

Bab VI. Penutup

1.5. Pengertian Umum Istilah

Pengertian-pengertian dan istilah yang digunakan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kependudukan** adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- 2) **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- 4) **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 5) **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- 6) **Bonus Demografi** adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kelahiran jangka panjang. Bonus demografi juga dikenal sebagai *demographic dividend* atau *demographic gift*, atau Jendela Kesempatan (*the Window of Opportunity*).
- 7) **Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk di bawah usia kerja



dan di atas usia kerja) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia kerja).

- 8) **Piramida Penduduk** adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dari data penduduk suatu daerah.
- 9) **Kelahiran Hidup** adalah pengeluaran atau penarikan suatu hasil konsepsi dari ibunya, berapa pun usia kehamilan, yang setelah pemisahan tersebut bernafas atau menunjukkan bukti lain kehidupan, misalnya denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan nyata otot rangka, baik tali pusat telah dipotong atau pun plasenta masih melekat;
- 10) **Angka Kelahiran Kasar** adalah nilai atau petunjuk untuk menentukan jumlah bayi yang ada dan jumlah bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam satu tahunnya.
- 11) **Angka Kelahiran Menurut Umur** adalah banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu, per 1.000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama.
- 12) **Angka Kelahiran Total** adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu.
- 13) **Rasio Anak Wanita (*Child Women Ratio* atau *CWR*)** adalah perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0-4 tahun dengan jumlah wanita usia reproduksi (15-49 tahun).
- 14) **Kematian** adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup.
- 15) **Angka Kematian Kasar** adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk.
- 16) **Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
- 17) **Angka Kematian Neonatal** adalah kematian neonatus lahir hidup pada usia gestasi 20 minggu atau lebih, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
- 18) **Angka Kematian Balita** adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).



- 19) **Angka Kematian Anak** adalah jumlah kematian anak usia 1 – 5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pertengahan tahun.
- 20) **Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
- 21) **Kematian Neonatal** adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan.
- 22) **Kematian Post Neonatal** adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan per seribu kelahiran hidup).
- 23) **Kematian Anak** adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
- 24) **Mobilitas Penduduk** adalah pergerakan (*movement*) penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah yang lain pada periode waktu tertentu.
- 25) **Migrasi** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi Internasional).
- 26) **Migrasi Masuk (*inmigration*)** adalah masuknya penduduk ke suatu wilayah tempat tujuan (*area of destination*).
- 27) **Migrasi Keluar (*outmigration*)** adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*area of origin*).
- 28) **Migrasi Netto (*net migrastion*)** adalah selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar.
- 29) **Migrasi Bruto (*gross migration*)** adalah jumlah migran masuk dan migran keluar.



- 30) **Migrasi Sirkuler** atau **Migrasi Musiman** adalah seseorang berpindah tempat, tetapi tidak untuk menetap dan masih mempunyai keluarga atau kaitan dengan tempat asal.
- 31) **Migrasi Ulang Alik** adalah orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya, tetapi pulang pada sore harinya.
- 32) **Urbanisasi (*urbanization*)** adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh penambahan penduduk wilayah perkotaan, perpindahan penduduk ke perkotaan, dan/atau akibat dari perluasan daerah perkotaan.
- 33) **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah indeks yang digunakan sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.
- 34) **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
- 35) **Rata-rata Lama Sekolah** adalah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- 36) **Harapan Lama Sekolah (HLS)** adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- 37) **Pengeluaran Riil per Kapita** adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.
- 38) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan.
- 39) **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca atau menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada tahun tertentu.
- 40) **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- 41) **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang



pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

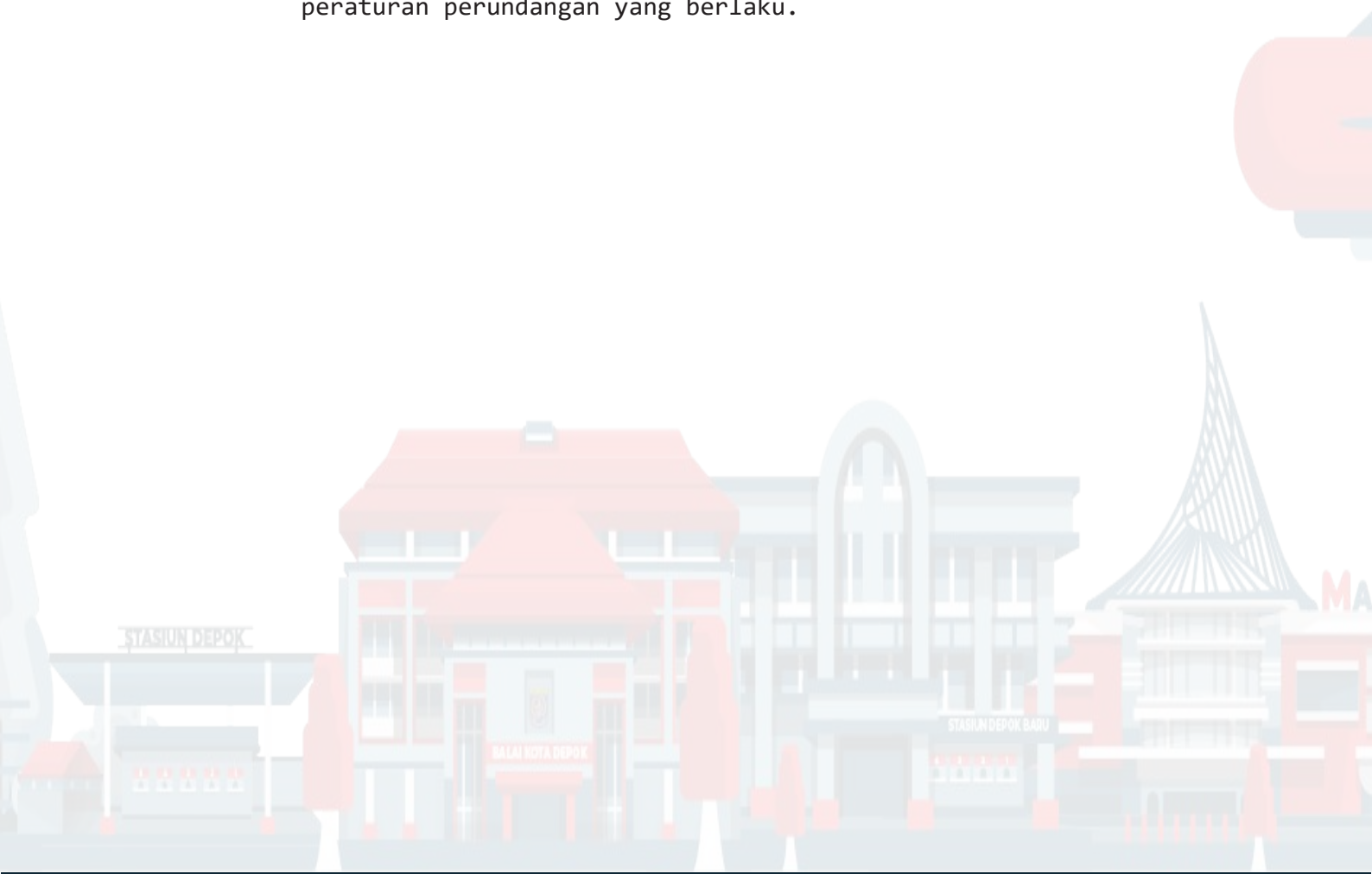
- 42) **Angka Putus Sekolah (APS)** adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
- 43) **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih.
- 44) **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 45) **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- 46) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah menunjukkan persentase jumlah Angkatan Kerja dibandingkan dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas.
- 47) **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- 48) **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. (UU 52 Tahun 2009).
- 49) **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974).
- 50) **Angka Perkawinan Kasar (AKK)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu.
- 51) **Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin (biasanya 15 tahun ke atas) per 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas.
- 52) **Angka Perceraian Kasar** menunjukkan banyaknya peristiwa perceraian per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu.

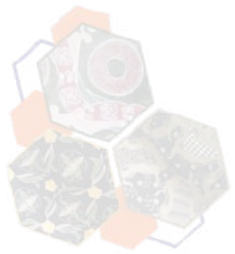


- 53) **Angka Perceraian Umum** menunjukkan banyaknya perceraian diantara penduduk umur 15 tahun ke atas yang berisiko bercerai per 1.000 penduduk umur 15 tahun ke atas.
- 54) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan** adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan semua penduduk Indonesia wajib menjadi anggotanya.
- 55) **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
- 56) **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).
- 57) **Penerima Bantuan Iuran (PBI)** adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- 58) **Registrasi Penduduk** diartikan sebagai data yang menyangkut peristiwa sehari-hari dimana bisa merubah status penduduk atau orang yang diambil datanya. Peristiwa penduduk antara lain; lahir, mati, pindah, kawin, dan lain sebagainya. Data registrasi selalu diperbarui (*up date*) setiap saat.
- 59) **Sensus Penduduk** diartikan sebagai sebuah proses dari pencatatan, proses perhitungan dan juga publikasi dari data demografis terhadap seluruh penduduk yang tinggal atau berdomisili atau menetap pada suatu wilayah/daerah atau negara tertentu secara bersamaan. Pendataan sensus umumnya dilakukan 10 tahun sekali.
- 60) **Survei Penduduk** dilakukan pada penduduk di suatu cakupan wilayah atau daerah tertentu yang bisa mewakili unsur karakteristik dari semua penduduk yang ada di daerah tersebut. Jadi data survey bersifat sampel pada suatu objek penelitian tertentu.



- 61) **Kartu Keluarga** adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya.
- 62) **Akta Kelahiran** merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya.
- 63) **Akta Perkawinan** adalah suatu legalitas untuk menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami istri. Akta perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka.
- 64) **Akta Perceraian** adalah suatu bukti otentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan.
- 65) **Akta Kematian** merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.





BAB 2

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK





BAB 2

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

2.1. Profil Umum

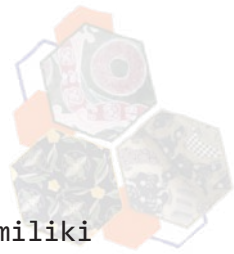
Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak di sebelah selatan Jakarta, Depok berbatasan langsung dengan Jakarta di sebelah utara, Kabupaten Bogor di sebelah selatan, dan Kabupaten Bogor serta Tangerang Selatan di sebelah barat. Kota Depok memiliki luas wilayah 199,99 kilometer persegi.

Depok memiliki perkembangan yang pesat dari sebuah kawasan perumahan menjadi kota yang berkembang dengan berbagai sektor, termasuk perumahan, industri, pendidikan, dan perdagangan. Kota Depok juga menjadi salah satu bagian dari wilayah metropolitan Jakarta dan merupakan bagian dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), yang merupakan salah satu kawasan perkotaan terpadat di Indonesia.

Penduduk Kota Depok juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan kota ini. Pada tahun 2022, penduduknya diperkirakan mencapai 1.920.182 jiwa. Mayoritas penduduk Depok adalah warga yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya, sehingga transportasi antara Depok dan Jakarta sangat penting dan sibuk.

Salah satu ciri khas Kota Depok adalah adanya sejumlah institusi pendidikan tinggi yang terkenal, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan masih banyak lagi perguruan tinggi lainnya. Ini menjadikan kota ini menjadi pusat pendidikan dan menarik bagi para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah.

Selain itu, Kota Depok juga memiliki beberapa tempat wisata dan rekreasi yang menarik. Misalnya, Taman Margonda sebagai salah satu



pusat kuliner dan tempat nongkrong yang populer. Depok juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan dan mal, seperti Margo City, Depok Town Square (DeTos), dan ITC Depok.

Namun, seperti banyak kota di Indonesia, Kota Depok juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, urbanisasi yang cepat, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Depok terus berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan transportasi umum, mengembangkan infrastruktur, dan memperbaiki pelayanan publik.

Secara keseluruhan, Kota Depok merupakan kota yang berkembang pesat dengan sektor pendidikan, industri, dan perdagangan yang signifikan. Kota Depok memiliki perpaduan antara lingkungan perkotaan berwawasan lingkungan dan kawasan perumahan yang menarik serta menawarkan berbagai fasilitas dan layanan bagi penduduknya.

2.1.1. Sejarah Kota Depok

Pemberian nama suatu wilayah, biasanya dikarenakan karakteristik yang melekat atas wilayah tersebut, hasil bumi, maupun cerita rakyat yang melegenda di masa lampau. Depok memiliki beberapa pengertian, diantaranya :

Dalam kamus Kawi-Jawa (Winter dan Rangga Warsita, 1990), Dhepok yang berarti patapan. Patapan berasal dari kata tapa yang berarti 'api, panas, sinar dan siksaan diri' (Mardiwarsito, 1981:585), atau berarti menahan diri dari segala macam hawa nafsu' (Satjadibrata, 1954:401), Adapun makna kata Patapan adalah 'Tempat untuk bertapa, tempat mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk jangka waktu tertentu sehingga memperoleh apa yang diinginkannya. Dalam Baosastra Jawa, istilah depok diartikan sebagai tempat tinggal para pandita. Menurut Kamus Malay istilah Depok merupakan duduk bersila, tanpa melakukan apa-apa. Dalam kamus jawa, depok berarti tapa yang berarti duduk bersila, ataupun menuntut ilmu, apabila ditambah dengan imbuhan per dan an, menjadi berarti tempat menuntut ilmu.

Wilayah Depok adalah sebagian wilayah tanah partikelir yang dibeli oleh Cornelis Chastelein di era VOC (1602-1811), Setelah Chastelein meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714, dan dia mewariskan



kepada 12 budak (marga) yang berasal dari wilayah Nusantara. 12 marga yang mendiami wilayah Depok beranak pinak, sehingga jumlah penduduknya menjadi banyak, dan membuat Pemerintahan Hindia Belanda mengakui tanah partikelir tersebut menjadi Gementee Bestuur. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan tersendiri (republik mini), Pembiayaan roda organisasi dibiayai oleh pajak yang ditetapkan pemerintah republik mini tersebut, didapat dari hasil pertanian dan perkebunan.

Jalan Pemuda, kec. Pancoran Mas, adalah lokasi kediaman dari Chastelein, dan menjadi pusat pemerintahan bagi wilayah Depok pada saat itu. Sehingga banyak bangunan besar yang berdiri di kawasan tersebut dan terletak pada posisi strategis yang dilalui sungai dan jalan, Stasiun Depok dibuka untuk (feeder station) Batavia - Buitenzorg pada abad 19.



Gambar 2.1 Peta Depok 1851-1852 Diterbitkan 1854

Sumber: nla.au; <http://poestahadepok.blogspot.co.id/p/atlas.html>

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

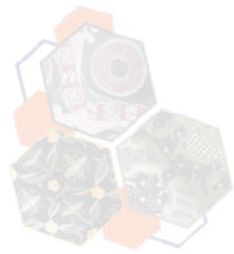


Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administrasi Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu:

- ❖ Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
- ❖ Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
- ❖ Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu: Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukmaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu:

- ❖ Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
- ❖ Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
- ❖ Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.



2.1.2. Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

- ❖ Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa, yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
- ❖ Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojongsari, Desa Bojongsari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Bedahan, Desa Pasir Putih.
- ❖ Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
- ❖ Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu: Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.



Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk Kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima) dengan warna dasar biru yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan "KOTA DEPOK" dan dibagian bawah terdapat tulisan "PARICARA DHARMA" dengan warna putih. Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan perincian sebagai berikut:

a. Bagian Depan terdiri dari :

- Gambar Kujang dengan posisi tegak; Kujang merupakan senjata/alat kerja masyarakat Jawa Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria-satria Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan pahlawan Depok, yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran dan rela berkorban;
- Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang, dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan tangkai (gagang) mempunyai lekukan 4 (empat) buah, yang dikelilingi rangkaian padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan) kuntum bunga kapas yang mempunyai arti Kota Depok dilahirkan pada tanggal "27 April 1999". Padi dan Kapas melambangkan cita-cita pemerintahan dan masyarakat Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran;
- Di bawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.

b. Bagian Tengah terdiri dari :

- Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Gambar Bangunan Gedung melambangkan Kota Depok sebagai Kota Pemukiman serta sebagai pusat perdagangan dan jasa;



- Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala bidang;
- Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai Kota Resapan Air;

c. Bagian dasar terdiri dari :

Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tentram baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan ke 5 (lima) sisi tersebut melambangkan pula fungsi/pesan yang diemban oleh Pemerintah Kota Depok yaitu sebagai:

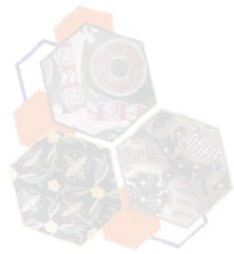
- a) Kota Pemukiman;
- b) Kota Pendidikan;
- c) Pusat Perdagangan dan Jasa;
- d) Kota Wisata;
- e) Kota Resapan Air;

Tulisan "**Kota Depok**" menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Depok;

Tulisan "**Paricara Dharma**" : berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata Paricara yang berarti Abdi, sedangkan Dharma adalah kebaikan kebenaran dan keadilan jadi Paricara Dharma mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Warna dalam lambang Kota mempunyai arti sebagai berikut :

- Kuning emas melambangkan kemuliaan;
- Merah bata melambangkan keberanian;
- Putih melambangkan kesucian;
- Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur;



- Hitam melambangkan keteguhan;
- Warna Biru melambangkan keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.

2.2. Letak Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat: 6° 19' 00''-6° 28' 00'' Lintang Selatan dan 106° 43' 00''-106° 55' 30'' Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 199,91 km² atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tajur Halang, dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

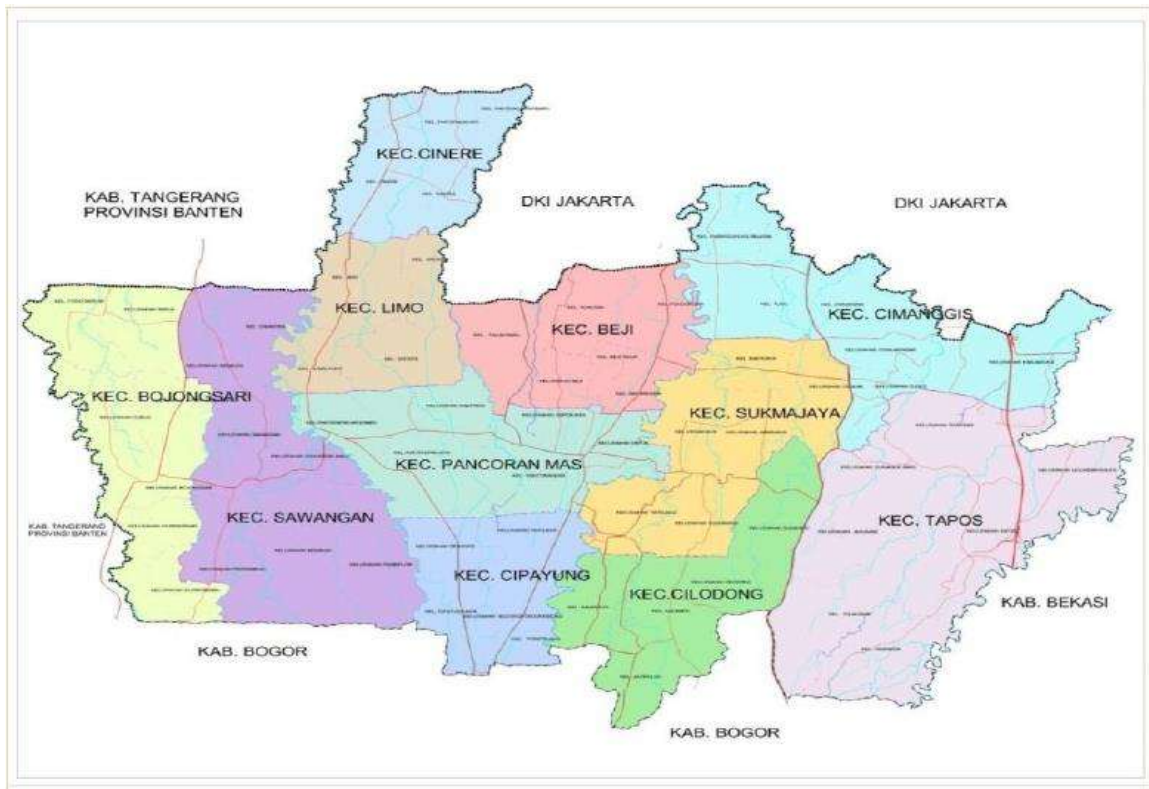
Berdasarkan lokasinya, Kota Depok ditetapkan sebagai Kota Satelit dan mempunyai fungsi sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) bersama-sama dengan Kota Bogor, Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Selain itu, Kota Depok dan DKI Jakarta, ditetapkan sebagai Kota Inti dalam Rencana Struktur Tata Ruang Nasional atau Sistem Perkotaan Nasional. Selain itu, Kota Depok termasuk ke dalam konstelasi ruang Kawasan Andalan DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten atau disebut juga Kawasan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perdagangan, jasa dan perikanan.

Lebih lanjut, penataan ruang Kota Depok sebagai bagian dari PKN Metropolitan Jabodetabek-punjur diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2008, sehingga pengembangan ruang Kota Depok harus terintegrasi, terpadu dan menjadi bagian dari pengembangan ruang PKN Metropolitan Jabodetabek-Punjur.

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan. Adapun 11 kecamatan tersebut sebagai berikut: Kecamatan



Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.2 Pembagian Administrasi Kota Depok

Sumber : RT RW Kota Depok 2010-2030

Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim. Permasalahan mendasar walaupun di satu sisi di dukung oleh iklim tropis yang baik yaitu alokasi tata guna lahan yang harus mempertimbangkan sektor lain terutama lahan hijau dan permukiman.

2.2.1. Topografi

Kondisi morfologi wilayah bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng antara 2-15%. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 50-140 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian



Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas.

Topografi Wilayah Kota Depok dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian utara (elevasi antara 50-80 mdpI (meter diatas permukaan laut)), meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya.
- Bagian tengah (elevasi 80-110 mdpl (meter diatas permukaan laut)), meliputi Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, KecamatanPancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya.
- Bagian selatan (elevasi >110 mdpl (meter diatas permukaan laut) merupakan perbukitan, bergelombang lemah, meliputi Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos.

Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8%, adapun kemiringan 8-15% hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai. Adapun penyebaran wilayah berdasarkan kemiringan yaitu:

- 1) 0-3% terletak di hampir seluruh Kota Depok
- 2) 2. 3-8% terletak di hampir seluruh Kota Depok,
- 3) 8-15% terletak di Kelurahan Leuwinangung, Tapos Cimpaeun, Sukmajaya, Pasir Gunung Selatan, Tugu, Pondok Cina, Baktijaya, Kemirimuka, Mekarjaya, Depok, Tirtajaya, Ratu Jaya, Kalimulya, Pondok Jaya, Pangkalan Jati, Cinere, Limo dan Cinangka (pada umumnya terletak di sekitar sungai).

Kemiringan lereng antara 0-8% potensial untuk pengembangan perkotaan, sedangkan kemiringan lereng yang lebih besar dari 8-15% potensial untuk dijadikan sebagai pertanian. Di samping itu, perbedaan kemiringan lereng juga bermanfaat untuk sistem drainase. Permasalahan



yang muncul akibat topografi Kota Depok adalah karena adanya perbedaan kemiringan lereng yang cukup rendah (relative datar) menyebabkan terjadinya genangan atau banjir, bila penanganannya tidak dilakukan secara terpadu.

Kecamatan Tapos merupakan kecamatan yang mempunyai luasan kemiringan lereng 0-2% paling luas, sedangkan Kecamatan Cinere mempunyai luasan yang paling sedikit. Untuk kemiringan 2-8% Kecamatan Sawangan mempunyai luasan kemiringan lereng paling luas dan Kecamatan Cinere mempunyai luasan kemiringan 2-8% paling sedikit, untuk kemiringan 8-15% Kecamatan Tapos mempunyai luasan yang paling luas, dan hanya ada 4 Kecamatan yang mempunyai luasan kemiringan lereng tersebut, yaitu Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Tapos.

2.2.2. Hidrologi

2.2.2.1. Daerah Aliran Sungai

Sumber Daya Air yang ada terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu Sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan Sungai Caringin.

Kota Depok memiliki setidaknya 3 (tiga) sungai utama yang mengalir melewati Kota Depok dari Selatan ke Utara. ketiga sungai besar yang melewati wilayah Kota Depok ini berperan sebagai sungai induk bagi sungai-sungai kecil yang tercakup dalam Daerah Aliran Sungai masing-masing. Kota Depok menurut Arahan Sistem Air Baku dan Pengendali Banjir dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke Pesanggrahan, DAS Cikeas Cileungsi dan DAS Ciliwung. Khususnya DAS Ciliwung, yang memiliki daerah cakupan aliran sungai yang paling besar bila dibandingkan dengan DAS lainnya, menurut dokumen akademis RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, memiliki rasio kebutuhan dan ketersediaan air sebesar 548,71% dengan kategori sangat kritis.



Kategori DAS sangat kritis menunjukkan rasio kebutuhan dan ketersediaan air lebih besar dari 100%, sedangkan DAS kritis apabila rasio kebutuhan dan ketersediaan air berkisar dari 76% sampai 100%. Berikut ini profil sungai-sungai utama Kota Depok yang menjadi cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Depok diantaranya:

1) Sungai Pesangrahan

Sungai ini merupakan sumberdaya air terpenting untuk Sawangan, dan kondisi air berwarna coklat bercampur lumpur dan kotoran. Sungai ini mempunyai fluktuasi yang tinggi antara musim hujan dan musim kemarau. Bahkan pada musim hujan sering menimbulkan banjir setempat. Berdasarkan data debit dari Balitbang PU, Pusat penelitian dan pengembangan Pengairan Bandung antara statistik pengukuran Sawangan debit minimum adalah $Q_{min} = 350 \text{ l/detik}$.

2) Sungai Ciliwung

Sungai Ciliwung digunakan sebagai sumber mata air baku bagi Kota Depok dan Jakarta. Pada perbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat pada musim kemarau mempunyai debit sebesar 9,06-13,40 m³/detik.

3) Sungai Cikeas

Sungai ini merupakan batas wilayah antara Kota Depok dan Kabupaten Bogor, mengalir kearah Utara. Sungai Cikeas ini mempunyai perbedaan debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau.

2.2.2.2. Sebaran Sumber Air

Sumber daya air merupakan sumber air baku yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan air bersih. Di Kota Depok dan sekitarnya tidak ditemukan mata air yang besar. Pada beberapa danau hulu cabang sungai, serta tebing-tebing sungai didapatkan mata air dengan debit kecil dan alirannya tidak kontinu. Untuk melayani air bersih Kota Depok, diambilkan dari mata air di Kabupaten Bogor yang merupakan hulu sungai besar yang mengalir ke Utara.

Pemanfaatan mata air sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Pada tahun 1922 dipasang jalur pipa sepanjang 60 km dari mata air Ciburial dengan debit 300 l/detik. Mata air ini untuk memasok Jakarta, tetapi air ini juga disadap untuk memasok Kota Depok, Cimanggis, Cibinong dan Ciomas (RT RW Kota Depok Tahun 2015). Selain mata air,



sumber mata air untuk Kota Depok berasal dari sumber air permukaan. Kota Depok banyak memiliki diantaranya sumber air permukaan sumber-sumber air yang potensial (sungai, setu) dan sumur dalam.

Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 Ha, atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ bervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan.

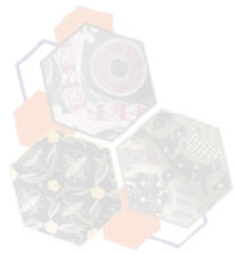
2.2.3. Curah Hujan

Kota Depok dipengaruhi oleh iklim muson dan termasuk dalam daerah beriklim tropis, sehingga kondisi iklim di tiap daerah Depok relatif sama. Berikut merupakan kondisi iklim Kota Depok:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata: 82%
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata: 49.8%
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Selain itu, Kota Depok memiliki kondisi curah hujan yang relatif sama di seluruh wilayahnya, yaitu kadar curah hujan sepanjang tahun dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Berikut merupakan curah hujan Kota Depok:

- a. 1500-2000 mm /tahun, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- b. 2000-2500 mm/tahun, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- c. 2500-3000 mm/tahun, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,
- d. 3000-3500 mm/tahun, terjadi di wilayah selatan-timur Kota Depok



2.3. Kondisi Demografi

Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan, 63 kelurahan, 928 Rukun Warga (RW), 5.365 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah keseluruhan 199,99 km². Ada 3 (tiga) kecamatan yang memiliki kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Bojongsari masing-masing 7 (tujuh) kelurahan. Sedangkan yang memiliki jumlah RW terbanyak adalah Kecamatan Tapos (134 RW), Kecamatan Sukmajaya (125 RW), dan Kecamatan Pancoran Mas (108 RW). Sementara 3 (tiga) kecamatan yang memiliki jumlah RT terbanyak adalah Kecamatan Sukmajaya (903 RT), Kecamatan Cimanggis (662 RT), dan Kecamatan Tapos (661 RT). Secara rinci data RT dan RW disajikan pada Grafik dan Tabel berikut.

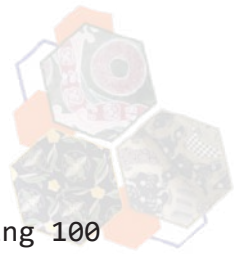
Tabel 2.1.
Jumlah Kelurahan, RW, RT dan Luas Wilayah, Kota Depok, Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JMLH RW	JMLH RT	LUAS WILAYAH
1	PANCORAN MAS	6	108	654	18,05
2	CIMANGGIS	6	92	663	21,80
3	SAWANGAN	7	86	450	26,07
4	LIMO	4	49	264	11,89
5	SUKMAJAYA	6	125	903	17,37
6	BEJI	6	75	400	14,63
7	CIPAYUNG	5	54	353	11,38
8	CILODONG	5	69	393	15,38
9	CINERE	4	42	218	10,52
10	TAPOS	7	134	664	33,46
11	BOJONGSARI	7	94	403	19,43
JUMLAH		63	928	5.365	199,99

SUMBER :

1. *Disdukcapil DKB Semester 2 tahun 2022 - data Kecamatan dan Kelurahan*
2. *BAGIAN PEMERINTAHAN - Data Jmlh RW dan RT TAHUN 2022*
3. *PUPR - Data Jmlh Luas wilayah TAHUN 2022*

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), jumlah penduduk Kota Depok pada Tahun 2022 sebesar 1.920.182 jiwa, terdiri dari laki-laki 963.442 jiwa dan 956.740 perempuan. Ini berarti sex ratio penduduk

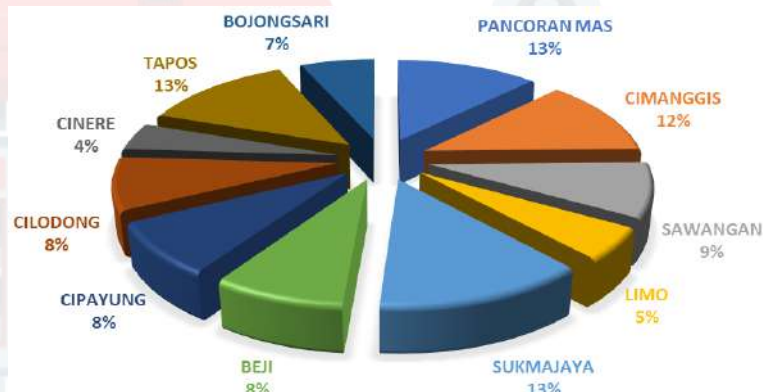


laki-laki terhadap perempuan sebesar 101 (101 laki-laki berbanding 100 perempuan). Sementara jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 604.123 KK, dengan jumlah KK terbanyak terdapat di Kecamatan Tapos (79.314 KK) dan paling sedikit di Kecamatan Cinere (27.746 KK). Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Tapos yaitu sebanyak 251.742 jiwa, sedangkan yang terendah di Kecamatan Cinere sebanyak 84.495 jiwa.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
PANCORAN MAS	119.521	50,13	118.964	49,87	238.485	12,42%
CIMANGGIS	118.442	50,46	116.901	49,54	235.343	12,26%
SAWANGAN	83.654	50,63	81.925	49,37	165.579	8,62%
LIMO	48.581	50,38	48.076	49,62	96.657	5,03%
SUKMAJAYA	123.099	49,54	125.373	50,46	248.472	12,94%
BEJI	78.042	50,16	77.818	49,84	155.860	8,12%
CIPAYUNG	80.116	50,38	78.985	49,62	159.101	8,29%
CILODONG	80.177	50,44	78.924	49,56	159.101	8,29%
CINERE	42.033	49,85	42.462	50,15	84.495	4,40%
TAPOS	126.493	50,34	125.249	49,66	251.742	13,11%
BOJONGSARI	63.284	50,56	62.063	49,44	125.347	6,53%
JUMLAH	963.442	50,17%	956.740	49,83%	1.920.182	100%

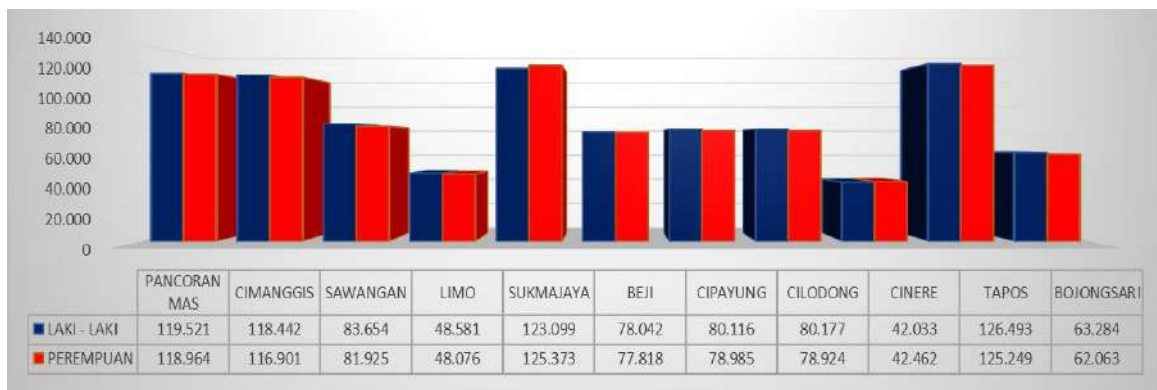
sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)



Gambar 2.3. Jumlah Penduduk (Dalam Persen) Kota Depok, Tahun 2022
sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)



Jika dilihat dari jumlah berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan, Kecamatan Tapos dengan total jumlah penduduk sebesar 251.742, terdiri dari 125.249 laki-laki (50,34 persen) dan 125.249 wanita (49,66 persen). Kecamatan Cinere merupakan kecamatan dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang paling sedikit, yaitu 42.033 laki-laki (49,85 persen) dan 42.462 wanita (50,15 persen). Secara lengkap terlihat pada tabel di atas dan grafik di bawah.

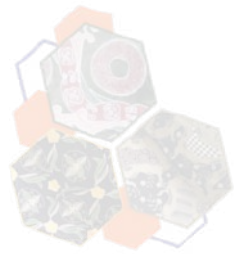


sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)

Gambar 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan data registrasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Depok, dalam periode tahun 2018 - 2022 jumlah penduduk Kota Depok terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan 0,80 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 1,82 persen dan terendah pertumbuhan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,69 persen. Pertumbuhan penduduk Kota Depok tidak hanya dari faktor fertilitas dan mortalitas saja akan tetapi juga faktor migrasi. Migrasi masuk sangat menentukan dalam penambahan jumlah penduduk Kota Depok, karena Kota Depok merupakan wilayah yang menarik untuk bermukim hal ini terlihat dari berkembangnya perumahan dan fasilitas perdagangan dari tahun ke tahun. Gambaran secara lebih rinci perkembangan penduduk Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel

2.3



Tabel 2.3
Tren Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan, Tahun 2018-2022

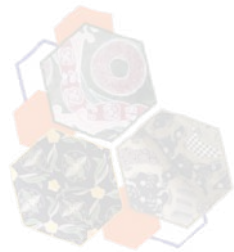
KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018 - 2022					LAJU PERTUMBUHAN 5 TAHUN TERAKHIR
	2018	2019	2020	2021	2022	
PANCORAN MAS	231.492	232.418	234.142	236.066	238.485	0,60%
CIMANGGIS	233.168	234.134	233.620	234.382	235.343	0,19%
SAWANGAN	148.556	150.935	154.891	159.525	165.579	2,19%
LIMO	89.814	90.976	92.859	94.570	96.657	1,48%
SUKMAJAYA	247.717	248.015	247.265	247.826	248.472	0,06%
BEJI	155.224	155.546	155.555	155.260	155.860	0,08%
CIPAYUNG	148.866	150.156	153.119	155.843	159.101	1,34%
CILODONG	148.175	150.309	152.868	155.771	159.101	1,43%
CINERE	85.810	85.330	85.076	84.767	84.495	-0,31%
TAPOS	240.147	242.562	243.974	247.266	251.742	0,95%
BOJONGSARI	115.963	117.353	119.627	122.045	125.347	1,57%
JUMLAH PENDUDUK	1.844.932	1.857.734	1.872.996	1.893.321	1.920.182	
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN	1,82%	0,69%	0,82%	1,09%	1,42%	0,80%

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2018 - 2022)

Dari sisi kepadatan penduduk, pada Tabel 2.4 terlihat bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Kota Depok Tahun 2022 mencapai 9.602 jiwa/km². Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (14.304 jiwa/km²), kemudian Kecamatan Cipayung (13.984 jiwa/km²) dan Kecamatan Pancoran Mas (13.212 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Sawangan (6.350 jiwa/km²) dan Kecamatan Bojongsari (6.452 jiwa/km²). Secara rinci tingkat kepadatan penduduk setiap kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut ini.

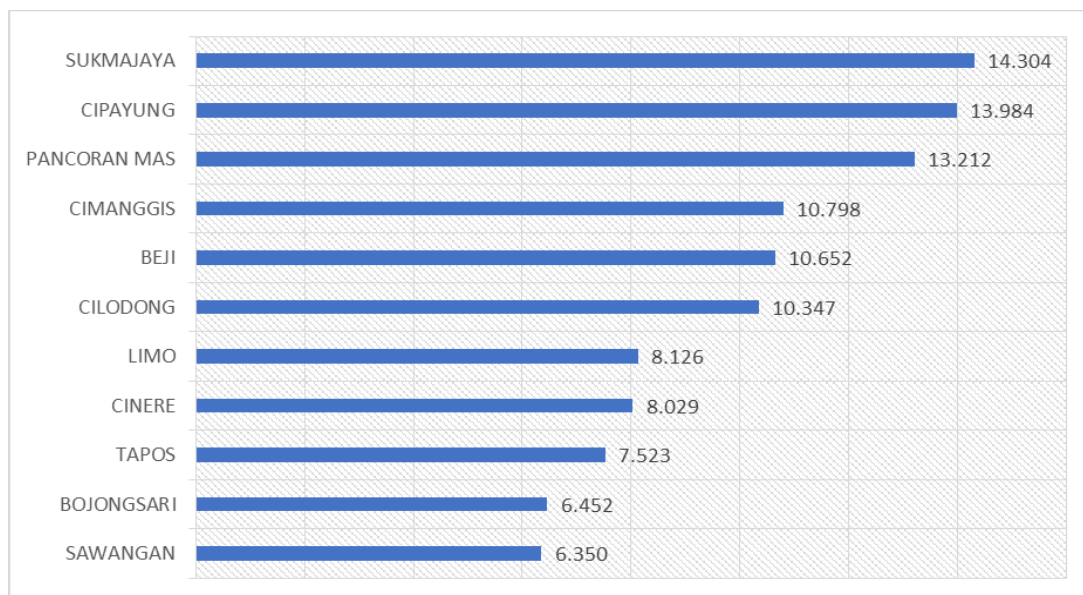
Tabel 2.4
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH	LUAS (km ²)	KEPADATAN PENDUDUK
PANCORAN MAS	238.485	18,05	13.212



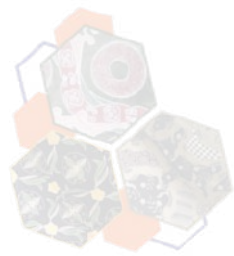
KECAMATAN	JUMLAH	LUAS (km ²)	KEPADATAN PENDUDUK
CIMANGGIS	235.343	21,80	10.798
SAWANGAN	165.579	26,07	6.350
LIMO	96.657	11,89	8.126
SUKMAJAYA	248.472	17,37	14.304
BEJI	155.860	14,63	10.652
CIPAYUNG	159.101	11,38	13.984
CILODONG	159.101	15,38	10.347
CINERE	84.495	10,52	8.029
TAPOS	251.742	33,46	7.523
BOJONGSARI	125.347	19,43	6.452
JUMLAH	1.920.182	199,99	9.602

Sumber : Disdukcapil Kota Depok – DKB Semester 2 Tahun 2022



Sumber: Tabel 2.4, diolah

Gambar 2.5.
Grafik Batang Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022



2.4. Perekonomian

Struktur perekonomian menunjukkan peranan setiap lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah dari usaha-usaha didalamnya. Kategori-kategori lapangan usaha dalam perekonomian yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

Nilai PDRB merupakan cerminan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 81.166,75 miliar rupiah (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok 2018-2022 (miliar rupiah)

PDRB Sektor	Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	891,63	952,27	952,11	976,39	1.066,69
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	19.254,42	20.337,43	20.337,11	21.701,86	23.458,26
Pengadaan Listrik dan Gas	190,29	198,93	193,72	213,01	227,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,56	54,13	60,00	64,77	70,72
Konstruksi	12.853,65	14.800,78	14.530,62	15.500,02	16.980,21
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.010,80	15.707,00	14.925,54	15.754,55	17.135,82
Transportasi dan Pergudangan	2.848,25	3.039,07	3.065,35	3.135,15	3.600,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.477,48	2.906,66	2.909,96	2.925,94	3.251,07
Informasi dan Komunikasi	1.168,69	1.261,64	1.651,67	1.761,30	1.882,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.682,71	2.827,34	2.869,17	3.157,87	3.497,10
Real Estate	1.031,12	1.150,29	1.186,03	1.308,33	1.475,13



Jasa Perusahaan	126,26	144,12	132,62	145,32	165,74
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.830,95	1.921,69	1.795,87	1.770,60	1.786,40
Jasa Pendidikan	1.887,31	2.195,20	2.400,07	2.473,91	2.672,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	687,51	783,40	780,46	860,79	916,78
Jasa Lainnya	2.373,61	2.684,09	2.596,02	2.632,53	2.980,24
Kota Depok	64.363,24	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75

Sumber : BPS Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2022 mengalami kenaikan, dari 49.947,24 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 52.564,98 miliar rupiah pada tahun 2022. Kondisi perekonomian tahun 2022 sudah mulai menggeliat setelah mengalami kontraksi sebesar -1,92 persen pada tahun 2020. Kinerja perekonomian di Kota Depok pada tahun 2022 mengalami kenaikan di hampir seluruh lapangan usaha. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2022 secara rinci disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok 2018-2022 (miliar rupiah)

PDRB Sektor	Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	524,35	543,05	546,08	547,81	572,24
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	13.827,72	14.293,45	14.104,03	14.532,56	15.141,51
Pengadaan Listrik dan Gas	123,57	128,79	125,88	138,19	145,61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,90	36,02	39,79	42,54	44,64
Konstruksi	9.628,96	10.591,23	10.341,54	10.921,57	11.466,71



PDRB Sektor	Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.873,46	10.684,99	9.891,04	10.311,40	10.806,83
Transportasi dan Pergudangan	1.615,24	1.709,13	1.688,00	1.692,74	1.870,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.570,03	1.714,51	1.690,70	1.661,64	1.826,54
Informasi dan Komunikasi	1.218,28	1.327,69	1.730,85	1.863,85	2.012,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.839,48	1.868,75	1.893,64	2.004,81	2.036,67
Real Estate	791,61	877,44	894,71	983,73	1.076,94
Jasa Perusahaan	101,19	105,09	93,59	101,61	110,15
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,12	1.182,11	1.096,57	1.070,97	1.080,97
Jasa Pendidikan	1.309,84	1.390,82	1.495,38	1.497,80	1.571,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514,24	564,49	545,40	589,49	621,49
Jasa Lainnya	1.874,90	2.059,01	1.958,72	1.986,51	2.179,81
Kota Depok	45.978,89	49.076,58	48.135,93	49.947,24	52.564,98

Sumber : BPS Kota Depok, Tahun 2022

Selama tujuh tahun terakhir (2015- 2021) struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha, yaitu: a) Industri Pengolahan; b) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta c) Konstruksi. Total ketiga sektor tersebut pada tahun 2022 memiliki peranan sebesar 70,93 persen, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 71,21 persen. Penurunan ini terjadi pada sektor industri pengolahan yang ditahun 2021 sempat diangka 29,18 persen menurun di tahun 2022 menjadi 28,90.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan,



yaitu mencapai 28,90 persen. Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,11 persen, dan Konstruksi sebesar 20,92 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Mencermati struktur perekonomian di Kota Depok, ada pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Kegiatan perdagangan memperdagangkan hasil dari Industri Pengolahan, membutuhkan dukungan insfrastruktur (konstruksi) dan juga dari aktivitas jasa keuangan serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang.

Pergeseran struktur lapangan usaha di Kota Depok dapat terlihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB Kota Depok selama periode 2018-2022 adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.

Sedangkan sektor lain yang belum disebutkan di atas, jika melihat data Distribusi PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2018-2022 terlihat sangat dinamis, bergerak mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan yang terlihat stabil terjadi pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan. Secara lengkap data-data tersebut dijadikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Distribusi PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,39	1,34	1,35	1,31	1,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	29,92	28,66	28,89	29,18	28,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,28	0,28	0,29	0,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	19,97	20,86	20,64	20,84	20,92



Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,77	22,13	21,21	21,18	21,11
H	Transportasi dan Pergudangan	4,43	4,28	4,36	4,21	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,85	4,10	4,13	3,93	4,01
J	Informasi dan Komunikasi	1,82	1,78	2,35	2,37	2,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	3,98	4,08	4,25	4,31
L	Real Estate	1,60	1,62	1,69	1,76	1,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,84	2,71	2,55	2,38	2,20
P	Jasa Pendidikan	2,93	3,09	3,41	3,33	3,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,11	1,16	1,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,69	3,78	3,69	3,54	3,67
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Depok

Ket : * angka sementara

** angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 2021-2022 sebesar 5,24 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar -1,92% pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74 persen. Jika dilihat dari kelompok sektor, pada Tahun 2022 hanya ada 2 sektor mengalami kontraksi yaitu sektor Akomodasi dan Makan minum dan sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok secara rinci disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018 – 2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

PDRB Sektor	Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,58	3,57	0,56	0,32	4,46



Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	4,04	3,37	-1,33	3,04	4,19
Pengadaan Listrik dan Gas	3,60	4,22	-2,26	9,78	5,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,63	3,22	10,45	6,93	4,93
Konstruksi	10,11	9,99	-2,36	5,61	4,99
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	8,22	-7,43	4,25	4,80
Transportasi dan Pergudangan	5,61	5,81	-1,24	0,28	10,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,13	9,20	-1,39	-1,72	9,92
Informasi dan Komunikasi	9,99	8,98	30,36	7,68	7,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,87	1,59	1,33	5,87	1,59
Real Estate	6,22	10,84	1,97	9,95	9,48
Jasa Perusahaan	1,85	3,85	-10,94	8,57	8,40
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,56	4,51	-7,24	-2,33	0,93
Jasa Pendidikan	7,36	6,18	7,52	0,16	4,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	9,77	-3,38	8,08	5,43
Jasa Lainnya	8,42	9,82	-4,87	1,42	9,73
Kota Depok	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24

Sumber : BPS Kota Depok

Ket : * angka sementara

** angka sangat sementara

Kinerja ekonomi Kota Depok pada tahun 2022 sudah mulai kembali ke arah yang lebih baik, setelah penurunan kinerja hampir di semua Lapangan Usaha di tahun 2020. Penurunan lapangan usaha hampir di semua sektor pada tahun 2020 karena mengalami situasi pandemi Covid-19 yang menimpa di seluruh Indonesia dan juga dunia. Situasi Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk Kota Depok. Dampak yang diakibatkan antara lain menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat karena banyaknya pemutusan hubungan kerja, menurunnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, serta berkurangnya investasi.

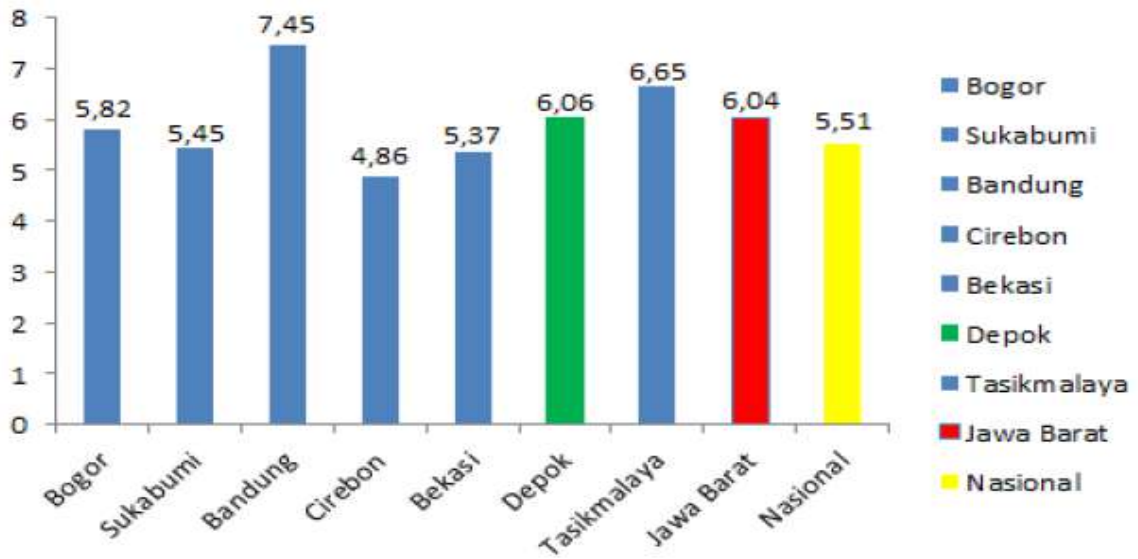
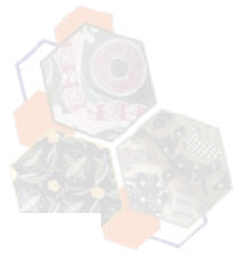
Kategori lapangan usaha di Kota Depok yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah Real Estate sebesar 9,95



persen. Kategori lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah Pengadaan Listrik dan Gas (9,78%), Jasa Perusahaan (8,57%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (8,08%), Informasi dan Komunikasi (7,68%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6,93%), Jasa Keuangan dan Asuransi (5,87%), Konstruksi (5,61%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4,25%), Industri Pengolahan (3,04%), dan sektor lainnya dibawah 2 persen.

Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya. Pada 2021 inflasi di Kota Depok dan Tingkat Nasional mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020), sedangkan inflasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Tingkat inflasi di Kota Depok tahun 2021 sebesar 1,81 persen, meningkat 0,003 persen dibandingkan tahun 2020 (1,78%).

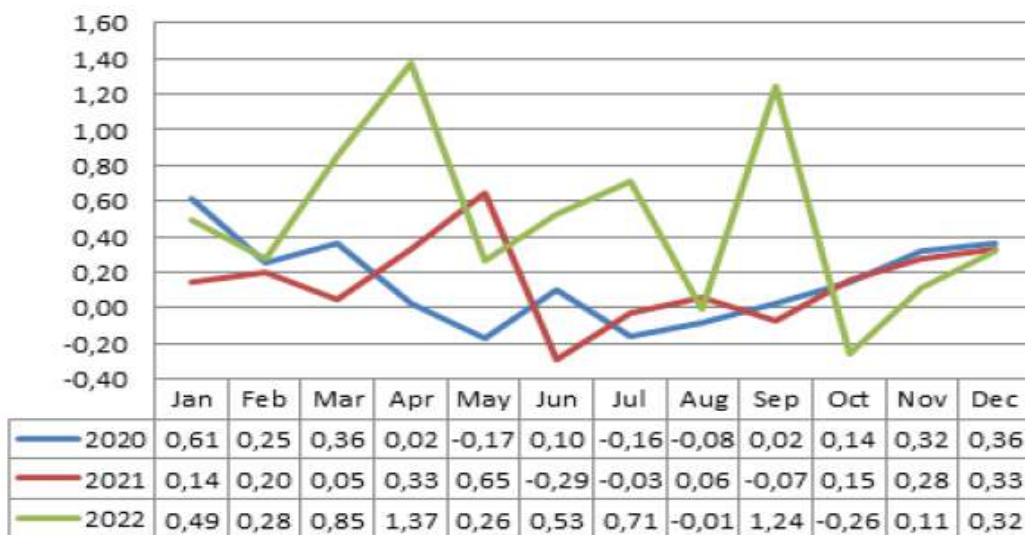
Inflasi Kota Depok dihitung berdasarkan Survei Harga Konsumen. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Harga Konsumen Kota Depok yang dihitung berdasarkan perhitungan Survei Biaya Hidup tahun dasar 2018=100 selama Tahun 2022. Inflasi Kota Depok tahun kalender selama 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2021. Inflasi tahun kalender tahun 2021 sebesar 1,81 persen sedangkan tahun 2022 sebesar 6,06 persen. Di provinsi Jawa Barat, inflasi tahun kalender Kota Depok menjadi yang tertinggi ketiga setelah Kota Bandung yang mencatatkan inflasi tahun 2022 sebesar 7,45 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 6,65 persen. Disamping itu, inflasi tahun kalender Jawa Barat sebesar 6,04 persen lebih tinggi dari inflasi tahun kalender Nasional yakni sebesar 5,51 persen sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.6. Perbandingan Inflasi 7 Kota di Jawa Barat, Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Depok, 2022

Tingginya angka inflasi di semua Kota di Jawa Barat bahkan di seluruh kota di Indonesia, disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), cukai rokok, dan gas elpiji selama tahun 2022. Sedangkan Pemerintah daerah juga mengambil kebijakan yang berdampak pada angka inflasi. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Bandung yang menaikkan tarif air minum berlangganan (PDAM) di penghujung tahun 2022.



Gambar 2.7

Pergerakan Inflasi Bulanan Kota Depok, Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Kota Depok, 2022



Selama tahun 2022, di Kota Depok terjadi deflasi pada bulan Agustus dan Oktober, sedangkan pada bulan lainnya terjadi inflasi. Pola pergerakan inflasi selama tahun 2022 cukup berbeda dengan pola pergerakan inflasi selama tahun 2021, hanya pada triwulan keempat pola pergerakan inflasi cenderung sama. Salah satu penyebabnya adalah menjelang akhir tahun.

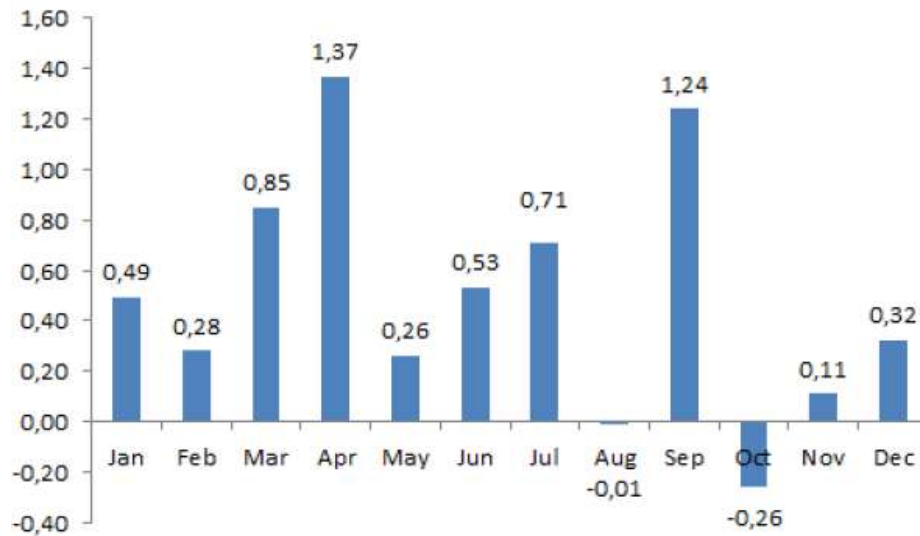
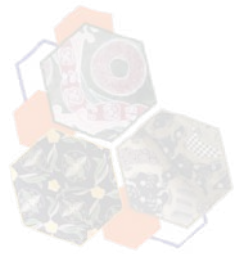
Untuk kondisi Inflasi per Bulan (*Month to Month*), mengacu pada data yang dirilis oleh BPS Kota Depok, sepanjang tahun 2022, Kota Depok mengalami 10 (sepuluh) kali inflasi dan 2 (dua) kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 1,37 persen. Hal ini biasa terjadi saat bulan Ramadhan (awal Ramadhan dan menjelang Idul Fitri) yang ditandai oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga tertinggi terjadi di 2 komoditas, yakni minyak goreng dan daging ayam ras.

Selain itu, masih pada bulan yang sama Pemerintah Pusat juga menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama jenis bensin. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia imbas dari adanya invasi Rusia ke Ukraina.

Kenaikan harga BBM pada tahun 2022 bukan hanya terjadi di bulan April saja, melainkan juga berlanjut pada bulan September. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi yang cukup signifikan di Kota Depok. Tercatat sebesar 1,24 persen inflasi terjadi pada bulan September.

Berbeda dengan bulan April dan September yang mencatatkan inflasi cukup signifikan, pada bulan November Kota Depok mencatatkan Inflasi sebesar 0,11 persen atau yang terendah sepanjang 2022. Hal ini terjadi karena adanya inflasi pada komoditas telur ayam ras dan minyak goreng namun diimbangi dengan deflasi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit. Sehingga kondisi ini hampir terjadi keseimbangan pada angka inflasi yang dihasilkan.

Selain terjadi inflasi pada 2022, Kota Depok juga sempat mengalami deflasi. Tepatnya pada bulan Juni terjadi deflasi tertinggi, yakni -0,26 persen. Hal ini disebabkan oleh kembali normalnya harga beberapa komoditas yang sebelumnya naik. Diantaranya cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.



Gambar 2.8. Inflasi per Bulan Kota Depok 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sepanjang tahun 2022 terjadi inflasi pada 10 kelompok pengeluaran dan terjadi deflasi pada 1 kelompok pengeluaran. Transportasi menjadi kelompok komoditas yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali, yakni April dan September.

Sedangkan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi sepanjang tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penerapan baru dari Bank Indonesia yang mulai menjalankan BI-Fast di penghujung 2021.

Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2022 di Kota Depok adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, akademi/penguruan tinggi, rokok kretek filter, tempe, rokok kretek, angkutan dalam kota, beras, telur ayam ras, dan cabai merah. Sedangkan komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi adalah minyak goreng, biaya administrasi transfer uang, cabait rawit, bayam, kangkung, bawang putih, ketimun, santan jadi, daun singkong, dan sawi putih.

Salah satu yang menjadi sorotan selama 2022 adalah kenaikan harga bensin. Bensin memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi sepanjang tahun 2022 disebabkan adanya kebijakan Pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menaikkan harga BBM disebabkan oleh



kenaikan tren harga minyak mentah dunia karena adanya invasi Rusia ke Ukraina. Sepanjang tahun 2022, bensin memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 1,3154 persen.

Hampir sama dengan bensin, harga LPG juga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi kota Depok. Penyebab kenaikan harga LPG dikarenakan ooleh masih tingginya harga bahan bakunya. Sepanjang tahun 2022, LPG yang termasuk ke dalam bahan bakar rumah tangga memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 0,9145 persen.

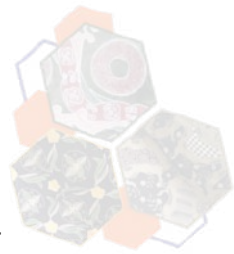
Selain itu, Pemerintah menaikan cukai rokok guna mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Dengan adanya kebijakan ini, maka rokok memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 0,3882 persen selama tahun 2022.

Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang sempat viral di tahun 2022 karena kelangkaannya dan harganya yang tinggi. Pelan namun pasti, Pemerintah berhasil mengendalikan harga minyak goreng dalam beberapa bulan hingga menjadikannya salah satu komoditas yang mampu menahan laju inflasi.

Secara umum, nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita. Namun untuk kasus beberapa kabupaten kota yang banyak kaum komuternya, PDRB per kapita tidak dapat menjelaskan ukuran kemakmuran di wilayah tersebut, karena sebagian besar warganya membangkitkan ekonomi bukan di wilayah dimana mereka tinggal.

PDRB ADHB Kota Depok pada tahun 2022 berdasarkan data yang dipublish BPS Kota Depok di Tahun 2023 sebesar 81,17 Triliun rupiah. Sedangkan sektor dengan distribusi persentase PDRB ADHB yang paling besar di Kota Depok adalah Industri Pengolahan sebesar 28,90%. Dan Sektor yang paling kecil adalah Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,09 persen.

Kota Depok mencatatkan angka kemiskinan terendah se-Jawa Barat pada tahun 2021 yaitu 2,58 persen. Jumlah ini juga jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yakni 8,40 persen.



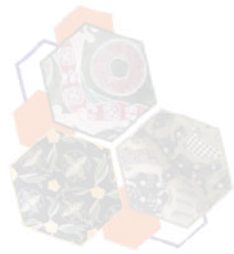
(<https://berita.depok.go.id/pemerintahan/angka-kemiskinan-depok-terendah-se-jabar>). Disamping terendah se Jawa Barat, juga Kota Depok menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah se Indonesia pada 2021. Adapun persentase tingkat kemiskinan Kota Depok sebesar 2,58 persen, naik dari tahun sebelumnya, yakni 2,45 persen dari total penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilihat detikcom, Depok berada di posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan paling rendah di bawah Kota Sawahlunto sebesar 2,38 persen dan Kota Tangerang Selatan 2,57 persen. (<https://news.detik.com/berita/d-5966743/angka-kemiskinan-depok-terendah-ke-3>)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Jumlah penduduk miskin di Kota Depok pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 63.430 jiwa, yang sebelumnya sebanyak 60.430 jiwa. Data jumlah penduduk miskin Kota Depok disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.9 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Depok 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2015	496.747	49,97	2,40
2016	522.934	50,56	2,34
2017	556.470	52,34	2,34
2018	615.255	49,39	2,14
2019	644.860	49,35	2,07
2020	688.194	60,43	2,45
2021	705.084	63,86	2,58
2022	744.771	64,36	2,53

Sumber : Badan Pusat Statistik



2.5. Potensi Wilayah

Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi wilayah yang sangat berkembang saat ini maupun di masa datang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

2.5.1. Potensi Geografis

Kota Depok secara geografis mempunyai kedudukan yang strategis sebagai pendukung dan penyangga ibukota negara, dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai kota PKN, Depok merupakan bagian dari Kawasan Jabodetabekpunjur. Jika dilihat dari konstelasi wilayahnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Bab II Pasal 13 Tahun 2015. Kota Depok merupakan kawasan pengembangan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa dalam mendukung kesetaraan fungsi di PKN Jabodetabekpunjur.

Letak Kota Depok yang strategis di selatan kota Jakarta dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Bekasi tentunya berpengaruh terhadap lalu lintas transportasi dan mobilitas penduduk di Kota Depok. Implikasi dari kondisi ini, memberikan potensi besar dengan terbukanya peluang pada aktivitas perekonomian dan sosial budaya lainnya.

2.5.2. Potensi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Depok Tahun 2021 berdasarkan DKB dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebesar 1.893.321 jiwa. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk semakin bertambah, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) periode 2017-2021 rata-rata sebesar 0,88% per tahun.

Sisi kualitas penduduk dianggap cukup bagus, ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2021 sebesar 81,37. Kota Depok juga merupakan salah satu kota dengan angka IPM yang tertinggi se Provinsi Jawa Barat, dan menempati posisi ke 3 setelah Kota Bandung (81,96) dan Kota Bekasi (81,95). Sedangkan untuk IPM Tahun 2020 sebesar 80,97 meningkat dari 80,82 pada Tahun 2019. Tingginya angka IPM mencerminkan tingginya tingkat kualitas penduduk Kota Depok.



Hal ini merupakan potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan, dan menggerakkan roda pembangunan Kota Depok di segala sektor.

Penduduk Kota Depok baik secara kuantitas, dan kualitas merupakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduknya. Selain itu, didukung dengan daya beli yang bagus, ditandai dengan pendapatan per kapita tahun 2021 sebesar Rp 35,66 Juta (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku).

2.5.3. Potensi Wisata Budaya dan Religius

Kota Depok mempunyai potensi wisata cukup baik untuk dapat berkembang di masa yang akan datang. Saat ini ada beberapa daerah tujuan wisata yang menjadi andalan yaitu sebagai berikut:

2.5.3.1. Masjid Kubah Emas

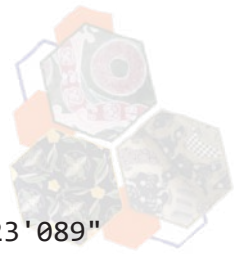
Kawasan Masjid Kubah Emas Dian Al Mahri ini dalam perkembangannya telah menjelma sebagai salah satu tujuan wisata religi umat Islam di Kota Depok.



Gambar 2.9 Masjid Kubah Emas, Cinere, Kota Depok

2.5.3.2. Makam Keramat Beji

Makam/Petilasan Mbah Raden Wujud Beji, merupakan bukti sejarah kehadiran tentara Islam yang ditemukan di Depok. Letak makam ini di Jalan Kemiri Muka, Desa Kramat (Kramat Jaya), Kecamatan Beji.



Secara geografis terletak pada koordinat 106 48'614" BT dan 0623'089" LS dengan ketinggian 324 m di atas permukaan laut.

Lokasi yang hanya seluas kurang lebih seribu meter persegi ini sangat asri dengan adanya pohon beringin besar. Uniknya, ada salah satu pohon yang akarnya membentuk tempat seperti petilasan. Namun sebenarnya ada sendiri tempat khusus petilasan, bukan di pohon tersebut.



Gambar 2.10 Makam Keramat Beji

2.5.3.3. Godong Ijo

Godong ijo merupakan tempat wisata yang menawarkan banyak program yang menyenangkan untuk para pengunjungnya. Berbagai pilihan wahana sebagai berikut: Young Greeners, yang dirancang untuk menghibur sekaligus merangsang anak-anak supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Program ini memberikan pertunjukan Life Opera dengan tema Stop Global Warming, Fast Learning Camp atau disebut juga dengan Kemah Belajar Super Cepat yang merupakan perpaduan acara Mind Map, Super Memory, Successful Learning Strategies, Brain Gymnastic, Brain Games, Outbond Games, Planting Class, dan Reptile Corner. Lokasinya adalah Jalan Cinangka Raya Km. 10 No. 60, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, dan Sawangan.

Selain itu, tempat wisata ini juga memiliki area pemancingan yang bernama Banyu Ijo Lake Fishing. Area ini merupakan danau buatan yang cukup luas dengan kedalaman lima meter. Di pinggir danau terdapat saung-saung bambu. Sambil menunggu umpan, pengunjung dapat mengakses WiFi gratis untuk mencari tahu teknik-teknik memancing atau browsing



tentang hal lain. Setiap pekan ada acara kontes pemancingan. Dalam lomba ini peserta ditantang untuk mendapatkan ikan Genghis Khan atau Mekhong Catfish yang beratnya bisa mencapai 20 kilogram. Godong Ijo juga menawarkan wisata edukasi bagi anak sekolah mulai TK, SD, sampai SMP. Kegiatan ini untuk memperkenalkan lingkungan alam, pertanian, dan dunia fauna. Kegiatan yang dapat dipilih diantaranya kemah, membuat keramik, memasak, mengenal satwa, dan bercocok tanam.

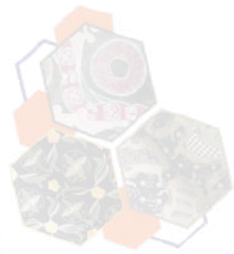


Gambar 2.11 Tempat Wisata Godong Ijo

2.5.3.4. Kawasan Bangunan Kolonial

Kawasan bangunan kolonial merupakan salah satu potensi wisata yang dikembangkan Pemerintah Kota Depok. Bangunan ini merupakan peninggalan sejarah, yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan jaman dulu. Sebagai contoh Gereja Immanuel di Jalan Pemuda, Depok lama; Jembatan Panus yang melintas Sungai Ciliwung menghubungkan Depok Lama dan Depok II.

Bangunan zaman kolonial lain yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Immanuel Depok. Gereja tersebut dibangun oleh Cornelis Chastelein pada abad ke-18. Bangunannya bergaya Renaissance, dan masih terdapat gaya khas arsitektur Belanda pada dinding serta bingkai pintu dan jendela. Meskipun bangunan tersebut sudah beberapa kali mengalami renovasi.



Gambar 2.12 Jembatan Panus yang melintas diatas sungai Ciliung

2.5.4. Potensi Industri Kreatif

2.5.4.1. Kerajinan Genta

Kerajinan genta atau lonceng angin (wind chimes) adalah sebuah produk kerajinan yang biasanya terbuat dari bambu, kerang dan logam ringan. Produk kerajinan ini dipergunakan sebagai hiasan rumah/taman, dan bila terkena angin menimbulkan nada. Hal itu sangat berbeda dengan lonceng angin hasil tangan kreatif warga Sawangan Depok. Kerajinan genta nada tersebut bila terkena angin dapat menghasilkan nada-nada etnik Jawa, Sunda, Bali, Batak, Mandarin, India, dan Jepang.

Produk ini terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan 2 (dua) mm, dengan panjang dan diameter sesuai dengan pesanan. Pemilihan bahan aluminium dikarenakan bahan tersebut mudah untuk diwarnai serta memiliki gaung/sustain yang sempurna. Hasil produk ini sudah dipasarkan ke mancanegara, seperti Amerika Serikat. Di Kota Depok, produk ini dipasarkan di pusat perbelanjaan.

2.5.4.2. Kerajinan Gentong

Curug gentong nama hasil kerajinan tangan berupa miniatur air terjun di dalam gentong. Air terjun ini dipadu dengan nuansa alam pedesaan serta rumah tradisional Sunda. Kesannya menyegarkan, suara gemericik air itu berasal dari gentong-gentong dari gerabah berbagai ukuran. Gentong yang digunakan berupa gentong “robek”. Keindahan curug



dengan nuansa alam pedesaan itu juga ditampilkan ke guci yang dilubangi. Selain itu juga disajikan di dalam pot kembang terbuka, baik itu yang berukuran besar maupun kecil.

Gentong dibelah dengan teknik khusus di satu sisi, hingga memperlihatkan rongga raksasa. Di dalam rongga gentong, dibuat berbagai jenis kreasi taman mini. Tebing buatan, tanaman artifisial, dan aliran air yang menimbulkan suara gemericik. Semua dari bahan daur ulang, kecuali tanaman yang terbuat dari plastik. Produk ini merupakan potensi Kota Depok, untuk dikembangkan lebih lanjut. Apabila kegiatan pembuatan produk ini dapat berkembang, dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan pendapatan. Selain itu, sebagai saranan untuk menciptakan lapangan kerja.

2.5.4.3. Makanan Olahan Belimbing

Belimbing, merupakan lambang Kota Depok, terus dikembangkan sebagai salah satu produk hortikultura unggulan. Berbagai sajian khas berbahan dasar belimbing seperti dodol belimbing, dan jus belimbing. Koperasi Usaha Bersama (KUB) Harapan Sejahtera Abadi adalah badan usaha yang fokus dalam membuat sajian atau pun souvenir khas kota Depok. Salah satu produknya yaitu dodol belimbing.

2.5.4.4. HandyCraft Batik

HandyCraft Batik dari Mabella Bonafi memproduksi berbagai jenis produk berbahan batik, terutama berupa limbah potongan kain batik atau sarung. Produk yang dihasilkan terdiri dari 30 jenis, mulai dari sandal batik, tas laptop batik, sarung HP, sprei, pernak-pernik, tempat tissue, buku bersampul batik, tempat sertifikat dan lainnya. Bahan dasar diperoleh dari Kota Pekalongan, Jogja, Cirebon dan Sekitar Jawa Barat. Hasil produk ini dipasarkan domestik di sekitar Depok, Jakarta dan Bandung, sedangkan untuk mancanegara sudah mencapai Malaysia dan Australia.

2.5.4.5. Sulam Perca

Kerajinan sulam perca dikelola oleh UKM, di daerah Kelapa Dua Depok. Jenis produk yang dihasilkan terdiri dari Baik, Tas, dan



BedCover. Bahan baku batik didapat dari sampel garmen, limbah penjahit, dan limbah konveksi. Pemasaran produk sulam perca meliputi wilayah Jakarta, Depok, Aceh, Makasar dan Padang. Hasil produksi ini dipajang di pusat-pusat perbelanjaan terkenal di Jakarta.

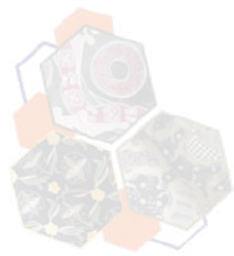


Gambar 2.13 Contoh Hasil Kerajinan Sulam Perca

2.5.4.6. Potensi Usaha Ikan Hias

Ikan hias merupakan produk yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Depok. Usaha ini dapat dilakukan secara kelompok maupun rumah tangga warga, yang sudah dilakukan di 10 kecamatan (kecuali Cinere). Menurut data dari Dinas Perikanan Kota Depok, produksi ikan hias Tahun 2020 sebanyak 95.025.448 ekor, dengan nilai Rp 59.975.412.210,-. Sebagian besar ikan hias diproduksi di Kecamatan Bojongsari (39.425.979 ekor), Kecamatan Sawangan (15.026.367 ekor) dan Kecamatan Cipayang (8.880.880 ekor).

Peluang usaha ikan hias masih menjanjikan dan akan terus berkembang, sehingga Pemkot Depok menargetkan pangsa ekspor ikan hias terbesar, dengan jumlah pembudidaya saat ini mencapai 439 pengusaha. Jenis ikan hias yang dikembangkan antara lain, neon tetra, arwana, kardinal banggai, red nose, dan ikan pelangi. Pemasaran dilakukan di pasar domestik, juga diekspor ke sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan negara Asia lainnya.



2.5.5. Potensi Ekonomi

Kota Depok memiliki beberapa potensi daerah diantara pada sektor pertanian, Usaha Kecil Menengah (UKM), Pendidikan, Kuliner, dan perbelanjaan. beberapa potensi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pertanian

Kota Depok yang memiliki visi unggul, nyaman dan religius sebagai kota yang nyaman untuk bidang niaga dan jasa diharapkan menjadi daerah yang nyaman bagi penduduknya. Kenyamanan tersebut salah satunya dengan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan potensi lahan pertanian

Belimbing yang produktif menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan ruang terbuka hijau perkotaan, sehingga Kota Depok tetap memiliki komoditas unggulan yang bernilai Kompetitif dan Komparatif khususnya komoditas hortikultura yang merupakan sumber daya lokal (Base Resources) kota Depok yaitu BELIMBING. Keunggulan spesifik ini yang harus dilestarikan, dan menjadi IKON kota, sehingga di masa mendatang Kota Depok tetap memiliki kebanggaan akan sumber daya alam yang potensial dari pengembangan produk pertanian spesifik wilayah dan mendukung ruang terbuka hijau Kota Depok.

2) Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok kian bertambah setiap tahunnya. Saat ini jumlah UMKM di Kota Depok mencapai 85 ribu dan ada 25 asosiasi yang bermitra dengan dengan dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok. Sementara untuk UMKM yang sudah terdigitalisasi hampir 400 dan berpotensi untuk bertambah. Adanya Kampung UMKM ini menjadi saran promosi yang baik bagi para pelaku UMKM di Kota Depok. Melalui pemanfaatan digitalisasi ini tentunya dapat membantu para pelaku UMKM untuk tidak hanya berjualan dengan cara-cara manual atau tradisional, melainkan dapat memanfaatkan era digital, sehingga produk-produk tersebut tidak hanya dikenal di Depok melainkan hingga di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Jika sudah dikenal, bukan tidak mungkin produk-produk UMKM yang ada di Kota Depok dapat bersaing di level nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat bersaing di level internasional.



Selain itu, adanya Kampung UKM ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Depok sebagai sahabat UMKM.

3) Pendidikan

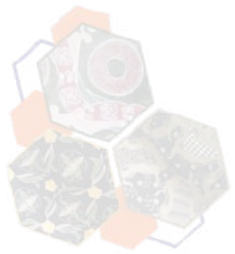
Kota Depok memiliki potensi yang besar di bidang pendidikan, mulai dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga universitas bergengsi ada di kota ini. Selain itu sekolah profesi hingga bahasa juga banyak didirikan. Seluruh pusat pendidikan baik lokal, swasta hingga dimiliki oleh asing pun bisa dijumpai. Namun yang paling menonjol di kota ini adalah dua universitas bergengsi yang kerap menyebut kota ini sebagai kotanya mahasiswa. Ada Universitas Indonesia yang merupakan universitas negeri favorit di Indonesia dan Universitas Gunadarma, universitas swasta terbesar di Asia Tenggara.

4) Kuliner

Kota Depok kaya akan beragam kuliner yang nikmat mulai dari aneka jajanan hingga berjamurnya restoran-restoran di sepanjang jalan protokol di Kota Depok.

5) Perbelanjaan

Kota Depok tidak hanya dikenal dengan kulinernya yang nikmat, tetapi juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan di kota ini yang berdiri kokoh di sepanjang Jalan Margonda. Setidaknya ada 7 (tujuh) pusat perbelanjaan besar yang kerap menjadi destinasi warga di akhir pekan, Margo City, Depok Town Square, Depok Mall, Depok Pesona Square, Saladin Square, Cinere Bellevue Mall dan ITC Depok. Dari belanja kebutuhan bulanan, pembeli produk fashion hingga menonton di bioskop pun bisa dilakukan. Di Margo City misalnya, mall yang memiliki arsitektur unik ini menyimpan potensi hiburan yang cukup memadai hingga adanya live music di akhir pekan.



BAB 3

SUMBER DATA





BAB 3

SUMBER DATA

Gambaran perkembangan kependudukan Kota Depok dapat diperoleh dari data dan informasi yang tersedia. Sehubungan dengan itu, diperlukan sumber data yang akurat dan mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi tersebut. Secara umum, sumber data kependudukan yang digunakan untuk menggambarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok ini bersumber dari Data Registrasi, Data Non Registrasi, dan Sumber Data Lintas Sektor.

3.1. Registrasi

Registrasi penduduk diartikan sebagai data yang menyangkut peristiwa sehari-hari, mencakup perubahan status penduduk atau orang yang diambil datanya. Peristiwa yang dicatat dalam registrasi penduduk, menyangkut data kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sebagai contoh, pencatatan peristiwa lahirnya seorang bayi yang diterbitkan dalam bentuk akte kelahiran bayi. Data kematian dan data perpindahan penduduk yang dicatat setiap peristiwa secara terus menerus juga merupakan data registrasi.

Data registrasi penduduk Kota Depok dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mencatat setiap peristiwa kelahiran dan kematian melalui pelaporan dari RT dan RW. Sumber data registrasi penduduk memberikan data mengenai jumlah penduduk Kota Depok setiap tahun secara akurat yang dibutuhkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyusunan program perencanaan maupun program aksi secara langsung.

Contoh registrasi lainnya yaitu peristiwa pernikahan, jika ada penduduk yang menikah, maka status penduduk tersebut mengalami perubahan. Selain itu, dengan terbentuknya keluarga baru, maka diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru. Berdasarkan KK tersebut, dapat



dihitung jumlah Kepala Keluarga dari suatu daerah. Data registrasi jika dapat dikumpulkan dengan baik, dapat merupakan data yang selalu ter-update terperinci sesuai dengan pergantian waktu secara berkala harian, mingguan dan bulanan.

Terdapat dua macam cara dalam pelaksanaan sensus pada penduduk yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Cara-cara ini adalah sebagai berikut:

1. Sensus de jure, adalah proses sensus pada penduduk atau pencacahan penduduk dimana dilaksanakan pada semua orang dimana benar-benar sudah tercatat berdomisili atau bertempat tinggal pada suatu daerah atau wilayah, biasanya sesuai dengan KTP.
2. Sensus de facto, adalah proses sensus pada penduduk atau proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan pada semua penduduk atau setiap orang yang ditemui oleh petugas saat diadakannya sensus.

Terkait dengan penulisan buku profil ini, digunakan sumber data registrasi dari Disdukcapil Kota Depok yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Ditjendukcapil Kemendagri. Data registrasi ini diperoleh melalui pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Cara memperoleh data tersebut yaitu dapat secara defensif di kantor pelayanan kependudukan. Selain itu, dapat secara aktif melalui pemberian surat keterangan kependudukan dan catatan sipil.

Sumber data registrasi penduduk sudah diberlakukan secara nasional, namun sayangnya belum menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Berbagai kendala yang masih banyak dihadapi, menyangkut kualitas dan kuantitas petugas, dana dan sarana, partisipasi masyarakat, kondisi geografis dan lain sebagainya. Di masa depan, perlu memperluas cakupan, dan meningkatkan validitas dan kecermatan.

3.2. Non Registrasi

Sumber data non registrasi bersumber dari hasil Sensus dan Survei penduduk. Pengertian kata Sensus dapat diartikan juga sebagai cacahan jiwa. Sensus juga bisa diartikan sebagai sebuah proses dari pencatatan, proses perhitungan, dan publikasi data demografis terhadap seluruh penduduk yang tinggal atau berdomisili atau menetap pada suatu wilayah/daerah atau Negara tertentu secara bersamaan terus menerus



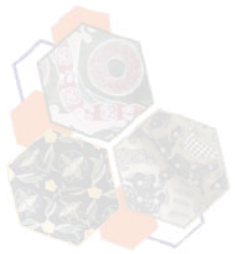
menjadi sumber data yang mencatat setiap perubahan Pelaksanaan sensus biasanya setiap 10 tahun sekali, dan untuk Indonesia data Sensus yang tersedia saat ini yaitu Sensus Penduduk Tahun 2020.

Sedangkan Survei pada penduduk ini hanya dilakukan pada penduduk di suatu cakupan wilayah atau daerah tertentu yang bisa mewakili unsur karakteristik dari semua penduduk yang ada di daerah tersebut. Proses survei pada penduduk ini juga bisa dikatakan sebagai pengambilan data sampel atau data contoh yang bisa mewakili kondisi penduduk di daerah tersebut.

Terkait dengan penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok, sumber data Non Registrasi yang digunakan adalah data hasil survei dan catatan pelayanan administrasi dari instansi pemerintah dan swasta selain data dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Depok. Adapun sumber data non registrasi tersebut adalah Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Kantor Pengadilan Agama Kota Depok, Kantor Pengadilan Negeri Kota Depok, Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, BPD Provinsi DKI Jakarta, dan data dari literature, data dari internet, dan sumber data lainnya.

3.3. Data Lintas Sektor

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok dibutuhkan sumber data selain dari Registrasi dan Non Registrasi yaitu Sumber Data dari Lintas Sektor. Data yang dimaksud berasal dari instansi terkait di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Depok, selain Disdukcapil. Sumber data tersebut antara lain dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan sumber data SKPD lainnya. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperkuat informasi tentang situasi dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kependudukan.



BAB 4

PERKEMBANGAN PENDUDUK





BAB 4

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Gambaran perkembangan kependudukan Kota Depok disajikan dari segi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Pasal 17 yang isinya menjelaskan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Informasi terkait jumlah, struktur, dan komposisi penduduk serta pertumbuhan dan persebaran penduduk diperlukan untuk menunjang terlaksananya pembangunan berwawasan kependudukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010.

Dari sisi kuantitas, jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu dikendalikan. Jumlah penduduk yang besar tentu membutuhkan banyak pangan, sandang dan papan. Dari sisi kualitas, penduduk dilihat tidak hanya dari segi jumlahnya yang besar. Jumlah penduduk yang besar perlu diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia agar mampu bersaing di era pasar global. Selain itu, penduduk yang berkualitas, dapat melakukan mobilitas dengan baik terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan.

4.1. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk menyajikan gambaran mengenai jumlah, komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik. Persebaran penduduk menurut dua karakteristik

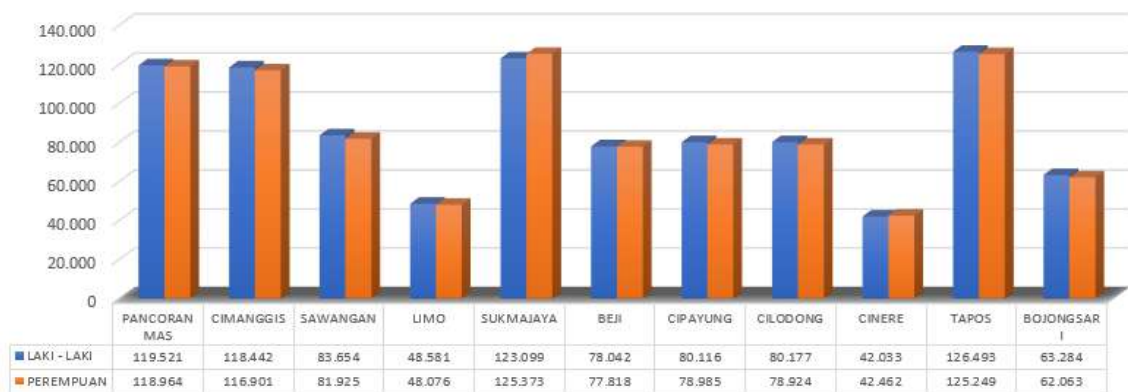


demografi yang utama yaitu kelompok umur dan jenis kelamin. Selain itu, secara geografis dan administrasi pemerintahan, disajikan pula jumlah dan kepadatan penduduk menurut wilayah Kecamatan. Informasi tentang pertumbuhan penduduk tidak hanya menyajikan tren selama lima tahun terakhir (2018-2022) namun dilihat juga dari sisi tiga komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk yang merupakan faktor penambah dan pengurang jumlah penduduk. Penyajian gambaran perkembangan kependudukan secara kuantitas juga menampilkan persebaran penduduk menurut karakteristik sosio-demografi. Berikut ini disajikan data kuantitas penduduk Kota Depok tahun 2022 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2022.

4.1.1. Komposisi dan Persebaran Penduduk

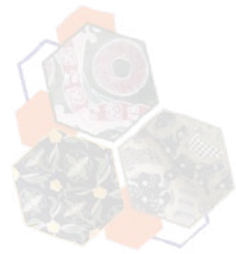
4.1.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk 2018-2022

Jumlah penduduk Kota Depok dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1.920.182 jiwa. Dibandingkan empat tahun sebelumnya (2018) sebesar 1.844.932 jiwa jumlahnya meningkat sebesar 75.250 jiwa.



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2022
Sumber Data :Disdukcapil - Data Konsolidasi Bersih (DKB 2 Tahun 2022)

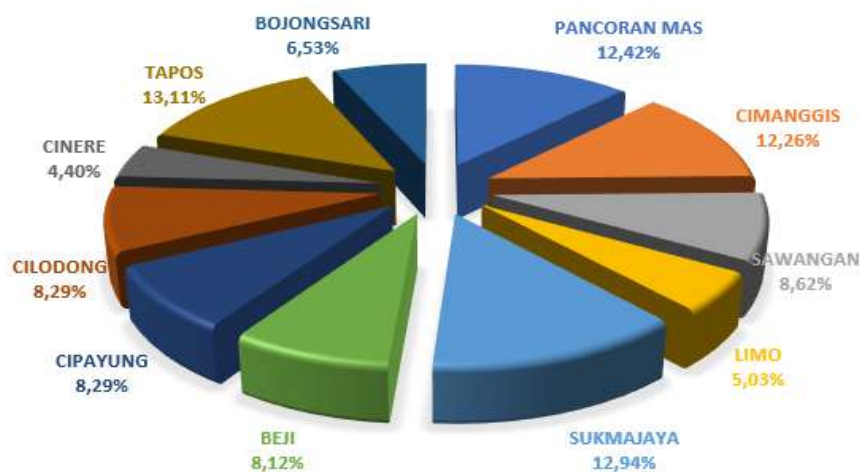
Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk berfluktuasi, tertinggi adalah tahun 2018 mencapai 1,82 persen. Pertumbuhan penduduk relatif meningkat dalam tiga tahun terakhir, terutama di tahun 2022 naik menjadi 1,42 persen.



Gambar 4.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Depok, Tahun 2018-2022

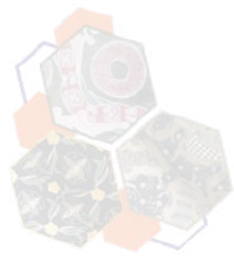
Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2018 - 2022)

Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. Persebaran atau distribusi penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara geografis dan administrasi pemerintahan. Secara administrasi pemerintahan, penduduk Kota Depok tersebar di sebelas kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Kecamatan Pancoran Mas 12,48 persen, dan terendah adalah Kecamatan Cinere 4,40 persen. Dua kecamatan dengan persentase sama besar adalah Kecamatan Cipayung dan Cilodong, masing-masing sebesar 8,29 persen (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Persentase Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)



4.1.1.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan kondisi penduduk di suatu wilayah yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, disebabkan karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Kepadatan penduduk merupakan indikator dari tekanan penduduk di suatu daerah.

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2022 sebesar 1.920.182 jiwa dengan luas wilayah 199,99 km², rasio kepadatan penduduk Kota Depok 9.602. Artinya, tiap km² wilayah Kota Depok dihuni oleh 9.602 orang penduduk. Dua kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sukmajaya (14.304 orang per km²) dan Cipayung (13.984 orang per km²). Sebaliknya, kecamatan paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Sawangan, yaitu 6.350 orang per km² (Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Jumlah, Luas, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

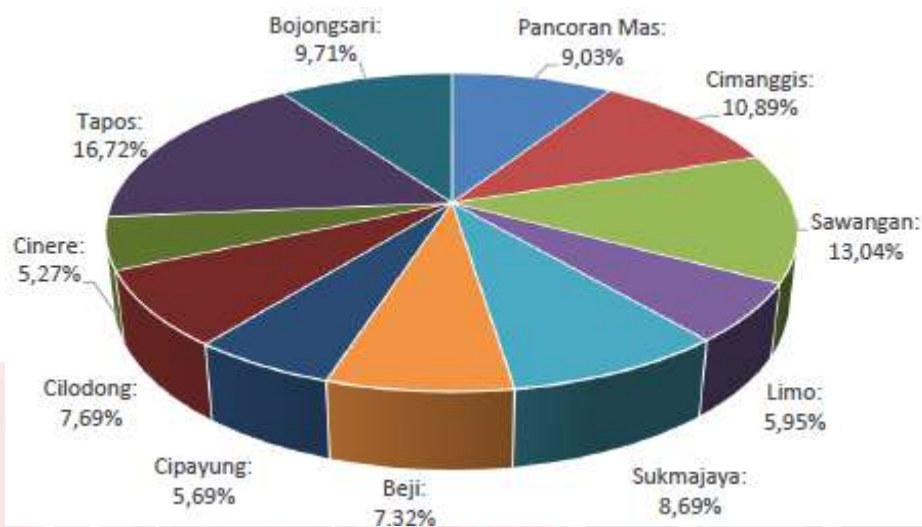
Kecamatan	Jumlah	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km ²)
Pancoran Mas	238.485	18,05	13.212
Cimanggis	235.343	21,80	10.798
Sawangan	165.579	26,07	6.350
Limo	96.657	11,89	8.126
Sukmajaya	248.472	17,37	14.304
Beji	155.860	14,63	10.652
Cipayung	159.101	11,38	13.984
Cilodong	159.101	15,38	10.347
Cinere	84.495	10,52	8.029
Tapos	251.742	33,46	7.523
Bojongsari	125.347	19,43	6.452
Jumlah	1.920.182	199,99	9.602

Sumber Data :

1. Jumlah Penduduk - Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)
2. Luas Wilayah Kota Depok - Data PUPR Tahun 2022

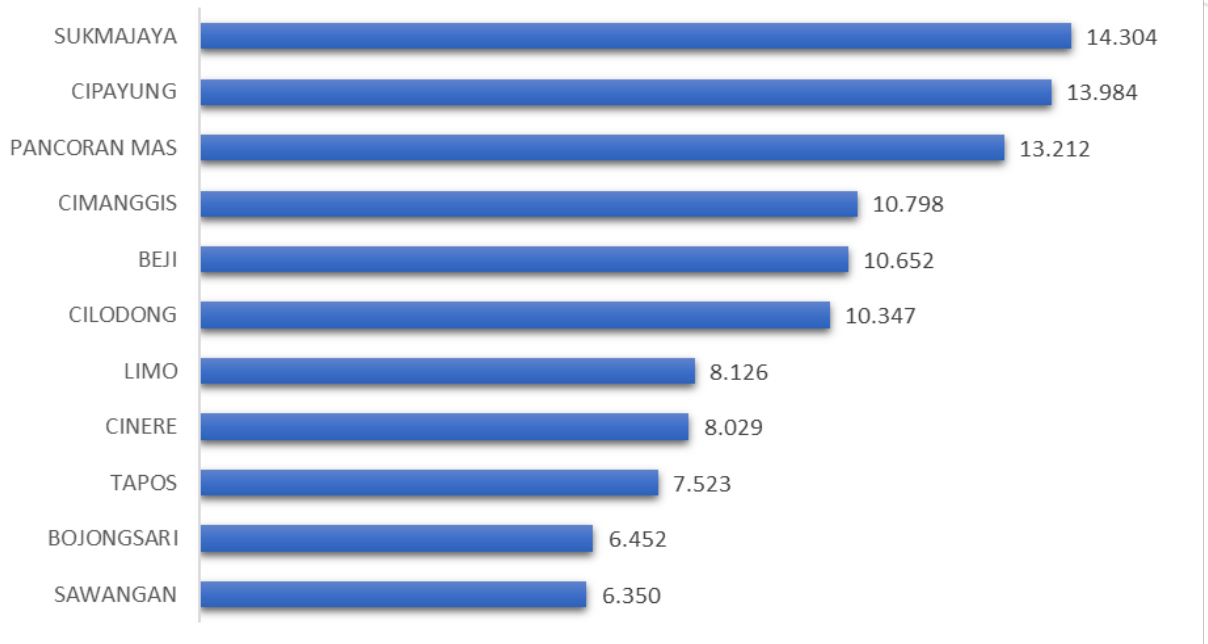


Secara umum, persebaran penduduk Kota Depok menurut kecamatan, belum merata. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk terbanyak di dominasi dalam empat kecamatan yaitu Sukmajaya (248.472 jiwa), Tapos (251.742 jiwa), Pancoran Mas (238.485 jiwa), dan Cimanggis (235.343 jiwa). Jumlah penduduk dalam empat kecamatan tersebut adalah separuh penduduk Kota Depok yang bermukim di empat wilayah tersebut. Namun, dari empat kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, hanya dua kecamatan yang termasuk dalam empat wilayah terluas di Kota Depok yaitu Kecamatan Tapos dan Cimanggis dengan luas wilayah masing-masing 33,43 km² dan 21,78 km². Dari keempat wilayah yang menempati lebih dari separuh luas Kota Depok yaitu Kecamatan Tapos, Sawangan, Cimanggis, dan Bojongsari, dua kecamatan yaitu Sawangan dan Bojongsari, jumlah penduduknya relatif sedikit, masing-masing 165.579 jiwa dan 125.347 jiwa. Dengan kata lain dua wilayah tersebut yang memiliki luas sekitar 23 persen dari luas wilayah Kota Depok hanya dihuni oleh sekitar 15 persen dari total penduduk Kota Depok. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berturut-turut di wilayah Kecamatan Sukmajaya (14.304 orang per km²), Cipayung (13.984 orang per km²), Pancoran Mas (13.212 orang per km²), Cimanggis (10.798 orang per km²), Beji (10.652 orang per km²), dan Cilodong (10.347 orang per km²). Tingkat kepadatan diatas 10.000 orang/km² tergolong kepadatan tinggi. Sementara itu, kecamatan lainnya kepadatan penduduknya berkisar antara 6 sampai 9 ribu orang per km², tergolong kepadatan sedang.



Gambar 4.4 Persentase Luas Kota Depok Menurut Kecamatan, Tahun 2022

Sumber : Data PUPR Kota Depok Tahun 2023



Sumber Data :

1. Jumlah Penduduk - Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)
2. Luas Wilayah Kota Depok - Data PUPR Tahun 2022

Gambar 4.5 Ranking Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

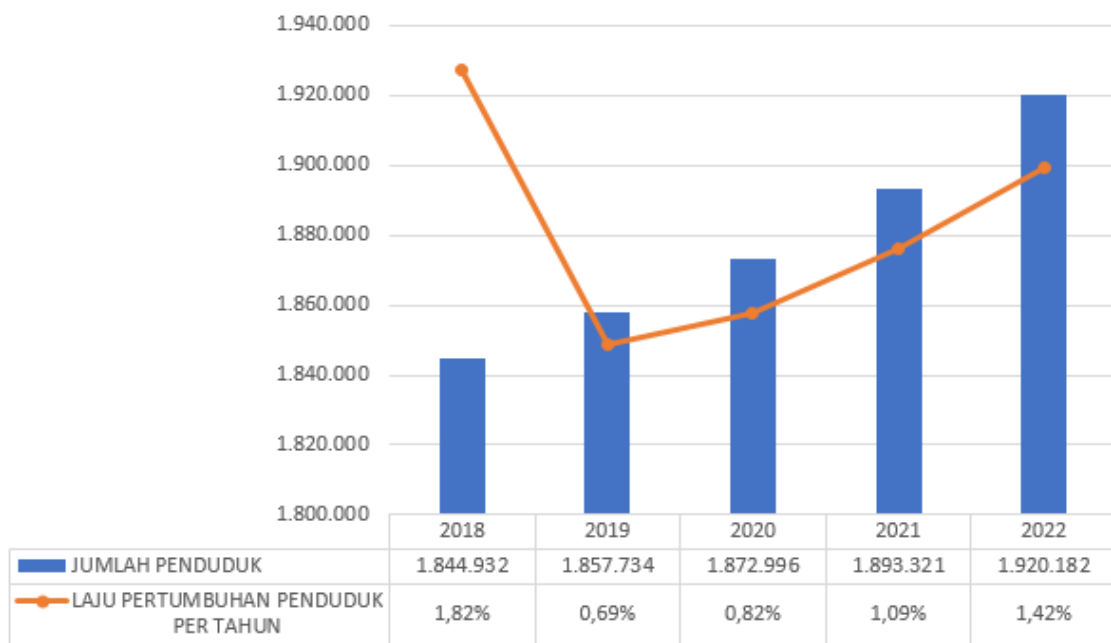
Bila dilihat dari luas wilayah, ada 4 (empat) kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Tapos 33,43 km² (16,72 persen), Sawangan 26,07 km² (13,04 persen), Cimanggis 21,78 km² (10,89 persen), dan Bojongsari 19,41 km² (9,71 persen), tetapi kepadatan penduduk di tiga kecamatan tersebut termasuk terendah, yaitu Kecamatan Sawangan 6.350 orang per km², Kecamatan Bojongsari 4.290 orang per km² dan Kecamatan Tapos 7.523 orang per km². Hal tersebut karena keempat wilayah tersebut merupakan wilayah terdepan atau wilayah yang menjadi batas wilayah Kota Depok dengan kota/kabupaten lain. Penyebaran penduduk yang kurang merata merupakan salah satu masalah kependudukan yang juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kuantitas atau jumlah penduduk di suatu wilayah perlu dikendalikan agar terdapat keseimbangan dinamis antara faktor-faktor yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Untuk itu perlu mengetahui



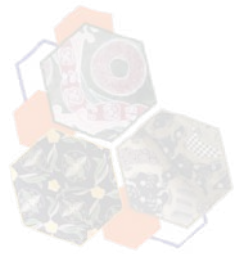
pertumbuhan penduduk yaitu besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu, pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan dan pengurangan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan perbandingan jumlah penduduk antar periode waktu. Indikator LPP sangat berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.



Gambar 4.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2022

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2018 - 2022)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun Kota Depok untuk periode Tahun 2018-2022 rata-rata per tahun 0,80 persen. LPP rata-rata per tahun, tertinggi adalah Kecamatan Bojongsari mencapai 1,57 persen, dan terendah adalah Kecamatan Cinere yaitu -0,31 persen. Meskipun laju pertumbuhan penduduk sudah termasuk rendah, namun pemerintah Kota Depok tetap harus waspada dengan laju pertumbuhan akibat adanya migrasi masuk. Kecenderungan dengan adanya bebas visa masuk ke Indonesia, akan meningkatkan jumlah penduduk, apalagi Kota Depok sebagai kota penyangga ibu kota negara.



Tabel 4.2.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Kota Depok
2018-2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018 - 2022					LAJU PERTUMBUHAN 5 TAHUN TERAKHIR
	2018	2019	2020	2021	2022	
PANCORAN MAS	231.492	232.418	234.142	236.066	238.485	0,60%
CIMANGGIS	233.168	234.134	233.620	234.382	235.343	0,19%
SAWANGAN	148.556	150.935	154.891	159.525	165.579	2,19%
LIMO	89.814	90.976	92.859	94.570	96.657	1,48%
SUKMAJAYA	247.717	248.015	247.265	247.826	248.472	0,06%
BEJI	155.224	155.546	155.555	155.260	155.860	0,08%
CIPAYUNG	148.866	150.156	153.119	155.843	159.101	1,34%
CILODONG	148.175	150.309	152.868	155.771	159.101	1,43%
CINERE	85.810	85.330	85.076	84.767	84.495	-0,31%
TAPOS	240.147	242.562	243.974	247.266	251.742	0,95%
BOJONGSARI	115.963	117.353	119.627	122.045	125.347	1,57%
JUMLAH PENDUDUK	1.844.932	1.857.734	1.872.996	1.893.321	1.920.182	
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN	1,82%	0,69%	0,82%	1,09%	1,42%	0,80%

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2018 - 2022).

4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

4.1.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk bermanfaat sebagai gambaran yang mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Pada umumnya, suatu wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau bentuk piramida penduduknya cembung pada kelompok umur 15-64 tahun.



Kota Depok telah mengalami transisi demografi akibat berubahnya tiga komponen utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan perpindahan penduduk (*migrasi*). Struktur umur penduduk tetap didominasi usia kerja (15-64 tahun) sebagai persentase tertinggi, diikuti penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) yang menempati posisi atau persentase tertinggi kedua. Sedangkan persentase penduduk terendah adalah kelompok penduduk lanjut usia (umur 65 tahun ke atas). Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Depok yang termasuk dalam kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 1.354.410 jiwa (70,54 persen), penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebanyak 471.987 jiwa (24,58 persen), penduduk usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) sebanyak 93.785 jiwa (4,88 persen).

Tabel 4.3
Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Tahun 2022

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	0-4	73.268	68.229	141.497	7,37
2	5-9	84.015	78.402	162.417	8,46
3	10-14	86.904	81.169	168.073	8,75
4	15-19	77.137	72.972	150.109	7,82
5	20-24	80.041	75.984	156.025	8,13
6	25-29	75.874	76.154	152.028	7,92
7	30-34	70.817	72.328	143.145	7,45
8	35-39	73.626	76.895	150.521	7,84
9	40-44	79.542	82.554	162.096	8,44
10	45-49	73.170	74.147	147.317	7,67
11	50-54	64.502	63.839	128.341	6,68
12	55-59	46.949	48.210	95.159	4,96
13	60-64	33.617	36.052	69.669	3,63
14	65-69	21.651	23.022	44.673	2,33
15	70 +	22.329	26.783	49.112	2,56
JUMLAH		963.442	956.740	1.920.182	100

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)



Transisi demografi yang terjadi di Kota Depok telah membentuk piramida penduduk Kota Depok Tahun 2022 (Gambar 4.5) lebih mengarah ke bentuk sarang tawon kuno (*old fashioned beehive*). Bentuk piramida seperti ini dialami negara atau daerah yang telah mengalami penurunan kelahiran dan kematian yang cukup lama. Kalau dilihat batang dasar piramida penduduk Kota Depok (kelompok umur 0-4 tahun) lebih pendek dibandingkan batang piramida kelompok umur 5-9 tahun, yang menunjukkan jumlah kelahiran yang semakin rendah.



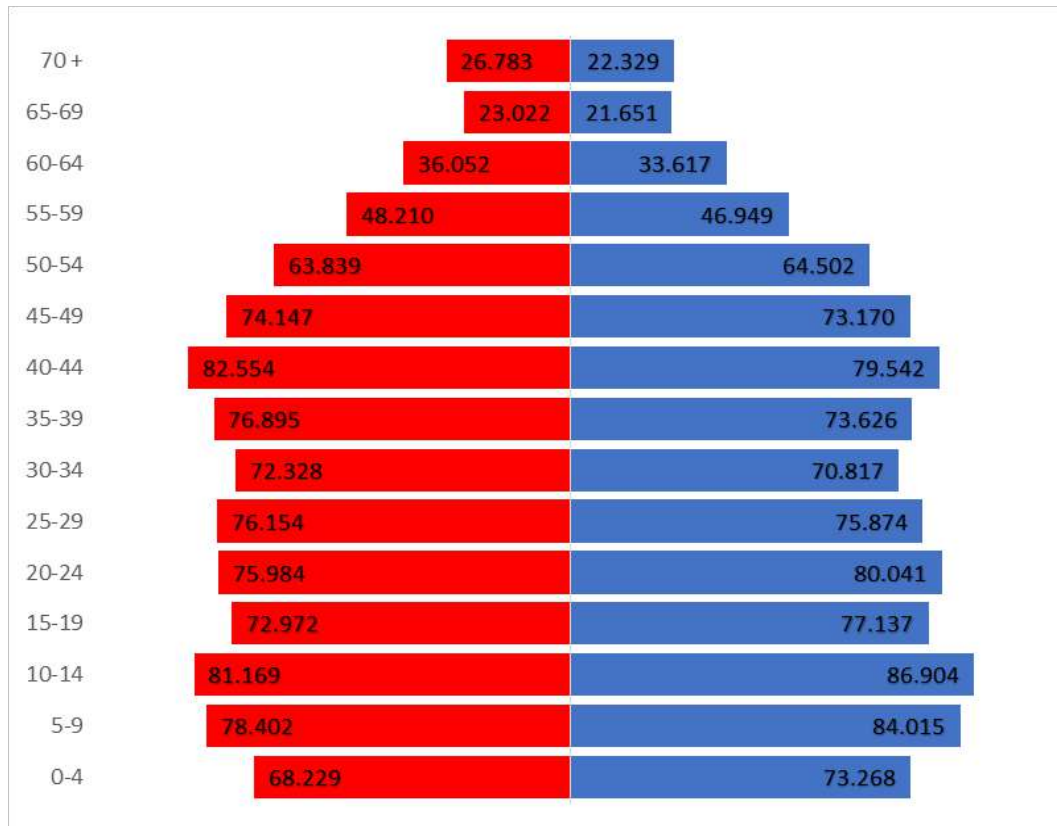
Gambar 4.7 Penduduk Kota Depok menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)

Karakter lain yang dimiliki piramida bentuk ini adalah umur median yang tinggi atau sangat tinggi, dengan rasio ketergantungan yang sangat rendah. Namun pada Tahun 2022, umur median penduduk Kota Depok masih termasuk kategori penduduk menengah atau *intermediate* dengan umur median 26,61 tahun, dan Rasio Ketergantungan Kota Depok walaupun sudah di bawah 50% yaitu 41,77 persen, kemungkinan masih bisa lebih rendah dari angka tersebut. Rasio Ketergantungan Kota Depok menunjukkan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif di Kota Depok



menanggung 41 sampai 42 jiwa penduduk non produktif baik non produktif muda (usia 0-14 tahun) maupun non produktif tua (65 tahun ke atas).



Gambar 4.8. Piramida Penduduk Kota Depok, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

4.1.2.1.1. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Wilayah Kecamatan

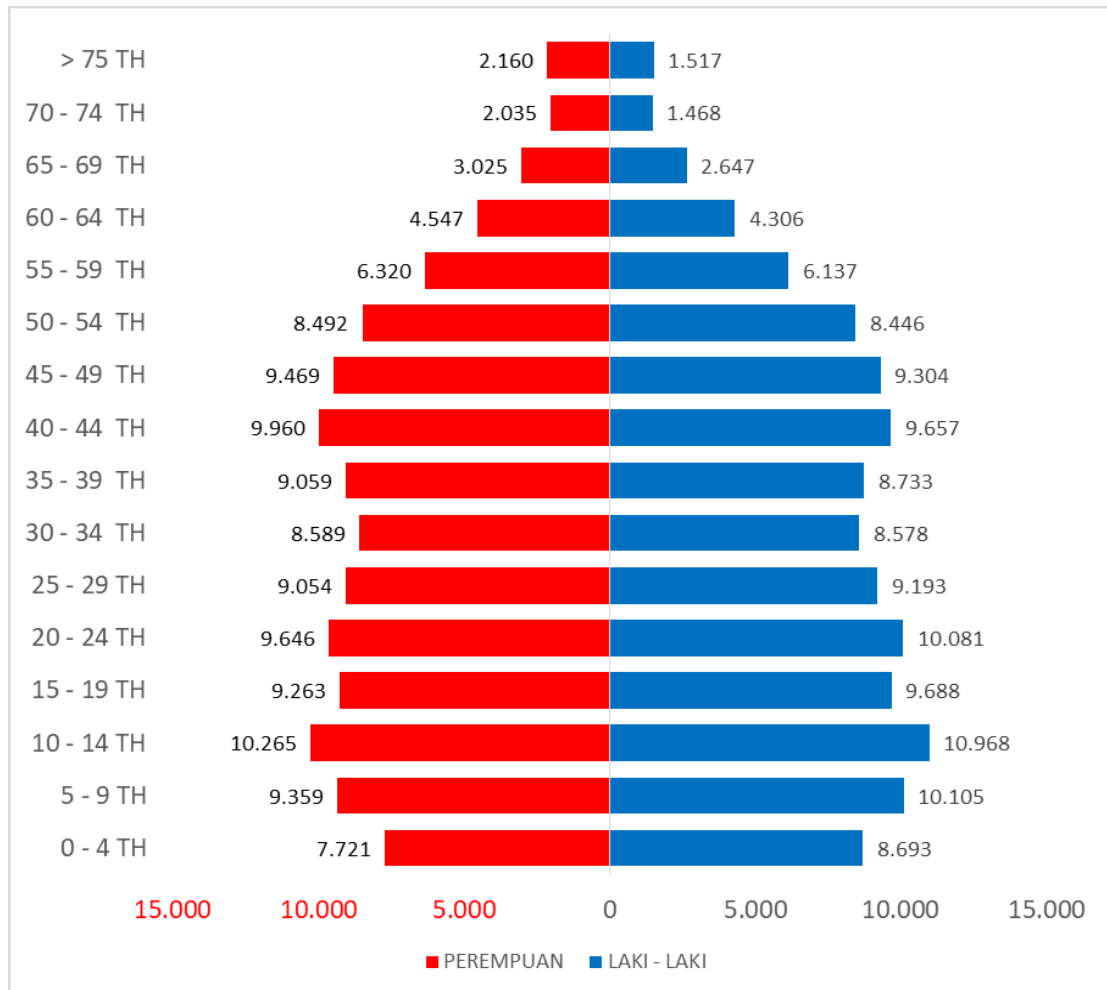
Secara administrasi pemerintahan, penduduk Kota Depok tersebar di sebelas kecamatan. Gambaran tentang penduduk menurut karakteristik demografi di tingkat kecamatan di Kota Depok disajikan sebagaimana tertera pada Gambar 4.9 sampai dengan Gambar 4.19 berikut.

1. Penduduk Kecamatan Pancoran Mas

Jumlah penduduk Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2022 sebesar 238.485 orang, terdiri dari 119.521 laki-laki dan 118.964 perempuan. Jumlah tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yaitu sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini mencapai 159.669 Jiwa. Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 57.111 Jiwa. Sedangkan penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sekitar 21.705 jiwa.



Gambar 4.9 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.9 Piramida Penduduk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Tahun 2022

Dari panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif di Kecamatan Pancoran Mas didominasi oleh kelompok umur 35-49 tahun, dimana kelompok umur ini menyumbang sekitar 56.182 jiwa atau hampir seperempat penduduk di kecamatan ini yaitu 23,56 persen dari total penduduk Kecamatan Pancoran Mas. Kecamatan ini juga terindikasi



mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 16.414 Jiwa (6,9 persen), lebih sedikit dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 19.464 (8,16 persen).

Selanjutnya, batang piramida juga tampak melebar pada penduduk perempuan usia 70 tahun ke atas dibandingkan batang piramida penduduk laki-laki pada usia yang sama. Jumlah penduduk perempuan umur 70 tahun ke atas sebesar 4.195 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 2.985 jiwa. Batang piramida penduduk usia 70 tahun ke atas relatif lebih lebar dibandingkan usia di bawahnya (65-69 tahun). Komposisi ini menunjukkan bahwa di masa depan, penduduk Kecamatan Pancoran Mas akan semakin cepat mengarah pada struktur penduduk tua, dan penduduk lanjut usia (lansia) perempuan relatif lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 24.339 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 12.946 siswa.

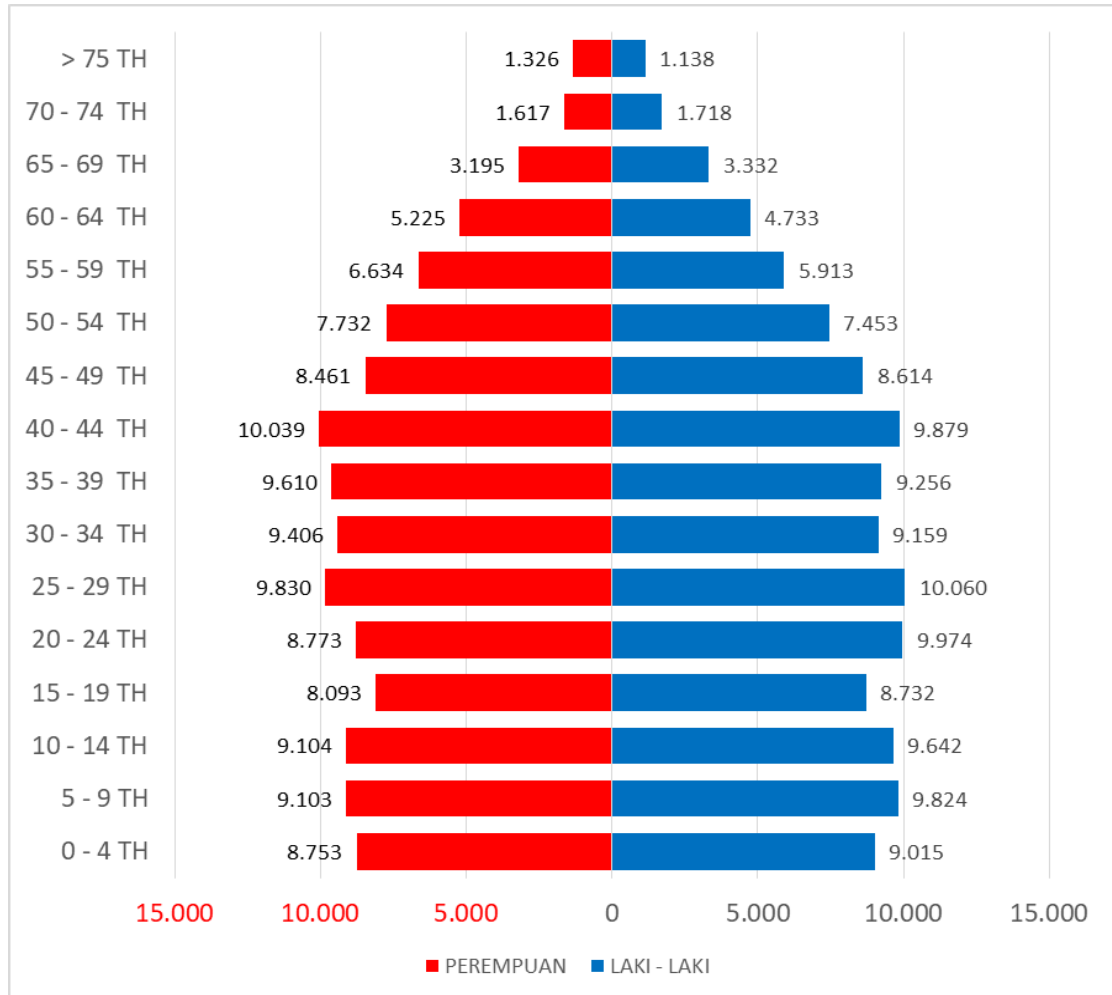
2. Penduduk Kecamatan Cimanggis

Jumlah penduduk di Kecamatan Cimanggis pada tahun 2022 sebesar 235.343 jiwa. Dengan RJK sebesar 101,32, artinya jumlah penduduk laki-laki (118.442 orang), lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (116.901 orang). Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yaitu sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini mencapai 157.618 jiwa (66,97 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 55.441 jiwa (23,56 persen). Sedangkan penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sekitar 22.284 jiwa (9,47 persen).

Gambar 4.10 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Cimanggis Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Cimanggis pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan



dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 17.768 (7,55 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 18.927 jiwa (8,04 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.10 Piramida Penduduk Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif di Kecamatan Cimanggis didominasi oleh kelompok umur dewasa yaitu 35-44 tahun, dimana kelompok umur ini menyumbang sekitar 38.784 jiwa (16,48 persen). Selain itu juga kelompok umur muda yaitu 25-29 tahun sebesar 19.890 (8,45 persen). Jika dijumlahkan dari ketiga kelompok umur produktif tersebut sekitar seperempat dari total penduduk Kecamatan Cimanggis. Pada kelompok umur produktif, batang piramida tampak menyempit pada kelompok umur 15-19 tahun, demikian pula pada



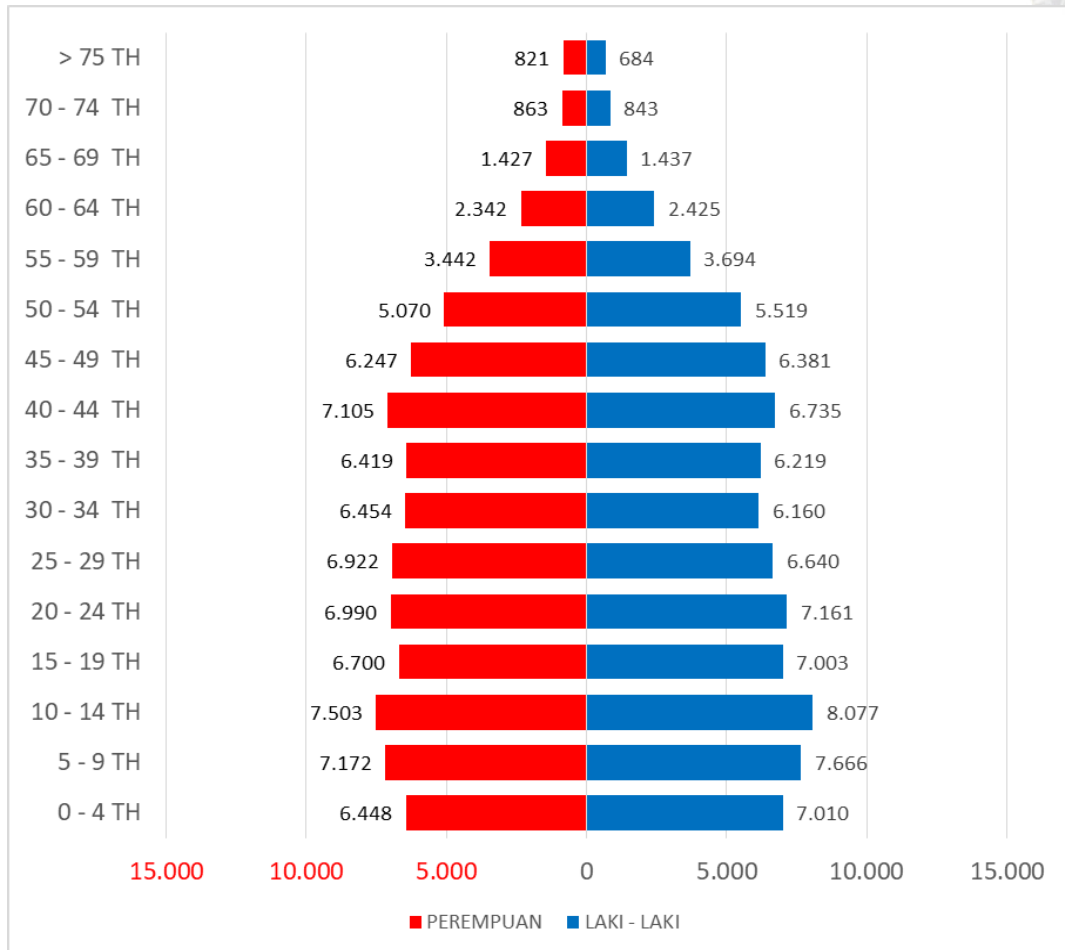
kelompok umur 20-24 tahun. Hal ini kemungkinan banyak migrasi keluar pada kedua kelompok umur produktif tersebut sehingga jumlah penduduk di kedua kelompok umur tersebut semakin berkurang.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 22.576 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 11.050 siswa.

3. Penduduk Kecamatan Sawangan

Jumlah penduduk di Kecamatan Sawangan pada tahun 2022 sebesar 165.579 Jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 83.654 jiwa, lebih banyak dibandingkan perempuan 81.925 jiwa dengan RJK 102 artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sebagaimana halnya di kecamatan lainnya di Kota Depok. jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 110.861 jiwa (66,95 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 43.876 (26,6 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sekitar 10.842 jiwa (6,55 persen).

Gambar 4.11 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Sawangan Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Sawangan pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 13.458 jiwa (8,13 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 14.838 (8,96 persen).

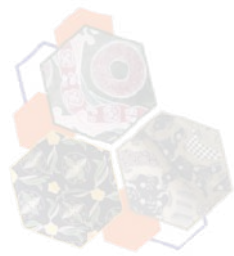


Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.11 Piramida Penduduk Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Tahun 2022

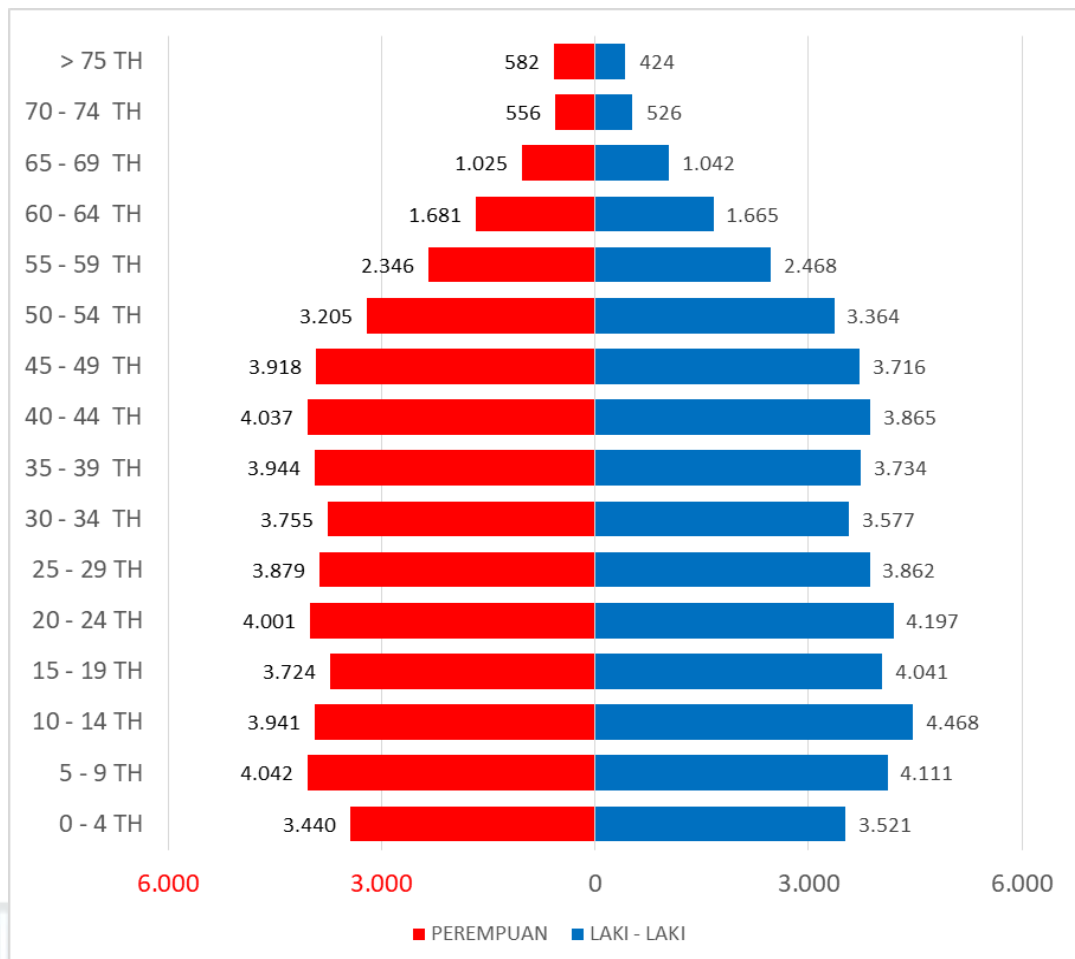
Dari panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif di Kecamatan Sawangan didominasi oleh kelompok umur produktif muda yaitu 15-29 tahun, dimana kelompok umur ini menyumbang sekitar 41.416 (25,01 persen) atau sekitar seperempat dari total penduduk di kecamatan ini. Selain itu juga kelompok umur dewasa yaitu 40-49 tahun sebesar 26.468 jiwa (15,99 persen). Pada kelompok umur produktif, batang piramida tampak menyempit pada kelompok umur 30-34 tahun, hal ini kemungkinan banyak migrasi keluar pada kelompok umur produktif tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 18.288 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 9.260 siswa.



4. Penduduk Kecamatan Limo

Jumlah penduduk di Kecamatan Limo pada tahun 2022 sebesar 96.657 orang. Jumlah penduduk laki-laki (48.581 orang), lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (48.076 orang). Rasio Jenis Kelamin 101, artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Sebagaimana halnya di kecamatan lainnya di Kota Depok. jumlah dan persentase penduduk di Kecamatan Limo, tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun) sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 65.633 jiwa (68,61 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 23.523 (24,59 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 7.501 jiwa (7,84 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.12 Piramida Penduduk Kecamatan Limo, Kota Depok, Tahun 2022



Gambar 4.12 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Limo Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Limo pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 6.961 jiwa (7,28 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 8.153 (8,52 persen).

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif di Kecamatan Limo didominasi oleh kelompok umur produktif dimana lebar batang piramida pada kelompok umur 35-39 tahun hingga 45-49 tahun, relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya, dan jika dijumlahkan mencapai 23.214 jiwa (24,27 persen) atau hampir seperempat dari total penduduk di kecamatan ini. Sedangkan pada kelompok umur 15-19 tahun hingga 30-34 tahun, lebar batang piramida relatif hampir sama, dan lebih pendek bila dibandingkan kelompok umur 5-14 tahun maupun umur 35-49 tahun. Selain itu, pada kelompok umur 20-24 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang berkurang kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Walaupun demikian, penduduk usia produktif 15-34 tahun adalah yang terbesar jumlahnya mencapai 31.036 jiwa (32,45 persen) atau hampir sepertiga dari total penduduk di kecamatan ini.

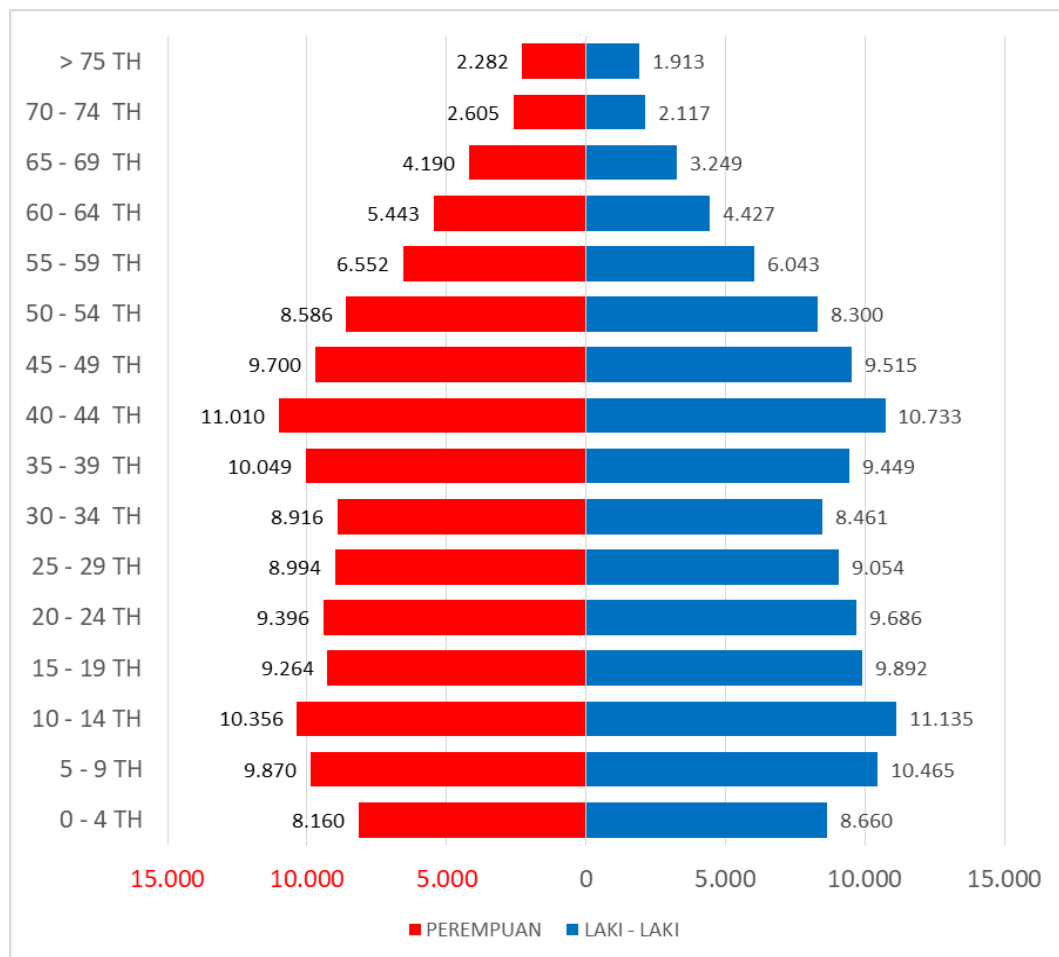
Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 9.987 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 4.996 siswa.

5. Penduduk Kecamatan Sukmajaya

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2022 sebesar 248.472 orang. Berbeda dengan kecamatan lainnya dimana jumlah penduduk



laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, di kecamatan ini, jumlah penduduk laki-laki 123.099 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan 125.373 orang. Rasio Jenis Kelamin 98, artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 98 laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), hampir dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 163.600 jiwa (65,84 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 58.646 jiwa (23,60 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 26.226 jiwa (10,55 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.13 Piramida Penduduk Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Tahun 2022

Gambar 4.13 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Sukmajaya Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan



kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 16.820 jiwa (6,77 persen), lebih sedikit dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 20.335 jiwa (8,18 persen).

Selain itu, batang piramida juga tampak melebar pada penduduk perempuan usia 70 tahun ke atas dibandingkan batang piramida penduduk laki-laki pada usia yang sama. Jumlah penduduk perempuan umur 70 tahun ke atas sebesar 4.887 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 4.030 jiwa. Batang piramida juga tampak melebar pada usia 70 tahun ke atas dibandingkan usia di bawahnya (65-69 tahun). Komposisi ini menunjukkan bahwa di masa depan, penduduk di kecamatan ini akan semakin cepat mengarah pada struktur penduduk tua, dan penduduk lanjut usia (lansia) perempuan relatif lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki.

Dari panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif kelompok umur 35-44 tahun memiliki batang piramida yang relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu. Di sisi lain, batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 30-34 tahun. Pada keempat kelompok umur tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di bawahnya yaitu 5-14 tahun maupun kelompok umur di atasnya yaitu 35-44 tahun. Selain itu pada kelompok umur 15-29 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain penduduk usia produktif muda lebih banyak meninggalkan kawasan ini, sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan dan kemudahan sarana transportasi yang memudahkan akses keluar masuk Kota Depok terutama di kecamatan ini. Walaupun demikian, penduduk usia produktif 15-34 tahun



adalah yang terbesar jumlahnya mencapai 73.663 jiwa (29,65 persen) atau lebih dari seperempat dari total penduduk di kecamatan ini.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 25.210 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 12.991 siswa.

6. Penduduk Kecamatan Beji

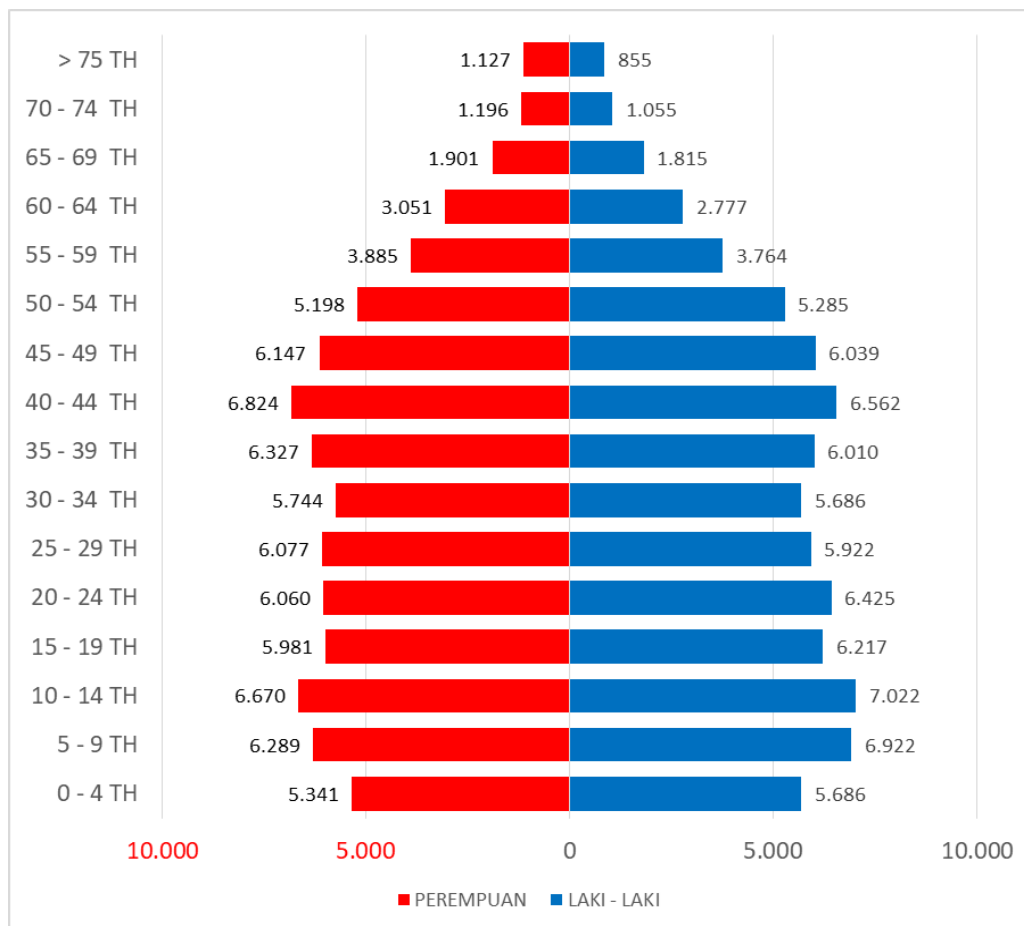
Jumlah penduduk di Kecamatan Beji pada tahun 2022 sebesar 155.860 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 78.042 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu 77.818 orang. Rasio Jenis Kelamin 100 artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 100 laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 104.153 jiwa (66,82 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 37.930 (24,34 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 13.777 jiwa (8,84 persen).

Gambar 4.14 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Beji Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Beji pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 11.027 jiwa (7,07 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 13.211 jiwa (8,48 persen).

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif kelompok umur 35-44 tahun memiliki batang piramida yang relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Sedangkan batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 30-34 tahun. Pada keempat kelompok umur tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di atasnya yaitu 35-44 tahun. Selain itu pada kelompok umur 15-29 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan. Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah



penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang.



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.14 Piramida Penduduk Kecamatan Beji, Kota Depok, Tahun 2022

Dibandingkan kelompok umur muda (15-34 tahun) sebesar 48.112 jiwa (30,87 persen), penduduk usia produktif dewasa (35-59 tahun), jumlahnya lebih banyak mencapai 56.041 jiwa (35,96 persen), terdiri dari kelompok umur 35-49 tahun sebesar 37.909 jiwa (24,32 persen) dan kelompok umur 50-59 tahun sebesar 18.132 jiwa (11,63 persen). Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu, sebaliknya, jumlah penduduk usia produktif muda lebih banyak yang bermigrasi keluar kawasan ini, sedangkan migrasi masuk ke kawasan kecamatan Beji didominasi oleh penduduk usia pekerja dewasa. Hal ini dimungkinkan karena Kota Depok merupakan kawasan penyangga ibukota yang



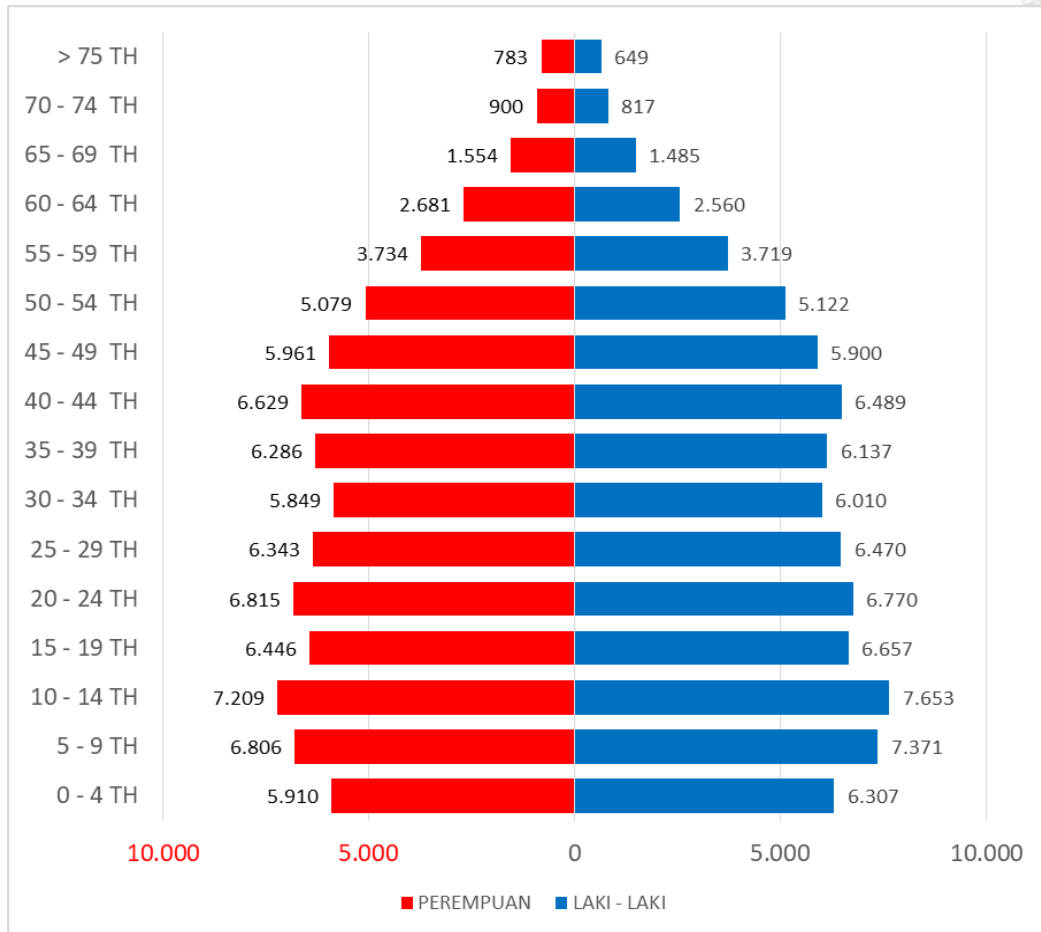
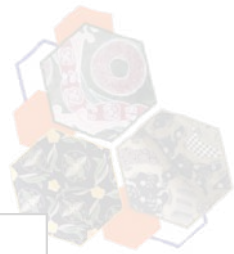
semakin berkembang sebagai pusat jasa dan bisnis sehingga memungkinkan untuk menarik orang-orang untuk mencari pekerjaan di kota ini. Kemungkinan lainnya adalah kemajuan sarana transportasi yang memudahkan akses keluar masuk Kota Depok sebagai pelaku komuter yang bekerja di luar Kota Depok namun bermukim di Kota Depok terutama di kecamatan ini.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 16.358 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 8.139 siswa.

7. Penduduk Kecamatan Cipayung

Jumlah penduduk di Kecamatan Cipayung pada tahun 2022 sebesar 159.101 orang. Jumlah penduduk laki-laki 80.116 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan 78.985 jiwa. Rasio Jenis Kelamin (RJK) 101, artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 106.416 jiwa (66,89 persen). Diikuti penduduk muda (0-14 tahun) 41.256 jiwa (25,93 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 11.429 jiwa (7,18 persen).

Gambar 4.15 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Cipayung Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Cipayung pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 12.217 (7,68 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 14.177 jiwa (8,91 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.15 Piramida Penduduk Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif di Kecamatan Cipayung, batang piramida kelompok umur 35-44 tahun, relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu. Di sisi lain, batang piramida tampak hampir sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 25-29 tahun. Sedangkan batang piramida umur 30-34 tahun relatif lebih sempit atau pendek. Selain itu pada kelompok umur 15-19 tahun dan 30-34 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang.



Selain itu, dengan kemajuan sarana transportasi dan kemudahan akses keluar masuk Kota Depok sebagai pelaku komuter yang bekerja di luar Kota Depok dan bermukim di Kota Depok memungkinkan banyaknya pekerja yang melakukan aktivitas migrasi keluar-masuk Kota Depok terutama di kecamatan Cipayung.

Berdasarkan panjang batang piramida dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk usia produktif di kecamatan Cipayung terkonsentrasi pada kelompok umur produktif muda yaitu 15-29 tahun mencapai 39.501 jiwa (24,83 persen) dan kelompok umur produktif dewasa yaitu 35-44 tahun sebesar 25.541 jiwa (16,05 persen).

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 17.493 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 8.915 siswa.

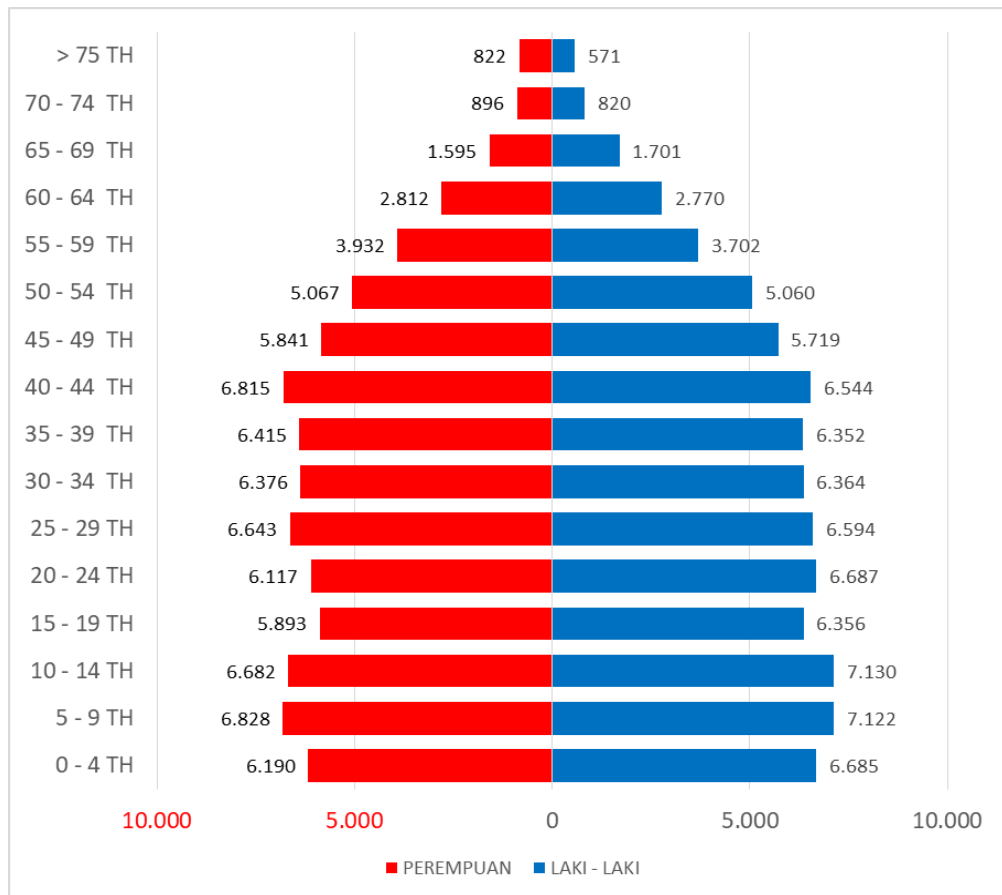
8. Penduduk Kecamatan Cilodong

Jumlah penduduk Kecamatan Cilodong pada tahun 2022 sebesar 159.101 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 80.177 orang, lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan 78.924 orang. Rasio Jenis Kelamin 102, artinya diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 106.477 (66,92 persen) atau melebihi dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini. Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 40.637 jiwa (25,54 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 11.987 jiwa (7,53 persen).

Gambar 4.16 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Cilodong Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Cilodong pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 12.875



jiwa (8,09 persen), lebih sedikit dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 13.950 jiwa (8,77 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.16 Piramida Penduduk Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa di Kecamatan Cilodong, batang piramida penduduk usia produktif kelompok umur 35-44 tahun, relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Sedangkan batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 30-34 tahun, dan sedikit lebih panjang pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada keempat kelompok umur tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di atasnya yaitu 35-44 tahun. Selain itu pada kelompok umur 20-24 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut



sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Walaupun demikian usia produktif di Kecamatan Cilodong sebagian besar masih terkonsentrasi pada kelompok umur produktif muda yaitu 15-34 tahun yang jumlahnya mencapai 51.030 jiwa (32,07 persen) atau hampir sepertiga dari total penduduk di kecamatan ini.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 16.606 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 8.254 siswa.

9. Penduduk Kecamatan Cinere

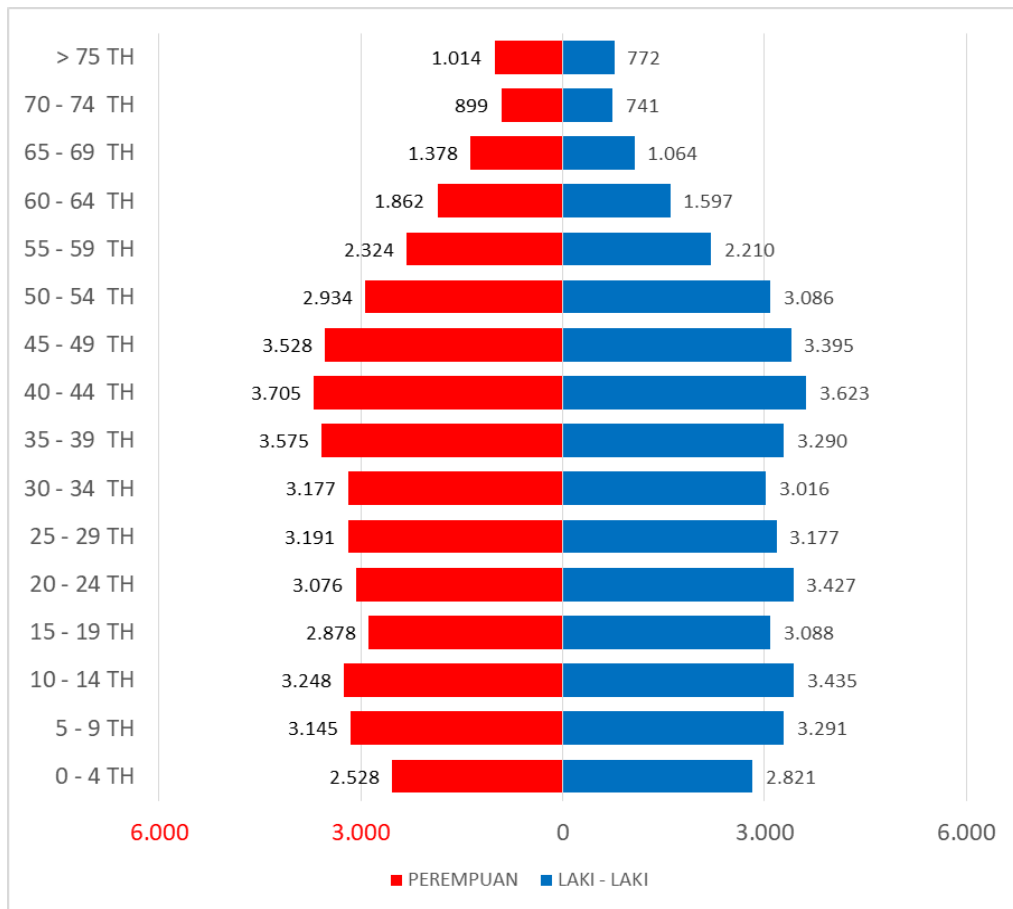
Jumlah penduduk di Kecamatan Cinere pada tahun 2022 sebesar 84.495 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 42.033 orang, sedikit di bawah jumlah penduduk perempuan 42.462 orang. Rasio Jenis Kelamin 99, artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 99 laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), sekitar dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 56.700 jiwa (67,10 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 18.468 jiwa (21,86 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 9.327 jiwa (11,04 persen).

Persentase penduduk lansia di Kecamatan Cinere, tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, artinya, jumlah penduduk lansia di kecamatan ini cukup banyak dibandingkan kelompok umur lainnya. Namun dari sisi jumlah, penduduk lansia di Kecamatan Cinere tidak sebanyak penduduk lansia di kecamatan lainnya kecuali Kecamatan Limo dan Bojongsari yang jumlah penduduk lansianya lebih sedikit dibandingkan di Kecamatan Cinere.

Gambar 4.17 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Cinere Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Cinere pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 5.349 jiwa



(6,33 persen), lebih sedikit dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 6.436 jiwa (7,62 persen).

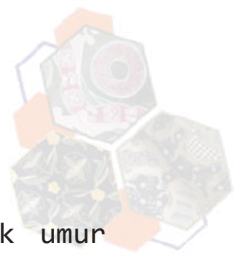


Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.17 Piramida Penduduk Kecamatan Cinere, Kota Depok, Tahun 2022

Selain itu, batang piramida juga tampak melebar pada penduduk perempuan usia 70 tahun ke atas dibandingkan batang piramida penduduk laki-laki pada usia yang sama. Jumlah penduduk perempuan umur 70 tahun ke atas sebesar 1.913 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 1.513 jiwa. Batang piramida juga tampak melebar pada usia 70 tahun ke atas dibandingkan usia di bawahnya (65-69 tahun). Komposisi ini menunjukkan bahwa di masa depan, penduduk Kecamatan Cinere akan semakin cepat mengarah pada struktur penduduk tua, dan penduduk lanjut usia (lansia) perempuan relatif lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki.

Panjang batang piramida juga menunjukkan gambaran secara umum penduduk usia produktif di kecamatan ini dimana batang piramida kelompok



umur 35-49 tahun, relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran di masa lalu. Di sisi lain, batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 30-34 tahun. Pada keempat kelompok umur tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di atasnya yaitu 35-49 tahun. Selain itu pada kelompok umur 15-19 tahun, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Walaupun demikian usia produktif di Kecamatan ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada kelompok umur produktif muda yaitu 15-34 tahun yang jumlahnya mencapai 25.030 jiwa (29,62 persen) atau melebihi seperempat dari total penduduk di kecamatan ini.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 7.947 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 3.953 siswa.

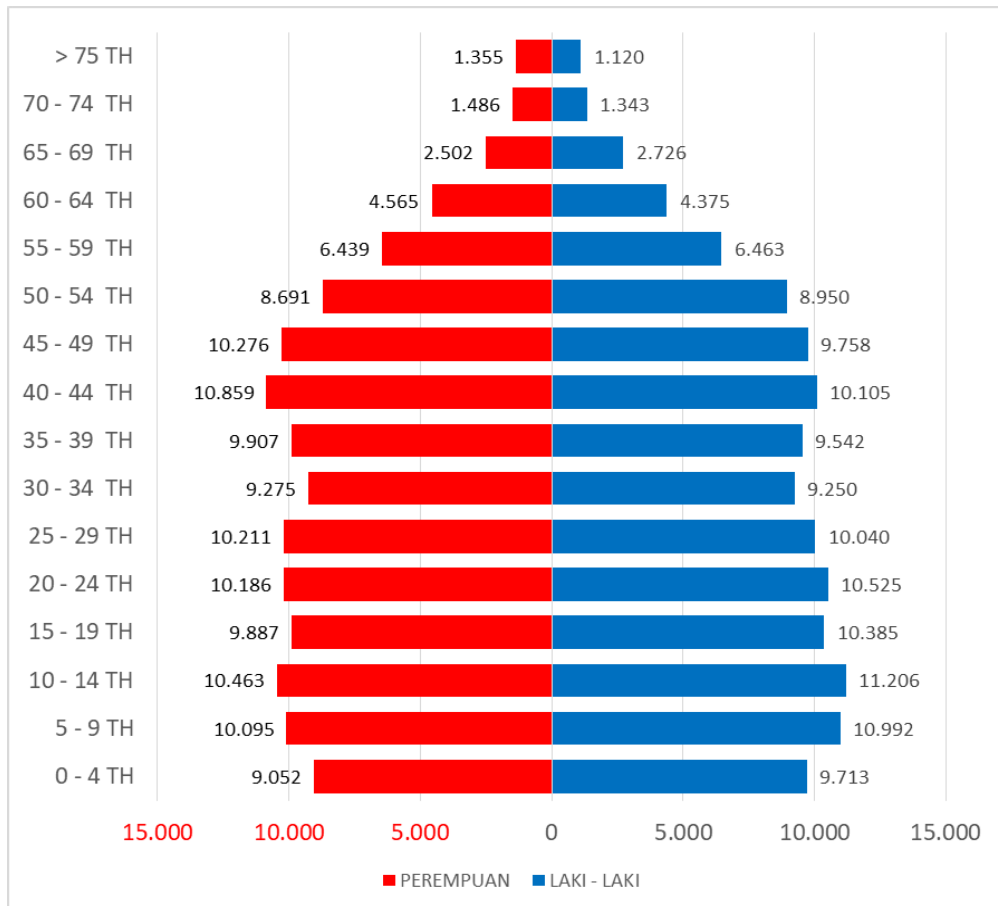
10. Penduduk Kecamatan Tapos

Jumlah penduduk di Kecamatan Tapos pada tahun 2022 sebesar 251.742 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 126.493 orang, lebih banyak dibandingkan perempuan 125.249 orang. Rasio Jenis Kelamin 101, artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 101 laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), melebihi dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu 170.749 jiwa (67,83 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 61.521 jiwa (24,44 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 19.472 jiwa (7,73 persen).

Gambar 4.18 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Tapos Tahun 2021. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Tapos pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk



kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 18.765 jiwa (7,45 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 21.087 jiwa (8,38 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.18 Piramida Penduduk Kecamatan Tapos, Kota Depok, Tahun 2022

Berdasarkan panjang batang piramida tampak bahwa penduduk usia produktif kelompok umur 35-49 tahun memiliki batang piramida yang relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran di masa lalu. Di sisi lain, batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 25-29 tahun, dan sedikit menyempit pada kelompok umur 30-34 tahun. Pada keempat kelompok umur



tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di bawahnya yaitu 5-14 tahun maupun kelompok umur di atasnya yaitu 35-49 tahun. Selain itu pada beberapa kelompok umur, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Walaupun demikian usia produktif di kecamatan ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada kelompok umur produktif muda yaitu 15-34 tahun yang jumlahnya mencapai 79.759 jiwa (31,68 persen) atau hampir sepertiga dari total penduduk di kecamatan ini. Sedangkan kelompok umur dewasa (35-49 tahun) jumlahnya lebih sedikit yaitu 60.447 jiwa (24,01 persen).

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 25.767 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 13.132 siswa.

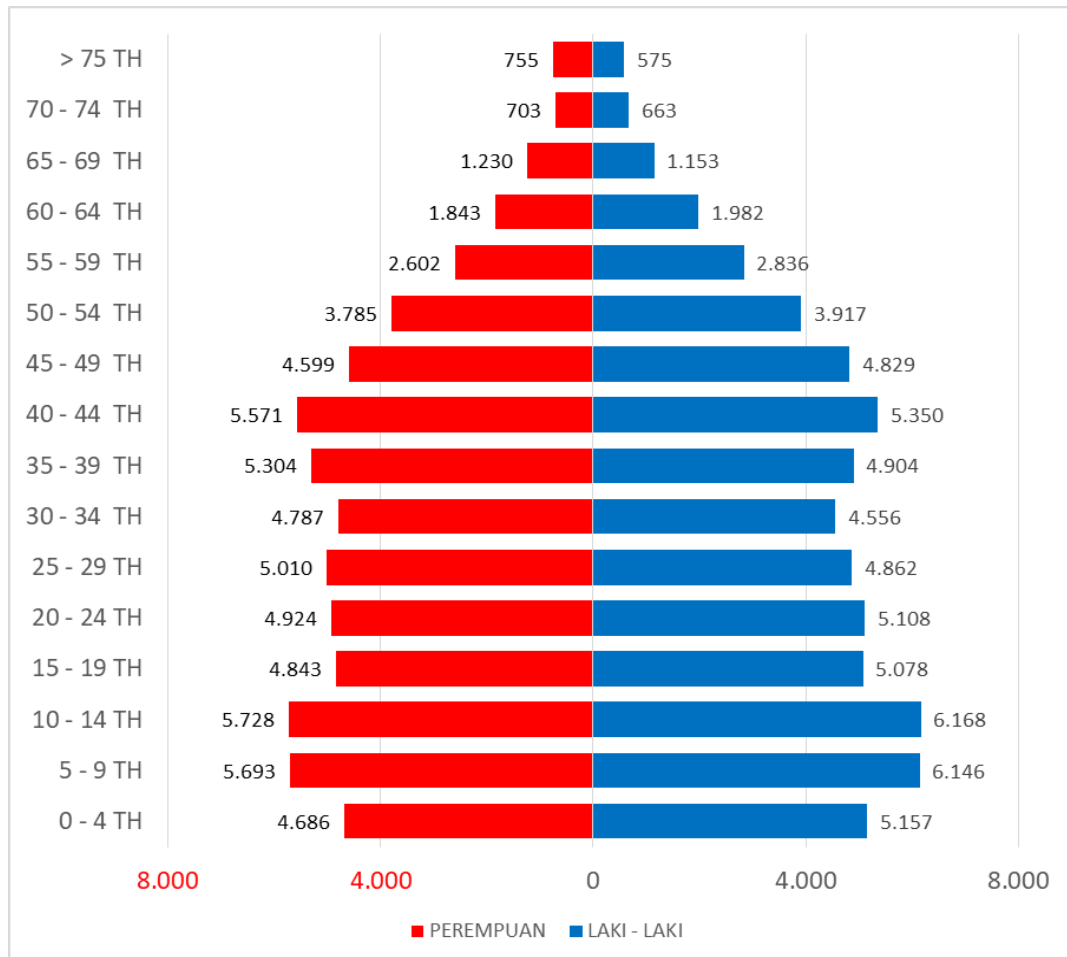
11. Penduduk Kecamatan Bojongsari

Jumlah penduduk di Kecamatan Bojongsari pada tahun 2022 sebesar 125.347 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 63.284 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan 62.063 orang. Rasio Jenis Kelamin 102, artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah dan persentase tertinggi adalah penduduk usia produktif (15-59 tahun), hampir dua pertiga dari total penduduk di kecamatan ini yaitu sekitar 82.865 jiwa (66,11 persen). Diikuti penduduk usia muda (0-14 tahun) 33.578 jiwa (26,79 persen). Sedangkan jumlah dan persentase penduduk lansia (60 tahun ke atas) adalah yang terendah sebesar 8.904 jiwa (7,10 persen). Penduduk lansia di kecamatan ini tercatat lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain di Kota Depok kecuali Kecamatan Limo dengan jumlah penduduk lansia terendah.

Gambar 4.19 menunjukkan piramida penduduk Kecamatan Bojongsari Tahun 2022. Piramida tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di Kecamatan Bojongsari pada tahun 2022 tergolong penduduk tua dengan kelahiran dan kematian bayi yang rendah, dimana terlihat batang piramida untuk kelompok usia 0-4 tahun lebih sempit, dan semakin melebar pada



kelompok umur di atasnya (5-9 tahun) dan (10-14 tahun). Kecamatan ini juga terindikasi mengalami penurunan tingkat kelahiran yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk umur 0-4 tahun sebesar 9.843 jiwa (7,85 persen), lebih banyak dibandingkan penduduk umur 5-9 tahun yaitu 11.839 jiwa (9,44 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.19 Piramida Penduduk Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Tahun 2022

Batang piramida juga tampak sedikit melebar pada penduduk perempuan usia 70 tahun ke atas dibandingkan batang piramida penduduk laki-laki pada usia yang sama. Jumlah penduduk perempuan umur 70 tahun ke atas sebesar 1.458 jiwa, lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 1.238 jiwa. Batang piramida juga tampak sedikit melebar pada usia 70 tahun ke atas dibandingkan usia di bawahnya (65-69 tahun). Komposisi ini menunjukkan bahwa di masa depan, penduduk Kecamatan Bojongsari



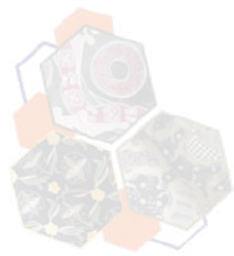
relatif mengarah pada struktur penduduk tua, dan penduduk lanjut usia (lansia) perempuan relatif lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki.

Berdasarkan panjang batang piramida juga menunjukkan gambaran secara umum penduduk usia produktif di kecamatan ini dimana batang piramida kelompok umur 35-44 tahun, relatif lebih panjang dibandingkan kelompok umur produktif lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran di masa lalu. Di sisi lain, batang piramida tampak sama panjang di kelompok umur produktif muda 15-19 tahun hingga 30-34 tahun. Pada keempat kelompok umur tersebut batang piramida relatif lebih pendek dibandingkan kelompok umur di bawahnya yaitu 5-14 tahun maupun kelompok umur di atasnya yaitu 35-44 tahun. Selain itu pada beberapa kelompok umur, batang piramida penduduk laki-laki lebih lebar dibandingkan perempuan.

Batang piramida yang lebih sempit atau pendek menunjukkan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit kemungkinan disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar pada kelompok umur tersebut sehingga jumlah penduduk di kelompok umur tersebut semakin berkurang. Walaupun demikian usia produktif di Kecamatan ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada kelompok umur produktif muda yaitu 15-34 tahun yang jumlahnya mencapai 39.168 jiwa (31,25 persen) atau hampir sepertiga dari total penduduk di kecamatan ini.

Jika dilihat menurut kelompok umur sekolah, jumlah penduduk usia SD 7-12 tahun mencapai 14.512 siswa. Diikuti 13-15 tahun sebesar 6.890 siswa.





4.1.2.1.2. Umur Median (*Median Age*)

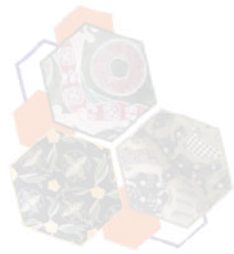
Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama: bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Umur median penduduk suatu wilayah dibagi menurut kategori berikut:

- a. Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
- b. Penduduk intermediate, jika umur median antara 20 tahun sampai 30 tahun ($20 \text{ tahun} < \text{median} < 30 \text{ tahun}$);
- c. Penduduk tua jika umur median > 30 tahun.

Umur median penduduk kota Depok pada Tahun 2022 adalah 26,61 tahun, yang berarti setengah dari penduduk Kota Depok pada Tahun 2022 berusia antara 20 sampai 30 tahun. Berdasarkan perhitungan umur median, penduduk Kota Depok termasuk kategori penduduk Intermediate.

4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Salah satu aspek dari komposisi penduduk adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya disebut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Sex ratio adalah angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan menurut banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin dengan angka lebih besar dari 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki, sebaliknya, rasio jenis kelamin kurang dari 100 berarti lebih banyak penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk kota Depok Tahun 2022 adalah 101, artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.



Tabel 4.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan, ,
Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Laki - Laki	Perempuan		
PANCORAN MAS	119.521	118.964	238.485	100
CIMANGGIS	118.442	116.901	235.343	101
SAWANGAN	83.654	81.925	165.579	102
LIMO	48.581	48.076	96.657	101
SUKMAJAYA	123.099	125.373	248.472	98
BEJI	78.042	77.818	155.860	100
CIPAYUNG	80.116	78.985	159.101	101
CILODONG	80.177	78.924	159.101	102
CINERE	42.033	42.462	84.495	99
TAPOS	126.493	125.249	251.742	101
BOJONGSARI	63.284	62.063	125.347	102
KOTA DEPOK	963.442	956.740	1.920.182	101

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)

Di tingkat Kecamatan kecamatan pada Tahun 2022, Rasio Jenis Kelamin tertinggi yaitu 102 adalah di Kecamatan Sawangan, artinya di setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Sawangan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Sawangan lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, Rasio Jenis Kelamin terendah yaitu 98 adalah di Kecamatan Sukmajaya, artinya di setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Sukmajaya terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Sukmajaya lebih sedikit dibandingkan perempuan.

Di tingkat kelurahan, Rasio Jenis Kelamin (RJK) tertinggi adalah Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong sebesar 108, artinya dari 100 perempuan terdapat 108 laki-laki, dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. RJK tertinggi kedua



yaitu sebesar 103 terdapat di dua kelurahan yaitu Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos dan Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari, yang berarti dari 100 perempuan di dua kelurahan tersebut terdapat 103 laki-laki, dengan kata lain penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, RJK terendah adalah di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas sebesar 93, artinya dari 100 perempuan di kelurahan tersebut terdapat 93 laki-laki, dengan kata lain penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 4.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan, Kota Depok, Tahun 2022

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
01-Pancoran Mas	1006-Depok	22.604	22.432	45.036	101
	1007-Depok Jaya	11.862	12.785	24.647	93
	1008-Pancoran Mas	31.674	31.196	62.870	102
	1009-Mampang	13.541	13.378	26.919	101
	1010-Rangkapan Jaya Baru	19.320	19.089	38.409	101
	1011-Rangkapan Jaya	20.520	20.084	40.604	102
Jumlah		119.521	118.964	238.485	100
02-Cimanggis	1007-Harjamukti	11.943	12.001	23.944	100
	1008-Curug	11.082	11.144	22.226	99
	1009-Tugu	42.540	42.315	84.855	101
	1010-Mekarsari	23.363	23.570	46.933	99
	1011-Pasir Gunung Selatan	17.350	15.759	33.109	110
	1012-Cisalak Pasar	12.164	12.112	24.276	100
Jumlah		118.442	116.901	235.343	101
03-Sawangan	1001-Pasir Putih	14.701	14.309	29.010	103
	1002-Bedahan	16.740	16.343	33.083	102
	1003-Pengasinan	13.956	13.707	27.663	102
	1009-Cinangka	10.410	10.200	20.610	102
	1010-Sawangan	10.201	9.941	20.142	103
	1011-Sawangan Baru	9.293	9.217	18.510	101
1012-Kedaung	8.353	8.208	16.561	102	
Jumlah		83.654	81.925	165.579	102
04-Limo	1001-Meruyung	10.257	10.012	20.269	102
	1002-Grogol	14.002	13.905	27.907	101
	1003-Krukut	8.107	8.011	16.118	101
	1004-Limo	16.215	16.148	32.363	100
Jumlah		48.581	48.076	96.657	101



Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
05-Sukmajaya	1001-Sukmajaya	16.663	16.867	33.530	99
	1003-Abadijaya	29.826	30.287	60.113	98
	1004-Mekarjaya	28.323	29.622	57.945	96
	1005-Baktijaya	28.528	28.964	57.492	98
	1008-Cisalak	8.573	8.610	17.183	100
	1010-Tirtajaya	11.186	11.023	22.209	101
Jumlah		123.099	125.373	248.472	98
06-Beji	1001-Beji	23.818	23.926	47.744	100
	1002-Kukusan	9.193	9.114	18.307	101
	1003-Tanah Baru	17.069	17.328	34.397	99
	1004-Kemirimuka	16.216	15.858	32.074	102
	1005-Pondok Cina	6.200	6.039	12.239	103
	1006-Beji Timur	5.546	5.553	11.099	100
Jumlah		78.042	77.818	155.860	100
07-Cipayung	1001-Cipayung	15.811	15.585	31.396	101
	1002-Cipayung Jaya	10.465	10.358	20.823	101
	1003-Ratu Jaya	20.898	20.871	41.769	100
	1004-Bojong Pondok Terong	18.797	18.349	37.146	102
	1005-Pondok Jaya	14.145	13.822	27.967	102
Jumlah		80.116	78.985	159.101	101
08-Cilodong	1001-Sukamaju	34.223	34.346	68.569	100
	1002-Cilodong	11.031	10.253	21.284	108
	1003-Kalibaru	15.847	15.470	31.317	102
	1004-Kalimulya	11.008	10.879	21.887	101
	1005-Jatimulya	8.068	7.976	16.044	101
Jumlah		80.177	78.924	159.101	102
09-Cinere	1001-Cinere	16.002	16.224	32.226	99
	1002-Gandul	12.349	12.461	24.810	99
	1003-Pangkalan Jati	8.607	8.652	17.259	99
	1004-Pangkalan Jati Baru	5.075	5.125	10.200	99
Jumlah		42.033	42.462	84.495	99
10-Tapos	1001-Tapos	8.483	8.440	16.923	101
	1002-Leuwinanggung	6.802	6.652	13.454	102
	1003-Sukatani	27.991	28.232	56.223	99
	1004-Sukamaju Baru	22.609	22.286	44.895	101
	1005-Jatijajar	19.631	19.072	38.703	103
	1006-Cilangkap	27.638	27.675	55.313	100
	1007-Cimpaeun	13.339	12.892	26.231	103
Jumlah		126.493	125.249	251.742	101



Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
11-Bojongsari	1001-Bojongsari	8.367	8.205	16.572	102
	1002-Bojongsari Baru	5.916	5.731	11.647	103
	1003-Serua	10.085	9.747	19.832	103
	1004-Pondok Petir	11.652	11.787	23.439	99
	1005-Curug	11.973	11.633	23.606	103
	1006-Duren Mekar	9.046	8.886	17.932	102
	1007-Duren Seribu	6.245	6.074	12.319	103
Jumlah		63.284	62.063	125.347	102
Jumlah Total		963.442	956.740	1.920.182	101

Sumber Data : Disdukcapil (DKB Semester 2 Tahun 2022)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Rasio jenis kelamin waktu lahir (sex ratio at birth). Para demografer mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir adalah berkisar antara 103-105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- 2) Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jika kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan maka rasio jenis kelamin semakin kecil. Ini bisa terjadi misalnya di suatu daerah dengan pekerjaan yang berbahaya bagi laki-laki seperti pertambangan dan peperangan.
- 3) Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jika suatu daerah memiliki rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk perempuan yang mungkin disebabkan karena banyaknya penduduk laki-laki yang bermigrasi ke luar dari wilayah tersebut.

4.1.2.1.4. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau 'rasio beban tanggungan' dalam studi demografi disebut juga *age dependency ratio*. Rasio ini merupakan perbandingan antara penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan dapat menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja.



Nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Dikenal tiga jenis Rasio Ketergantungan yaitu:

1. Rasio Ketergantungan Muda (*Youth Dependency Ratio*)
2. Rasio Ketergantungan Tua (*Elderly Dependency Ratio*)
3. Rasio Ketergantungan Total (*Total Dependency Ratio*) atau lebih dikenal dengan Rasio Ketergantungan.

Kedua rasio ketergantungan (usia muda dan usia lanjut) dapat digunakan untuk mengetahui kelompok umur mana yang berkontribusi paling besar/sedikit dalam rasio ketergantungan total

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, Rasio Ketergantungan penduduk Kota Depok adalah 41,77 per 100 penduduk usia produktif, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif Kota Depok mempunyai tanggungan 42 penduduk usia non-produktif,. Rasio Ketergantungan Muda sebesar 35,03 dan Rasio Ketergantungan Tua sebesar 6,66. Ini artinya, 42 penduduk usia non-produktif yang harus ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif terdiri dari 35 penduduk usia muda (0-14 tahun) dan 7 penduduk usia tua atau lanjut (65 tahun ke atas).

Tabel 4.6
Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan, Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah	Rasio Ketergantungan
	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	>= 65 Tahun		
Pancoran Mas	57.111	168.522	12.852	238.485	41,52
Cimanggis	55.441	167.576	12.326	235.343	40,44
Sawangan	43.876	115.628	6.075	165.579	43,20
Limo	23.523	68.979	4.155	96.657	40,13
Sukmajaya	58.646	173.470	16.356	248.472	43,24
Beji	37.930	109.981	7.949	155.860	41,72
Cipayung	41.256	111.657	6.188	159.101	42,49
Cilodong	40.637	112.059	6.405	159.101	41,98
Cinere	18.468	60.159	5.868	84.495	40,45
Tapos	61.521	179.689	10.532	251.742	40,10
Bojongsari	33.578	86.690	5.079	125.347	44,59
Jumlah	471.987	1.354.410	93.785	1.920.182	41,77

Sumber: Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022



Tabel 4.7.
Rasio Ketergantungan, Kota Depok, Tahun 2022

Kelompok Umur	Penduduk			Rk	Ket
	Laki-Laki	Perempuan	Jmlh		
0 - 14 Th (Usia Muda)	244.187	227.800	471.987	34,85	Rk Muda
15 - 64 Th (Usia Produktif)	675.275	679.135	1.354.410	41,77	Rk Total
>= 65 Th (Usia Tua)	43.980	49.805	93.785	6,92	Rk Tua
Jumlah	963.442	956.740	1.920.182		

Sumber: *Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022*

4.1.2.2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Status kawin, peristiwa perkawinan pertama, cerai, pisah, menjadi janda, rujuk atau menikah kedua kali dan seterusnya merupakan aspek penting dalam kependudukan. Usia kawin pertama menjadi penting karena menandakan saat dimana seseorang memasuki masa reproduksi untuk yang pertama kali. Status kawin penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelahiran. Umur kawin pertama yang rendah dan rendahnya pendidikan perempuan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kelahiran. Untuk itu, informasi penduduk menurut status perkawinan menjadi penting dalam analisa kependudukan.

Selain dapat mempengaruhi jumlah penduduk melalui kelahiran, perkawinan dapat mengubah komposisi penduduk, yakni perubahan status perkawinan itu sendiri. Status perkawinan merupakan suatu karakteristik demografi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, biologis, hukum dan agama. Dari sisi aspek biologis dapat diteliti kapan seorang perempuan mulai melakukan hubungan seksual pertama kali, kapan hubungan seksual tersebut berakhir, dan kapan mempunyai risiko hamil/melahirkan. Perubahan status perkawinan seseorang dari status bujangan/belum menikah menjadi berstatus menikah, dari status menikah menjadi janda, bercerai atau berpisah membawa konsekuensi sosial dan ekonomi tersendiri. Perubahan status perkawinan dapat menyebabkan perubahan tempat tinggal yang selanjutnya berpengaruh terhadap migrasi, perubahan partisipasi angkatan kerja atau perubahan pendidikan. Perempuan yang telah menikah seringkali lebih memilih untuk mengurus rumah tangga daripada bekerja atau melanjutkan pendidikan.



Secara demografis perkawinan merupakan peristiwa berkurangnya secara perlahan jumlah penduduk muda yang belum menikah ke jenjang pernikahan dan kemudian berkurang secara drastis pada usia yang dianggap pantas untuk menikah (Bogue, 1969). Perilaku perkawinan dapat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk, terutama komposisi umur laki-laki dan perempuan pada usia pantas kawin.

4.1.2.2.1. Penduduk menurut Status Kawin

Sensus atau survei Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengkategorikan status perkawinan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut:

1. Belum kawin, yaitu penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang belum pernah menikah, termasuk penduduk yang hidup selibat atau tidak pernah kawin.
2. Kawin adalah mereka yang kawin secara hukum (adat, negara, dan agama) dan mereka yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
3. Cerai Hidup adalah mereka yang bercerai dari suami/isteri dan belum melakukan perkawinan ulang.
4. Cerai Mati adalah mereka yang suami/isterinya meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang.

Status perkawinan tersebut digunakan dalam Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kota Depok Semester 2 Tahun 2022.

Gambar 4.7 menunjukkan distribusi penduduk menurut status perkawinan di Kota Depok pada Tahun 2022 yaitu 46,71 persen penduduk berstatus kawin, 47,51 persen berstatus belum kawin, 4,32 persen sisanya bersatus cerai mati, dan 1,46 hidup cerai hidup.

Tabel 4.8
Distribusi Penduduk Menurut Status Perkawinan, Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Status Perkawinan				Jumlah Penduduk
	Blm Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Pancoran Mas	114.337	109.175	3.643	11.330	238.485
Cimanggis	109.992	111.632	3.285	10.434	235.343

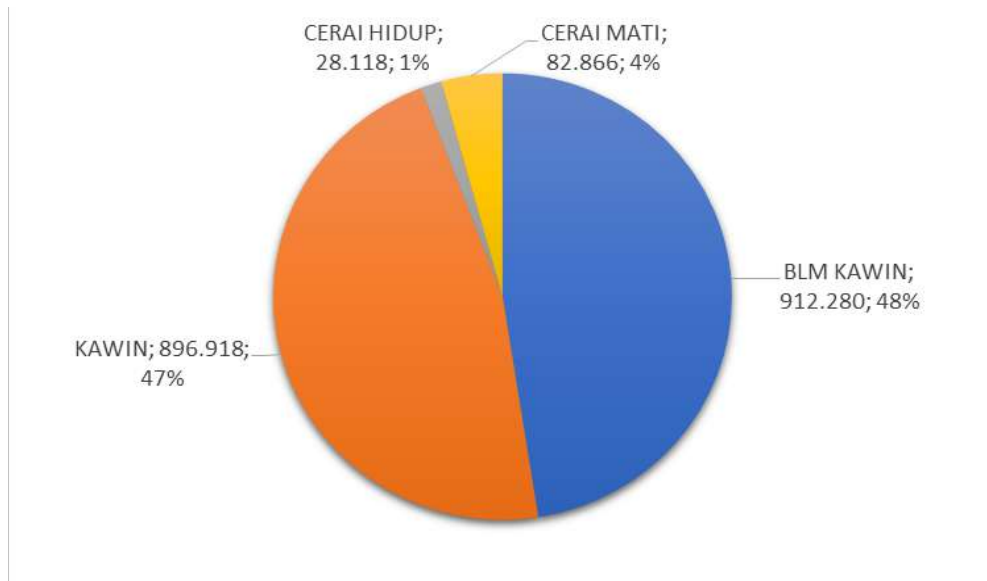
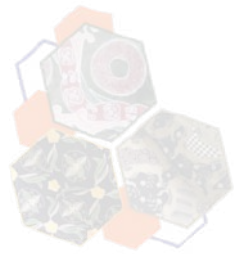


Sawangan	79.641	78.142	2.171	5.625	165.579
Limo	45.743	45.904	1.325	3.685	96.657
Sukmajaya	118.227	113.217	4.409	12.619	248.472
Beji	74.792	71.428	2.624	7.016	155.860
Cipayung	77.065	72.948	2.186	6.902	159.101
Cilodong	76.239	74.592	2.024	6.246	159.101
Cinere	38.813	40.317	1.452	3.913	84.495
Tapos	117.423	120.093	3.516	10.710	251.742
Bojongsari	60.008	59.470	1.483	4.386	125.347
Jumlah	912.280	896.918	28.118	82.866	1.920.182

Sumber: Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Jika dilihat secara proporsi, tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara distribusi status perkawinan Kota Depok dengan distribusi status perkawinan di tingkat kecamatan. Hal yang sama juga berlaku untuk distribusi penduduk menurut status perkawinan antar kecamatan yang ada di Kota Depok. Namun jika dilihat secara absolut, jumlah penduduk paling banyak adalah di Kecamatan Tapos sebesar 251.742 orang, sedangkan yang berstatus kawin paling banyak bermukim di Kecamatan Tapos sebesar 120.093 orang, dan paling sedikit di Kecamatan Cinere 40.317 orang. Proporsi tertinggi penduduk berstatus kawin adalah di Kecamatan Cinere yaitu 47,72 persen, sedangkan proporsi terendah penduduk berstatus kawin bukan di Kecamatan Cinere tetapi di Kecamatan Sukmajaya yaitu 45,57 persen. Penduduk bestatus belum kawin paling banyak bermukim di Kecamatan Sukmajaya 118.227 orang, dan paling sedikit di Kecamatan Cinere 38.813 orang. Proporsi tertinggi penduduk belum kawin adalah di Kecamatan Cipayung 48,44 persen, dan terendah di Kecamatan Cinere 45,94 persen.

Sedangkan yang berstatus cerai mati, paling banyak di Kecamatan Sukmajaya 12.619 orang, dan paling sedikit di Kecamatan Limo 3.685 orang. Penduduk berstatus cerai hidup paling banyak di Kecamatan Sukmajaya 4.409 orang, dan paling sedikit di Kecamatan Limo 1.325 orang.



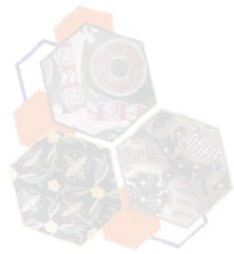
Gambar 4.20. Penduduk Menurut Status Kawin, Kota Depok Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Jika Mengacu pada data dari Kementerian Agama Kanwil Kota Depok, jumlah perkawinan yang terdata selama tahun 2022 adalah sebanyak 10.361 dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Cilodong sebanyak 1.235 dan Kecamatan Sawangan merupakan Kecamatan dengan jumlah perkawinan paling sedikit, yaitu 530. Secara lengkap data disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Jumlah Perkawinan Kota Depok Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN
1	Pancoran Mas	596
2	Cimanggis	997
3	Sawangan	530
4	Limo	835
5	Sukmajaya	637
6	Beji	1.182
7	Cipayung	1.124
8	Cilodong	1.235
9	Cinere	1.029



NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN
10	Tapos	920
11	Bojongsari	1.276
JUMLAH		10.361

Sumber : Kementerian Agama Kanwil Depok, 2022

4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar (AKK) adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu. Di Kota Depok Tahun 2022 tercatat sebanyak 11.228 perkawinan. Jika jumlah penduduk Kota Depok pada pertengahan Tahun 2022 adalah 1.902.159, maka angka Perkawinan Kasar kota Depok pada Tahun 2022 adalah 5,90. Artinya, dari 1.000 penduduk Kota Depok pada Tahun 2022 terdapat 5 Sampai 6 orang penduduk yang berstatus kawin atau sebanyak antara 5 sampai 6 kali terjadi peristiwa perkawinan.

4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum merupakan angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin (biasanya 15 tahun ke atas) per 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka perkawinan umum lebih baik dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar, karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara itu, penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut, karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Di Kota Depok Tahun 2022 tercatat sebanyak 11.228 perkawinan. Jumlah penduduk umur 15 tahun atau lebih sebanyak 1.448.195. Dari kedua data tersebut dapat dihitung Angka Perkawinan Umum Kota Depok pada Tahun 2022 yaitu sebesar 7,75. Artinya, pada Tahun 2022 dari setiap 1.000 penduduk kota Depok yang berumur 15 tahun ke atas terdapat terdapat antara 7 sampai 8 orang penduduk yang berstatus kawin atau sebanyak 7 sampai 8 kali terjadi peristiwa perkawinan. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 6 orang per 1000



penduduk (2021). Peningkatan Angka Perkawinan Umum Kota Depok selama 2021-2022 sebesar 1 orang.

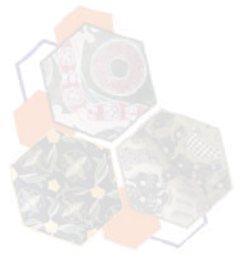
4.1.2.2.4. Rata-rata Umur Kawin Pertama

Data perkawinan yang tersedia untuk Kota Depok Tahun 2021, mencakup jumlah perkawinan, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan status kawin. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rata-rata umur perkawinan pertama.

Salah satu cara untuk menghitungnya menggunakan metode Hajnal yang dikenal dengan Istilah Singulate Mean Age at First Marriage/SMAM (Hajnal, 1953 dalam Pathak dan Ram, 1992). Hasil perhitungan SMAM diperoleh rata-rata umur perkawinan pertama pada penduduk perempuan di Kota Depok Tahun 2021 sebesar 26,62 tahun, artinya rata - rata umur kawin pertama untuk penduduk perempuan Kota Depok adalah antara usia 26 sampai 27 tahun. Sementara untuk penduduk laki-laki, rata-rata umur perkawinan pertamanya lebih tinggi yaitu 30,33 tahun, artinya rata - rata umur kawin pertama untuk penduduk laki - laki adalah usia 30 tahun.

4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar

Perceraian merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kelahiran. Perempuan yang termasuk dalam kelompok usia reproduktif atau usia subur yang berstatus cerai baik cerai mati atau cerai hidup tidak memiliki risiko melahirkan, untuk itu perlu suatu ukuran. Sebagaimana halnya Angka Perkawinan Kasar, Angka Perceraian Kasar menunjukkan banyaknya peristiwa perceraian per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu. Di Kota Depok Tahun 2022 tercatat sebanyak 4.022 (3.864 perceraian secara Islam bersumber dari Kantor Pengadilan Agama Kota Depok Tahun 2022, dan 158 perceraian Non-Islam yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2022). Jumlah perceraian meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 4007, atau terjadi peningkatan sebesar 15 kasus perceraian di Kota Depok selama 2021-2022.



Tabel 4.10
Angka Perceraian Kasar Kota Depok Tahun 2022

Perceraian Muslim	Perceraian Non Muslim	Jmlh Perceraian	Jmlh Pnddk Pertengahan Tahun 2022	Angka Perceraian Kasar
3.864	158	4.022	1.902.159	2,11

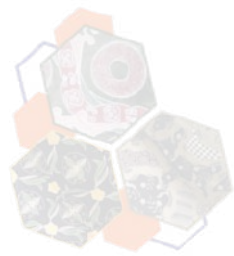
Sumber: *Disdukcapil - DKB Semester 1 Dan 2 Tahun 2022 Dan Data Pengadilan Agama Tahun 2022*

Jika jumlah penduduk pertengahan Tahun 2022 di Kota Depok sebanyak 1.902.159 orang maka diperoleh Angka Perceraian Kasar Kota Depok pada Tahun 2022 sebesar 2,11. Artinya, dari 1.000 penduduk Kota Depok pada Tahun 2022 terdapat 2,11 perceraian, atau 2 (dua) kali kasus perceraian. Walaupun masih dalam rentang sekitar 2 kasus, namun Angka Perceraian Kasar di Kota Depok tahun 2022 mengalami penurunan dengan tahun 2021 yaitu dari 2,12 menjadi 2,11 atau turun 0,1 poin.

4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan banyaknya perceraian diantara penduduk umur 15 tahun ke atas yang berisiko bercerai per 1.000 penduduk umur 15 tahun ke atas. Dibanding Angka Perceraian Kasar, Angka Perceraian Umum lebih baik, karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko cerai saja atau disebut penduduk yang berumur *divorceable*, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara itu, penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut, karena dianggap belum terpapar terhadap perceraian.

Di Kota Depok Tahun 2022 tercatat sebanyak 4.022 perceraian. Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas di Kota Depok pada Tahun 2022 sebanyak 1.448.195 orang. Angka Perceraian Umum Kota Depok pada Tahun 2022 sebesar 2,78. Angka ini memberikan makna bahwa pada Tahun 2022 dari setiap 1.000 penduduk Kota Depok yang berumur 15 tahun ke atas terdapat 2 sampai 3 orang penduduk yang berstatus cerai. Dibandingkan tahun 2021, walaupun masih dalam rentang 2 sampai 3 orang di antara 1000 orang yang mengalami kasus perceraian, terdapat penurunan Angka Perceraian Umum di Kota Depok selama setahun terakhir yaitu dari 2,81 (2021) menjadi 2,78 (2022), atau menurun sebesar 0,3 poin.



Tabel 4.11
Angka Perceraian Umum Kota Depok Tahun 2022

Perceraian Muslim	Perceraian Non Muslim	Jmlh Perceraian	Jmlh Pnddk 15 Thn Keatas	Angka Perceraian Kasar
3.864	158	4.022	1.448.195	2,78

Sumber: Disdukcapil - DKB Semester 1 Dan 2 Tahun 2022 Dan Data Pengadilan Agama Tahun 2022

Sedangkan bila merujuk pada data dari Pengadilan Agama Kota Depok, Data Perkara Perceraian Tahun 2022 adalah sebanyak 3.864 perkara. Perkara Perceraian paling banyak berada di Kecamatan Tapos dengan angka perceraian sebanyak 496 kasus. Sedangkan yang paling sedikit adalah di kecamatan Cinere sebanyak 173.

Jika dilihat berdasarkan penyebab perkaranya, dari total jumlah angka perceraian di Kota Depok, yang paling banyak adalah kasus cerai gugat dengan jumlah 2.942 dengan kejadian perkara terbanyak di Kecamatan Sukmajaya sejumlah 385 kasus cerai gugat, sedangkan yang paling jarang terjadi adalah di Kecamatan Limo, tercatat hanya 53 kasus cerai talak. Berikut ini data lengkap perkara perceraian sepanjang tahun 2022.

Tabel 4.12.
Data Perkara Perceraian Tahun 2022 Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	PERKARA PERCERAIAN		JUMLAH
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	
1	Pancoran Mas	375	114	489
2	Cimanggis	325	96	421
3	Sawangan	272	89	361
4	Limo	161	53	214
5	Sukmajaya	385	108	493
6	Beji	233	75	308
7	Cipayung	292	86	378
8	Cilodong	234	73	307
9	Cinere	123	50	173
10	Tapos	384	112	496
11	Bojongsari	192	66	258
JUMLAH		2.942	922	3.864

Sumber: Pengadilan Agama, 2022



4.1.2.3. Keluarga

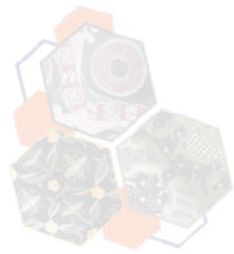
Konsep perkembangan kependudukan dan dinamika penduduk lebih mengacu pada individu, orang per orang, sedangkan konsep keluarga lebih mengarah pada kelompok terkecil dalam masyarakat tetapi mempunyai fungsi tersendiri. UU 52 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014, maupun Peraturan Presiden No 153 Tahun 2014 semuanya mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga pada dasarnya merupakan unit terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai unit terkecil, keluarga mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang tentunya menjadi cita-cita pembangunan negara. Keluarga menjadi lingkungan sosial utama guna memperkenalkan berbagai pengetahuan dan pemahaman agama, cinta kasih, moral, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2, ada delapan fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi keagamaan

Mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa



2. Fungsi sosial budaya

Memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta kasih

Memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi perlindungan

Menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikososial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

5. Fungsi reproduksi

Melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

7. Fungsi ekonomi

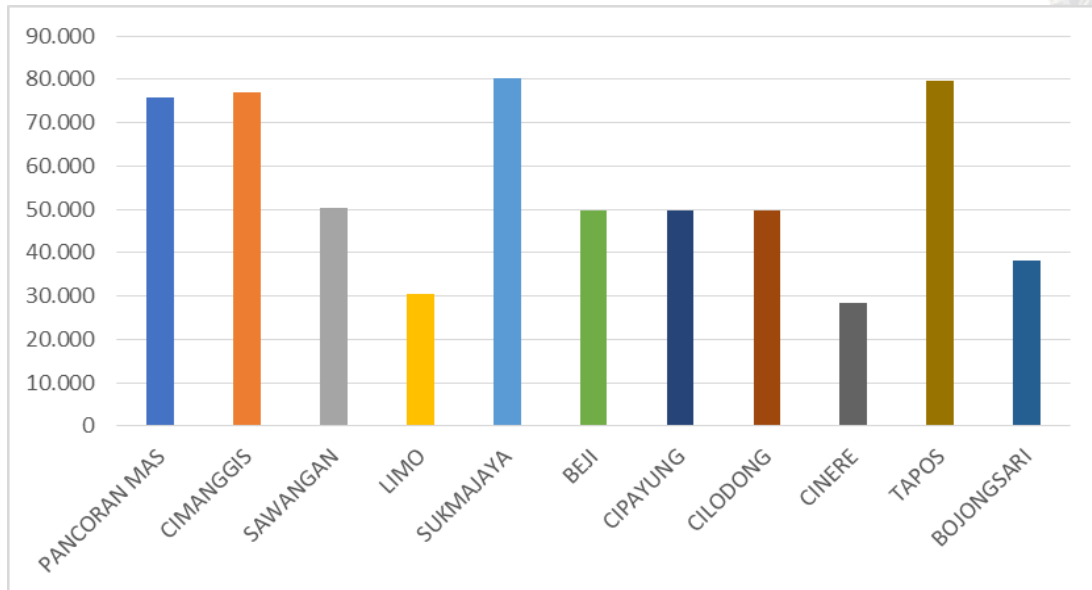
Fungsi ekonomi adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

4.1.2.3.1. Jumlah dan Sebaran Keluarga

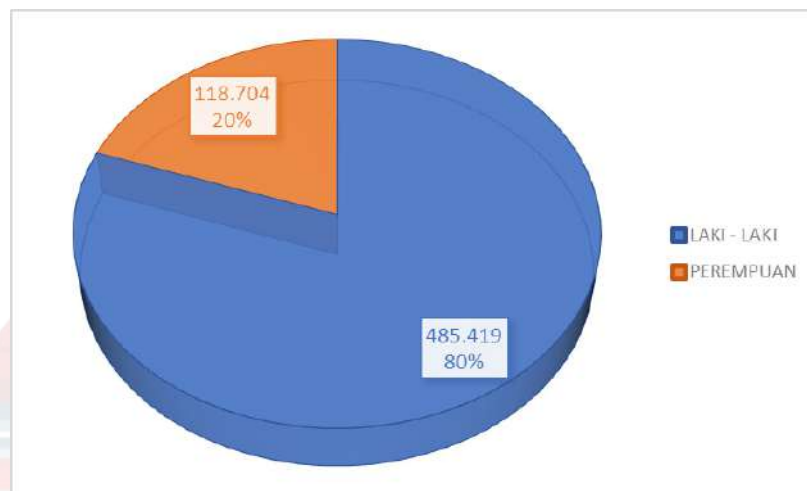
Dari data DKB Semester 2 (dua) Tahun 2022, tampak jumlah keluarga di Kota Depok sebanyak 604.123 keluarga. Distribusi keluarga di 11 kecamatan di Kota Depok digambarkan dalam Gambar 4.21



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.21 Jumlah Kepala Keluarga Kota Depok Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

Dari sebelas kecamatan di Depok jumlah keluarga terbanyak ada di Kecamatan Tapos (79.314), dan yang paling sedikit adalah Cinere (27.746). Sukmajaya, Tapos, Cimanggis, dan Pancoran Mas adalah yang paling banyak jumlah keluarga yaitu lebih dari 70.000 keluarga.



Gambar 4.22. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin, Kota Depok 2022

Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

4.1.2.3.2. Jumlah Anggota Keluarga

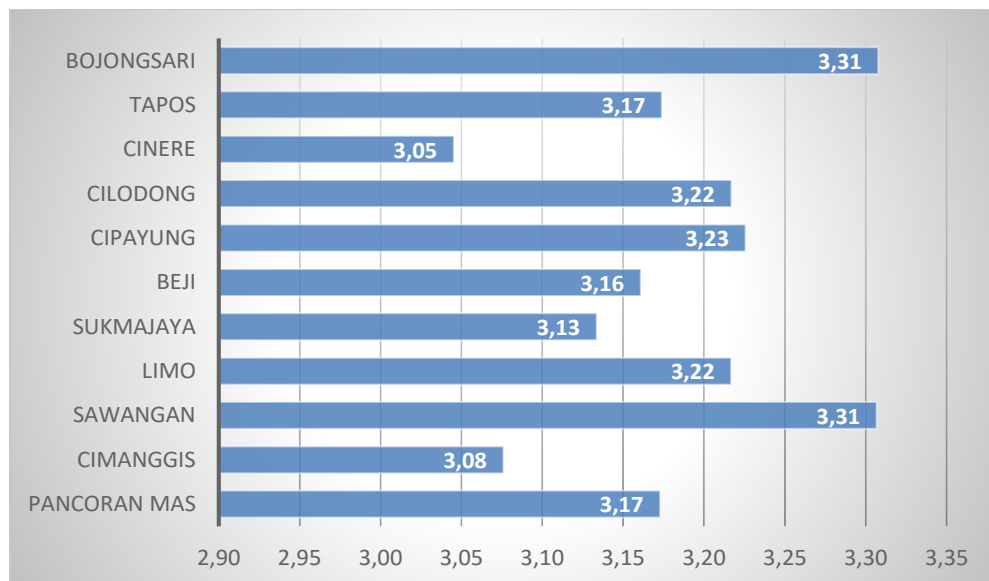
Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili



lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap.

Data yang diperoleh dari DKB Semester 2 tahun 2022 rata-rata jumlah anggota keluarga di Depok adalah 3,18 artinya rata-rata keluarga memiliki anggota keluarga sebanyak 3 orang.

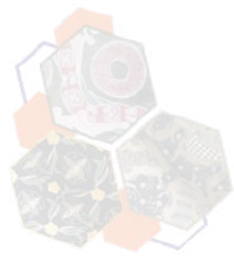
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga Kota Depok saat ini telah menjalankan norma keluarga kecil. Hal ini tentunya tidak lepas dari keberhasilan program Keluarga Berencana dan pembangunan manusia terutama peningkatan pendidikan perempuan. Namun juga perlu dicatat bahwa setiap anggota keluarga yang tercatat dalam Kepala Keluarga tidak selalu memiliki hubungan keluarga langsung dengan Kepala Rumah Tangga. Sehingga besar kecilnya jumlah anggota keluarga per keluarga tidak selalu diasosiasikan dengan jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga.



sumber : *Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)*

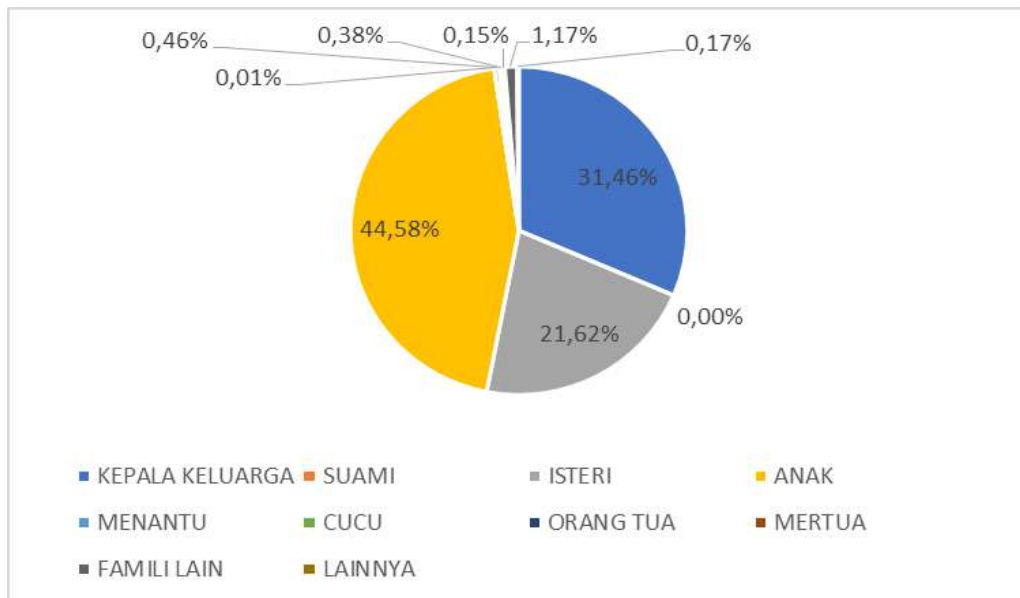
Gambar 4.23 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022

Walaupun semua kecamatan rata-rata jumlah anggota keluarganya 3 orang, Sawangan dan Bojongsari adalah kecamatan yang paling banyak rata-rata jumlah anggota keluarganya yaitu 3,31 dan yang paling sedikit adalah Cinere 3,05 rata-rata anggota keluarganya.



4.1.2.3.3. Hubungan Penduduk dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Dilihat dari hubungan penduduk dengan Kepala Keluarga (KK). Gambar 4.24. Memperlihatkan bahwa pada Tahun 2022, mayoritas keluarga Kota Depok adalah keluarga inti (*nuclear family*) atau keluarga batih. Hal ini terlihat karena mayoritas penduduk Kota Depok adalah anak (44,58 persen), kepala keluarga (31,46 persen penduduk) dan pasangan kepala keluarga (21,62 persen).



Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.24. Persentase Penduduk Menurut Hubungan Dengan Kepala Keluarga, Kota Depok 2022

Selain keluarga inti, beberapa keluarga di Depok juga terdiri dari menantu, orang tua, mertua, cucu, pembantu, dan keluarga lainnya yang jumlahnya hanya 2,34 persen saja. Jumlah penduduk menurut hubungan dengan kepala keluarga disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13.
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Hubungan Dengan Kepala Keluarga, Kota Depok 2022

Status Hubungan Dengan Kepala	Laki-Laki		Perempuan		Jmlh Penduduk	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Kepala Keluarga	485.419	50,384%	118.704	12,41%	604.123	31,46%



Status Hubungan Dengan Kepala	Laki-Laki		Perempuan		Jmlh Penduduk	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Suami	6	0,001%	0	0,00%	6	0,00%
Isteri	0	0,000%	415.138	43,39%	415.138	21,62%
Anak	458.480	47,588%	397.464	41,54%	855.944	44,58%
Menantu	92	0,010%	135	0,01%	227	0,01%
Cucu	4.730	0,491%	4.106	0,43%	8.836	0,46%
Orang Tua	738	0,077%	6.544	0,68%	7.282	0,38%
Mertua	338	0,035%	2.562	0,27%	2.900	0,15%
Famili Lain	12.134	1,259%	10.359	1,08%	22.493	1,17%
Lainnya	1.505	0,156%	1.728	0,18%	3.233	0,17%
Jumlah	963.442	100,00%	956.740	100,00%	1.920.182	100,00%

Sumber : Disdukcapil Kota Depok - DKB Semester 2 Tahun 2022

4.1.2.4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Pada bagian ini akan dibahas keadaan karakteristik social penduduk kota Depok, yang dirinci menurut pendidikan, agama, dan disabilitas. Karakteristik social penduduk diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam menata warganya. Setiap daerah memiliki karakteristik penduduk yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya.

4.1.2.4.1. Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu dari indikator kualitas penduduk. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar kalau tidak dibarengi dengan kualitas yang mumpuni akan berdampak buruk, apalagi sekarang ini era globalisasi persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja semakin ketat, peningkatan pendidikan perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

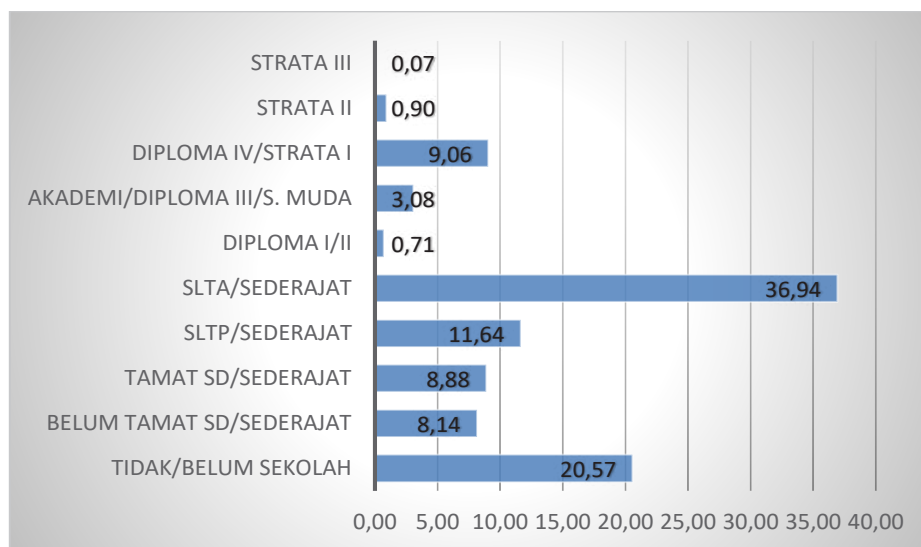
Penduduk Depok tahun 2022 yang bersekolah adalah 1.525.191 orang yang terdiri dari 759.625 orang laki-laki dan 765.566 orang perempuan. Dari total penduduk Kota Depok 71,29 persennya berpendidikan Tamat SD hingga Strata III, dan 28,71 persen adalah tidak/belum bersekolah dan belum tamat SD. Mereka yang tidak atau belum sekolah ini



masih cukup besar persentasenya yaitu 20,57 persen dan 8,14 persen yang belum tamat atau sedang bersekolah di SD.

4.1.2.4.2. Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

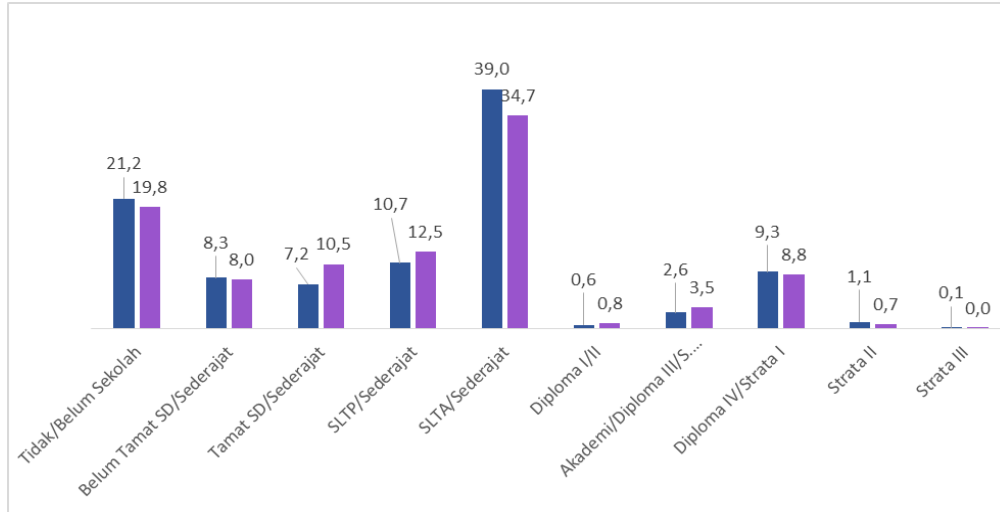
Gambar 4.25 menyajikan informasi tentang pendidikan yang ditamatkan penduduk. Penduduk Kota Depok Tahun 2022 sebanyak 36,94 persen adalah tamatan SLTA/ sederajat. Pendidikan Tinggi mulai Diploma sampai Strata III adalah yang terbanyak kedua dengan proporsi sebanyak 13,82 persen. Sedangkan tamatan SLTP sederajat 11,64 persen. Disayangkan bahwa penduduk yang belum atau tidak sekolah masih cukup tinggi proporsinya di Depok (20,57 persen).



Gambar 4.25 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan, Kota Depok Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa perempuan lebih sedikit proporsinya dibanding laki-laki yang bersekolah pada jenjang yang sama. (Gambar.4.17), walaupun demikian ada beberapa jenjang dimana perempuan lebih tinggi proporsinya dibanding laki-laki.



Gambar 4.26 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan jenis Kelamin, Kota Depok 2022
sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)

Jenjang sekolah dimana proporsi perempuan lebih besar daripada laki-laki adalah pada tingkat SD, Diploma 1/II maupun Akademi. Pada jenjang SLTP proporsi perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki, tetapi perbedaannya tidak sebesar pada proporsi SD dan Diploma/Akademi. Selanjutnya Jumlah dan persentase penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kota Depok 2022

PENDIDIKAN	PENDUDUK				JMLH
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
Tidak/Belum Sekolah	203.817	21,2	191.174	19,8	394.991
Belum Tamat SD/Sederajat	79.746	8,3	76.603	8,0	156.349
Tamat SD/Sederajat	69.420	7,2	101.171	10,5	170.591
SLTP/Sederajat	103.495	10,7	120.058	12,5	223.553
SLTA/Sederajat	375.510	39,0	333.837	34,7	709.347
Diploma I/II	5.572	0,6	8.100	0,8	13.672
Akademi/Diploma III/S. Muda	25.439	2,6	33.609	3,5	59.048
Diploma IV/Strata I	89.198	9,3	84.692	8,8	173.890

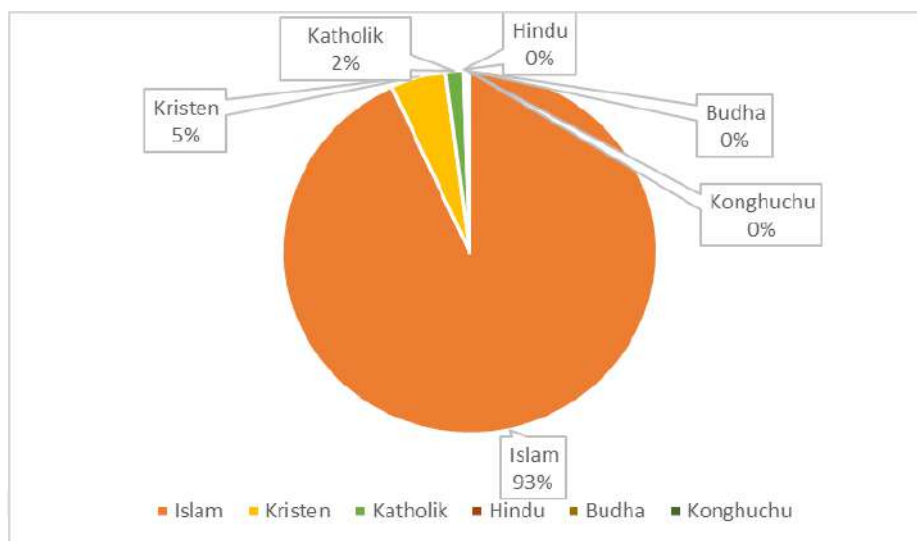


PENDIDIKAN	PENDUDUK				JMLH
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
Strata II	10.280	1,1	7.073	0,7	17.353
Strata III	965	0,1	423	0,0	1.388
JUMLAH	963.442	100	956.740	100	1.920.182

sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)

4.1.2.4.3. Penduduk Menurut Agama

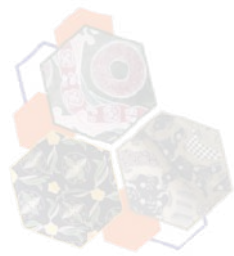
Gambar 4.27 menunjukkan sebaran penduduk Kota Depok menurut agama yang dianut. Berdasarkan data Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022, penduduk Kota Depok mayoritas beragama Islam, 93 persen dari seluruh penduduknya. Sementara itu, persentase penduduk beragama lain yang terbesar adalah pemeluk agama Kristen (hampir 5 persen), disusul oleh Katholik (hampir 2 persen). Lainnya, Budha, Hindu, Khonghucu masing-masing tidak sampai setengah persen, dan agama lain hanya 0,56 persen.



Gambar 4.27 Persentase Penduduk menurut Agama, Kota Depok, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat informasi tentang jumlah dan persentase agama menurut jenis kelamin penduduk Depok pada tahun 2022. Terlihat hanya 10.552 orang saja yang memeluk agama selain Islam, Kristen dan Katolik.



Tabel 4.15.
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin, Kota Depok 2022

AGAMA DAN KEPERCAYAAN	PENDUDUK				JMLH	(%)
	L	%	P	%		
Islam	898.847	93,30	890.293	92,41	1.789.140	93%
Kristen	45.016	4,67	46.508	4,83	91.524	5%
Katholik	14.303	1,48	14.663	1,52	28.966	2%
Hindu	1.613	0,17	1.561	0,16	3.174	0,17%
Budha	2.655	0,28	2.665	0,28	5.320	0,28%
Konghuchu	991	0,10	1.030	0,11	2.021	0,11%
Kepercaraan	17	0,00	20	0,00	37	0,00%
JUMLAH	963.442	100	956.740	100	1.920.182	100%

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

4.1.2.4.4. Penduduk Menurut Disabilitas

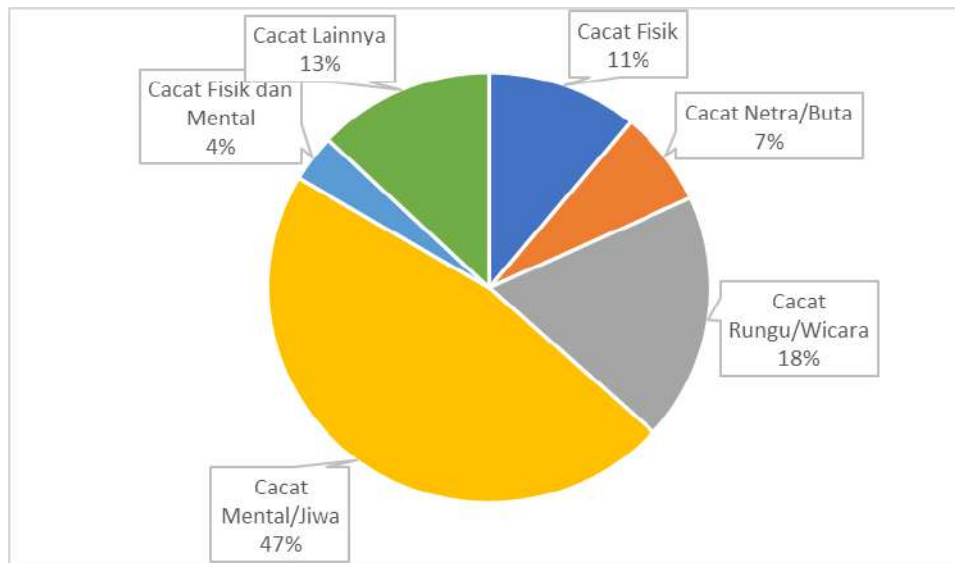
Menurut WHO (2001) disabilitas adalah istilah umum yang mencakup penurunan nilai, pembatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan kecacatan adalah masalah dalam fungsi atau struktur tubuh, kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu yang terkait dalam situasi kehidupan. Sedangkan Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Kemenkes RI, 2017)¹. Jadi istilah penyandang cacat sudah tidak digunakan lagi, dan sebagai gantinya lebih tepat digunakan penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

¹ Kementerian Kesehatan RI, Situasi Penyandang Disabilitas, 2017



hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.



Gambar 4.28 Persentase Penduduk Menurut Kecacatan Kota Depok Tahun 2022

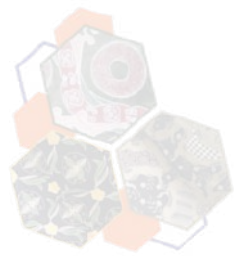
Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 4.28 menunjukkan bahwa dari seluruh penyandang cacat di Depok sebanyak 11,01 persennya adalah penyandang cacat fisik. Selanjutnya berturut turut yang terbanyak setelah cacat fisik adalah penyandang cacat mental (46,79 persen) Cacat tuna rungu/wicara (18,56 persen), Cacat lainnya (12,92 persen), cacat netra (7,15 persen).

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2022 Menurut Kecacatan

JENIS KECACATAN	PENDUDUK				JMLH
	L	%	P	%	
Cacat Fisik	157	10,41	114	7,56	271
Cacat Netra/Buta	97	6,43	79	5,24	176
Cacat Rungu/Wicara	252	16,71	205	13,59	457
Cacat Mental/Jiwa	779	51,66	373	24,73	1152
Cacat Fisik dan Mental	51	3,38	37	2,45	88
Cacat Lainnya	172	11,41	146	9,68	318
JUMLAH	1.508	100	954	100	2.462

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022



4.1.2.5. Kelahiran

Kelahiran hidup adalah pengeluaran atau penarikan suatu hasil konsepsi dari ibunya, berapa pun usia kehamilan, yang setelah pemisahan tersebut bernafas atau menunjukkan bukti lain kehidupan, misalnya denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan nyata otot rangka, baik tali pusat telah dipotong atau pun plasenta masih melekat; setiap hasil kelahiran semacam itu dianggap sebagai kelahiran hidup.

4.1.2.5.1. Jumlah Kelahiran Hidup

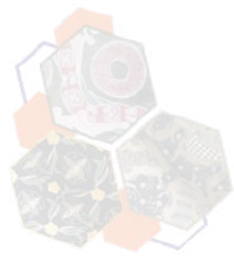
Jumlah kelahiran di kota Depok selama Tahun 2022 tercatat sebanyak adalah 42.760 (Tabel 4.23). Jumlah tersebut terdiri dari 21.713 bayi laki-laki dan 21.047 bayi perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di tahun 2021 maka jumlah tersebut menurun sebesar 345 kelahiran.

Menurut kecamatan, jumlah kelahiran tertinggi ada di Cimanggis dan yang paling sedikit adalah kecamatan Limo. Kecamatan dengan jumlah kelahiran yang tinggi yaitu di atas 5000 kelahiran berturut-turut adalah Kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, Tapos, dan Pancoran Mas. Selain empat kecamatan tersebut, kecamatan lainnya jumlah kelahiran di bawah 5000.

Tabel 4.17
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Depok 2022

Kecamatan	Kelahiran Hidup		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pancoran Mas	2.636	2.554	5.190
Cimanggis	2.906	2.816	5.722
Sawangan	1.628	1.581	3.210
Limo	1.235	1.197	2.431
Sukmajaya	2.757	2.672	5.428
Beji	2.103	2.039	4.142
Cipayung	1.641	1.591	3.232
Cilodong	1.531	1.484	3.015
Cinere	1.253	1.214	2.467
Tapos	2.737	2.653	5.390
Bojongsari	1.286	1.246	2.532
Jumlah	21.713	21.047	42.760

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022



4.1.2.5.2. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka kelahiran kasar merupakan nilai atau petunjuk untuk menentukan jumlah bayi yang ada dan jumlah bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam satu tahunnya. Saat perhitungan angka kelahiran kasar selalu menggunakan rumus yang ada dan yang telah ditentukan. Angka kelahiran kasar diperoleh dari hasil perhitungan jumlah kelahiran hidup dibanding dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada dasarnya angka kelahiran kasar juga digolongkan menjadi tiga kategori. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar saat dilakukannya praktik dapat memudahkan penelitian. Adapun golongan tersebut meliputi:

1. golongan tinggi
2. golongan sedang
3. golongan rendah

Dalam pengkategorian tersebut juga dibedakan dalam berbagai hal, misalnya saja pada golongan tinggi. Disebut golongan tinggi apabila bayi yang lahir memiliki jumlah lebih dari 30. Sedangkan untuk golongan kedua yaitu golongan sedang di kriteriakan apabila kelahiran antara 20-30. Golongan ketiga jika kelahiran kurang dari 20.



Gambar 4.29. Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kota Depok Tahun 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok dan Disdukcapil

Hasil perhitungan yang disajikan pada Gambar di atas diperoleh CBR rata-rata Kota Depok Tahun 2022 sebesar 22,48, artinya



dari setiap 1.000 penduduk di Kota Depok terdapat 22 kelahiran hidup pada Tahun 2022. Kecamatan Cinere adalah kecamatan dengan CBR tertinggi sebesar 29,25 persen dan yang terendah adalah Cilodong 19,20 persen.

4.1.2.6. Kematian

Kematian adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian. Kematian adalah proses universal yang tak terhindarkan dan pada akhirnya akan terjadi pada semua makhluk hidup. Sebagai titik waktu, kematian tampaknya mengacu pada saat di mana kehidupan berakhir. Sulit untuk menentukan kapan kematian telah terjadi, karena penghentian fungsi kehidupan sering kali tidak terjadi simultan di seluruh sistem organ.

4.1.2.6.1. Jumlah Kematian

Kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 (tiga) komponen demografi selain kelahiran (*fertlitas*) dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya jumlah kematian dalam satu wilayah berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan adat istiadat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Disdukcapil (Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022) Jumlah Kematian Penduduk Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar 14.368.

4.1.2.6.2. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Angka Kematian Kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka Kematian Kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kematian. Angka ini



berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan.

Angka Kematian Kasar Kota Depok Tahun 2022 mengacu pada sumber data Disdukcapil (DKB Semester 1 Tahun 2021), dan Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, Angka Kematian Kasar sebesar 7,55, maka angka kematian kasar (CDR) adalah 7,55 artinya bahwa dari 1000 penduduk di Kota Depok terjadi kematian sebanyak 7 sampai 8 orang penduduk pada tahun 2021.

4.2. Kualitas Penduduk

Penduduk merupakan modal pembangunan, dengan syarat penduduk mempunyai kualitas sumberdaya yang tinggi. Menurut Human Development Report (HDR) tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, maka digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

- 1) Pendidikan, sebagai modal dasar dalam mengembangkan kemampuan intelektual seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan



penduduk dan keterampilan penduduk untuk mendukung pembangunan bangsa.

- 2) Kesehatan, sebagai modal berharga bagi seseorang untuk memulai aktivitasnya. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatannya.
- 3) Kesejahteraan, sebagai arah cita-cita setiap manusia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ditujukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Badan Pusat Statistik (BPS) dahulu untuk menghitung IPM dengan metode lama, diwakili dengan angka harapan hidup, indeks pendidikan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan indeks ekonomi diwakili oleh konsumsi riil per kapita. Sedangkan metode baru yang sekarang digunakan adalah Angka Harapan Hidup, Rata-rata Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama sekolah, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

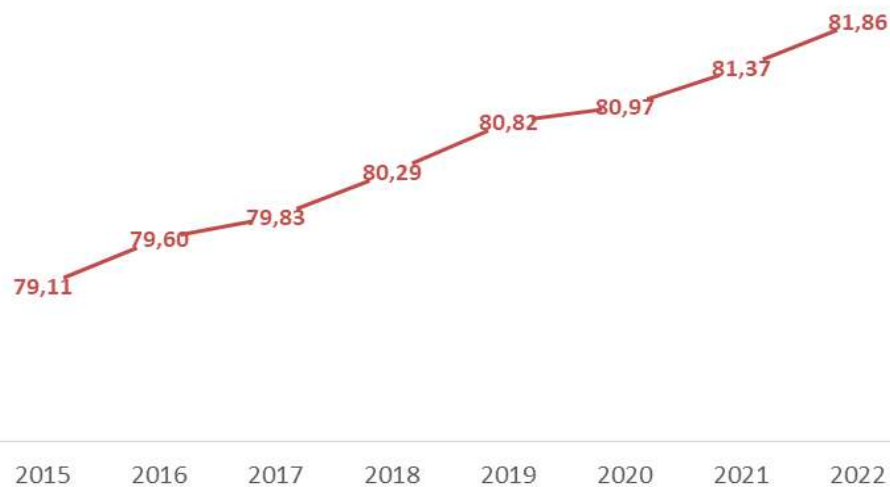
e. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.



IPM Kota Depok Tahun 2022 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya dari 81,37 menjadi 81,86. Capaian IPM Kota Depok termasuk tinggi, merupakan peringkat ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Artinya pembangunan manusia yang dilaksanakan di Kota Depok telah cukup berhasil jika diperbandingkan secara nasional.

Meskipun IPM Kota Depok termasuk tinggi, namun tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun-tahun mendatang. Kerja keras masih diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Hal ini terutama terkait dengan masih terdapat balita yang kurang gizi atau anak usia sekolah dasar tetapi tidak bersekolah.

Tren IPM di Kota Depok terus menunjukkan peningkatan seperti terlihat dalam Gambar 4.30 berikut ini.



Gambar 4.30 Tren IPM 2015-2022, KOTA DEPOK 2022

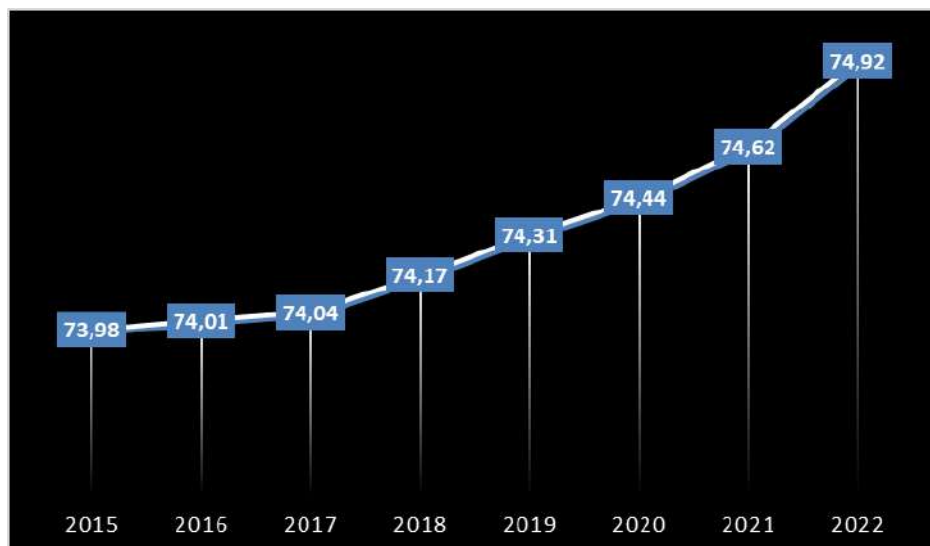
Sumber :BPS Kota Depok, 2022

Ke depan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusianya. perlu merumuskan kebijakan pembangunan hingga tingkat kecamatan. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia di tingkat kecamatan perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk



mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Depok.

Dilihat dari indikator kesehatan, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Kota Depok mempunyai Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi dari nasional, yaitu mencapai 74,92 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada Tahun 2022 rata-rata diharapkan akan dapat hidup sampai 74 – 75 tahun. Tren Angka Harapan Hidup Kota Depok dari Tahun 2015 sampai Tahun 2022, angkanya berkisar pada 74 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup dianggap sebagai cerminan dari peningkatan kehidupan dan kesejahteraan. Meskipun demikian, perlu melihat indikator-indikator kesehatan lainnya, seperti status gizi, morbiditas, dan mortalitas. Mengingat Angka Harapan Hidup adalah angka hipotetis yang diperoleh secara tidak langsung, berdasar angka kematian.



Gambar 4.31 Tren Angka Harapan Hidup 2015-2022

Sumber :BPS Kota Depok, 2022

Kemajuan atau peningkatan umur harapan hidup di setiap kecamatan sangat ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggiatkan program Posyandu dan RW siaga. Posyandu merupakan kepanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan giatnya kegiatan



Posyandu diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin. Faktor lain yang berpengaruh terhadap umur harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di sekolah-sekolah kepada murid-murid misalnya dengan pemilahan sampah.



Gambar 4.32 Tren Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah, Kota Depok, Tahun 2015-2022

Sumber : BPS Kota Depok, 2022

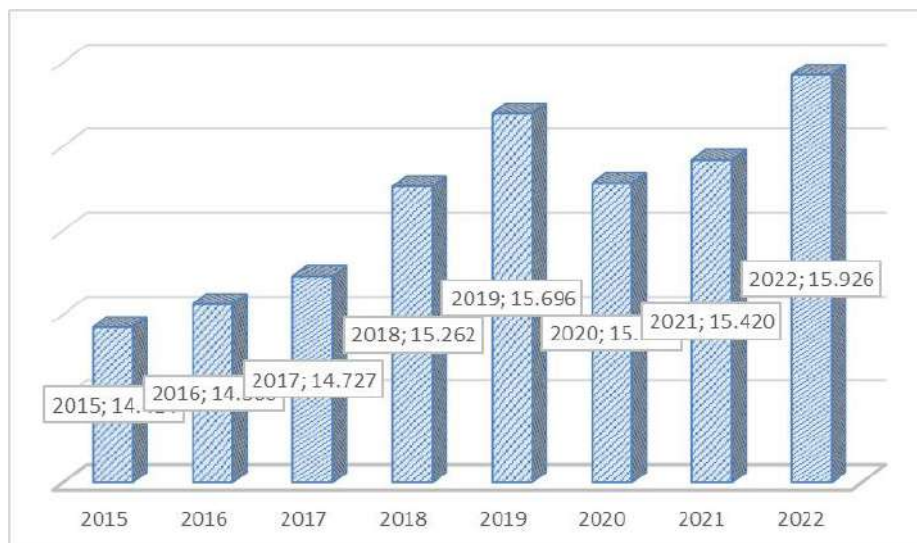
Secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Depok adalah 11,47 tahun yang artinya sampai dengan kelas 2 SLTA. Hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok untuk dapat menetapkan prioritas pendidikan dengan lebih memudahkan masyarakat misalnya pendidikan gratis sampai dengan SLTA sebab jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Depok sangat tidak sebanding dengan banyaknya murid yang harus sekolah sementara sekolah di SLTA swasta memerlukan dana yang cukup bahkan mungkin mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Namun sekarang dengan adanya berbagai bantuan pendidikan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Depok.

Rata rata Harapan Lama Sekolah di Kota Depok tahun 2022 sebesar 13.94, artinya penduduk Depok diharapkan dapat bersekolah



selama 13.94 tahun atau sampai dengan Diploma II. Angka harapan lama sekolah senantiasa naik meskipun sedikit dari tahun 2015 hingga tahun 2022.

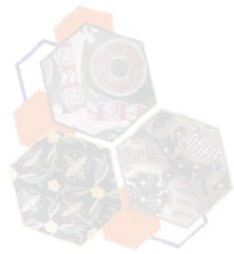
Selain kedua dimensi tersebut, peningkatan juga terlihat dari dimensi ekonomi. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-rata pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan di Kota Depok mengalami kenaikan dari Tahun 2015-2022. Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok pada tahun 2022 sebesar Rp. 15.926 juta perkapita per tahun, meningkat dari 15.420 juta daripada tahun 2021.



Gambar 4.33 Tren Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, Kota Depok, Tahun 2015-2022

Sumber : BPS Kota Depok, 2022

Selanjutnya disajikan beberapa perkembangan kependudukan dari segi kualitas, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.



4.2.1. Kesehatan

Kebijakan kesehatan Kota Depok adalah untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan. Permasalahan yang dihadapi Kota Depok sejak awal tahun 2020 adalah terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan sistem tatanan kehidupan. Dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Depok, Pemerintah Daerah melakukan berbagai strategi percepatan penanganan yang melibatkan Pemerintah daerah, lintas sektor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026. Pada bagian kesehatan disajikan gambaran mengenai kelahiran, dan kematian sebagai berikut:

4.2.1.1. Kelahiran

Idealnya data kelahiran diperoleh dari hasil pencatatan dan pelaporan kejadian sehari-hari melalui registrasi penduduk. Namun sayang, data tersebut sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Sementara data terkait dengan angka kelahiran total, dan angka kelahiran menurut kelompok umur jarang tersedia untuk tingkat kabupaten/kota. Berikut hasil perhitungan kelahiran menurut kabupaten/kota.

a. Rasio Anak Perempuan (*Child Women Ratio* atau *CWR*)

Rasio Anak Wanita (*Child Women Ratio* atau *CWR*) adalah perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0-4 tahun dengan jumlah wanita usia reproduksi (15-49 tahun). Rasio anak dan perempuan dapat digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. CWR tahun 2022 sebesar 26,66 artinya pada tahun 2022 di Kota Depok terdapat 27 anak berusia 0 - 4 tahun dari setiap 100 perempuan usia 15 - 49 tahun.

CWR tertinggi ditemukan di Kecamatan Cilodong yaitu 28-29 anak balita di 1000 orang wanita, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Cinere yang hanya 22-23 orang anak.

Tabel 4.18
Rasio Anak Perempuan, Kota Depok, Tahun 2022



Kecamatan	Penduduk Usia 0 - 4 Thn	Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Thn	Rasio Anak Dan Perempuan (Cwr)
Pancoran Mas	16.414	65.040	25,24
Cimanggis	17.768	64.212	27,67
Sawangan	13.458	46.837	28,73
Limo	6.961	27.258	25,54
Sukmajaya	16.820	67.329	24,98
Beji	11.027	43.160	25,55
Cipayung	12.217	44.329	27,56
Cilodong	12.875	44.100	29,20
Cinere	5.349	23.130	23,13
Tapos	18.765	70.601	26,58
Bojongsari	9.843	35.038	28,09
Jumlah	141.497	531.034	26,65

sumber : Disdukcapil (DKB Semester 2 tahun 2022)

4.2.1.2. Kematian

Angka kematian digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan. Umumnya semakin tinggi tingkat kematian, maka derajat kesehatan semakin buruk. Beberapa indikator kematian yang sering digunakan sebagai indikator tingkat kesehatan disajikan sebagai berikut:

a. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate=IMR*)

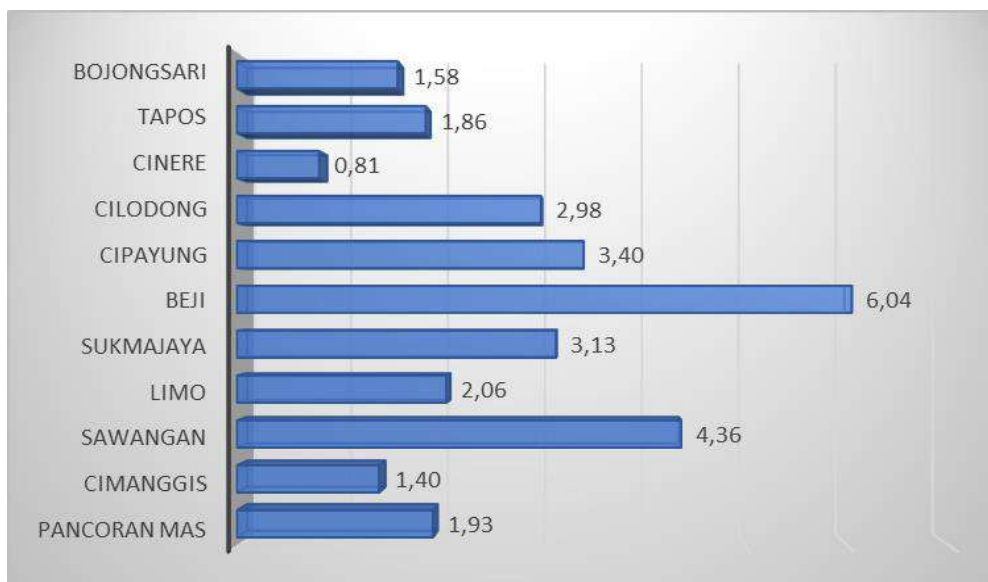
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dinamakan Angka Kematian Bayi (AKB) atau IMR. Angka ini sering digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: ■ 70 sangat tinggi, ■ 40 - 70 tinggi, ■ 20-39 sedang, ■ dan <20 rendah.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial



orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Data dari Dinas Kesehatan, IMR Kota Depok Tahun 2022 sebesar 1 - 2 bayi per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sepertinya sangat kecil, kemungkinan memang kematian bayi yang terjadi hanya sedikit, atau memang pelaporan belum lengkap seluruhnya. Data tahun 2022 menunjukkan ada sedikit peningkatan kematian bayi daripada tahun 2021, yaitu menjadi 1,35 menjadi 2,69.



Gambar 4.34
Angka kematian Bayi Menurut Kecamatan, Depok 2022

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Depok, 2022

Dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Beji adalah yang tertinggi. Angka Kematian Bayi sebesar 6,04 atau dalam 1000 kelahiran hidup ditemukan 5-6 bayi yang mati. Tiga kecamatan yang memiliki AKB tertinggi berturut turut adalah Sawangan, Sukmajaya dan Cipayung. Sedangkan yang memiliki AKB terendah adalah Cinere, Cimanggis dan Bojongsari.

Banyak faktor terkait kematian bayi, yang secara garis besar dilihat dari sisi penyebabnya. Ada dua macam penyebab kematian bayi yaitu endogen dan eksogen Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi



endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Walaupun dalam kenyataannya, penyebab kematian bayi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kematian di masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan di suatu daerah antara lain tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan kualitas lingkungan hidup. Upaya penanganan bayi perlu dilakukan secara komprehensif dan integrasi. Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan mencakup preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif (BMPK, 2020).

b. Angka Kematian Bayi Neonatal

Kematian neonatal yaitu kematian neonatus lahir hidup pada usia gestasi 20 minggu atau lebih. Sedangkan, neonatus lahir hidup adalah salah satu neonatus yang menunjukkan bukti hidup setelah lahir, bahkan bila hanya sementara (pernapasan, denyut jantung, gerakan otot volunter, atau pulsasi dalam korda umbilikalis), dan yang meninggal dalam 28 hari. Umumnya kematian bayi seperti ini disebabkan oleh faktor-faktor endogen, yang dibawa anak sejak lahir. Faktor ini dapat diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Damayanti, 2010³ menyebutkan bahwa faktor ibu (umur, paritas, penyulit dalam kehamilan dan persalinan), faktor bidan (pengetahuan bidan dan keterampilan bidan), dan faktor bayi (umur kehamilan, berat badan bayi waktu lahir, dan penyulit lain) pada bayi sama-sama memiliki hubungan bermakna terhadap kematian neonatal. Berat badan bayi waktu lahir memiliki pengaruh paling dominan terhadap kematian Neonatal.

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Depok, jumlah kematian neonatal pada Tahun 2022 sebanyak 102 bayi, dan jumlah kelahiran hidup sebanyak 42.760 bayi. Angka Kematian Bayi sesuai dengan data yang dilaporkan



tersebut sebesar 2,39 per 1000 kelahiran hidup. Artinya dari setiap 1000 kelahiran bayi, terdapat sekitar 2 (dua) orang bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Besaran angka ini sesuai dengan data yang dilaporkan, belum tentu menggambarkan angka kematian bayi yang sebenarnya terjadi pada penduduk. Karena pada beberapa kasus kematian, kadang masyarakat tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kelurahan atau puskesmas.

Tabel 4.19
Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022

Kecamatan	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		NDR
	Jmlh	%	Jmlh	%	
Pancoran Mas	5.190	12,14	9	8,82	1,73
Cimanggis	5.722	13,38	7	6,86	1,22
Sawangan	3.210	7,51	13	12,75	4,05
Limo	2.431	5,69	4	3,92	1,65
Sukmajaya	5.428	12,70	16	15,69	2,95
Beji	4.142	9,69	20	19,61	4,83
Cipayung	3.232	7,56	11	10,78	3,40
Cilodong	3.015	7,05	9	8,82	2,98
Cinere	2.467	5,77	1	0,98	0,41
Tapos	5.390	12,61	8	7,84	1,48
Bojongsari	2.532	5,92	4	3,92	1,58
Jumlah	42.760	100	102	100	2,39

sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022

Sementara penyebab kematian bayi neonatal umumnya terkait dengan penyebab Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, infeksi, dan masalah laktasi. Lebih lanjut penyebab kematian bayi dapat terjadi karena gangguan pernafasan pada bayi, yang salah satunya dapat dipicu oleh asap rokok. Kondisi ini ditemukan apabila ayah bayi yang merokok, atau ibu bayi yang menjadi perokok pasif atau aktif. Penyakit lain yaitu terjadinya infeksi, misalnya karena tali pusat yang belum puput dan salah perawatan. Selain itu, kematian bayi seperti ini dapat terjadi karena sepsis, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh bayi, dan mengancam



keselamatan jiwa bayi. Apabila tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak pada kematian bayi.

Dari beberapa rangkaian peristiwa kematian bayi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kematian bayi diantaranya tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola perilaku hidup.

Ditinjau menurut kecamatan, terlihat Angka Kematian neonatal di Depok sudah cukup rendah yaitu 2,39 tetapi bervariasi di sebelas kecamatan yang ada di Depok. Sawangan dan Beji adalah yang memiliki Angka Kematian neonates tertinggi, sedangkan Cinere dan Cimanggis adalah yang paling rendah.

c. Angka Kematian Anak

Anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka kematian Anak (AKA) mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka Kematian Anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Dengan melihat Angka Kematian Anak yang tinggi maka diindikasikan terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah (Budi Utomo, 1985).

Tabel 4.20
Angka Kematian Anak, Kota Depok 2022

Kecamatan	Penduduk Usia 1 - 4 Thn Pada Pertengahan Tahun 2022		Kematian Anak		Ak Anak
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pancoran Mas	14.176	11,81	0	0,00	0,00
Cimanggis	15.042	12,53	0	0,00	0,00
Sawangan	11.169	9,30	0	0,00	0,00
Limo	5.923	4,93	0	0,00	0,00
Sukmajaya	14.564	12,13	1	20,00	0,07
Beji	9.489	7,90	2	40,00	0,21



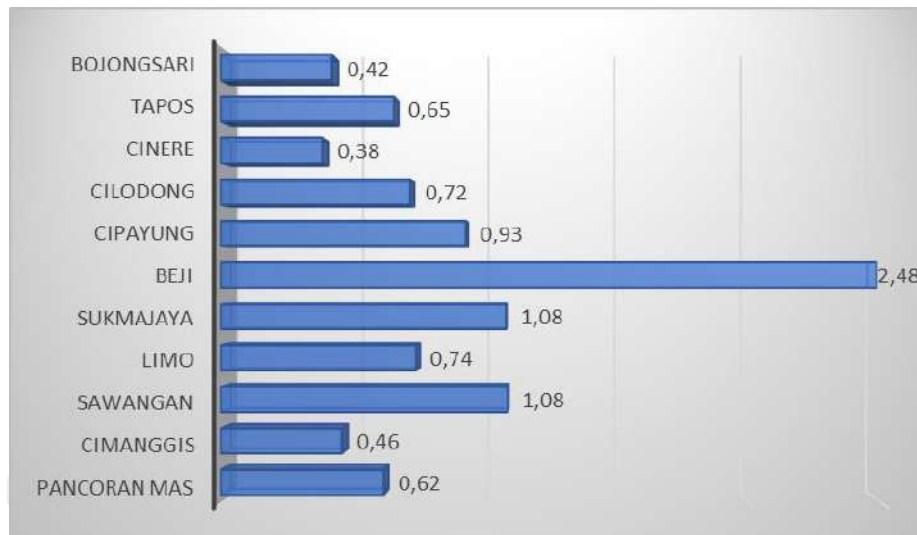
Kecamatan	Penduduk Usia 1 - 4 Thn Pada Pertengahan Tahun 2022		Kematian Anak		Ak Anak
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Cipayung	10.251	8,54	0	0,00	0,00
Cilodong	10.857	9,04	0	0,00	0,00
Cinere	4.568	3,80	0	0,00	0,00
Tapos	15.745	13,11	2	40,00	0,13
Bojongsari	8.271	6,89	0	0,00	0,00
Jumlah	120.055	100	5	100	0,04

Sumber :

1. Jumlah Kematian Anak Balita - Dinas Kesehatan Tahun 2022
2. Jumlah Penduduk Usia 1 - 4 Thn - Disdukcapil (Dkb Semester 1 Tahun 2022)

d. Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya ditulis dengan notasi 0 - 4 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak usia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pertengahan tahun.



Sumber :

1. Jumlah Kematian Anak Balita - Dinas Kesehatan Tahun 2022
2. Jumlah Penduduk Usia 1 - 4 Thn - Disdukcapil (Dkb Semester 1 Tahun 2022)

Gambar 4.35 Angka Kematian Balita (AKABA) Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022

Angka kematian balita di Kota Depok sebesar 0,44 yang artinya hampir tidak ada kematian anak balita di tahun 2022. Menurut wilayah,



diketahui kecamatan yang memiliki kasus kematian balita tahun 2022 paling tinggi adalah di Kecamatan Beji sebesar 2,48. AKABA yang paling rendah terdapat di Cimanggis dan Cinere.

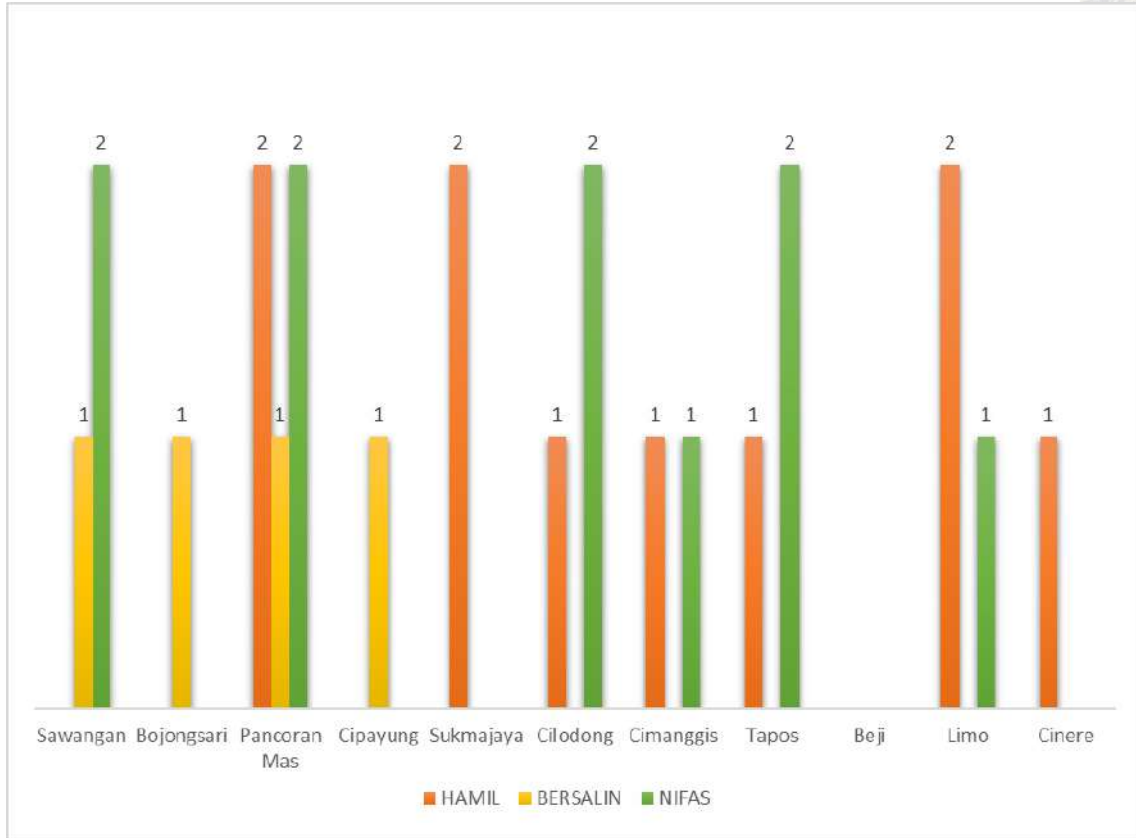
Faktor yang menjadi penyebab kematian Balita di Indonesia berdasarkan temuan penelitian ini adalah usia ibu saat melahirkan, berat badan lahir, jenis kelamin anak. Daerah tempat tinggal, dan jarak kelahiran anak.² Berat badan lahir anak berpengaruh paling signifikan terhadap kematian Balita dibandingkan dengan factor lainnya. Anak yang lahir dengan berat badan lahir berat kurang dari 2.500 gram atau berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lahir dengan berat badan normal (lebih dari 2.500 gram).

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi.

e. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Ratio = MMR*)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

² Journal of Pediatric Nursing. <https://doi.org/10.1016/J.PEDN.2022.02.005>



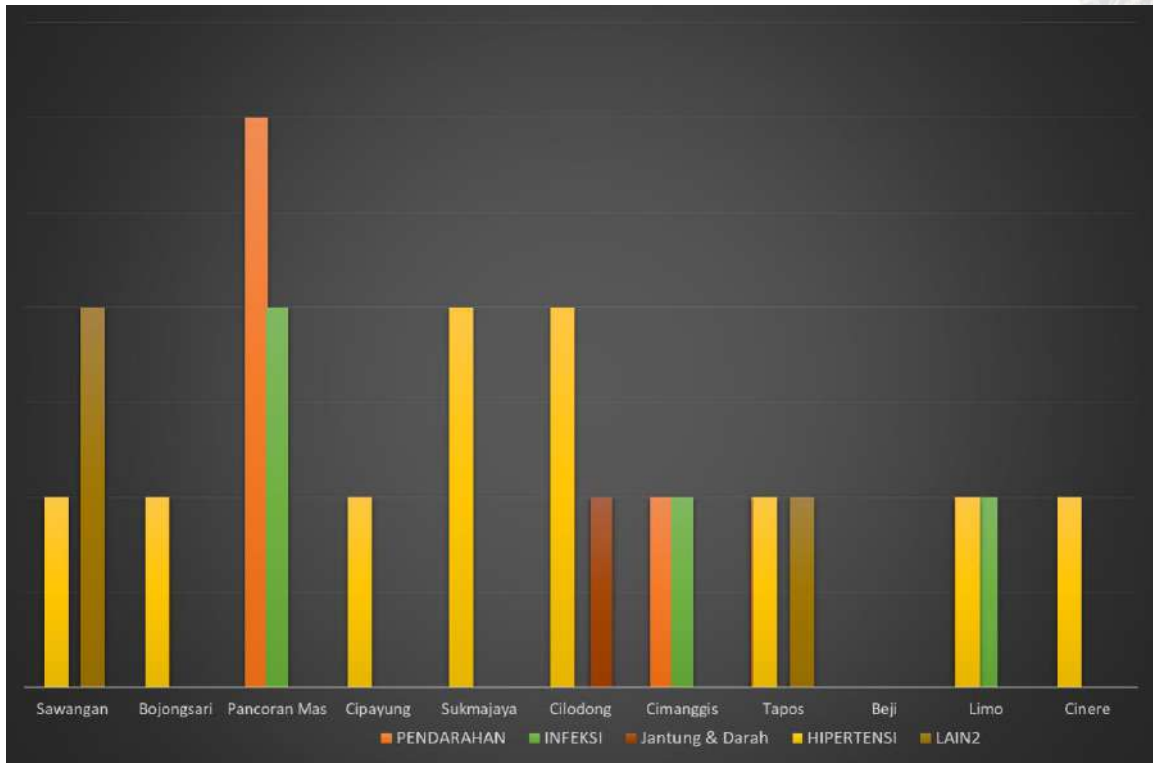
Gambar 4.36 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan, Kota Depok 2022
Sumber : PEP Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022 seperti yang tertera dalam grafik di atas, Kecamatan Pancoran Mas memiliki tingkat kematian yang paling tinggi sejumlah 5 kasus kematian dengan rincian adalah ibu hamil 2 kasus, ibu bersalin 1 kasus, dan 1 kasus untuk ibu nifas.

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kecamatan Beji untuk tahun 2022 tidak ditemukan kasus kematian ibu. Sedangkan untuk kecamatan Bojongsari, Cipayung, dan Cinere hanya ditemukan 1 kasus kematian saja.

Kasus kematian yang ditemukan di Kota Depok di tahun 2022 dengan total 24 kejadian, paling banyak adalah kasus pada kematian ibu hamil dan kematian pada masa nifas masing-masing sebanyak 10 kasus. Sedangkan untuk ibu bersalin hanya terdapat 4 kasus.

Dengan data-data tersebut di atas, bisa disebutkan bahwa angka kematian ibu (yang dilaporkan) memiliki nilai 56,14 persen. Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi.

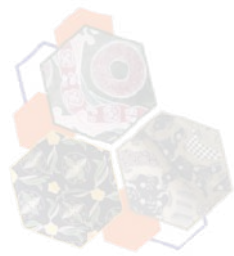


Gambar 4.37 Kematian Ibu Berdasarkan Penyebabnya Kota Depok Tahun 2022
Sumber : PEP Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022

Sedangkan angka kematian ibu menurut data dari Dinas Kesehatan terbagi menjadi 5 (lima) penyebab, yaitu Pendarahan, Gangguan Hipertensi, Infeksi, Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah penyakit jantung (kongenital, PPCM (Peripartum cardiomyopathy), aneurisma aorta, dll), dan penyebab lainnya.

Jika dilihat dari penyebabnya, jumlah kematian ibu Kota Depok tahun 2022 kasus terbanyak dengan jumlah 10 kasus disebabkan oleh gangguan hipertensi, sedangkan untuk gangguan jantung dan pembuluh darah hanya ditemukan 1 kasus selama tahun 2022 di Kecamatan Cilodong.

Kecamatan Pancoran Mas sebagai wilayah yang paling dilaporkan kematian ibu dengan jumlah kasus sebanyak 5 kasus, penyebab paling banyak adalah pendarahan. Penyebab ini bahkan menempati kejadian paling banyak dibandingkan penyebab lainnya di Kota Depok sepanjang Tahun 2022. Secara lengkap gambaran kejadian kematian ibu hamil bisa dilihat pada grafik di atas.



4.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator kualitas penduduk, dan merupakan investasi sumberdaya manusia di masa depan. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Berbagai indikator untuk melihat capaian penduduk dalam bidang pendidikan yaitu angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni.

4.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) berperan penting, sebagai salah satu indikator untuk mengukur output pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase/proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca atau menulis huruf latin dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan mutu dan kemampuan sumberdaya manusia di suatu daerah dalam meyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi indikator melek huruf atau semakin rendahnya Angka Buta Huruf maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di Kota Depok.

Tabel 4.21
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Depok, 2022

Kemampuan Membaca dan Menulis	Laki-laki	Perempuan	Total
Huruf Latin	99,68	98,74	99,21
Huruf Arab	59,04	59,04	59,04
Huruf Lainnya	3,25	2,69	2,97
Melek huruf	99,72	99,11	99,42
Buta Huruf	0,28	0,89	0,58

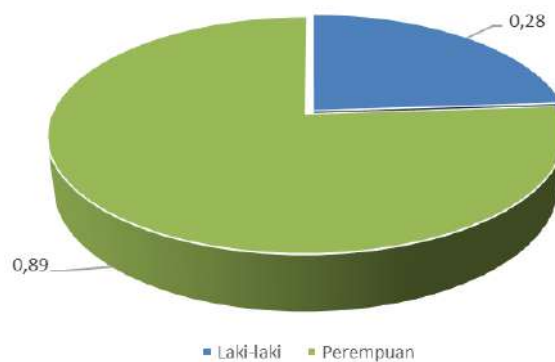
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS di tahun 2022, di Kota Depok masih terdapat 0,58 persen



penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang buta huruf, dengan rincian 0,28 persen laki-laki, dan perempuan sebesar 0,89 persen.

Dengan data tersebut, 99,21 persen penduduk kota Depok sudah mengenal huruf latin, kedudukan perempuan dan laki-laki untuk penilaian angka melek huruf cukup berimbang, yaitu 99,68 persen laki-laki dan perempuan adalah 98,74 persen. Sedangkan huruf arab sebanyak 59,04 persen. Pengenalan huruf ini cukup besar dikarenakan di Kota Depok sendiri agama mayoritas adalah beragama islam. Dan pengenalan huruf lainnya sebesar 2,97 persen.



Tabel 4.38. Persentase Angka Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Kota Depok, 2022

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

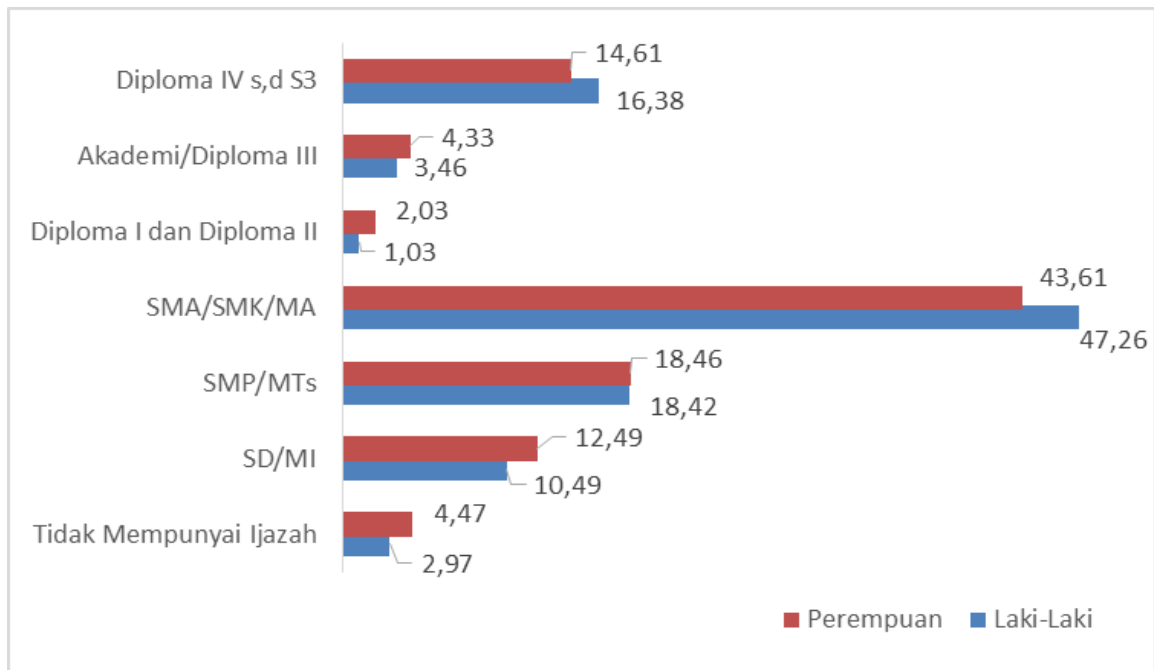
4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk usia muda. Dalam hal ini, meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.



Angka Partisipasi Kasar pada berbagai jenjang pendidikan di Kota Depok disajikan pada gambar 4.39.



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Gambar 4.39. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Depok menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Depok, Tahun 2022

Tabel memperlihatkan bahwa di Kota Depok hasil survey yang dilakukan oleh BPS sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 3,72 persen penduduk kota Depok yang berumur 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah, yaitu laki-laki sebesar 2,97 persen dan perempuan sebesar 4,47 persen.

Dari 100 persen penduduk kota Depok yang sudah berijazah, 45,44 persen merupakan lulusan SMA/SMK/MA/ sederajat. Sedangkan ijazah dengan jenjang yang lebih tinggi, seperti Diploma dan sarjana sebesar 15,50 persen dengan persentase terbesar adalah laki-laki sebesar 16,38 persen.

Dengan melihat tabel jenjang pendidikan di atas, terdapat hal yang menarik yang diperlihatkan di penduduk kota Depok, yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki besaran yang sangat berimbang, dari tingkat pendidikan yang paling rendah seperti Sekolah Dasar (SD) hingga Diploma ataupun sarjana. Ini tentunya memperlihatkan bahwa kesetaraan



gender di Kota Depok sudah sangat baik, terutama dalam hal pentingnya pendidikan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan.

4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama dan berasal dari daerah tersebut. Angka partisipasi murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM justru melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk yang tinggal di suatu wilayah atau kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 4.22.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Menurut Kecamatan Kota Depok, Tahun 2022

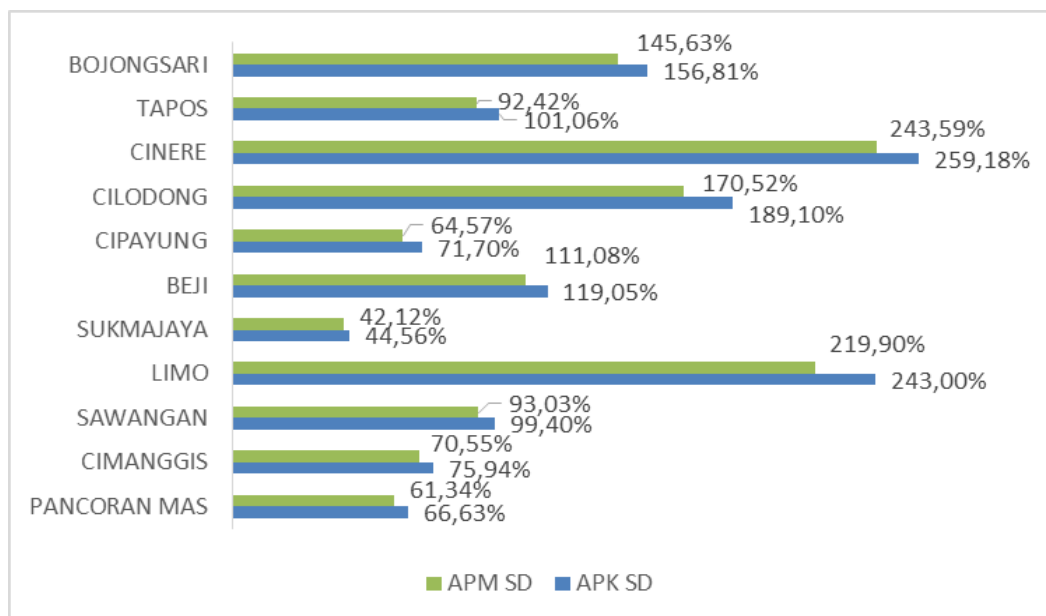
Kecamatan	SD	SD Usia 7-12	MI	MI Usia 7-12	Paket A	Paket A Usia 7-12	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Total Siswa Sd	Total Siswa SD Usia 7-12
Pancoran Mas	12607	12132	3264	2798	347	347	24339	24339	14930
Cimanggis	11382	10931	5523	4996	239	239	22576	22576	15927
Sawangan	14745	14061	3428	2952	6	6	18288	18288	17013
Limo	19233	18433	3913	3528	1122	1122	9987	9987	21961
Sukmajaya	8340	8057	2828	2561	66	66	25210	25210	10618
Beji	14209	13609	5149	4561	117	117	16358	16358	18170
Cipayung	8983	8607	3037	2689	522	522	17493	17493	11296
Cilodong	22864	21851	7310	6466	1228	1228	16606	16606	28317
Cinere	12834	12304	7731	7054	32	32	7947	7947	19358
Tapos	21881	20925	3120	2890	1039	1039	25767	25767	23815
Bojongsari	17708	16974	4772	4160	276	276	14512	14512	21134
Jumlah	164786	157884	50075	44655	4994	4994	199083	199083	202539

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2022



Data APM untuk tingkat SD di Kota Depok Tahun 2022 memperlihatkan bahwa total Siswa SD 199.083 siswa, dengan kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Tapos sebanyak 25.767 siswa. Sedangkan untuk yang paling rendah adalah di Kecamatan Cinere sebesar 7.947 siswa.

Sedangkan untuk perbandingan APM tingkat SD dan SMP diterangkan dalam grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2022

Gambar 4.40. Grafik Perbandingan APM SD dan APM SMP Kota Depok

Tabel 4.23.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Menurut Kecamatan Kota Depok, Tahun 2022

Kecamatan	Smp	Smp Usia 13-15 Tahun	Mts	Usia 13-15 Tahun	Paket B	Paket B Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Total Siswa Smp	Total Siswa Smp Usia 13-15 Tahun
Pancoran Mas	6408	5677	761	672	476	476	12946	7169	6825
Cimanggis	6452	5662	2592	2047	467	467	11050	9044	8176
Sawangan	6393	5552	3127	2355	77	77	9260	9520	7984
Limo	9871	8594	1732	1513	906	906	4996	11603	11013
Sukmajaya	3133	2800	792	742	84	84	12991	3925	3626
Beji	7406	6511	3373	2777	207	207	8139	10779	9495
Cipayung	3523	3114	685	595	241	241	8915	4208	3950
Cilodong	14104	12399	2692	1837	1419	1419	8254	16796	15655
Cinere	7615	6564	2962	1855	398	398	3953	10577	8817
Tapos	8878	7632	1633	1288	691	691	13132	10511	9611



Kecamatan	Smp	Smp Usia 13-15 Tahun	Mts	Usia 13-15 Tahun	Paket B	Paket B Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Total Siswa Smp	Total Siswa Smp Usia 13-15 Tahun
Bojongsari	8607	7567	1751	1357	263	263	6890	10358	9187
Jumlah	77710	67392	22100	17038	5229	5229	100526	104490	94339

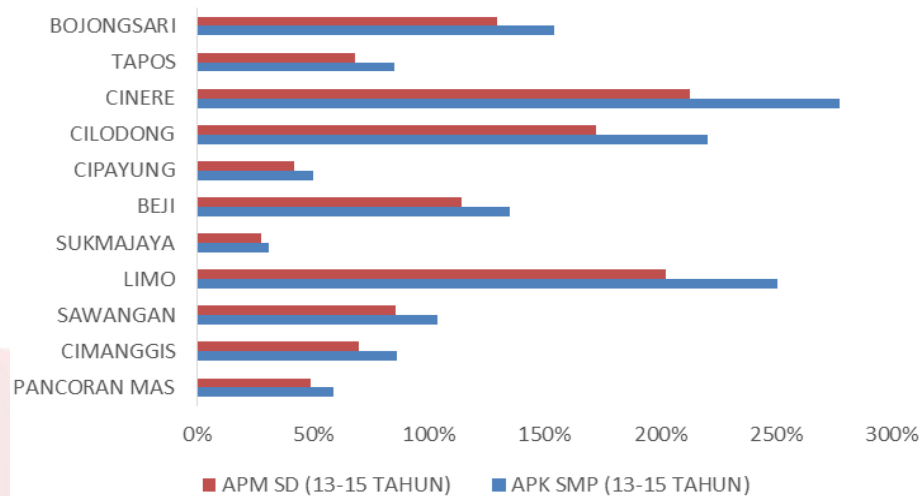
Sumber : Dinas Pendidikan dan Data BPS Kota Depok, Diolah 2022

Sedangkan Perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP sesuai pada tabel di atas yang didalamnya berisi variabel 13-15 Tahun pada jenjang SMP dan MTS, serta Paket B, dengan angka tertinggi pada Kecamatan Cilodong dengan angka sebesar 16.796 siswa. Sedangkan untuk yang paling sedikit adalah terletak pada kecamatan Sukmajaya dengan angka sebesar 3.925 siswa.

Pada perhitungan ini Kota Depok juga memiliki data sebanyak data Paket B dengan total 5.229 data dengan angka terbanyak terletak pada kecamatan Cilodong sebanyak 1.419. dan untuk angka terkecil adalah kecamatan Sawangan dengan angka sebesar 77 data.

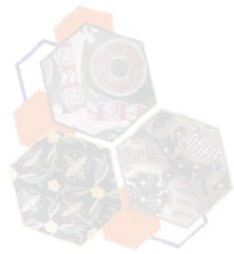
Jumlah Total Siswa Smp Usia 13-15 Tahun pada perhitungan APM di Kota Depok sepanjang tahun 2022, terdapat 94.339 data yang tersebar di 11 kecamatan, dengan angka paling banyak terletak pada Kecamatan Cilodong sebesar 15.655, sedangkan untuk angka terkecil terletak pada Kecamatan Sukmajaya dengan angka sebanyak 3.626 Data.

Sedangkan untuk perbandingan APM tingkat SD dan APK SMP diterangkan dalam grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2022

Gambar 4.41. Grafik Perbandingan APM SD dan APK SMP Kota Depok



4.2.3. Ekonomi

Aspek ekonomi yang disajikan pada bagian ini menyangkut ketenagakerjaan. Data penduduk yang digunakan berdasarkan SIAK DKB. Sayangnya data terkait ketenagakerjaan ini belum tersedia dengan lengkap dari hasil pelaporan, masih mengandalkan data hasil survey dari BPS.

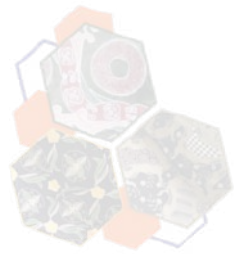
4.2.3.1. Proporsi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja, sesuai yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Dari data Tahun 2020, jumlah penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 1.316.121 jiwa atau 70%.

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang tergolong Bukan Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang kegiatan utama sehari-harinya adalah sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan lainnya, dan tidak sedang aktif mencari pekerjaan. (Statistik Kota Depok, 2020).

Klasifikasi tenaga kerja yang umum dibagi tiga macam yaitu tenaga kerja terdidik (*skill labour*), tenaga kerja terlatih (*trainer labour*), tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*).

1. Tenaga kerja terdidik (*skill labour*) merupakan tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu, tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut. Tenaga kerja terdidik ini diidentikkan dengan tenaga kerja yang belum berpengalaman.
2. Tenaga kerja Terlatih (*trained labour*) yaitu tenaga kerja yang sudah berpengalaman.
3. Tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*) yaitu tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada.



4.2.3.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

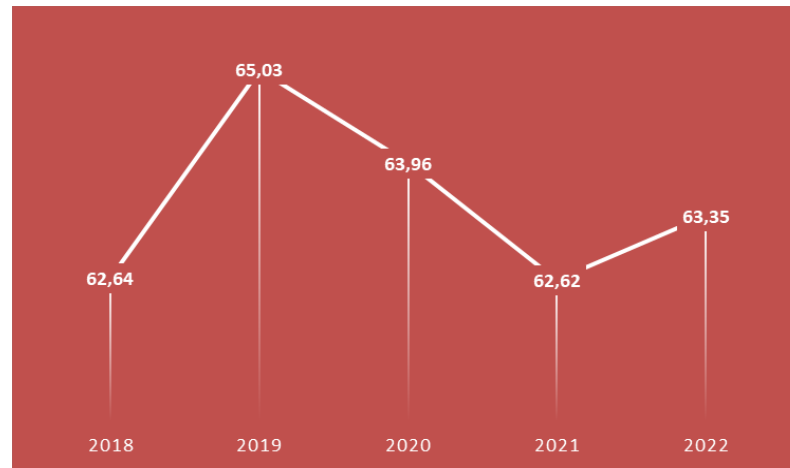
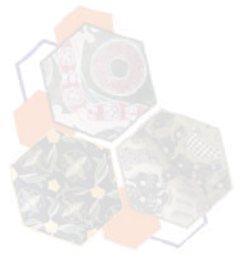
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka ini menunjukkan jumlah penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dibandingkan dengan penduduk berumur 15 tahun ke atas (Statistik Kota Depok, 2021). Pada Tahun 2022, TPAK Kota Depok mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 62,62 persen menjadi 63,35 persen pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kota Depok usia 15 tahun ke atas, sebanyak 62 sampai 63 orang tersedia untuk bekerja pada Tahun 2022.

Tabel 4.24.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Jenis Kelamin	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	80,16	81,82	80,25	77,24	79,26
Perempuan	45,09	48,23	47,57	47,92	47,36
Laki-laki+ Perempuan	62,64	65,03	63,96	62,62	63,35

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat pola yang fluktuatif rentang tahun 2018 - 2022 TPAK, tetapi masih dikisaran angka 60an persen. Terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 62,62 persen menjadi 63,35 persen, dengan komposisi laki-laki sebesar 79,26 persen, dan perempuan sebesar 47 persen.



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2022

Gambar 4.42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok Tahun 2018-2022

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tren TPT memperlihatkan penurunan, yang berarti bahwa penyerapan angkatan kerja semakin meningkat.

Tabel 4.25. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

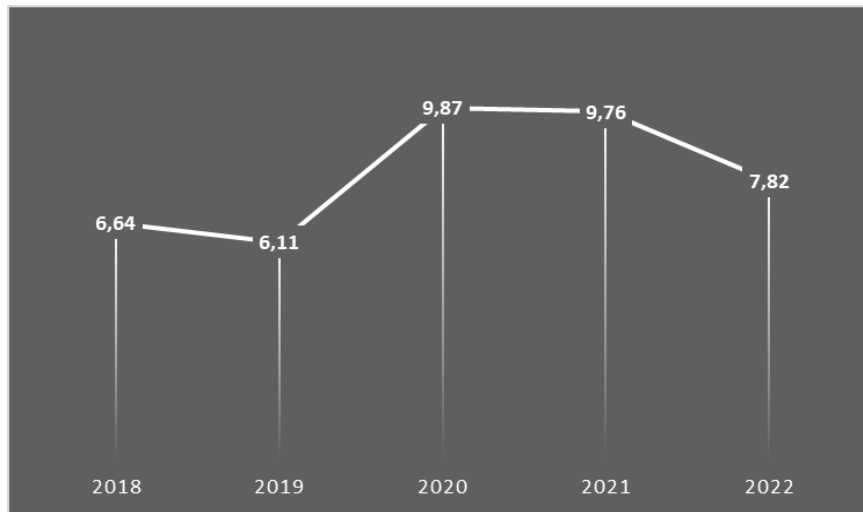
Jenis Kelamin	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	6,41	5,85	10,28	10,22	8,24
Perempuan	7,03	6,54	9,17	9,01	7,11
Laki-laki+ Perempuan	6,64	6,11	9,87	9,76	7,82

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin rentang tahun 2018-2022 untuk kota Depok mengalami penurunan, dari angka 9,76 persen menjadi 7,82 persen di tahun 2022. Penurunan ini terjadi dimungkinkan sudah mulai menggeliatkan perekonomian Kota Depok Pasca meredanya Covid-19. Sepanjang tahun 2022 terdapat 8,24 persen laki-laki dan 7,11 persen untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok. Terdapat signifikansi penurunan baik pada laki-laki maupun perempuan TPT dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Akan tetapi, capaian angka di



tahun ini masih belum bisa lebih rendah untuk TPT di tahun 2019 pada angka 6,11 persen.



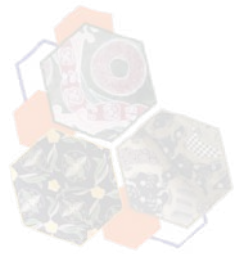
Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2022

Gambar 4.43. TPT Kota Depok Tahun 2018-2022

Selanjutnya penduduk dibedakan menurut kegiatan utamanya disajikan pada Tabel 4.26. Terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terlihat tren yang bekerja meningkat walaupun terlihat menurun seperti pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Sementara itu penduduk menganggur terlihat naik turun sepanjang 2018-2022, dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2020 yaitu dari 72.325 orang menjadi 118.022 orang yang menganggur. Seperti juga dengan TPT tahun 2020 kemungkinan besar hal ini sebagai dampak pandemic Covid 19 yang dimulai tahun 2019 dan dampak terbesar terjadi pada tahun 2020.

Sedangkan di tahun 2022 Jumlah jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 jumlah BAK 728.141 meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah 720.646. peningkatan ini terjadi karena Jumlah Penduduk usia kerja 15 thn keatas juga meningkat dari tahun 2021 berjumlah 1.927.757 menjadi 1.986.880 di tahun 2022.

Secara lengkap penyajian data untuk Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2018-2022 tertera dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.26.
Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu
2015-2022, Kota Depok

Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bekerja	1.028.292	1.112.358	1.077.600	1.089.295	1.160.313
Menganggur	73.080	72.325	118.032	117.816	98.426
Jumlah Angkatan Kerja (AK)	1.101.372	1.184.683	1.195.632	1.207.111	1.258.739
Sekolah	176.166	179.043	173.553	175.268	178.565
Mengurus Rumah tangga	424.725	396.540	415.316	414.555	441.214
Lainnya	55.978	61.352	84.823	130.823	108.362
Jumlah BAK	656.869	636.935	673.692	720.646	728.141
Jumlah Penduduk usia kerja 15 thn keatas	1.758.241	1.821.618	1.869.324	1.927.757	1.986.880
TPT	6,64	6,11	9,87	9,76	7,82
TPAK	62,64	65,03	63,96	62,62	63,35

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015-2022

4.2.4. Sosial

Bidang sosial juga merupakan bidang yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara pengertian umum, masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Masalah sosial terjadi karena fenomena yang ditimbulkan oleh individu atau antarkelompok sehingga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan sosial atau masalah sosial dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menggambarkan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan. Hal



ini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terpadu.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Informasi mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penduduk miskin yang perlu mendapat bantuan atau jaminan sosial dari pemerintah diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

4.2.4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Masalah kependudukan tidak terlepas dari masalah sosial yang dihadapi, sehingga perlu penanganan dari pemerintah terhadap penduduk tersebut.

Melihat data yang dirilis oleh Dinas Sosial Kota Depok, untuk data fakir miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021 tercatat 315.698 keluarga meningkat menjadi 332.106 keluarga di tahun 2022. Sedangkan anak balita terlantar, terdapat kenaikan yang signifikan, tahun 2021 hanya 1 anak meningkat menjadi 16 anak di tahun 2022. Akan tetapi untuk anak terlantar usia 6-17 tahun mengalami penurunan yang drastis dari 1.311 anak di tahun 2021 menjadi 236 anak di tahun 2022. Secara lengkap data-data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Jenisnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.27.
jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Jenisnya Tahun 2022

NO	JENIS PPKS	2020	2021	2022*	SAT
1	Anak Balita terlantar	-	1	16	Jiwa
2	Anak terlantar usia 6-17 tahun	1.200	1.311	236	Jiwa
3	Anak berhadapan dengan hukum	129	86	108	Jiwa
4	Anak jalanan	250	49	22	Jiwa
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	236	130	123	Jiwa
6	Anak yg memerlukan perlindungan khusus	45	183	130	Jiwa



NO	JENIS PPKS	2020	2021	2022*	SAT
7	Lanjut usia terlantar	330	360	99	Jiwa
8	Penyandang disabilitas	2.759	2.638	2.132	Jiwa
9	Tuna susila	243	230	10	Jiwa
10	Gelandangan	411	283	159	Jiwa
11	Pengemis	547	284	28	Jiwa
12	Pemulung	212	283	637	Jiwa
13	Bekas warga binaan Pemasarakatan	20	25	1	Jiwa
14	Penderita HIV/AIDS	352	1.244	327	Jiwa
15	Korban penyalahgunaan NAPZA	37	32	82	Jiwa
16	Korban trafficking	1	-	1	Jiwa
17	Korban tindak kekerasan	162	120	70	Jiwa
18	Pekerja migran bermasalah sosial	-	-	-	Jiwa
19	Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	1053	1.020	99	Jiwa
21	Fakir miskin	99.121	315.698	332.106	Keluarga
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	115	120	70	Jiwa
22	Keluarga bermasalah tidak layak huni	10.191	12.347	897	Keluarga
23	Korban bencana alam	15.961	8.531	3.316	Jiwa

*) Data menggunakan DIKS dan data PPKS yang mendapatkan pelayanan
 Sumber : Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2022

4.2.4.2. Jumlah Penduduk Miskin

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

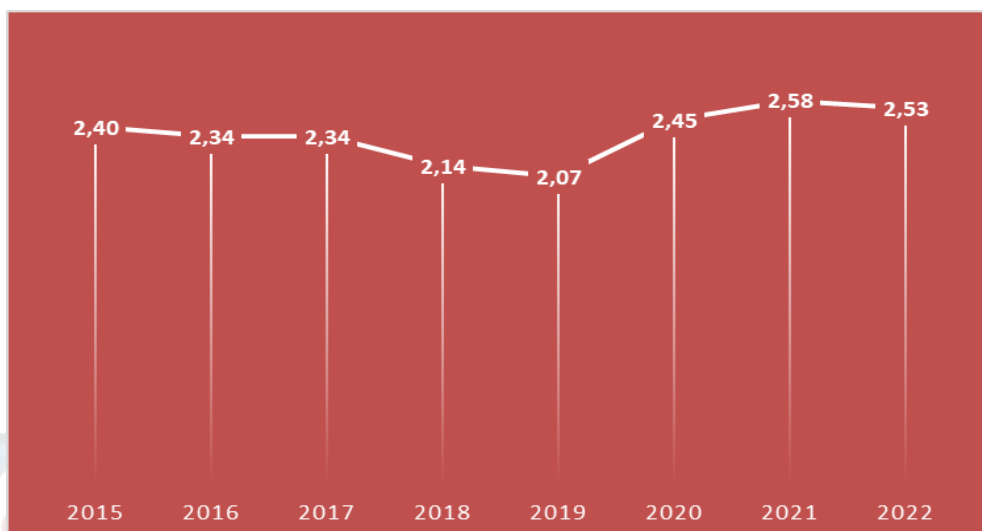


Sesuai data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Depok, garis kemiskinan Kota Depok di tahun 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2021 adalah senilai Rp705.084 meningkat menjadi Rp744.771 di tahun 2022. Akan tetapi kenaikan ini juga dibarengi dengan kenaikan penduduk miskin. Tercatat tahun 2021 berjumlah 63,86 ribu (2,58%) menjadi 64,36 ribu (2,53%). Secara lengkap data garis kemiskinan dan penduduk miskin disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.28.
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2022

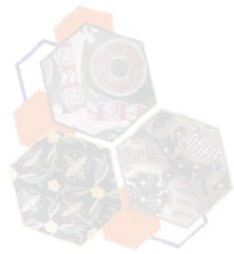
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2015	496.747	49,97	2,40
2016	522.934	50,56	2,34
2017	556.470	52,34	2,34
2018	615.255	49,39	2,14
2019	644.860	49,35	2,07
2020	688.194	60,43	2,45
2021	705.084	63,86	2,58
2022	744.771	64,36	2,53

Sumber : BPS Kota Depok, 2022



Sumber : BPS Kota Depok, 2022

Gambar 4.44. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2022



4.3. Mobilitas Penduduk

Depok merupakan wilayah primadona tujuan migrasi, salah satu indikasinya pertambahan penduduk dari penduduk yang datang lebih besar daripada jumlah yang keluar. Dari segi mobilitas juga cukup tinggi, baik secara permanen maupun non permanen. Sebagai kawasan yang cukup strategis dan berada pada poros Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), Kota Depok telah menjadi kota yang cukup nyaman untuk bermukim. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, maka Kota Depok menjadi salah satu magnet bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan. Sebagai konsekuensinya, Kota Depok menjadi daerah pemukiman yang padat penduduk.

Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan, dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan. Di Indonesia ketika laju pertumbuhan penduduk alamiah sudah dapat diturunkan melalui pengendalian kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk mulai memperoleh perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi seperti masalah kriminalitas, terorisme, konflik sosial, konflik antar suku, pelanggaran norma budaya yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat.

Ada dua tipe mobilitas penduduk, yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk permanen di Indonesia sudah banyak diteliti dan dianalisis oleh berbagai ahli kependudukan. Sedangkan penelitian mobilitas non permanen secara makro belum banyak dilakukan, karena keterbatasan data yang ada. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun daerah tujuan. Oleh sebab itu pengarahannya perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial.

Selain mobilitas yang dilakukan oleh penduduk Indonesia, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kecenderungan adanya arus migrasi masuk dari negara lain. Jika hal ini tidak dapat



diatasi, maka tidak menutup kemungkinan Kota Depok yang sudah padat akan semakin padat dengan bertambahnya penduduk imigran dari negara lain. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan dan mengaktifkan kegiatan pencatatan dan pelaporan setiap kejadian mobilitas penduduk. Bagi penduduk pendatang terutama dari negara lain, yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi, baik izin tinggal maupun bekerja, diberlakukan penerapan penegakan hukum dan peraturan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi meledaknya arus migrasi masuk ke Kota Depok, dan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan penduduk.

4.3.1. Mobilitas Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi Internasional). Migrasi ini juga diartikan sebagai perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Sebagai contoh, berpindahnya penduduk dari daerah kurang tersedia sumber daya untuk memberikan jaminan kehidupan, karena banyak kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya.

4.3.1.1. Migrasi Masuk

Migrasi masuk (*in migration*) adalah masuknya penduduk ke suatu wilayah tempat tujuan (*area of destination*). Migrasi masuk Kota Depok merupakan jumlah penduduk yang masuk (pindah datang) dari berbagai wilayah datang ke Kota Depok untuk menetap. Migrasi penduduk masuk ke Kota Depok (pindah datang) sesuai hasil pendaftaran penduduk sampai Bulan Desember Tahun 2022 adalah 39.261 jiwa, sementara pada tahun



sebelumnya berjumlah 37.332 jiwa (2021). Pindah datang yang berasal dari Antar Kota tahun 2022 berjumlah 10.056 jiwa dan dari Antar Provinsi berjumlah 29.205 jiwa. Angka Migrasi Masuk tahun 2022 sebesar 20,64 atau 20 jiwa. Ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Depok pertengahan tahun terdapat 20 jiwa merupakan migran masuk (pindah datang). Keadaan penduduk pindah keluar Kota Depok dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.29
Angka Migrasi Masuk Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Pindah Datang			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022	Angka Migrasi Masuk
	Antar Kota	Antar Prov	Jmlh		
Pancoran Mas	1.010	3.084	4.094	236.952	17,28
Cimanggis	1.136	3.666	4.802	234.239	20,50
Sawangan	998	3.625	4.623	162.186	28,50
Limo	377	1.784	2.161	95.386	22,66
Sukmajaya	1.023	2.850	3.873	247.684	15,64
Beji	714	2.032	2.746	155.131	17,70
Cipayung	919	2.368	3.287	156.912	20,95
Cilodong	1.228	2.702	3.930	157.017	25,03
Cinere	266	1.262	1.528	84.333	18,12
Tapos	1.599	3.236	4.835	248.835	19,43
Bojongsari	786	2.596	3.382	123.484	27,39
Jumlah	10.056	29.205	39.261	1.902.159	20,64

Sumber :

1. Jmlh Penduduk Pertengahan Tahun - Disdukcapil (DKB Semester 1 Tahun 2022)
2. Jumlah Pindah Datang Thn 2021 - Disdukcapil (Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022)

4.3.1.2. Migrasi Keluar

Migrasi keluar (*out migration*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*area of origin*). Migrasi keluar Kota Depok berarti jumlah penduduk yang pindah (pindah keluar) dari Kota Depok ke berbagai wilayah luar Kota Depok. Migrasi penduduk keluar dari Kota Depok (pindah keluar) pada Tahun 2022 berjumlah 33.900 jiwa, menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.633 jiwa (2021). Pindah keluar ke Antar Kota tahun 2022 berjumlah 12.124 jiwa, dan ke Antar



Provinsi berjumlah 21.776 jiwa. Angka Migrasi keluar tahun 2022 sebesar 17,82 atau 17-18 jiwa. Ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Depok pertengahan tahun terdapat 17-18 jiwa penduduk pindah ke luar Depok. Keadaan penduduk pindah keluar Kota Depok dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.30
Angka Migrasi Keluar Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Pindah Keluar			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022	Angka Migrasi Keluar
	Antar Kota	Antar Prov	Jmlh		
Pancoran Mas	1.439	2.396	3.835	236.952	16,18
Cimanggis	1.767	3.899	5.666	234.239	24,19
Sawangan	715	1.381	2.096	162.186	12,92
Limo	381	978	1.359	95.386	14,25
Sukmajaya	1.828	2.629	4.457	247.684	17,99
Beji	1.028	2.001	3.029	155.131	19,53
Cipayung	996	1.468	2.464	156.912	15,70
Cilodong	1.237	1.774	3.011	157.017	19,18
Cinere	392	1.589	1.981	84.333	23,49
Tapos	1.721	2.376	4.097	248.835	16,46
Bojongsari	620	1.285	1.905	123.484	15,43
Jumlah	12.124	21.776	33.900	1.902.159	17,82

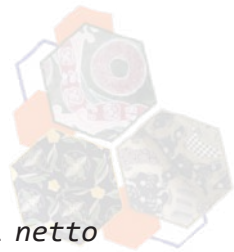
Sumber :

1. Jmlh Penduduk Pertengahan Tahun - Disdukcapil (DKB Semester 1 Tahun 2022)
2. Jumlah Pindah Keluar Thn 2021 - Disdukcapil (Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022)

4.3.1.3. Migrasi Netto

Migrasi netto (*net migration*) adalah merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk (*in migration*) dan migrasi keluar (*out migration*). Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, maka disebut migrasi netto negatif.

Migrasi netto di Kota Depok pada tahun 2022 sebanyak 5.361 jiwa. Jumlah ini merupakan selisih total migrasi masuk (39.261 jiwa) di kurang migrasi keluar (33.900 jiwa). Terdapat 4 kecamatan terjadi migrasi *netto negative*, yaitu kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, Beji, dan



Cinere. 7 kecamatan lainnya terjadi migrasi *netto positif*. Migrasi *netto negative* tertinggi di kecamatan Cimanggis (-864 jiwa), dan terendah di kecamatan Beji (-283 jiwa). Sedangkan migrasi *netto positif*, terbanyak di kecamatan Bojongsari (1.477 jiwa) dan yang terendah di kecamatan Pancoran Mas (259 jiwa).

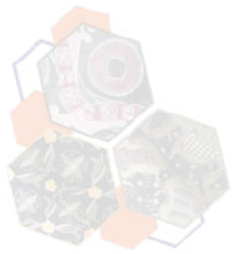
Berikut penyajian lengkap Angka Migrasi Neto (*nett-migration*/MJ kota Depok di Tahun 2022.

Tabel 4.31 Angka Migrasi Neto (*nett-migration*) Kota Depok Tahun 2022

Kecamatan	Pindah Datang			Pindah Keluar			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022	Angka Migrasi Neto
	Antar Kota	Antar Prov	Jmlh	Antar Kota	Antar Prov	Jmlh		
Pancoran Mas	1.010	3.084	4.094	1.439	2.396	3.835	236.952	1,09
Cimanggis	1.136	3.666	4.802	1.767	3.899	5.666	234.239	-3,69
Sawangan	998	3.625	4.623	715	1.381	2.096	162.186	15,58
Limo	377	1.784	2.161	381	978	1.359	95.386	8,41
Sukmajaya	1.023	2.850	3.873	1.828	2.629	4.457	247.684	-2,36
Beji	714	2.032	2.746	1.028	2.001	3.029	155.131	-1,82
Cipayung	919	2.368	3.287	996	1.468	2.464	156.912	5,24
Cilodong	1.228	2.702	3.930	1.237	1.774	3.011	157.017	5,85
Cinere	266	1.262	1.528	392	1.589	1.981	84.333	-5,37
Tapos	1.599	3.236	4.835	1.721	2.376	4.097	248.835	2,97
Bojongsari	786	2.596	3.382	620	1.285	1.905	123.484	11,96
Jumlah	10.056	29.205	39.261	12.124	21.776	33.900	1.902.159	2,82

Sumber :

1. Jmlh Penduduk Pertengahan Tahun - Disdukcapil (DKB Semester 1 Tahun 2022)
2. Jumlah Pindah Keluar Thn 2021 - Disdukcapil (Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022)



BAB 5

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN





BAB 5

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya.

Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk dalam pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini nampak dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pencatatan dan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk lebih tertib administrasi kependudukannya

5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kepemilikan kartu keluarga yang dalam istilah perkembangan kependudukan tahun sebelumnya disebutkan dengan sudah tercetak dan belum tercetak. Dalam buku profil perkembangan kependudukan tahun 2022 istilah tersebut dijelaskan dengan kepemilikan.

Jumlah Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2022 tercatat 602.532 KK yang sudah memiliki. Jika melihat jumlah keluarga Kota Depok yang



berjumlah 604.123, artinya kepemilikan KK sudah mencapai 99,12 persen, atau hanya 0,88 persen yang belum memiliki KK. Berikut tabel lengkapnya.

Tabel 5.1. Daftar Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Depok, 2022

Kode_Nama_Kec	Kode_Nama_Kel	Jmlh Kk	Kepemilikan Kk			
			Memiliki	%	Belum Memiliki	%
01-Pancoran Mas	1006-Depok	14.667	14.635	99,78	32	0,22
	1007-Depok Jaya	8.171	8.150	99,74	21	0,26
	1008-Pancoran Mas	19.867	19.805	99,69	62	0,31
	1009-Mampang	8.463	8.445	99,79	18	0,21
	1010-Rangkapan Jaya Baru	11.649	11.633	99,86	16	0,14
	1011-Rangkapan Jaya	12.348	12.320	99,77	28	0,23
	Jumlah		75.165	74.988	99,76	177
02-Cimanggis	1007-Harjamukti	7.622	7.614	99,90	8	0,10
	1008-Curug	7.206	7.190	99,78	16	0,22
	1009-Tugu	27.265	27.181	99,69	84	0,31
	1010-Mekarsari	15.331	15.283	99,69	48	0,31
	1011-Pasir Gunung Selatan	11.300	11.272	99,75	28	0,25
	1012-Cisalak Pasar	7.783	7.766	99,78	17	0,22
Jumlah		76.507	76.306	99,74	201	0,26
03-Sawangan	1001-Pasir Putih	8.791	8.753	99,57	38	0,43
	1002-Bedahan	9.878	9.839	99,61	39	0,39
	1003-Pengasinan	8.294	8.275	99,77	19	0,23
	1009-Cinangka	6.315	6.306	99,86	9	0,14
	1010-Sawangan	6.066	6.055	99,82	11	0,18
	1011-Sawangan Baru	5.573	5.555	99,68	18	0,32
	1012-Kedaung	5.155	5.144	99,79	11	0,21
Jumlah		50.072	49.927	99,71	145	0,29
04-Limo	1001-Meruyung	6.337	6.313	99,62	24	0,38
	1002-Grogol	8.517	8.492	99,71	25	0,29
	1003-Krukut	4.973	4.968	99,90	5	0,10
	1004-Limo	10.220	10.208	99,88	12	0,12
Jumlah		30.047	29.981	99,78	66	0,22
05-Sukmajaya	1001-Sukmajaya	10.381	10.339	99,60	42	0,40
	1003-Abadijaya	19.272	19.237	99,82	35	0,18
	1004-Mekarjaya	18.841	18.798	99,77	43	0,23
	1005-Baktijaya	18.656	18.613	99,77	43	0,23
	1008-Cisalak	5.534	5.524	99,82	10	0,18
	1010-Tirtajaya	6.604	6.596	99,88	8	0,12
Jumlah		79.288	79.107	99,77	181	0,23



Kode_Nama_Kec	Kode_Nama_Kel	Jmlh Kk	Kepemilikan Kk			
			Memiliki	%	Belum Memiliki	%
06-Beji	1001-Beji	15.178	15.118	99,60	60	0,40
	1002-Kukusan	5.780	5.771	99,84	9	0,16
	1003-Tanah Baru	10.563	10.548	99,86	15	0,14
	1004-Kemirimuka	10.218	10.188	99,71	30	0,29
	1005-Pondok Cina	4.041	4.032	99,78	9	0,22
	1006-Beji Timur	3.530	3.522	99,77	8	0,23
	Jumlah		49.310	49.179	99,73	131
07-Cipayung	1001-Cipayung	9.641	9.605	99,63	36	0,37
	1002-Cipayung Jaya	6.315	6.292	99,64	23	0,36
	1003-Ratu Jaya	13.016	12.948	99,48	68	0,52
	1004-Bojong Pondok Terong	11.682	11.663	99,84	19	0,16
	1005-Pondok Jaya	8.668	8.629	99,55	39	0,45
	Jumlah		49.322	49.137	99,62	185
08-Cilodong	1001-Sukamaju	21.877	21.839	99,83	38	0,17
	1002-Cilodong	6.857	6.831	99,62	26	0,38
	1003-Kalibaru	9.444	9.423	99,78	21	0,22
	1004-Kalimulya	6.547	6.531	99,76	16	0,24
	1005-Jatimulya	4.733	4.719	99,70	14	0,30
	Jumlah		49.458	49.343	99,77	115
09-Cinere	1001-Cinere	10.707	10.679	99,74	28	0,26
	1002-Gandul	7.850	7.839	99,86	11	0,14
	1003-Pangkalan Jati	5.788	5.773	99,74	15	0,26
	1004-Pangkalan Jati Baru	3.401	3.385	99,53	16	0,47
	Jumlah		27.746	27.676	99,75	70
10-Tapos	1001-Tapos	5.460	5.442	99,67	18	0,33
	1002-Leuwinanggung	4.393	4.380	99,70	13	0,30
	1003-Sukatani	17.645	17.600	99,74	45	0,26
	1004-Sukamaju Baru	14.140	14.100	99,72	40	0,28
	1005-Jatijajar	12.069	12.055	99,88	14	0,12
	1006-Cilangkap	17.260	17.218	99,76	42	0,24
	1007-Cimpaeun	8.347	8.328	99,77	19	0,23
	Jumlah		79.314	79.123	99,76	191
11-Bojongsari	1001-Bojongsari	5.073	5.059	99,72	14	0,28
	1002-Bojongsari Baru	3.532	3.522	99,72	10	0,28
	1003-Serua	5.937	5.924	99,78	13	0,22
	1004-Pondok Petir	7.006	6.984	99,69	22	0,31
	1005-Curug	7.002	6.976	99,63	26	0,37

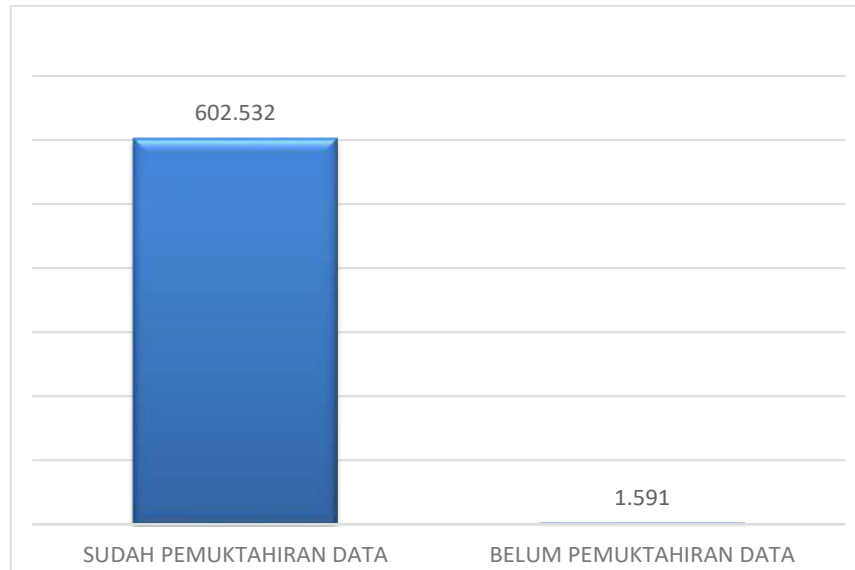
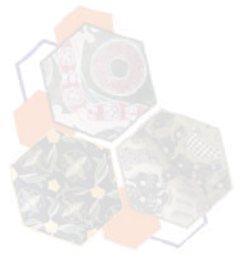


Kode_Nama_Kec	Kode_Nama_Kel	Jmlh Kk	Kepemilikan Kk			
			Memiliki	%	Belum Memiliki	%
	1006-Duren Mekar	5.462	5.432	99,45	30	0,55
	1007-Duren Seribu	3.882	3.868	99,64	14	0,36
	Jumlah	37.894	37.765	99,66	129	0,34
	Jumlah Total	604.123	602.532	99,74	1.591	0,26

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Data penduduk berdasarkan NIK bekorelasi dengan tabel catatan sipil kelahiran dan kematian dalam SIAK, jika data tidak akurat secara sistemik dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian pembangunan Daerah mengingat penduduk telah dimaknai sebagai subyek dan obyek pembangunan. Alternatif terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah memperbaiki atribusi Kartu Keluarga (KK) yang notabene mencakup identitas terlengkap penduduk dalam lingkup keluarga meliputi nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, hingga nama ayah dan ibu. Setiap terjadi perubahan data dalam kartu keluarga seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepindahan, dan lain-lain, maka kepala keluarga wajib melaporkan ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan ke kantor kelurahan, harus membawa 2 (dua) lembar kartu keluarga yaitu yang disimpan oleh kepala keluarga dan oleh ketua RT dan dari hasil pelaporan tersebut akan diterbitkan kartu keluarga baru.

Jumlah kepala keluarga yang status kartu kepala keluarganya sudah cetak (sudah memiliki kartu keluarga) dan melakukan pemutakhiran data di Kota Depok sampai kuartal ke 2 tahun 2022 sebanyak 604.123 atau 99,2 persen dari 609.495 jumlah total kepala keluarga di Kota Depok, sehingga kepala keluarga yang belum melakukan pemutakhiran data sekitar 5.372 kepala keluarga atau 0,88 persen.



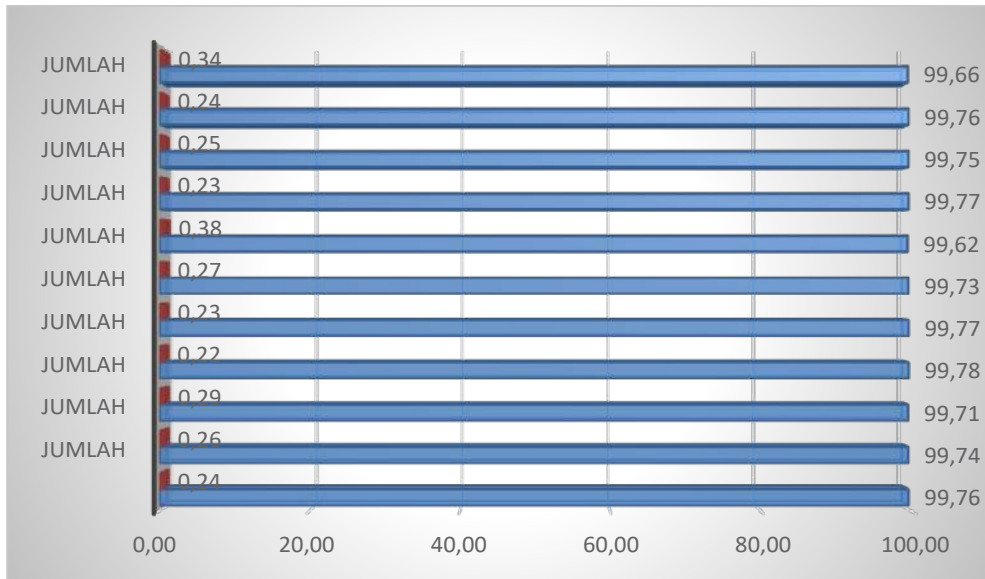
Gambar 5.1 Jumlah Kartu Keluarga Menurut Pemutakhiran/Pencetakan, Kota Depok 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2021

Dengan menggunakan informasi dalam kartu keluarga, didapatkan data dasar kependudukan, potensi keluarga serta besaran keluarga di suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu, seperti kelurahan. Berdasarkan kartu keluarga ini pula pemerintah dapat melakukan intervensi misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin maupun intervensi untuk anggota keluarga yang menyandang disabilitas dan memerlukan pertolongan.

Jika didasarkan pada kepemilikan KK menurut kecamatan, Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terbanyak yang sudah memiliki KK dengan jumlah 79.288 KK atau 98,99 persen. Sedangkan Kecamatan Cinere merupakan wilayah yang paling sedikit, yaitu sejumlah 27.746 KK sudah dimiliki atau 98 persen.

Disamping sebagai kecamatan yang paling banyak memiliki KK, kecamatan Sukmajaya juga wilayah yang paling tinggi masyarakatnya yang belum memiliki KK. Tercatat sebanyak 812 belum memiliki KK atau 1,01 persen. Sedangkan Kecamatan Bojongsari menjadi wilayah yang paling sedikit masyarakatnya yang belum memiliki, yaitu hanya sebanyak 285 atau 0,75 persen. Dengan demikian dari 11 kecamatan yang tersebar di Kota Depok, sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 0,88 persen yang belum memiliki kartu keluarga atau 5.372 yang masyarakat belum memiliki KK.



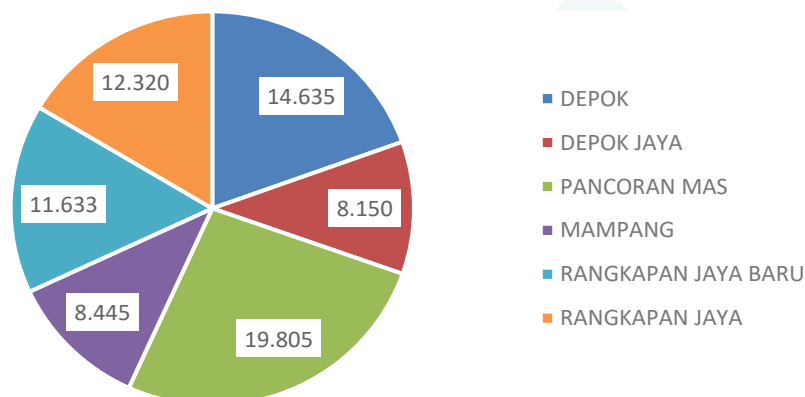
Gambar 5.2 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Menurut Kecamatan, Kota Depok, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.1. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Pancoran Mas

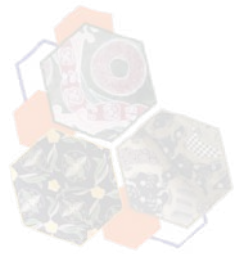
Jumlah KK di Kecamatan Pancoran Mas adalah sebanyak 75.897 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Pancoran Mas sebanyak 20.052, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Depok Jaya sebanyak 8.300.

Adapun jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Pancoran Mas sebanyak 74.988 atau 99,76 persen. Kelurahan Pancoran Mas merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 19.805 KK atau 99,69 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Depok Jaya dengan jumlah 8.150 atau 99,74 persen.



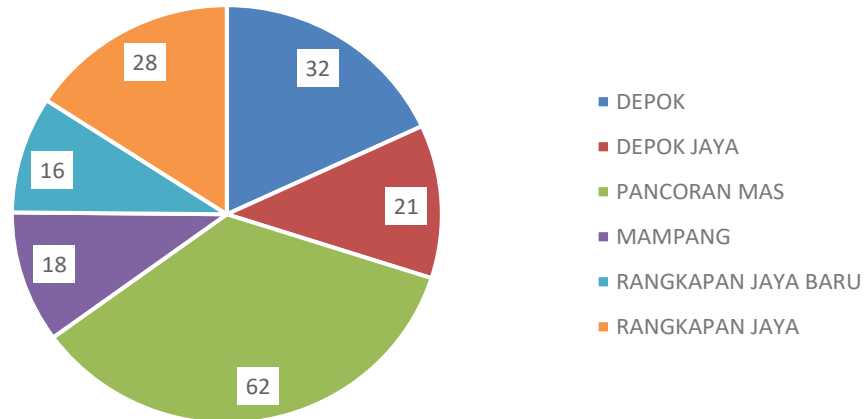
Gambar 5.3. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022



Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Pancoran Mas, hanya 0,24 persen atau 177 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Pancoran Mas menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 62 atau 0,31 persen. Sedangkan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 16 atau 0,14 persen.

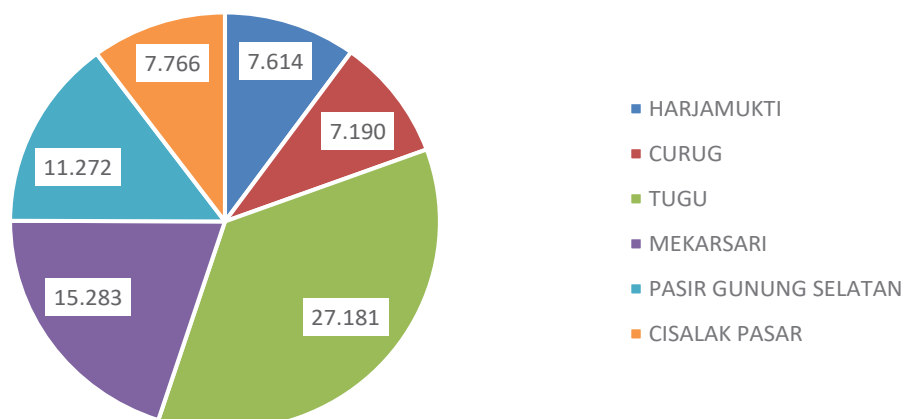


Gambar 5.4. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.2. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cimanggis

Jumlah KK di Kecamatan Cimanggis adalah sebanyak 76.507 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Tugu sebanyak 27.265, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Curug sebanyak 7.206.



Gambar 5.5. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Tahun 2022

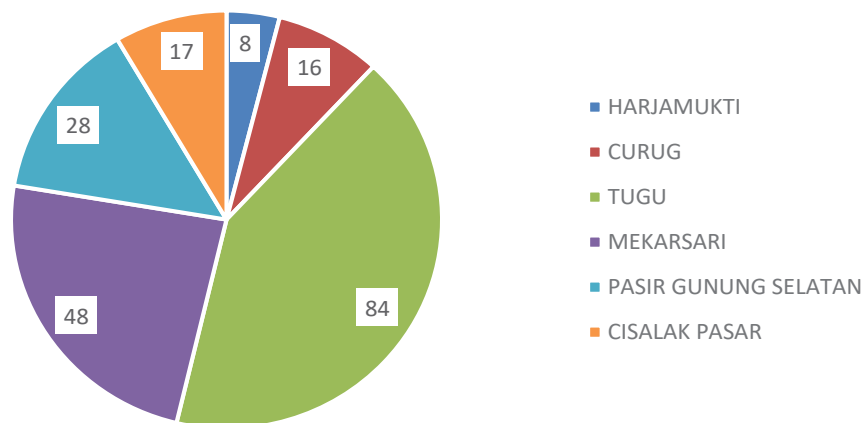
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022



Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Cimanggis sebanyak 76.306 atau 99,74 persen. Kelurahan Tugu merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 27.181 KK atau 99,69 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Curug dengan jumlah 7.190 atau 99,78 persen.

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Cimanggis, hanya 0,26 persen atau 201 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Tugu menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 84 atau 0,31 persen. Sedangkan Kelurahan Harjamukti merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 8 atau 0,10 persen.



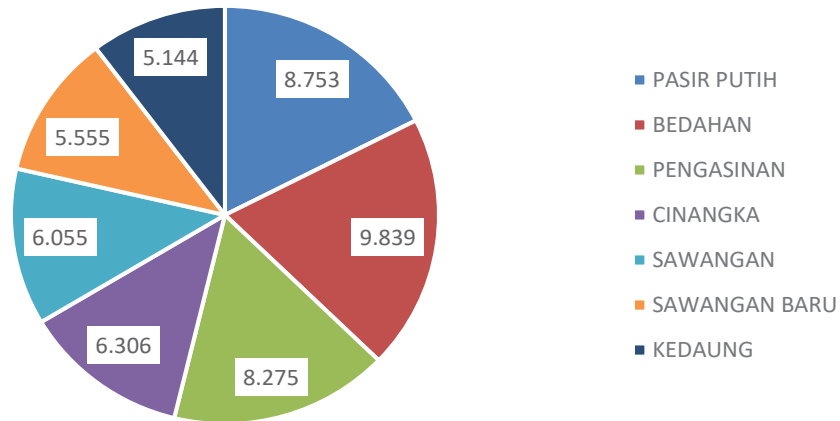
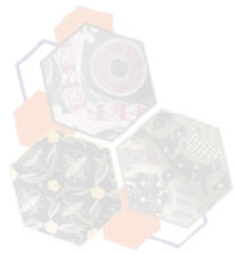
Gambar 5.6. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cimanggis, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.3. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Sawangan

Jumlah KK di Kecamatan Sawangan adalah sebanyak 50.072 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Bedahan sebanyak 9.878, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Kedaung sebanyak 5.155.

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Sawangan sebanyak 49.927 atau 99,71 persen. Kelurahan Bedahan merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 9.839 KK atau 99,61 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Kedaung dengan jumlah 5.144 atau 99,79 persen.

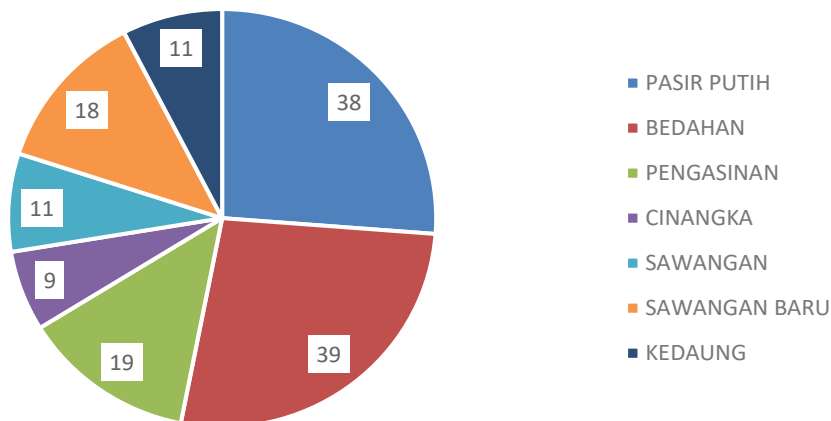


Gambar 5.7. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sawangan, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Sawangan, hanya 0,29 persen atau 145 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Bedahan menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 39 atau 0,39 persen. Sedangkan Kelurahan Cinangka merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 9 atau 0,14 persen.

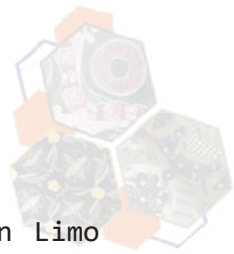


Gambar 5.8. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sawangan, Tahun 2022

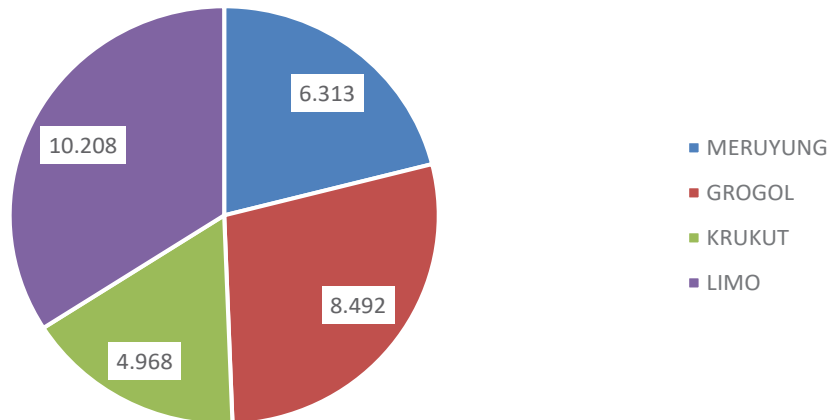
Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.4. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Limo

Jumlah KK di Kecamatan Limo adalah sebanyak 30.047 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Limo sebanyak 10.220, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Krukut sebanyak 4.973.



Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Limo sebanyak 29.981 atau 99,78 persen. Kelurahan Limo merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 10.208 KK atau 99,88 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Krukut dengan jumlah 4.968 atau 99,90 persen.

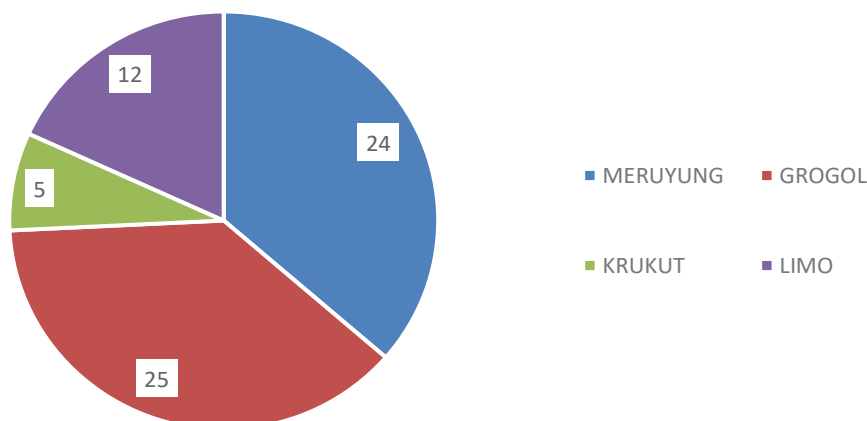


Gambar 5.9. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Limo, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

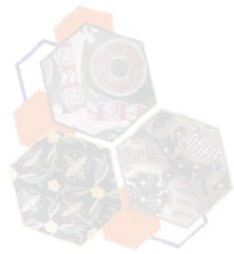
Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Limo, hanya 0,22 persen atau 66 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Grogol menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 25 atau 0,29 persen. Sedangkan Kelurahan Krukut merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 5 atau 0,10 persen.



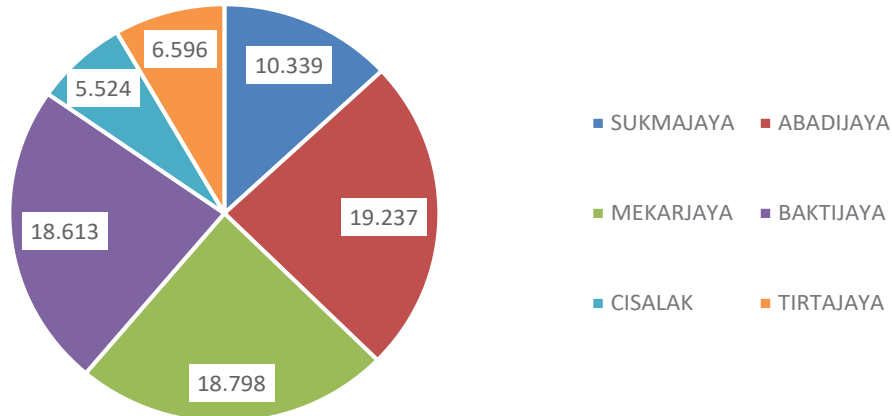
Gambar 5.10. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Limo, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022



5.1.5. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Sukmajaya

Jumlah KK di Kecamatan Sukmajaya adalah sebanyak 79.288 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Abadijaya sebanyak 19.272, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Cisalak sebanyak 5.534.



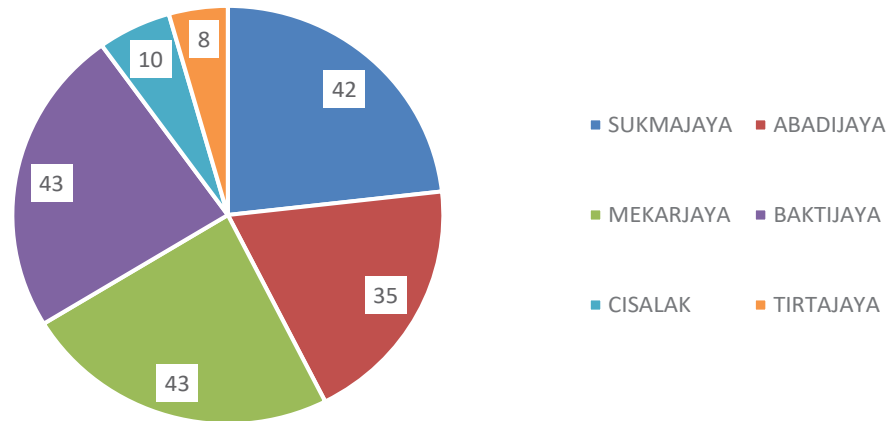
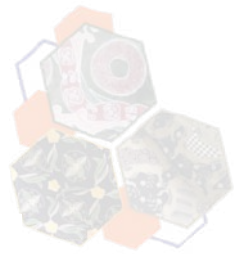
Gambar 5.11. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 79.107 atau 99,77 persen. Kelurahan Abadijaya merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 19.237 KK atau 99,82 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Cisalak dengan jumlah 5.524 atau 99,82 persen.

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Sukmajaya, hanya 0,23 persen atau 181 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Mekarjaya menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 43 atau 0,23 persen. Sedangkan Kelurahan Tirtajaya merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 8 atau 0,12 persen.



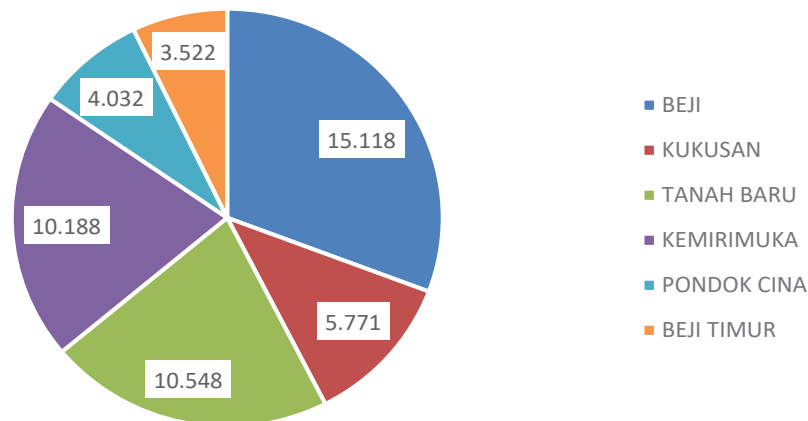
Gambar 5.12. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.6. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Beji

Jumlah KK di Kecamatan Beji adalah sebanyak 49.310 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Beji sebanyak 15.178, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Beji Timur sebanyak 3.530.

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Beji sebanyak 49.179 atau 99,73 persen. Kelurahan Beji merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 15.118 KK atau 99,60 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Beji Timur dengan jumlah 3.522 atau 99,77 persen.



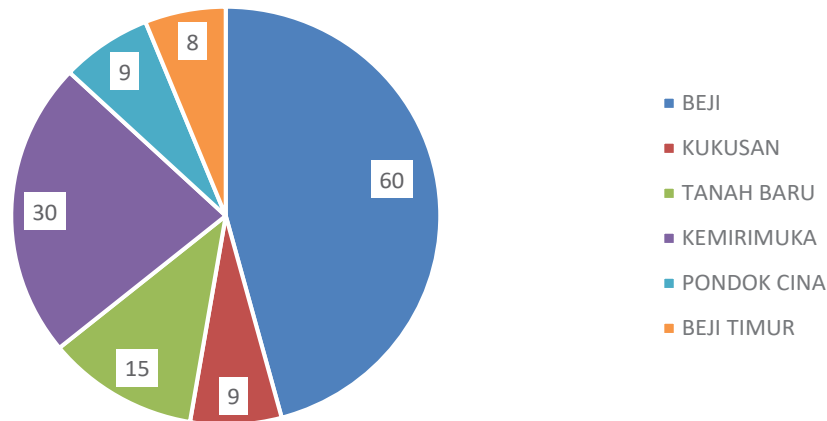
Gambar 5.13. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Beji, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Beji, hanya 0,27 persen atau 131 yang belum memiliki KK.



Kelurahan Beji menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 60 atau 0,40 persen. Sedangkan Kelurahan Beji Timur merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 8 atau 0,23 persen.



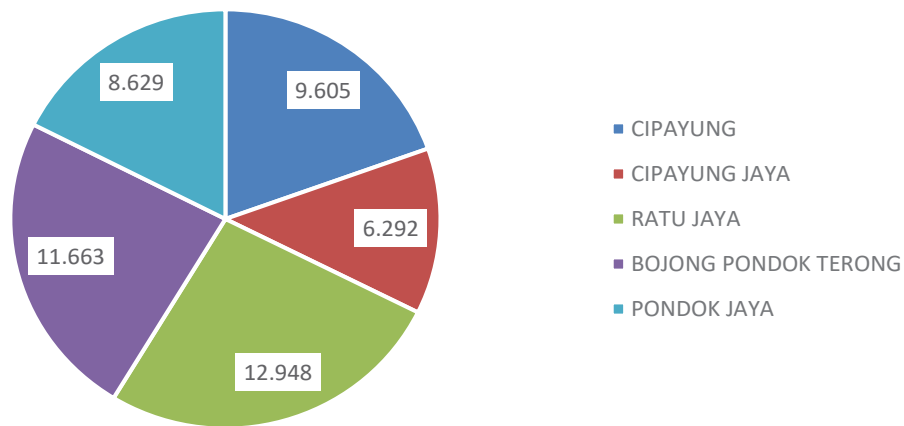
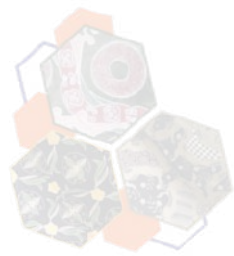
Gambar 5.14. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Beji, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.7. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cipayang

Jumlah KK di Kecamatan Cipayang adalah sebanyak 49.322 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Ratu Jaya sebanyak 13.016, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Cipayang Jaya sebanyak 6.315.

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Cipayang sebanyak 49.137 atau 99,17 persen. Ratu Jaya merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 12.948 KK atau 99,48 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Cipayunh Jaya dengan jumlah 6.292 atau 99,64 persen.

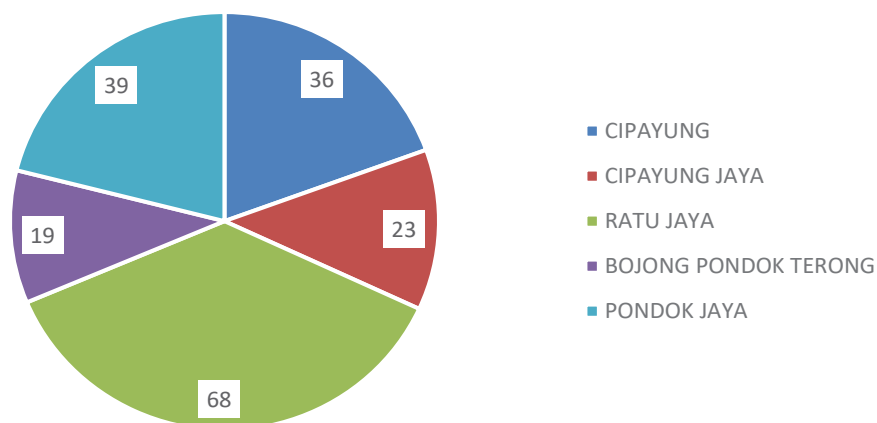


Gambar 5.15. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cipayung, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Cipayung, hanya 0,38 persen atau 185 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Ratu Jaya menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 68 atau 0,52 persen. Sedangkan Bojong Pondok Terong merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 19 atau 0,16 persen.



Gambar 5.16. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cipayung, Tahun 2022

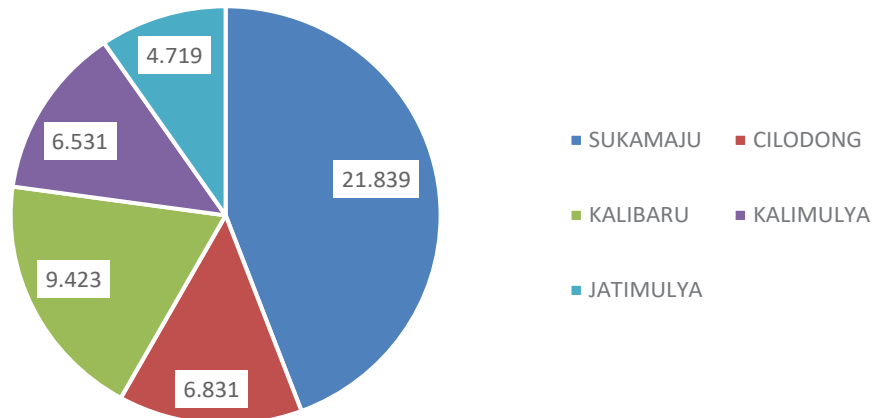
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.8. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cilodong

Jumlah KK di Kecamatan Cilodong adalah sebanyak 49.458 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Sukamaju sebanyak 21.877, sedangkan yang paling kecil adalah Jatimulya sebanyak 4.733.



Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Cilodong sebanyak 49.343 atau 99,77 persen. Kelurahan Sukamaju merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 21.839 KK atau 99,83 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Jatimulya dengan jumlah 4.719 atau 99,70 persen.

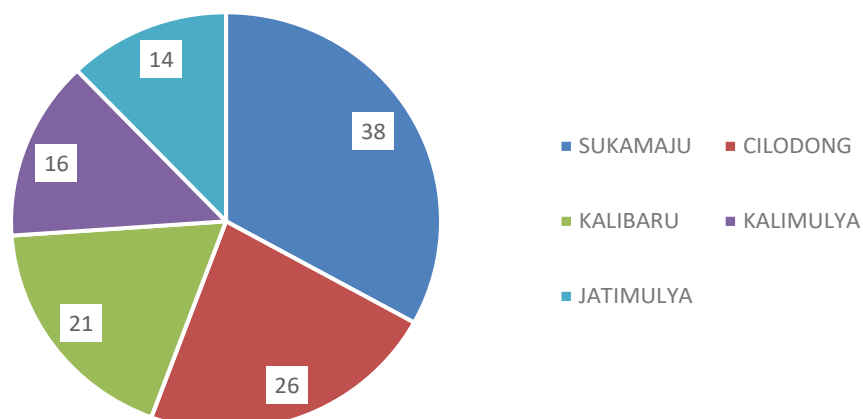


Gambar 5.17. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cilodong, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

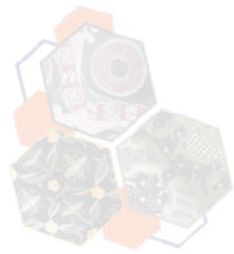
Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Cilodong, hanya 0,23 persen atau 115 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Sukamaju menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 38 atau 0,17 persen. Sedangkan Jatimulya merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 14 atau 0,30 persen.



Gambar 5.18. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cilodong, Tahun 2022

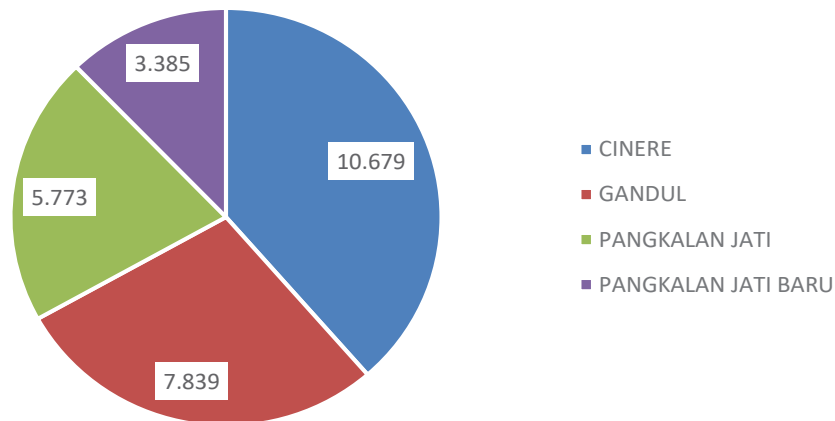
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022



5.1.9. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Cinere

Jumlah KK di Kecamatan Cinere adalah sebanyak 27.746 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Cinere sebanyak 10.707, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Pangkalan Jati Baru sebanyak 3.401.

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Cinere sebanyak 27.676 atau 99,75 persen. Kelurahan Cinere merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 10.679 KK atau 99,74 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Jaya dengan jumlah 3.385 atau 99,53 persen.

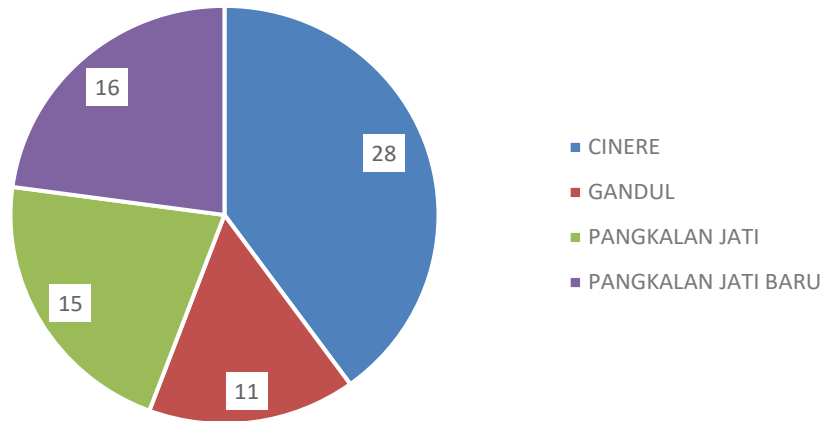


Gambar 5.19. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cinere, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Cinere, hanya 0,25 persen atau 70 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Cinere menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 28 atau 0,26 persen. Sedangkan Kelurahan Gandul merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 11 atau 0,14 persen.



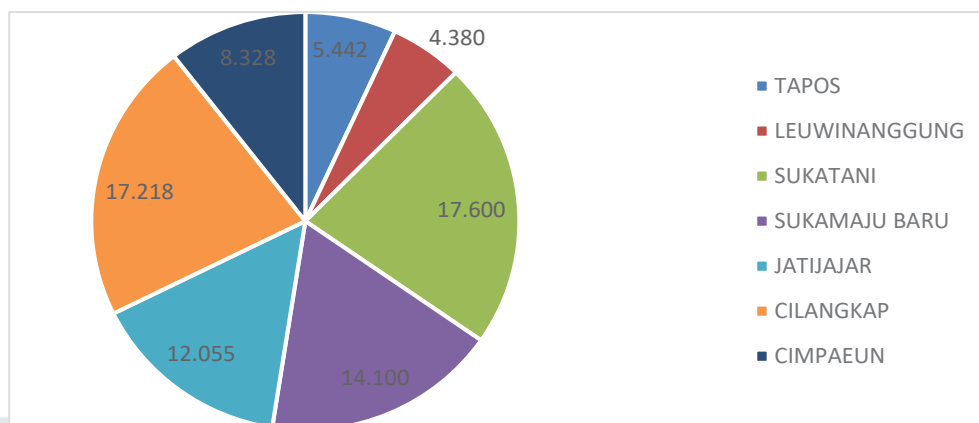
Gambar 5.20. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Cinere, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.10. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Tapos

Jumlah KK di Kecamatan Tapos adalah sebanyak 79.314 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Sukatani sebanyak 17.645, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Leuwinanggung sebanyak 4.393.

Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Tapos sebanyak 79.123 atau 99,76 persen. Kelurahan Sukatani merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 17.600 KK atau 99,74 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Leuwinanggung dengan jumlah 4.380 atau 99,70 persen.



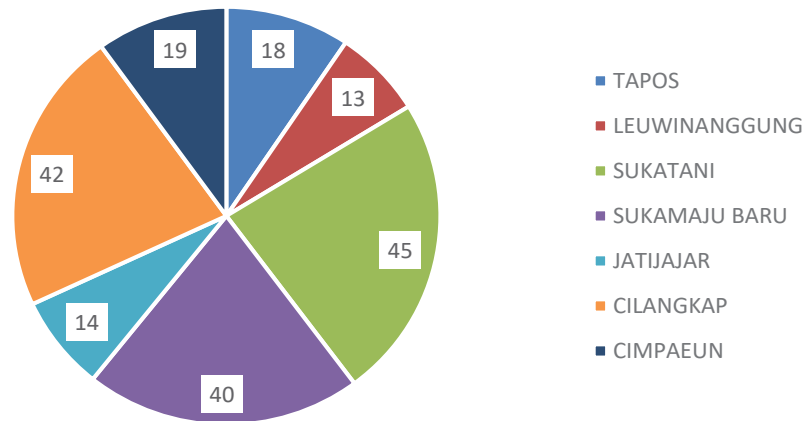
Gambar 5.21. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022



Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Tapos, hanya 0,24 persen atau 191 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Sukatani menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 45 atau 0,26 persen. Sedangkan Kelurahan Leuwinanggung merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 13 atau 0,30 persen.

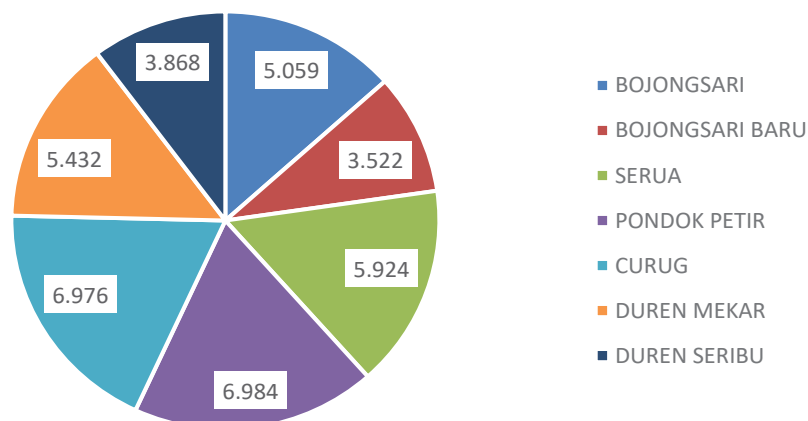


Gambar 5.22. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

5.1.11. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Bojongsari

Jumlah KK di Kecamatan Bojongsari adalah sebanyak 37.894 dengan jumlah KK terbanyak adalah di Kelurahan Pondok Petir sebanyak 7.006, sedangkan yang paling kecil adalah Kelurahan Bojongsari Baru sebanyak 3.532.



Gambar 5.23. Proporsi Keluarga Sudah Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Tapos, Tahun 2022

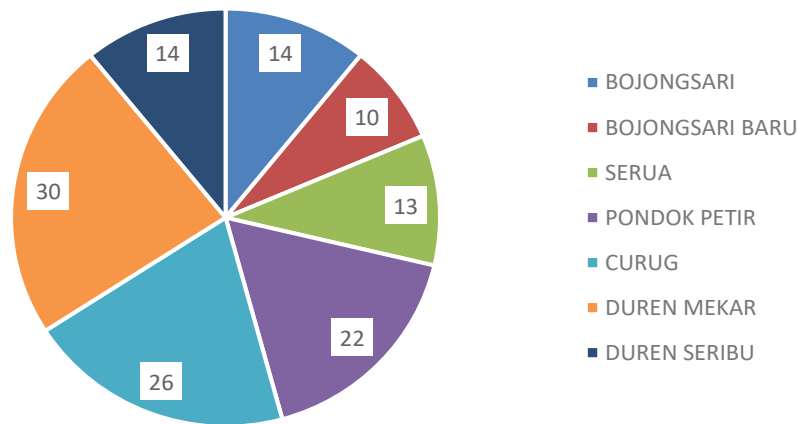
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022



Jumlah keluarga yang telah memiliki KK di Kecamatan Bojongsari sebanyak 37.765 atau 99,66 persen. Kelurahan Pondok Petir merupakan jumlah terbanyak yang sudah memiliki KK dengan 6.984 KK atau 98,69 persen. Dan yang paling kecil adalah Kelurahan Bojongsari Baru dengan jumlah 3.522 atau 99,72 persen.

Untuk data yang belum memiliki KK, di Kecamatan Bojongsari, hanya 0,34 persen atau 129 yang belum memiliki KK.

Kelurahan Duren Mekar menjadi wilayah yang terbesar masyarakatnya yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 30 atau 0,55 persen. Sedangkan Kelurahan Bojongsari Baru merupakan wilayah yang paling kecil yang belum memiliki KK, yaitu sebanyak 10 atau 0,28 persen.



Gambar 5.24. Proporsi Keluarga Belum Memiliki KK, Menurut Kelurahan di Kecamatan Bojongsari, Tahun 2022

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

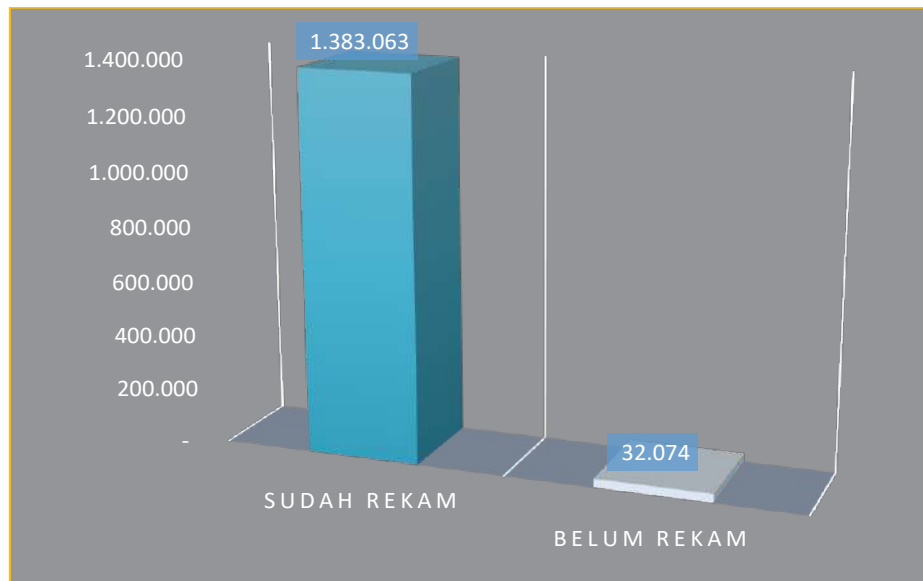
5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah. Dengan memiliki KTP penduduk diakui secara legal keberadaannya dan bermanfaat sebagai alat keamanan sekaligus untuk pelayanan sosial ekonomi dasar lainnya. Sebagai contoh urusan dengan bank, mengurus BPJS, paspor, untuk mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, bisnis dan lain sebagainya.

Untuk data Perekaman KTP, jumlah wajib KTP yang tercatat di Kota Depok sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 1.415.137. Sedangkan yang sudah dilakukan perekaman KTP sebanyak 1.383.063 atau 97,73 persen.



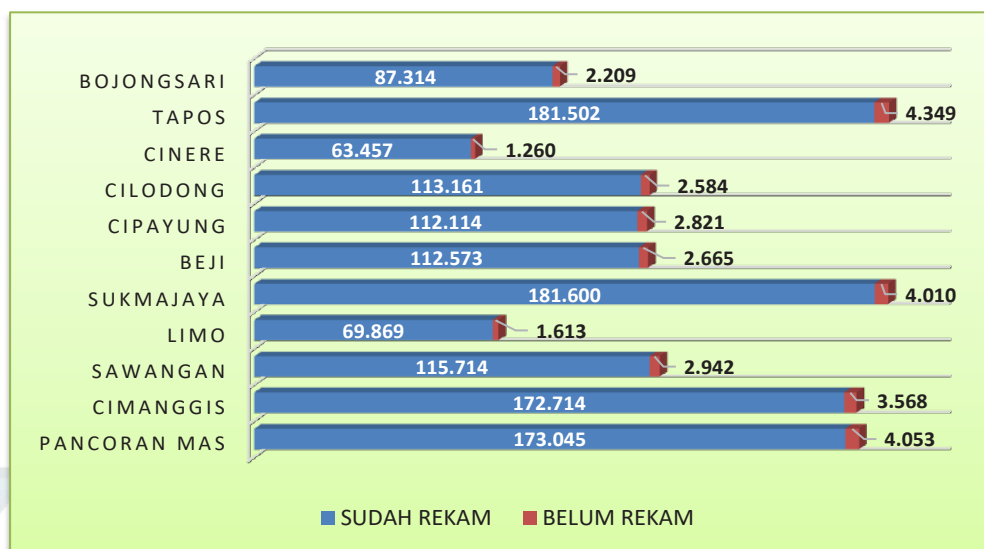
Sedangkan hanya tersisa 32.074 atau 2,27 persen yang belum dilakukan perekaman KTP.



Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 5.25 Distribusi Penduduk menurut Status KTP Tahun 2022

Jika didasarkan pada kecamatan, jumlah perekaman wajib KTP, Kecamatan Tapos merupakan wilayah yang sebaran perekamannya terbanyak. Tercatat 181.502 sudah dilakukan perekaman, sedangkan Kecamatan Cinere merupakan wilayah yang terkecil, yaitu hanya 63.457 yang sudah terekam.



Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 5.26 Distribusi Penduduk menurut Status KTP Menurut Kecamatan Tahun 2022



Dari grafik di atas juga diperlihatkan bahwa Kecamatan Cinere masuk dalam yang paling sedikit warga yang belum melakukan perekaman KTP, tercatat hanya sejumlah 1.260. sedangkan Kecamatan Tapos merupakan wilayah yang paling banyak belum merekam KTP berjumlah 4.349.

Berikut disajikan tabel secara lengkap daftar perekaman KTP di Kota Depok sepanjang tahun 2022.

Tabel 5.2.
Jumlah Perekaman Wajib KTP Menurut Kelurahan Tahun 2022

Kecamatan	Kelurahan	Wajib KTP	Sudah Rekam		Belum Rekam	
			Jmlh	(%)	Jmlh	(%)
Pancoran Mas	Depok	33.261	32.541	97,84	720	2,16
	Depok Jaya	18.990	18.542	97,64	448	2,36
	Pancoran Mas	46.551	45.472	97,68	1.079	2,32
	Mampang	20.041	19.600	97,80	441	2,20
	Rangkapan Jaya Baru	28.308	27.643	97,65	665	2,35
	Rangkapan Jaya	29.947	29.247	97,66	700	2,34
	Jumlah		177.098	173.045	97,71	4.053
Cimanggis	Harjamukti	17.981	17.583	97,79	398	2,21
	Curug	16.703	16.389	98,12	314	1,88
	Tugu	63.459	62.220	98,05	1.239	1,95
	Mekarsari	35.390	34.686	98,01	704	1,99
	Pasir Gunung Selatan	24.786	24.291	98,00	495	2,00
	Cisalak Pasar	17.963	17.545	97,67	418	2,33
	Jumlah		176.282	172.714	97,98	3.568
Sawangan	Pasir Putih	20.201	19.713	97,58	488	2,42
	Bedahan	23.285	22.666	97,34	619	2,66
	Pengasinan	20.268	19.750	97,44	518	2,56
	Cinangka	14.985	14.640	97,70	345	2,30
	Sawangan	14.558	14.190	97,47	368	2,53
	Sawangan Baru	13.194	12.841	97,32	353	2,68
	Kedaung	12.165	11.914	97,94	251	2,06
Jumlah		118.656	115.714	97,52	2.942	2,48
Limo	Meruyung	14.888	14.514	97,49	374	2,51
	Grogol	20.353	19.892	97,73	461	2,27



Kecamatan	Kelurahan	Wajib KTP	Sudah Rekam		Belum Rekam	
			Jmlh	(%)	Jmlh	(%)
	Krukut	11.862	11.615	97,92	247	2,08
	Limo	24.379	23.848	97,82	531	2,18
Jumlah		71.482	69.869	97,74	1.613	2,26
Sukmajaya	Sukmajaya	24.724	24.177	97,79	547	2,21
	Abadijaya	45.107	44.128	97,83	979	2,17
	Mekarjaya	44.050	43.087	97,81	963	2,19
	Baktijaya	43.038	42.099	97,82	939	2,18
	Cisalak	12.853	12.624	98,22	229	1,78
	Tirtajaya	15.838	15.485	97,77	353	2,23
Jumlah		185.610	181.600	97,84	4.010	2,16
Beji	Beji	35.708	34.881	97,68	827	2,32
	Kukusan	13.508	13.211	97,80	297	2,20
	Tanah Baru	25.084	24.525	97,77	559	2,23
	Kemirimuka	23.582	22.995	97,51	587	2,49
	Pondok Cina	9.047	8.863	97,97	184	2,03
	Beji Timur	8.309	8.098	97,46	211	2,54
Jumlah		115.238	112.573	97,69	2.665	2,31
Cipayung	Cipayung	22.545	22.001	97,59	544	2,41
	Cipayung Jaya	14.816	14.464	97,62	352	2,38
	Ratu Jaya	30.303	29.622	97,75	681	2,25
	Bojong Pondok Terong	26.889	26.192	97,41	697	2,59
	Pondok Jaya	20.382	19.835	97,32	547	2,68
Jumlah		114.935	112.114	97,55	2.821	2,45
Cilodong	Sukamaju	51.563	50.515	97,97	1.048	2,03
	Cilodong	15.439	15.158	98,18	281	1,82
	Kalibaru	22.457	21.870	97,39	587	2,61
	Kalimulya	15.289	14.901	97,46	388	2,54
	Jatimulya	10.997	10.717	97,45	280	2,55
Jumlah		115.745	113.161	97,77	2.584	2,23
Cinere	Cinere	25.064	24.557	97,98	507	2,02
	Gandul	18.473	18.086	97,91	387	2,09
	Pangkalan Jati	13.322	13.099	98,33	223	1,67



Kecamatan	Kelurahan	Wajib KTP	Sudah Rekam		Belum Rekam	
			Jmlh	(%)	Jmlh	(%)
	Pangkalan Jati Baru	7.858	7.715	98,18	143	1,82
Jumlah		64.717	63.457	98,05	1.260	1,95
Tapos	Tapos	12.351	12.104	98,00	247	2,00
	Leuwinanggung	9.740	9.491	97,44	249	2,56
	Sukatani	42.509	41.584	97,82	925	2,18
	Sukamaju Baru	33.299	32.537	97,71	762	2,29
	Jatijajar	28.758	28.084	97,66	674	2,34
	Cilangkap	40.418	39.378	97,43	1.040	2,57
	Cimpaeun	18.776	18.324	97,59	452	2,41
Jumlah		185.851	181.502	97,66	4.349	2,34
Bojongsari	Bojongsari	11.895	11.596	97,49	299	2,51
	Bojongsari Baru	8.287	8.084	97,55	203	2,45
	Serua	13.951	13.577	97,32	374	2,68
	Pondok Petir	17.063	16.651	97,59	412	2,41
	Curug	16.349	15.937	97,48	412	2,52
	Duren Mekar	12.990	12.689	97,68	301	2,32
	Duren Seribu	8.988	8.780	97,69	208	2,31
Jumlah		89.523	87.314	97,53	2.209	2,47
Jumlah Total		1.415.137	1.383.063	97,73	32.074	2,27

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki bukti identitas diri adalah sangat penting. Fungsi dan Kegunaan e-KTP dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sebagai identitas jati diri

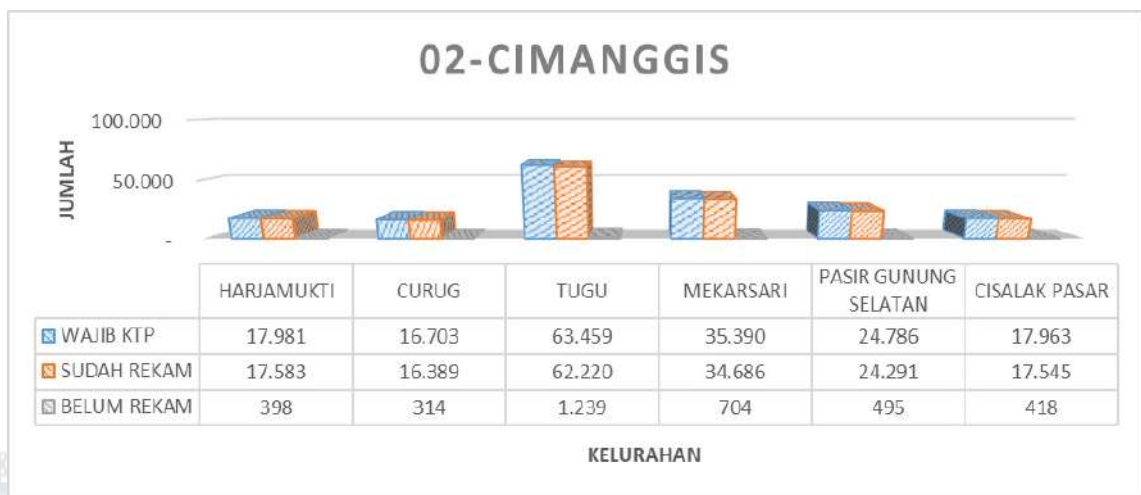
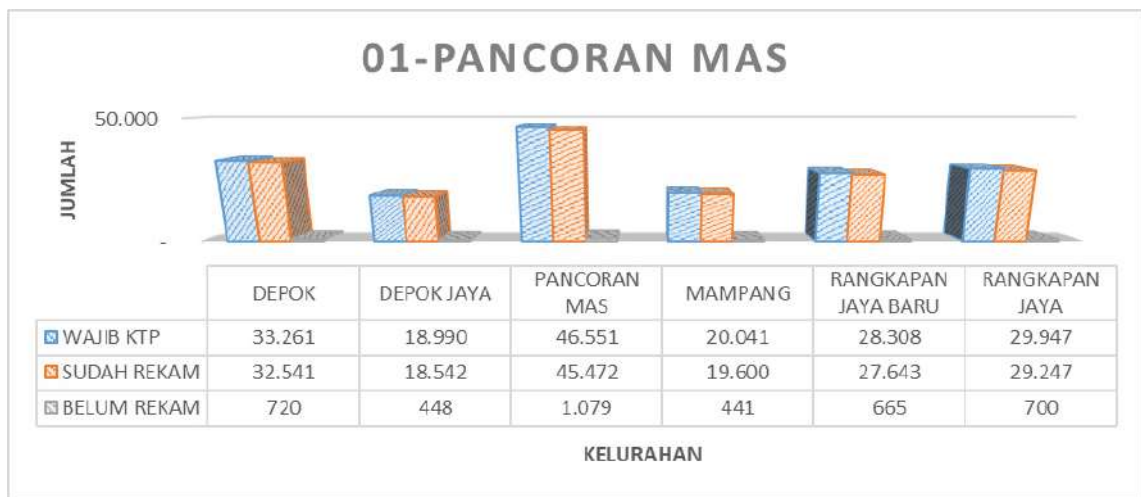
1. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
2. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, sehingga tercipta keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
3. Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam pemilu & pemilukada yang selama ini



sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

4. Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Pada Gambar-gambar di bawah disajikan distribusi Perekaman e-KTP Menurut Kelurahan di Masing-masing Kecamatan di Kota Depok.





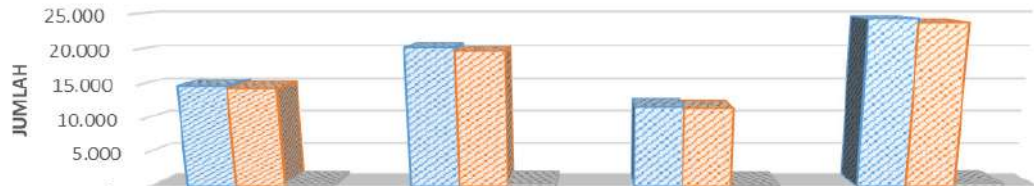
03-SAWANGAN



	PASIR PUTIH	BEDAHAN	PENGASINAN	CINANGKA	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	KEDAUNG
WAJIB KTP	20.201	23.285	20.268	14.985	14.558	13.194	12.165
SUDAH REKAM	19.713	22.666	19.750	14.640	14.190	12.841	11.914
BELUM REKAM	488	619	518	345	368	353	251

KELURAHAN

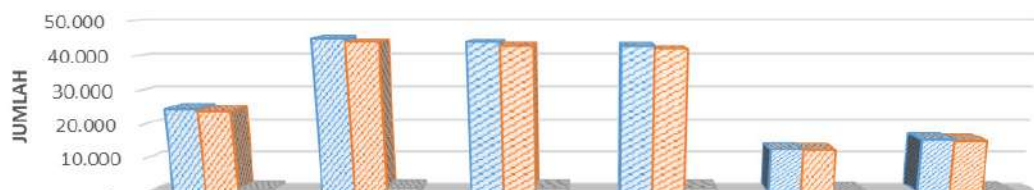
04-LIMO



	MERUYUNG	GROGOL	KRUKUT	LIMO
WAJIB KTP	14.888	20.353	11.862	24.379
SUDAH REKAM	14.514	19.892	11.615	23.848
BELUM REKAM	374	461	247	531

KELURAHAN

05-SUKMAJAYA

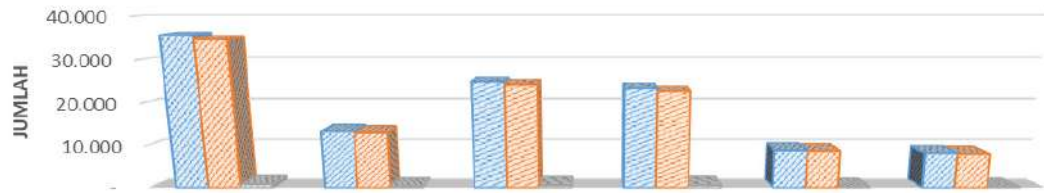


	SUKMAJAYA	ABADIJAYA	MEKARJAYA	BAKTUJAYA	CISALAK	TIRTAJAYA
WAJIB KTP	24.724	45.107	44.050	43.038	12.853	15.838
SUDAH REKAM	24.177	44.128	43.087	42.099	12.624	15.485
BELUM REKAM	547	979	963	939	229	353

KELURAHAN



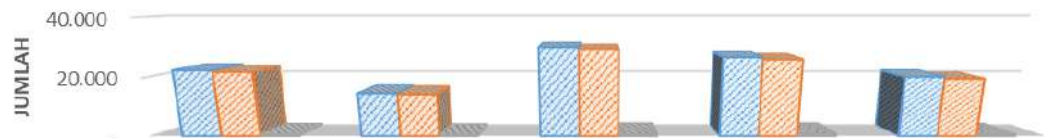
06-BEJI



	BEJI	KUKUSAN	TANAH BARU	KEMIRIMUKA	PONDOK CINA	BEJI TIMUR
WAJIB KTP	35.708	13.508	25.084	23.582	9.047	8.309
SUDAH REKAM	34.881	13.211	24.525	22.995	8.863	8.098
BELUM REKAM	827	297	559	587	184	211

KELURAHAN

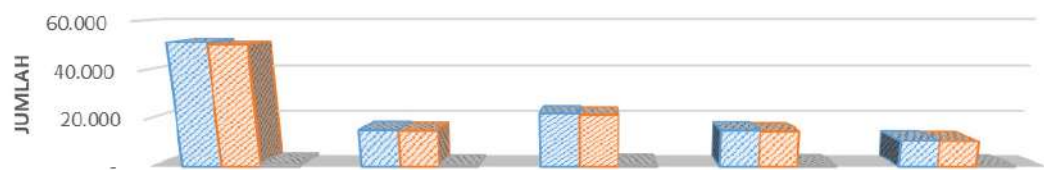
07-CIPAYUNG



	CIPAYUNG	CIPAYUNG JAYA	RATU JAYA	BOJONG PONDOK TERONG	PONDOK JAYA
WAJIB KTP	22.545	14.816	30.303	26.889	20.382
SUDAH REKAM	22.001	14.464	29.622	26.192	19.835
BELUM REKAM	544	352	681	697	547

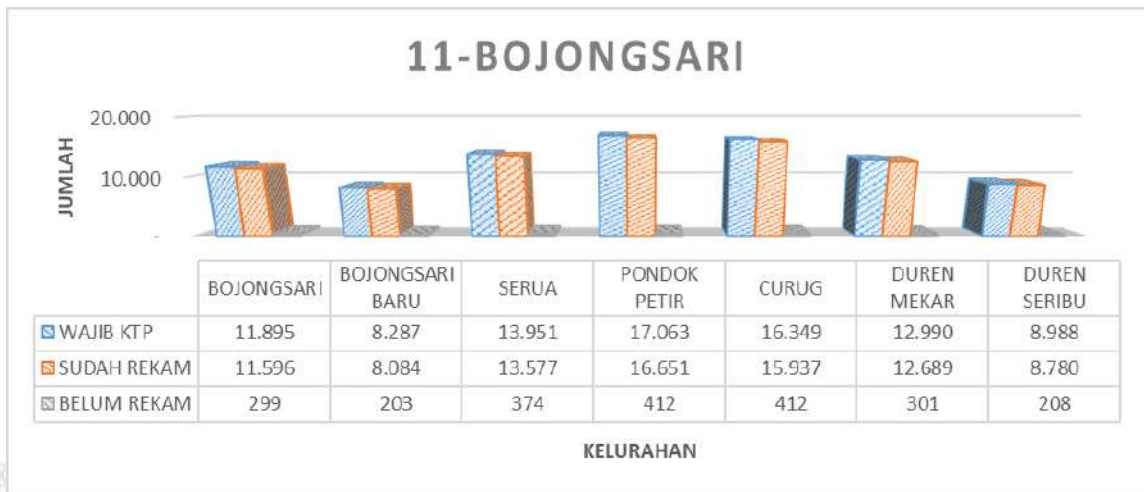
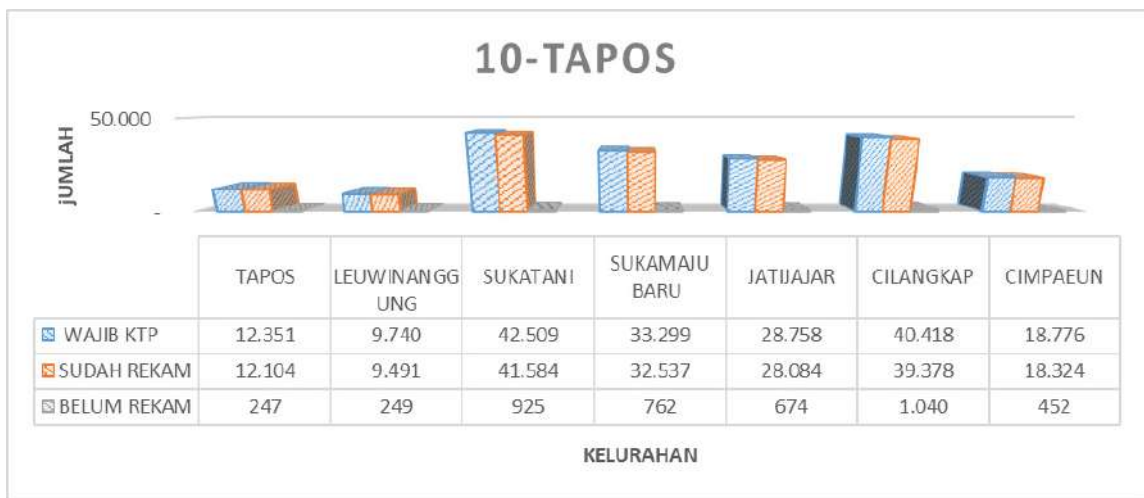
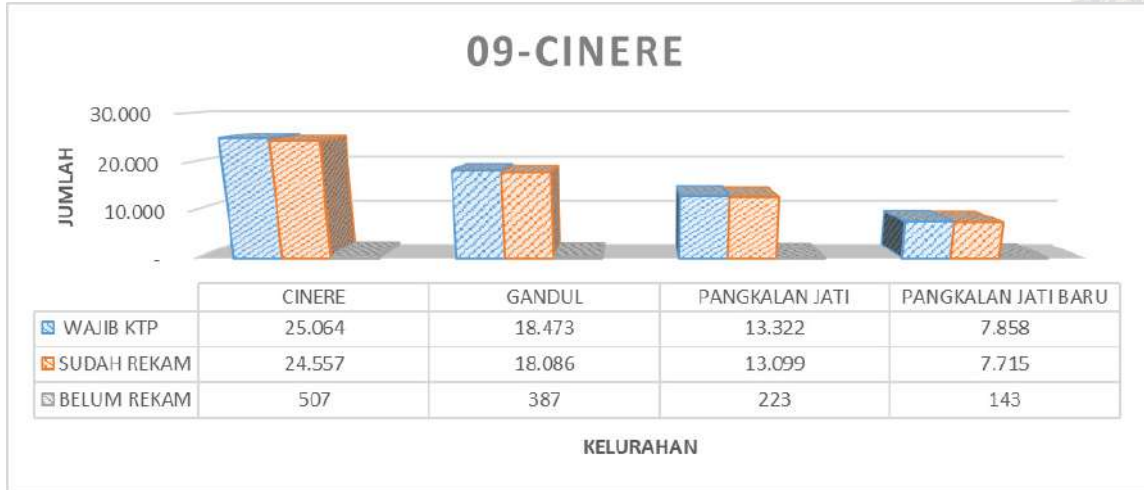
KELURAHAN

08-CILODONG



	SUKAMAJU	CILODONG	KALIBARU	KALIMULYA	JATIMULYA
WAJIB KTP	51.563	15.439	22.457	15.289	10.997
SUDAH REKAM	50.515	15.158	21.870	14.901	10.717
BELUM REKAM	1.048	281	587	388	280

KELURAHAN



Gambar 5.27
Distribusi Perekaman e-KTP Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022



Persentase kepemilikan KTP yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi, karena persentase cakupan kepemilikan KTP menjadi salah satu indikator kinerja dinas yang terkait. Sosialisasi dan kampanye sadar KTP harus terus dilakukan. Kepemilikan KTP selain untuk identitas diri juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi penyelundupan orang dari Negara atau daerah lain ke kabupaten/Kota yang bersangkutan. KTP juga mempunyai fungsi pertahanan terutama dalam menghadapi terorisme nasional dan internasional.

5.3. Kepemilikan Akta

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Dan pada ayat 17 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pada kegiatan pelayanan publik, hasil dari pelayanan pencatatan sipil tersebut akan diterbitkan sebuah akta.

5.3.1. Akta Kelahiran

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam Akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta



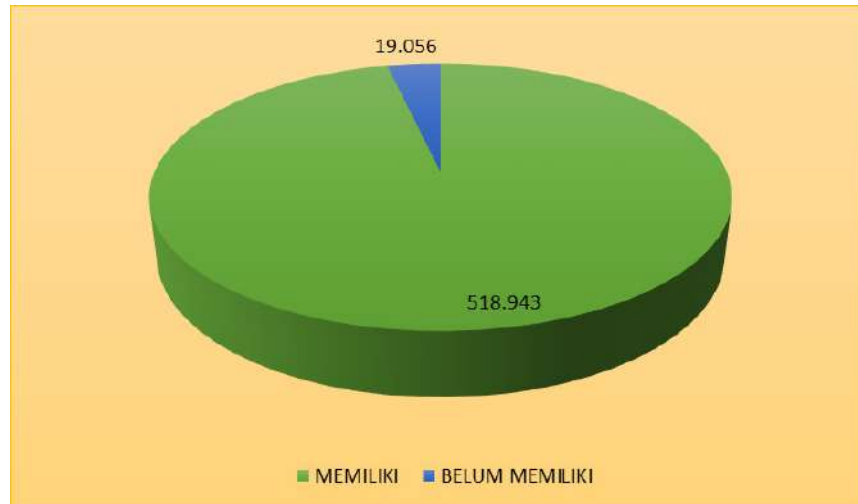
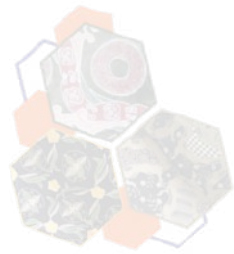
kelahirannya hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan Akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus parpor dan dokumen lainnya.

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 jenis yaitu:

- Akta Kelahiran Umum adalah Akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
- Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang sejak dulunya sudah diwajibkan membuat Akta-Akta Catatan Sipil, yang pada saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan), yaitu bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing (Kecuali keturunan India dan Arab) dan Warga Negara Asing. Cara penerbitan Akta Kelahirannya harus melalui sidang Pengadilan Negeri. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut maka diterbitkanlah Akta Kelahiran Istimewa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Depok tahun 2022 sebanyak 518.943 atau 96,46 persen dengan total jumlah anak usia 0-18 tahun adalah 537.999. sedangkan yang belum memiliki Akta sebanyak 19.056 atau 3,54 persen.





Sumber : Disdukcapil – DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 5.28. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2022

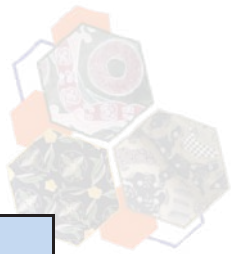
Secara lengkap sebaran kepemilikan Akta di Kota Depok di tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3.
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2022
berdasarkan Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	KEPEMILIKAN				JMLH ANAK USIA 0-18 THN
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		JMLH	(%)	JMLH	(%)	
Pancoran Mas	Depok	12.148	97,03	372	2,97	12.520
	Depok Jaya	5.915	96,76	198	3,24	6.113
	Pancoran Mas	16.553	95,07	858	4,93	17.411
	Mampang	7.164	97,87	156	2,13	7.320
	Rangkapan Jaya Baru	10.457	96,95	329	3,05	10.786
	Rangkapan Jaya	10.943	96,11	443	3,89	11.386
Jumlah		63.180	96,41	2.356	3,59	65.536
Cimanggis	Harjamukti	6.332	99,23	49	0,77	6.381
	Curug	5.744	98,32	98	1,68	5.842
	Tugu	21.136	93,22	1.537	6,78	22.673
	Mekarsari	11.349	92,56	912	7,44	12.261



Kecamatan	Kelurahan	KEPEMILIKAN				JMLH ANAK USIA 0-18 THN
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		JMLH	(%)	JMLH	(%)	
	Pasir Gunung Selatan	8.233	93,21	600	6,79	8.833
	Cisalak Pasar	6.188	91,86	548	8,14	6.736
	Jumlah	58.982	94,03	3.744	5,97	62.726
Sawangan	Pasir Putih	9.043	97,21	260	2,79	9.303
	Bedahan	9.854	94,46	578	5,54	10.432
	Pengasinan	7.477	94,26	455	5,74	7.932
	Cinangka	5.773	96,65	200	3,35	5.973
	Sawangan	5.868	98,57	85	1,43	5.953
	Sawangan Baru	5.448	96,03	225	3,97	5.673
	Kedaung	4.461	95,87	192	4,13	4.653
	Jumlah	47.924	96,00	1.995	4,00	49.919
Limo	Meruyung	5.469	95,00	288	5,00	5.757
	Grogol	7.635	95,19	386	4,81	8.021
	Krukut	4.274	94,79	235	5,21	4.509
	Limo	8.283	97,14	244	2,86	8.527
	Jumlah	25.661	95,70	1.153	4,30	26.814
Sukmajaya	Sukmajaya	9.303	99,08	86	0,92	9.389
	Abadijaya	15.385	96,01	640	3,99	16.025
	Mekarjaya	14.155	95,08	733	4,92	14.888
	Baktijaya	14.515	94,11	909	5,89	15.424
	Cisalak	4.398	96,41	164	3,59	4.562
	Tirtajaya	6.709	99,36	43	0,64	6.752
	Jumlah	64.465	96,16	2.575	3,84	67.040
Beji	Beji	12.538	97,34	342	2,66	12.880
	Kukusan	5.060	98,98	52	1,02	5.112
	Tanah Baru	9.637	97,51	246	2,49	9.883
	Kemirimuka	8.840	97,22	253	2,78	9.093



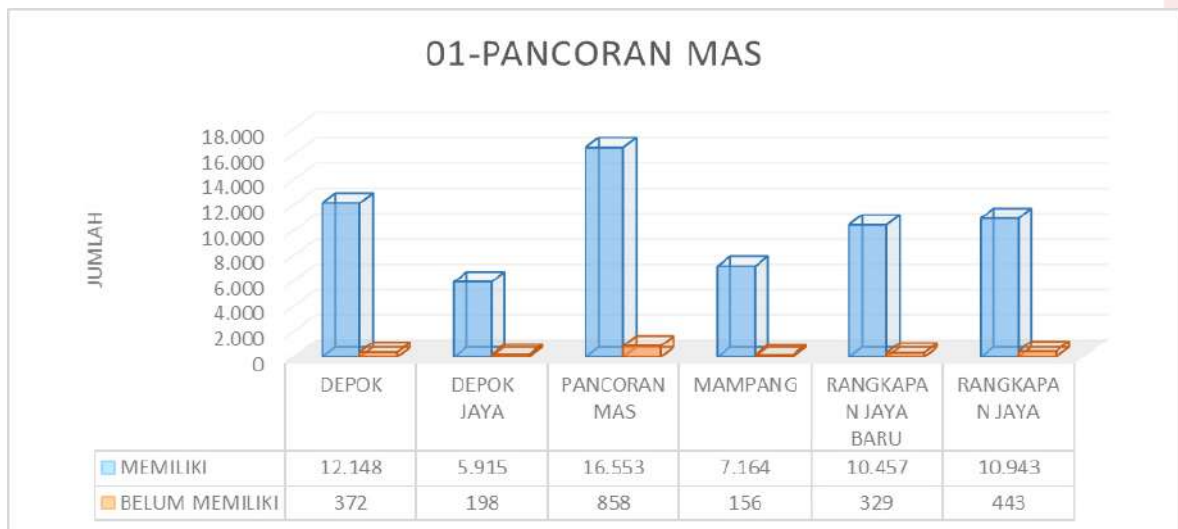
Kecamatan	Kelurahan	KEPEMILIKAN				JMLH ANAK USIA 0-18 THN
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		JMLH	(%)	JMLH	(%)	
	Pondok Cina	3.355	99,20	27	0,80	3.382
	Beji Timur	2.980	99,27	22	0,73	3.002
	Jumlah	42.410	97,83	942	2,17	43.352
Cipayung	Cipayung	9.212	97,98	190	2,02	9.402
	Cipayung Jaya	6.114	96,07	250	3,93	6.364
	Ratu Jaya	11.558	95,00	608	5,00	12.166
	Bojong Pondok Terong	10.501	95,78	463	4,22	10.964
	Pondok Jaya	7.678	94,32	462	5,68	8.140
	Jumlah	45.063	95,81	1.973	4,19	47.036
Cilodong	Sukamaju	17.694	97,76	406	2,24	18.100
	Cilodong	6.099	98,69	81	1,31	6.180
	Kalibaru	9.326	98,56	136	1,44	9.462
	Kalimulya	6.932	99,11	62	0,89	6.994
	Jatimulya	5.282	99,03	52	0,97	5.334
	Jumlah	45.333	98,40	737	1,60	46.070
Cinere	Cinere	7.458	97,19	216	2,81	7.674
	Gandul	6.589	97,90	141	2,10	6.730
	Pangkalan Jati	4.044	96,70	138	3,30	4.182
	Pangkalan Jati Baru	2.468	99,08	23	0,92	2.491
	Jumlah	20.559	97,54	518	2,46	21.077
Tapos	Tapos	4.633	95,96	195	4,04	4.828
	Leuwinanggung	3.921	98,84	46	1,16	3.967
	Sukatani	14.129	96,29	545	3,71	14.674
	Sukamaju Baru	11.946	96,42	443	3,58	12.389
	Jatijajar	10.225	96,14	411	3,86	10.636
	Cilangkap	15.532	97,37	420	2,63	15.952
	Cimpaeun	7.837	99,08	73	0,92	7.910
	Jumlah	68.223	96,97	2.133	3,03	70.356

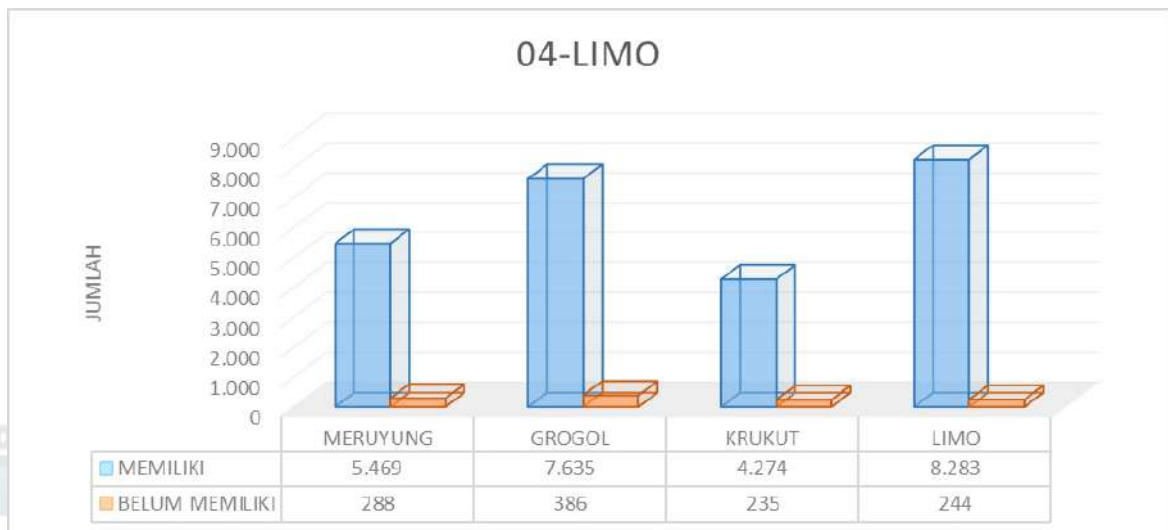
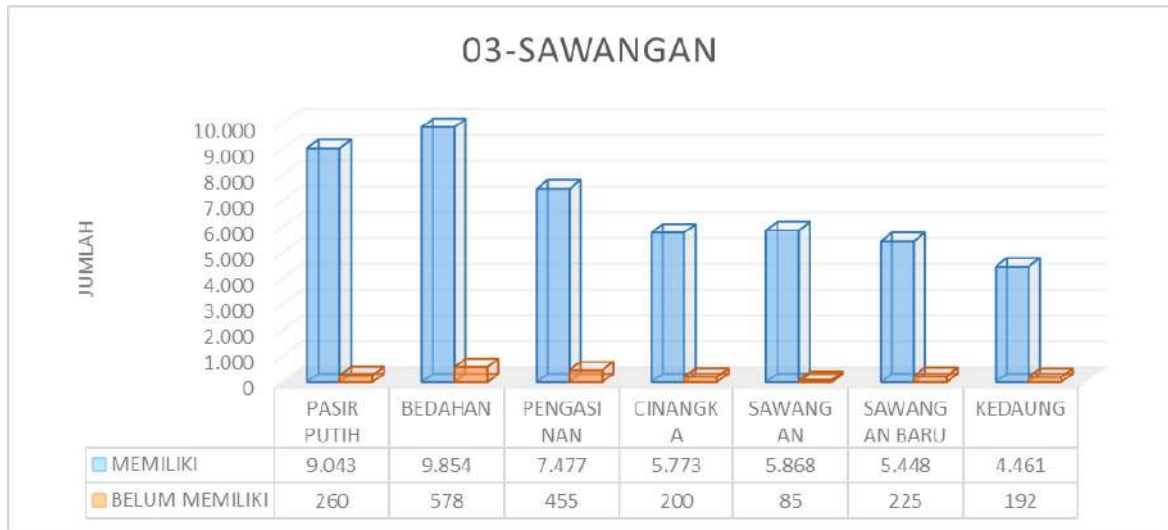
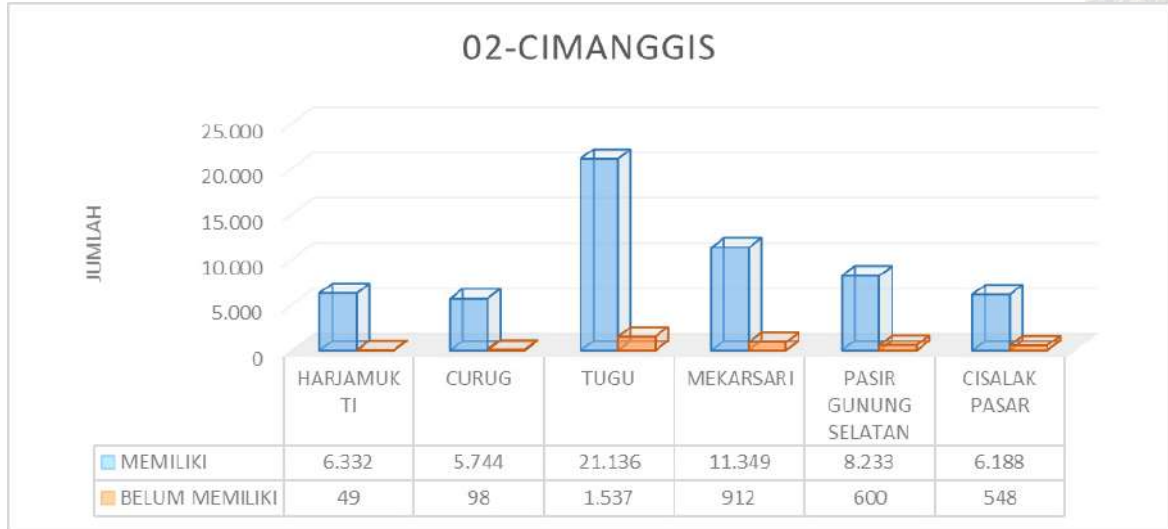


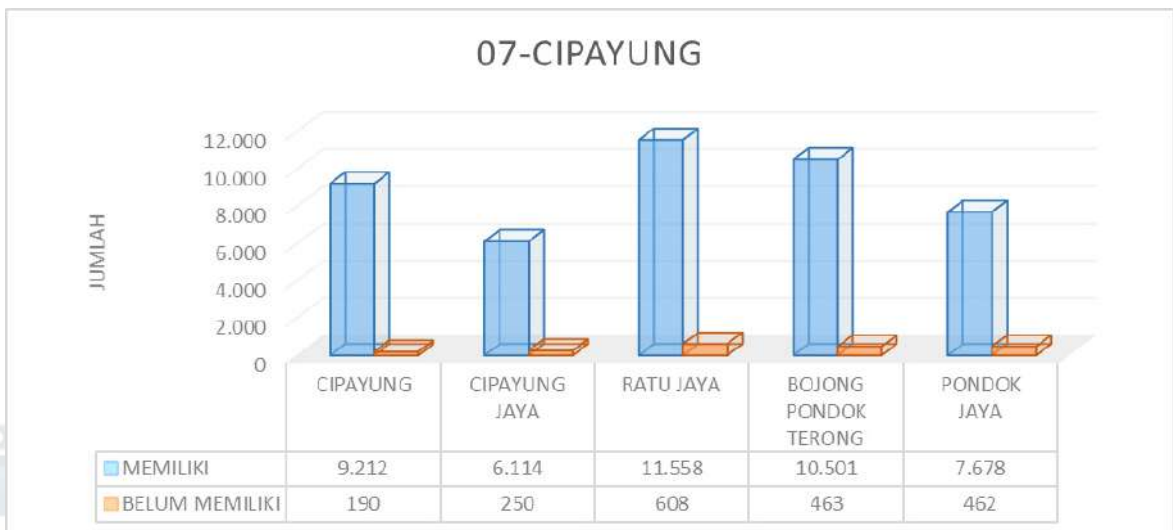
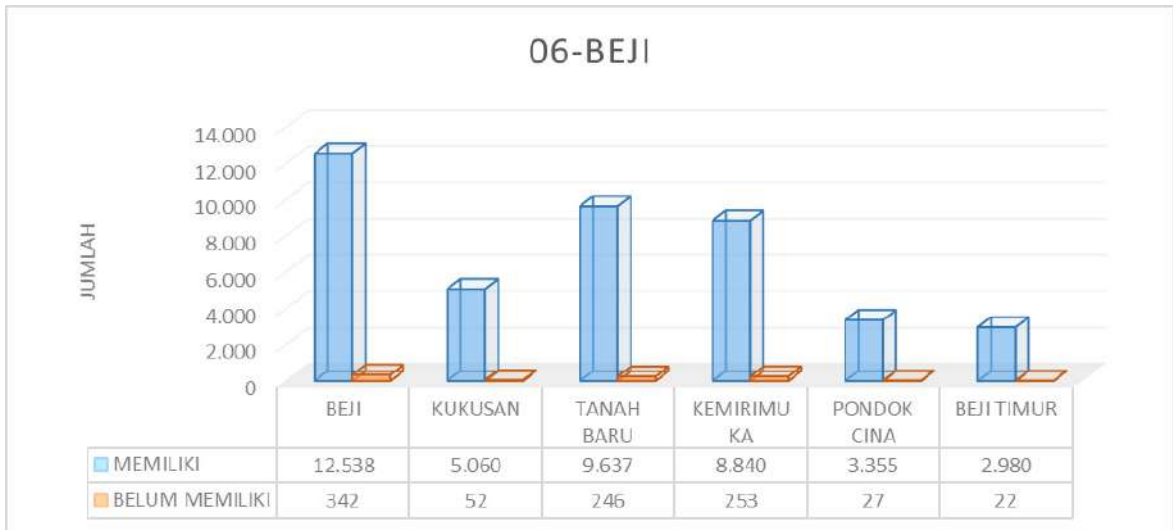
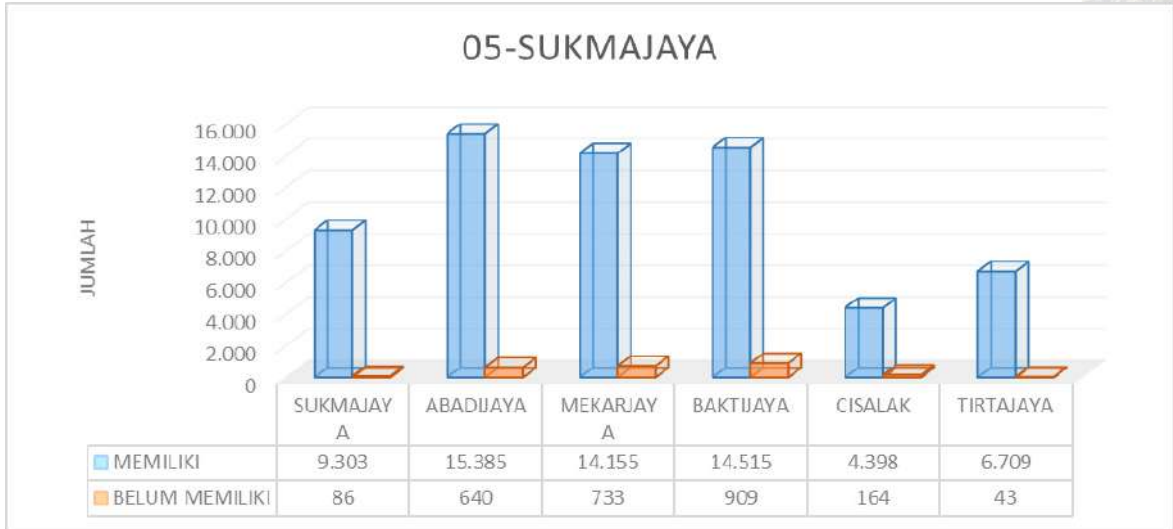
Kecamatan	Kelurahan	KEPEMILIKAN				JMLH ANAK USIA 0-18 THN
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
		JMLH	(%)	JMLH	(%)	
Bojongsari	Bojongsari	4.937	99,18	41	0,82	4.978
	Bojongsari Baru	3.532	99,05	34	0,95	3.566
	Serua	6.177	98,69	82	1,31	6.259
	Pondok Petir	6.473	95,22	325	4,78	6.798
	Curug	7.505	97,73	174	2,27	7.679
	Duren Mekar	5.019	95,58	232	4,42	5.251
	Duren Seribu	3.500	98,81	42	1,19	3.542
JUMLAH		37.143	97,56	930	2,44	38.073
JUMLAH TOTAL		518.943	96,46	19.056	3,54	537.999

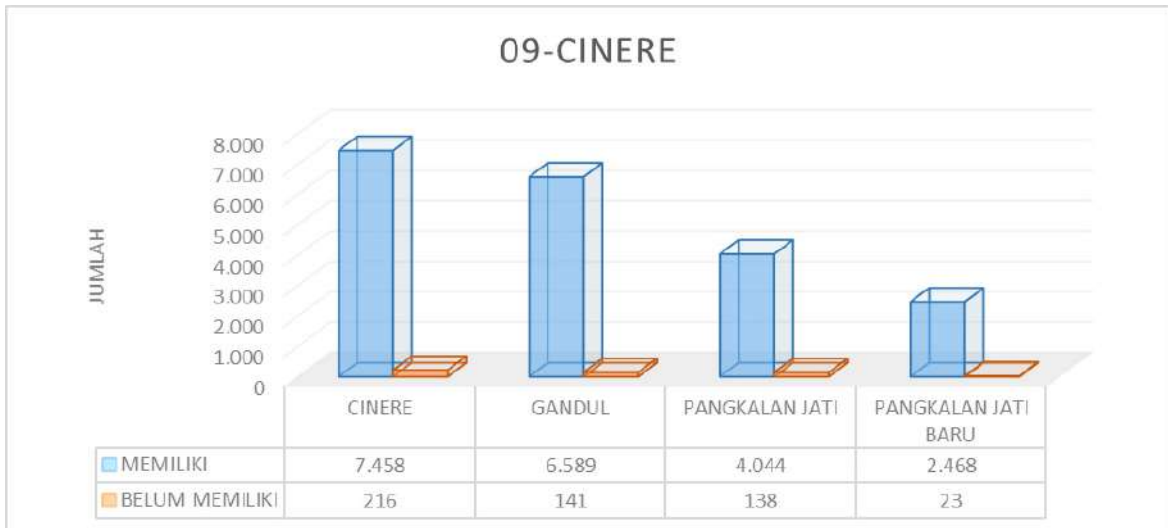
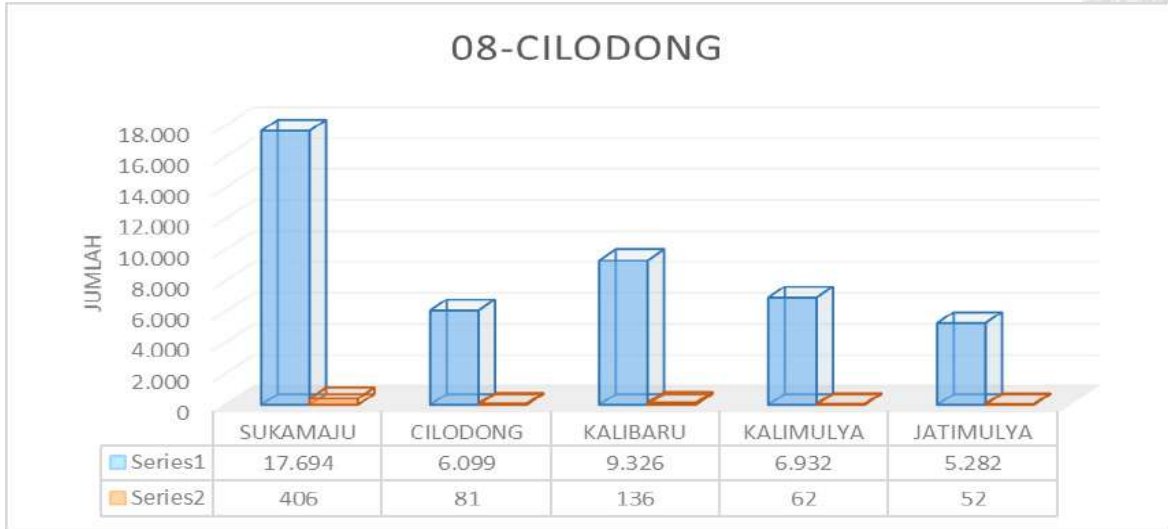
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

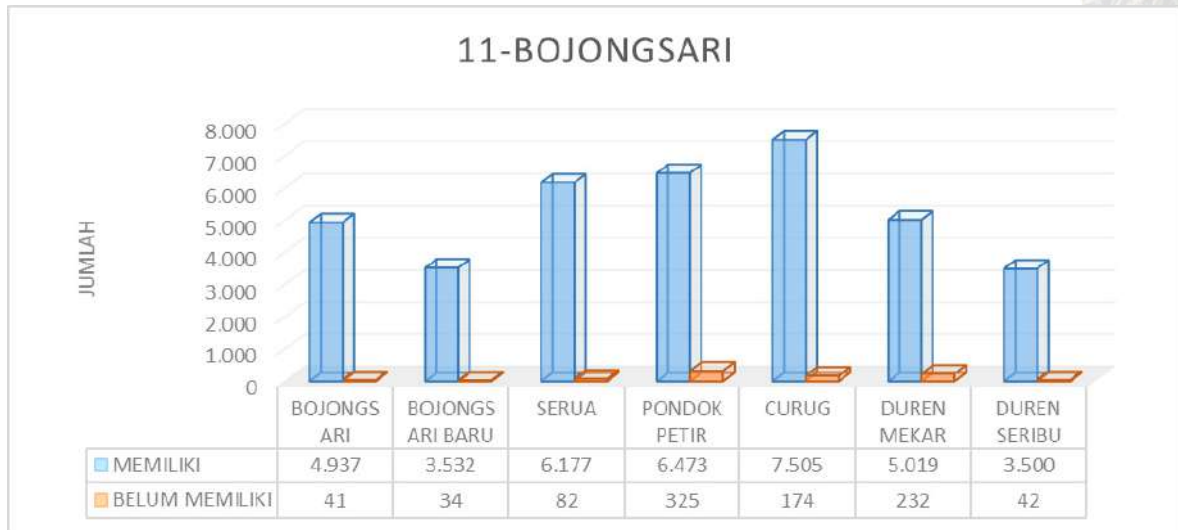
Dan berikut ini adalah tampilan gambar kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Depok Berdasarkan Kelurahan tahun 2022.











Gambar 5.29
Sebaran Akta Kelahiran Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022

5.4. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut 'Permendagri KIA'). Permendagri KIA adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

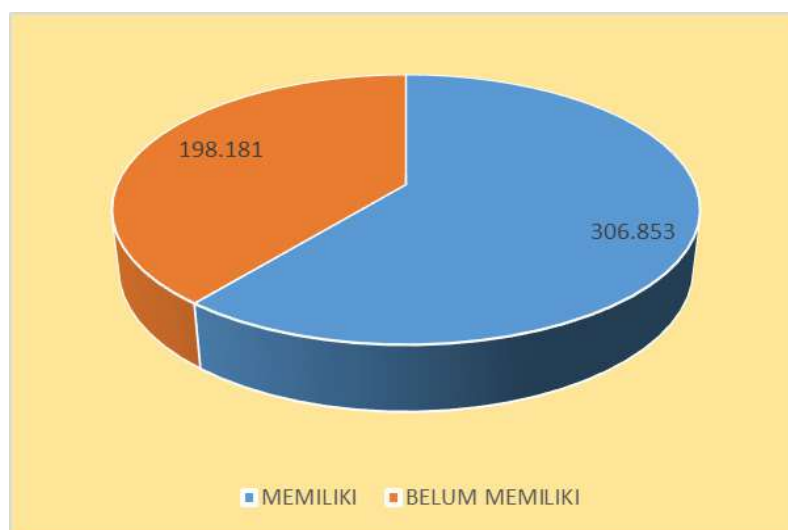
Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Definisi Kartu Identitas Anak dalam Permendagri KIA yaitu Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Permendagri KIA ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta, diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, dan



ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80 agar setiap orang mengetahuinya.



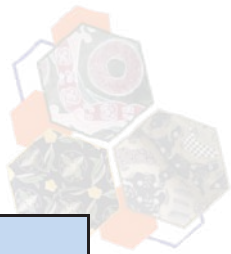
Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022

Gambar 5.30. Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2022

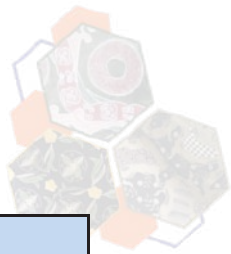
total jumlah anak yang berusia 0-17 tahun adalah 35.822, di Kota Depok, sedangkan Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun 2022 berjumlah 306.853 atau 60,76 persen. Sedangkan yang memiliki sebesar 198.181 atau 39,24 persen. Berikut daftar lengkap tabel kepemilikan KIA di Kota Depok.

Tabel 5.4.
Jumlah Kepemilikan KIA Usia 0-17 Tahun 2022 berdasarkan Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kepemilikan Kia				Jmlh Anak Usia 0 - 17 Thn
		Memiliki		Belum Memiliki		
		Jmlh	(%)	Jmlh	(%)	
Pancoran Mas	Depok	6.785	57,62	4.990	42,38	11.775
	Depok Jaya	3.149	55,67	2.508	44,33	5.657
	Pancoran Mas	10.374	63,57	5.945	36,43	16.319
	Mampang	4.476	65,10	2.400	34,90	6.876
	Rangkapan Jaya Baru	6.558	64,92	3.543	35,08	10.101
	Rangkapan Jaya	6.970	65,40	3.687	34,60	10.657
	Jumlah	38.312	62,41	23.073	37,59	61.385
Cimanggis	Harjamukti	3.423	57,40	2.540	42,60	5.963
	Curug	3.516	63,66	2.007	36,34	5.523

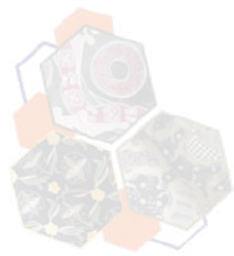


Kecamatan	Kelurahan	Kepemilikan Kia				Jmlh Anak Usia 0 - 17 Thn
		Memiliki		Belum Memiliki		
		Jmlh	(%)	Jmlh	(%)	
	Tugu	13.580	63,47	7.816	36,53	21.396
	Mekarsari	5.045	43,71	6.498	56,29	11.543
	Pasir Gunung Selatan	6.260	75,21	2.063	24,79	8.323
	Cisalak Pasar	3.233	51,21	3.080	48,79	6.313
	Jumlah	35.057	59,36	24.004	40,64	59.061
Sawangan	Pasir Putih	4.625	52,50	4.184	47,50	8.809
	Bedahan	5.137	52,43	4.661	47,57	9.798
	Pengasinan	4.263	57,66	3.130	42,34	7.393
	Cinangka	3.982	70,79	1.643	29,21	5.625
	Sawangan	3.386	60,64	2.198	39,36	5.584
	Sawangan Baru	2.516	47,33	2.800	52,67	5.316
	Kedaung	2.419	55,03	1.977	44,97	4.396
	Jumlah	26.328	56,11	20.593	43,89	46.921
Limo	Meruyung	3.239	60,19	2.142	39,81	5.381
	Grogol	4.531	59,98	3.023	40,02	7.554
	Krukut	2.510	58,98	1.746	41,02	4.256
	Limo	4.652	58,27	3.332	41,73	7.984
	Jumlah	14.932	59,31	10.243	40,69	25.175
Sukmajaya	Sukmajaya	6.018	68,34	2.788	31,66	8.806
	Abadijaya	8.529	56,84	6.477	43,16	15.006
	Mekarjaya	10.218	73,54	3.677	26,46	13.895
	Baktijaya	10.156	70,26	4.298	29,74	14.454
	Cisalak	2.844	65,68	1.486	34,32	4.330
	Tirtajaya	3.065	48,11	3.306	51,89	6.371
	Jumlah	40.830	64,95	22.032	35,05	62.862
Beji	Beji	7.679	63,81	4.356	36,19	12.035
	Kukusan	2.375	49,49	2.424	50,51	4.799
	Tanah Baru	5.623	60,38	3.689	39,62	9.312
	Kemirimuka	6.156	72,50	2.335	27,50	8.491
	Pondok Cina	2.216	69,42	976	30,58	3.192
	Beji Timur	2.227	79,82	563	20,18	2.790
	Jumlah	26.276	64,69	14.343	35,31	40.619
Cipayung	Cipayung	5.530	62,48	3.321	37,52	8.851
	Cipayung Jaya	2.496	41,55	3.511	58,45	6.007



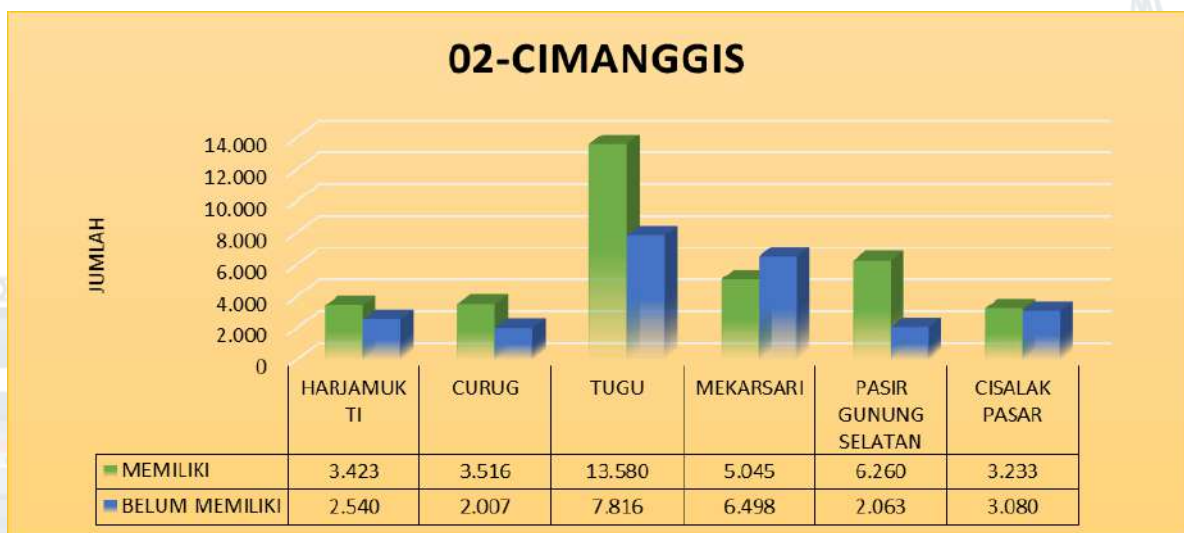
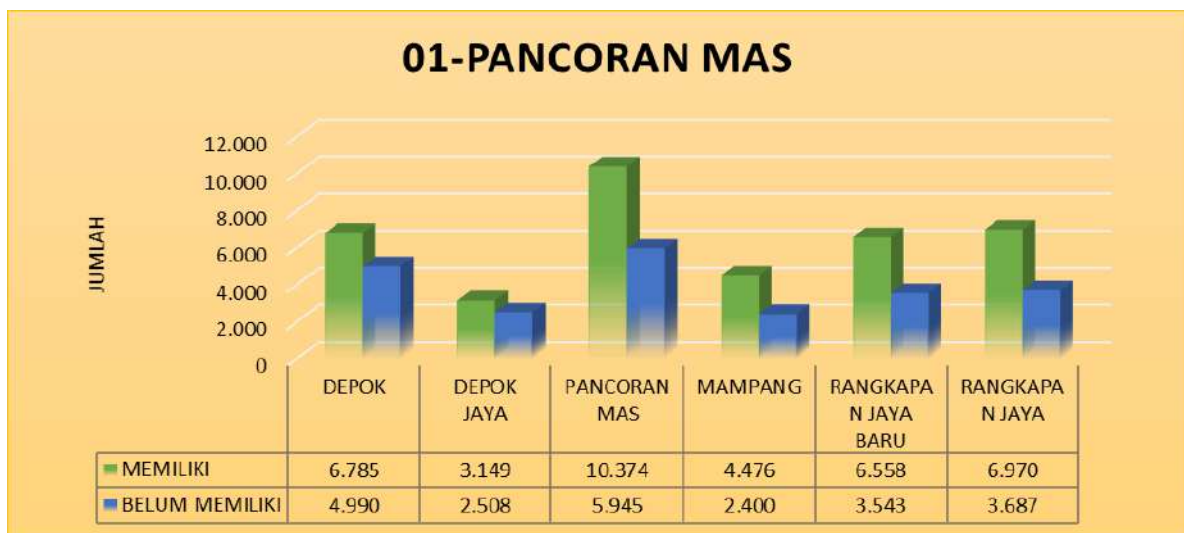
Kecamatan	Kelurahan	Kepemilikan Kia				Jmlh Anak Usia 0 - 17 Thn
		Memiliki		Belum Memiliki		
		Jmlh	(%)	Jmlh	(%)	
	Ratu Jaya	6.185	53,94	5.281	46,06	11.466
	Bojong Pondok Terong	5.386	52,51	4.871	47,49	10.257
	Pondok Jaya	4.060	53,53	3.525	46,47	7.585
	Jumlah	23.657	53,56	20.509	46,44	44.166
Cilodong	Sukamaju	11.795	69,36	5.211	30,64	17.006
	Cilodong	2.689	46,01	3.156	53,99	5.845
	Kalibaru	4.807	54,26	4.052	45,74	8.859
	Kalimulya	3.118	47,26	3.480	52,74	6.598
	Jatimulya	2.523	49,99	2.524	50,01	5.047
	Jumlah	24.932	57,51	18.423	42,49	43.355
Cinere	Cinere	5.984	83,55	1.178	16,45	7.162
	Gandul	3.501	55,25	2.836	44,75	6.337
	Pangkalan Jati	1.968	49,99	1.969	50,01	3.937
	Pangkalan Jati Baru	2.024	86,42	318	13,58	2.342
	Jumlah	13.477	68,14	6.301	31,86	19.778
Tapos	Tapos	2.887	63,15	1.685	36,85	4.572
	Leuwinanggung	2.490	67,04	1.224	32,96	3.714
	Sukatani	8.428	61,46	5.285	38,54	13.713
	Sukamaju Baru	7.693	66,34	3.903	33,66	11.596
	Jatijajar	7.509	75,51	2.436	24,49	9.945
	Cilangkap	9.070	60,89	5.825	39,11	14.895
	Cimpaeun	4.566	61,25	2.889	38,75	7.455
	Jumlah	42.643	64,72	23.247	35,28	65.890
Bojongsari	Bojongsari	3.063	65,50	1.613	34,50	4.676
	Bojongsari Baru	2.153	64,08	1.207	35,92	3.360
	Serua	2.710	46,08	3.171	53,92	5.881
	Pondok Petir	3.265	51,21	3.111	48,79	6.376
	Curug	4.276	58,92	2.981	41,08	7.257
	Duren Mekar	2.953	59,77	1.988	40,23	4.941
	Duren Seribu	1.989	59,71	1.342	40,29	3.331
	JUMLAH	20.409	56,97	15.413	43,03	35.822
	JUMLAH TOTAL	306.853	60,76	198.181	39,24	505.034

Sumber : Disdukcapil - DKB Semester 2 Tahun 2022



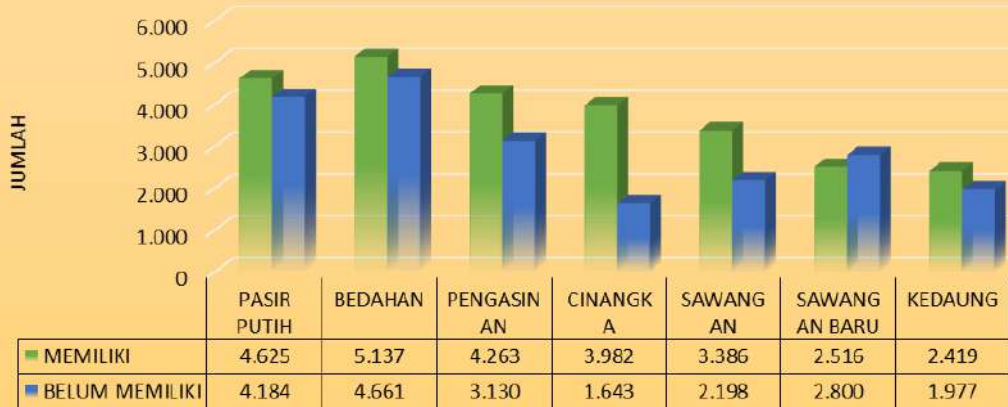
Dengan diberlakukannya Permendagri KIA pada tahun 2016, masing-masing Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan penerbitan KIA terhadap anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dengan tanpa dipungut biaya atau gratis serta mulai berlaku secara nasional. Adapun tujuan Pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan pemegang KIA diberikan kemudahan dalam menerima pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Dan berikut ini adalah tampilan gambar kepemilikan KIA usia 0-17 tahun di Kota Depok Berdasarkan Kelurahan tahun 2022.

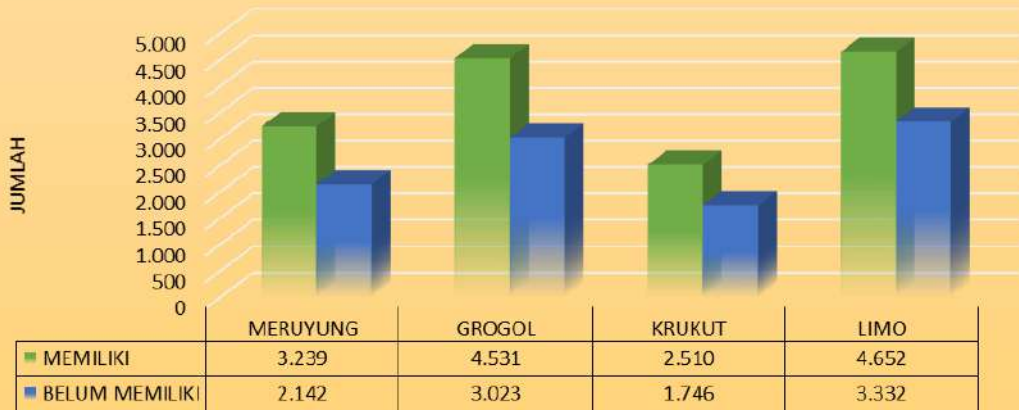




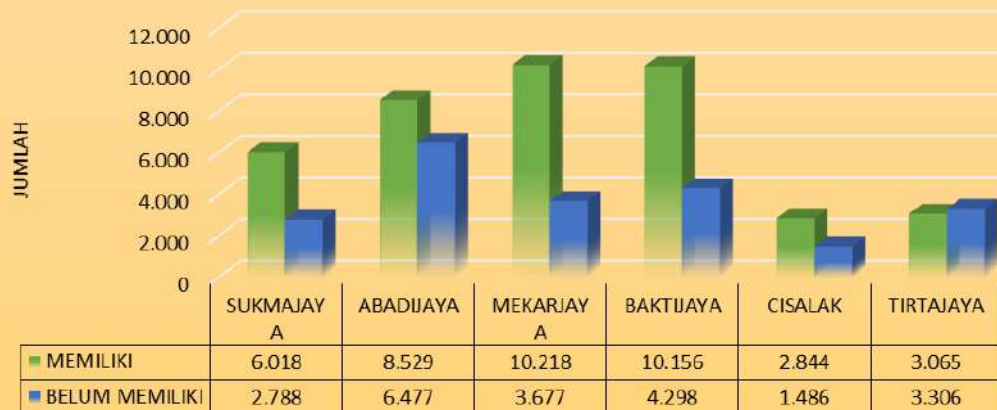
03-SAWANGAN



04-LIMO



05-SUKMAJAYA





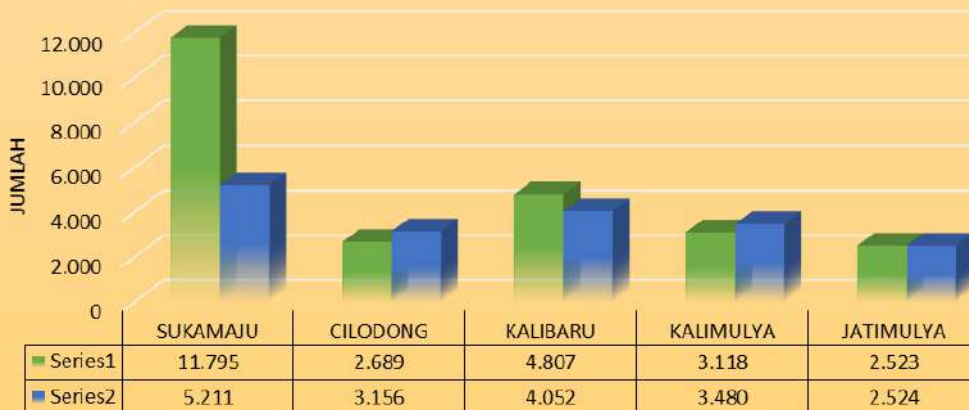
06-BEJI

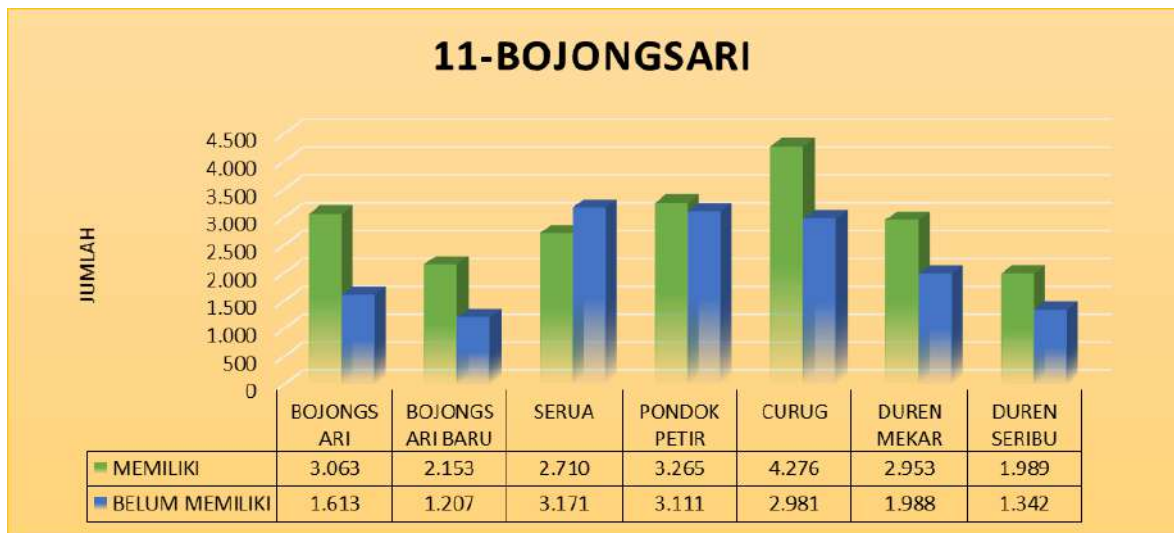
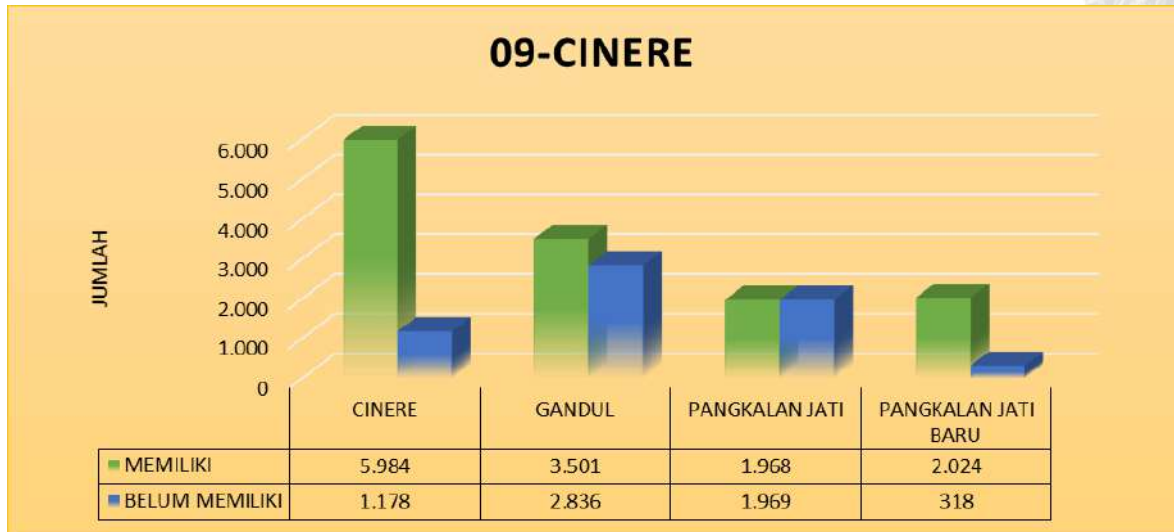


07-CIPAYUNG



08-CILODONG



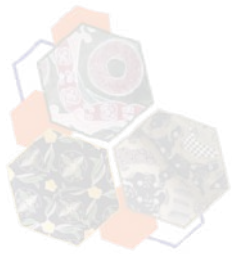


Gambar 5.31
Sebaran KIA Usia 0-17 Menurut Kelurahan di 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Depok Tahun 2022





DISDUKCAPIL
Kota Depok



BAB 6

PENUTUP





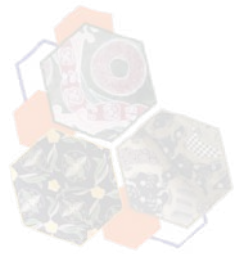
BAB 6

PENUTUP

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini memberikan gambaran mengenai Perkembangan Kependudukan Kota Depok. Berdasarkan gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, sebagai dasar bagi pendataan dan lainnya. Dengan demikian tujuan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak lain yang membutuhkan.

Buku profil menyajikan data yang tercatat dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan beberapa data tambahan dari BPS dan beberapa OPD terkait untuk memperkaya referensi penyajian dan validasi data yang disajikan dalam buku profil ini. Buku ini juga hanya menampilkan data-data yang bersifat faktual berdasarkan administrasi wilayah Kota Depok yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sesuai peraturan perundang-undangan.

Buku ini juga dapat untuk mengetahui lebih lanjut kondisi ke depan tentang kependudukan dan permasalahannya, maka Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini disajikan secara berkala. Pada buku profil mendatang akan dilakukan berbagai upaya untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem penyajian data kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga masyarakat diharapkan untuk selalu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.



6.1. Kesimpulan

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2022 sebesar 1.920.182 jiwa dengan luas wilayah 199,91 km², dengan rasio kepadatan penduduk adalah sebesar 9.602 Jiwa/km². Pertumbuhan penduduk di Kota Depok meningkat dalam tiga tahun terakhir, terutama di tahun 2022 naik menjadi 1,42 persen, persentase tertinggi berdasarkan kecamatan adalah Kecamatan Pancoran Mas 12,48 persen, dan terendah adalah Kecamatan Cinere 4,40 persen. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun Kota Depok untuk periode Tahun 2018-2022 rata-rata per tahun 0,80 persen.

IPM Kota Depok Tahun 2022 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya dari 81,37 menjadi 81,86. Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS di tahun 2022, masih terdapat 0,58 persen penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang buta huruf. Dan pada informasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin rentang tahun 2018-2022 Kota Depok mengalami penurunan, dari angka 9,76 persen menjadi 7,82 persen di tahun 2022.

Data yang dikeluarkan oleh BPS, garis kemiskinan Kota Depok di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp744.771. Kenaikan ini juga dibarengi dengan kenaikan penduduk miskin tercatat tahun 2021 berjumlah 63,86 ribu (2,58%) menjadi 64,36 ribu (2,53%).

Migrasi penduduk masuk ke Kota Depok (pindah datang) sesuai hasil pendaftaran penduduk sampai Bulan Desember Tahun 2022 adalah 39.261 jiwa, dan pindah datang yang berasal dari Antar Kota tahun 2022 berjumlah 10.056 jiwa dan dari Antar Provinsi berjumlah 29.205 jiwa. Sedangkan migrasi penduduk keluar dari Kota Depok (pindah keluar) pada Tahun 2022 berjumlah 33.900 jiwa. Pindah keluar ke Antar Kota tahun 2022 berjumlah 12.124 jiwa, dan ke Antar Provinsi berjumlah 21.776

Jumlah Kepala Keluarga yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2022 adalah 604.123 Kepala Keluarga.

jumlah wajib KTP yang tercatat di Kota Depok sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 1.415.137. Sedangkan yang sudah dilakukan perekaman KTP sebanyak 1.383.063 atau 97,73 persen. Sedangkan hanya tersisa 32.074 atau 2,27 persen yang belum dilakukan perekaman KTP. Dan jumlah



Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kota Depok tahun 2022 sebanyak 518.943 atau 96,46 persen dengan total jumlah anak usia 0-18 tahun adalah 537.999. sedangkan yang belum memiliki Akta sebanyak 19.056 atau 3,54 persen.

6.2. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perkembangan kependudukan di Kota Depok:

1) Perencanaan Pembangunan Berbasis Data:

Lanjutkan pengumpulan, pemantauan, dan analisis data kependudukan secara berkala. Data yang akurat dan terbaru akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang efektif.

2) Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik:

Fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan penduduk, seperti transportasi, sanitasi, dan layanan kesehatan. Pastikan bahwa fasilitas publik dan pelayanan tersedia merata di seluruh wilayah kota.

3) Pengembangan Perumahan Terencana:

Lakukan pengembangan perumahan terencana dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan. Pertimbangkan juga untuk mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan.

4) Pemberdayaan Ekonomi:

Dukung pengembangan ekonomi kreatif dan sektor-sektor produktif lainnya untuk menciptakan lapangan kerja. Program pelatihan dan pendidikan vokasional dapat membantu meningkatkan kualifikasi pekerja.

5) Pengelolaan Migrasi:

Lakukan pengelolaan migrasi dengan bijaksana. Dukung migrasi yang berkelanjutan dan menghindari urbanisasi yang berlebihan dengan menyediakan peluang di wilayah pedesaan juga.

6) Peningkatan Akses Pendidikan:

Pastikan semua warga memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Kembangkan sekolah-sekolah yang memadai dan fasilitas pendidikan yang memenuhi standar.

7) Program Keluarga Berencana:



Terus dukung program keluarga berencana dengan menyediakan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Edukasi mengenai perencanaan keluarga dapat membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk.

8) Pengembangan Wilayah Pinggiran:

Selain pengembangan wilayah perkotaan, perhatikan juga pengembangan wilayah pedesaan. Ini dapat membantu mengurangi tekanan pertumbuhan penduduk di pusat kota.

9) Peningkatan Kualitas Hidup:

Fokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk, termasuk dalam hal akses ke layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak.

10) Partisipasi Masyarakat:

Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan terkait kependudukan. Ini akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih akurat.

11) Lindungi Kelompok Rentan:

Perhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan difabel. Pastikan mereka mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan.

12) Pemantauan dan Evaluasi:

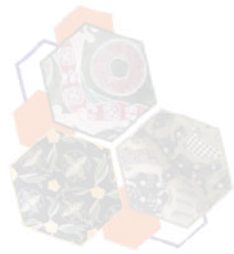
Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak dari implementasi kebijakan dan program-program kependudukan. Ini akan membantu dalam penyesuaian yang diperlukan.

13) Kemitraan dan Kolaborasi:

Bentuk kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat upaya perkembangan kependudukan.

14) Adopsi Teknologi:

Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan data, memantau program, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ini dapat membantu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.



15) Konservasi Lingkungan:

Perhatikan dampak pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan. Dukung program konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu dalam merancang kebijakan dan strategi yang berkelanjutan untuk perkembangan kependudukan yang seimbang dan berkualitas di Kota Depok.





**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK**

Jl. Margonda Raya No 54 Telp. (021) 7756256 Faks (021) 7756256

